



42 TANGGAMUS 6R2

**Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026**



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024–2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kesatu huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);
32. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi dan misi RPJPD serta arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra-PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.
- (2) RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM
 - BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX : PENUTUP

- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan:
- a. Renstra-PD; dan
 - b. RKPD.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan memperhatikan:
- a. Penyelarasan target kinerja indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan Tahun 2025;
 - c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2018-2023;
 - d. RPJMD Provinsi;
 - e. Isu-isu strategis yang berkembang;
 - f. Regulasi yang berlaku; dan
 - g. Kebijakan nasional.
- (3) Penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi, misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis aktual, memperhatikan tujuan, sasaran dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (4) Penyusunan program dalam RPD memperhatikan:
- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku; dan
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.
- (5) Penyusunan RPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) RPD digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bapperida.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-PD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) RPD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. Terjadinya perubahan yang mendasar; dan
 - d. Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Renstra PD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupataen Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HAMD HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023 NOMOR 843



Rencana Pembangunan Daerah **TANGGAMUS** **2024-2026**



Tahun 1997-2003
Drs. **ACHMAD SYAH PUTRA**
Bupati



Tahun 2003-2008
Drs. **H. FAUZAN SYA'IE, M.Sc.**
Bupati



BAMBANG KURNIAWAN, S.T.
Wakil Bupati



Tahun 2008-2013
H. BAMBANG KURNIAWAN, S.T.
Bupati



H. SUJADI
Wakil Bupati



Tahun 2013-2018
H. BAMBANG KURNIAWAN, S.T.
Bupati



H. SAMSUL HADI, S.Pd.I.
Wakil Bupati



Tahun 2017-2018
(28 Desember 2017 - 14 Februari 2018)
H. SAMSUL HADI, M.Pd.I.
Bupati



Tahun 2018
(23 Februari 2018 - 20 September 2018)
Ir. ZAINAL ABIDIN, M.T.
Pj. Bupati



Tahun 2018-2023
Hj. DEWI HANDAJANI, S.E., M.M.
Bupati



H. AM. SYAFI'I, S.Ag.
Wakil Bupati



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 7
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 47
1.5 Sistematika Penulisan	I - 48
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 44
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II - 73
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 151
2.5 Standar Pelayanan Minimal.....	II - 173
2.6 Sustainable Development Goals	II - 198
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III - 2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III - 20
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III - 36
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV - 1
4.2 Isu Strategis.....	IV - 16



	Halaman
BAB V TUJUAN, DAN SASARAN	V - 1
5.1 Tujuan dan Sasaran.....	V - 1
5.2 <i>Cascading</i> Kinerja.....	V - 33
5.3 Rencana Aksi Pembangunan.....	V - 41
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	VI - 1
6.1 Strategi Pembangunan Daerah.....	VI - 2
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI - 7
6.3 Program Prioritas Daerah.....	VI - 10
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII - 1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII - 1
7.2 Program Perangkat Daerah.....	VII - 4
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII - 1
BAB IX PENUTUP.....	IX - 1
9.1 Pedoman Transisi.....	IX - 1
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IX - 3



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Kepala Daerahnya Berakhir Pada Tahun 2023.....	I - 3
Gambar I.2. Hubungan RPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	I - 8
Gambar I.3. Pengembangan Kawasan Provinsi Lampung.....	I - 19
Gambar I.4. Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025.....	I - 22
Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	II - 1
Gambar II.2. Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus.....	II - 2
Gambar II.3. Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 7
Gambar II.4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus.....	II - 8
Gambar II.5. Peta Topografi Kabupaten Tanggamus.....	II - 10
Gambar II.6. Peta Geologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 15
Gambar II.7. Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 16
Gambar II.8. Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 17
Gambar II.9. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus..	II - 19
Gambar II.10. Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus.....	II - 20
Gambar II.11. Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus	II - 21
Gambar II.12. Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus	II - 22



	Halaman
Gambar II.13. Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus	II - 23
Gambar II.14. Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus	II - 24
Gambar II.15. Produksi Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2022.....	II - 33
Gambar II.16. Sebaran Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.....	II - 35
Gambar II.17. Peta Pola Perjalanan Wisata Kabupaten Tanggamus.....	II - 40
Gambar II.18. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 49
Gambar II.19. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2018-2022.....	II - 50
Gambar II.20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus.....	II - 56
Gambar II.21. Perkembangan Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022 (Rupiah).....	II - 58
Gambar II.22. Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018-2022.....	II - 59
Gambar II.23. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2022.....	II - 60
Gambar II.24. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 62
Gambar II.25. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 63
Gambar II.26. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 64



	Halaman
Gambar II.27. Perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 66
Gambar II.28. Perkembangan TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2021.....	II - 67
Gambar II.29. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 72
Gambar II.30. Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022...	II - 80
Gambar II.31. Trend Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022...	II - 82
Gambar II.32. Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022...	II - 83
Gambar II.33. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B Kabupaten Tanggamus.....	II -124
Gambar II.34. Transformasi Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanggamus.....	II -147
Gambar II.35. Pengeluaran Perkapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II -151
Gambar III.1. Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020.....	III - 10
Gambar III.2. Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023.....	III - 11
Gambar III.3. Perkembangan Rasio Lancar Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021.....	III - 14
Gambar III.4. Perkembangan Rasio Cair (<i>Quick Ratio</i>) Keuangan Kabupaten Tanggamus 2018-2021...	III - 15
Gambar III.5. Perkembangan Rasio Kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021.....	III - 16



	Halaman
Gambar III.6. Perkembangan <i>Debt Rasio</i> Pemerintah Kabupaten Tanggamus 2018-2021.....	III - 17
Gambar III.7. Perkembangan Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Tanggamus 2018-2021.....	III - 17
Gambar III.8. Proporsi Anggaran Belanja Pegawai Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	III - 28
Gambar V.1. Ilustrasi Konsep RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 4
Gambar V.2. Skema Integrasi Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 5
Gambar V.3. <i>Cascading</i> Kinerja Tujuan 1 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 34
Gambar V.4. <i>Cascading</i> Kinerja Tujuan 2 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 35
Gambar V.5. <i>Cascading</i> Kinerja Tujuan 3 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 36
Gambar V.6. <i>Cascading</i> Kinerja Tujuan 4 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 37
Gambar V.7. <i>Cascading</i> Kinerja Tujuan 5 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 38
Gambar V.8. <i>Cascading</i> Kinerja Tujuan 6 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 39
Gambar V.9. <i>Cascading</i> Kinerja Tujuan 7 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 40
Gambar VII.1. Indikasi Rencana Program Prioritas RPD.....	VII - 3



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Hubungan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024..	I - 10
Tabel I.2 Hubungan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031.....	I - 24
Tabel II.1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 6
Tabel II.2. Kelas Penutupan Lahan Di Kabupaten Tanggamus.....	II - 8
Tabel II.3. Kemiringan Lereng Yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus	II - 9
Tabel II.4. Daya Tampung Lahan Di Kabupaten Tanggamus.....	II - 18
Tabel II.5. Alokasi Kebutuhan Lahan Tahun 2031.....	II - 19
Tabel II.6. Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	II - 25
Tabel II.7. Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus.....	II - 27
Tabel II.8. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031.....	II - 27
Tabel II.9. Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Tanggamus.....	II - 29
Tabel II.10. Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus.....	II - 34
Tabel II.11. Obyek Wisata Bahari Kabupaten Tanggamus...	II - 37
Tabel II.12. Obyek Wisata Alam Buatan Kabupaten Tanggamus.....	II - 38



	Halaman
Tabel II.13. Obyek Wisata Tirta Kabupaten Tanggamus	II - 38
Tabel II.14. Obyek Wisata Alam Kabupaten Tanggamus	II - 39
Tabel II.15. Obyek Wisata Kolam Renang Kabupaten Tanggamus.....	II - 39
Tabel II.16. Obyek Wisata Budaya Kabupaten Tanggamus..	II - 39
Tabel II.17. Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah Kabupaten Tanggamus.....	II - 40
Tabel II.18. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II - 44
Tabel II.19. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II - 45
Tabel II.20. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022.....	II - 46
Tabel II.21. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022.....	II - 47
Tabel II.22. Perkembangan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II - 47
Tabel II.23. Laju Pertumbuhan Riel PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II - 48
Tabel II.24. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2022.....	II - 49
Tabel II.25. Perkembangan Nilai Inflasi Tahun 2016-2022..	II - 51
Tabel II.26. PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022.....	II - 52
Tabel II.27. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 53



	Halaman
Tabel II.28. Perkembangan Nilai Gini Rasio Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 53
Tabel II.29. Tingkat Ketimpangan Regional Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019.....	II - 55
Tabel II.30. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 56
Tabel II.31. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 57
Tabel II.32. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 59
Tabel II.33. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 59
Tabel II.34. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021 ke 2022.....	II - 61
Tabel II.35. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 64
Tabel II.36. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 65
Tabel II.37. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 68
Tabel II.38. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 69
Tabel II.39. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 69
Tabel II.40. Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 73
Tabel II.41. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 74
Tabel II.42. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 75



	Halaman
Tabel II.43. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 75
Tabel II.44. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 76
Tabel II.45. Angka Putus Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 77
Tabel II.46. Angka Mengulang Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 77
Tabel II.47. Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 78
Tabel II.48. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 78
Tabel II.49. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 79
Tabel II.50. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 79
Tabel II.51. Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 87
Tabel II.52. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2017-2022.....	II - 88
Tabel II.53. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2017-2022 di Kabupaten Tanggamus.....	II - 88
Tabel II.54. Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tanggamus Oleh Kementerian Kesehatan RI Sampai Dengan Tahun 2023.....	II - 89
Tabel II.55. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2017-2022 Kabupaten Tanggamus.....	II - 91
Tabel II.56. Jumlah Tenaga Medis Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 91



	Halaman
Tabel II.57. Jumlah Dokter Spesialis Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 92
Tabel II.58. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2022 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 92
Tabel II.59. Ketercukupan Fasilitas Kesehatan dan SDM Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 93
Tabel II.60. Hasil Pemantauan Masalah Gizi Balita Tahun 2017-2022.....	II - 94
Tabel II.61. Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Tahun 2018-2022.....	II - 95
Tabel II.62. Kasus Covid-19 Kabupaten Tanggamus Mulai 18 Maret 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2022.....	II - 96
Tabel II.63. Sasaran dan Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanggamus Sampai Dengan Tahun 2022.....	II - 96
Tabel II.64. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	II - 98
Tabel II.65. Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 99
Tabel II.66. Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 99
Tabel II.67. Rumah Layak Huni Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 100
Tabel II.68. Perkembangan capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 101
Tabel II.69. Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 102
Tabel II.70. Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 103



	Halaman
Tabel II.71. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 103
Tabel II.72. Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 105
Tabel II.73. Perkembangan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2022...	II - 106
Tabel II.74. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2018-2022.....	II - 108
Tabel II.75. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 108
Tabel II.76. Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 109
Tabel II.77. Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 110
Tabel II.78. Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020-2022.....	II - 112
Tabel II.79. Perkembangan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 112
Tabel II.80. Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 113
Tabel II.81. Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 115
Tabel II.82. Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 116
Tabel II.83. Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023.....	II - 117
Tabel II.84. Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 118



	Halaman
Tabel II.85. Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 118
Tabel II.86. Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 120
Tabel II.87. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2022.....	II - 121
Tabel II.88. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 122
Tabel II.89. Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 123
Tabel II.90. Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 124
Tabel II.91. Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 125
Tabel II.92. Perkembangan Indikator Persandian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 126
Tabel II.93. Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 126
Tabel II.94. Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 127
Tabel II.95. Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 131
Tabel II.96. Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 131
Tabel II.97. Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 132
Tabel II.98. Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 133
Tabel II.99. Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 134



	Halaman
Tabel II.100 Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 135
Tabel II.101 Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 136
Tabel II.102 Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 137
Tabel II.103 Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 138
Tabel II.104 Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 139
Tabel II.105 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 141
Tabel II.106 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2022.....	II - 142
Tabel II.107 Rincian Aspek Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022.....	II - 143
Tabel II.108 Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021.....	II - 144
Tabel II.109 Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan APIP Inspektorat dan BPK, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 149
Tabel II.110 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 149
Tabel II.111 Analisis Kebutuhan Auditor dan PPUPD Kabupaten Tanggamus.....	II - 150
Tabel II.112 Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 151
Tabel II.113 Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 153
Tabel II.114 Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022.....	II - 154



	Halaman
Tabel II.115 Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022.....	II - 155
Tabel II.116 Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 157
Tabel II.117 Jenis Tindak Kriminal Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 158
Tabel II.118 Persentase Penduduk Kabupaten Tanggamus Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2022.....	II - 158
Tabel II.119 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2022.....	II - 159
Tabel II.120 Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Tahun 2023.....	II - 160
Tabel II.121 Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2023.....	II - 160
Tabel II.122 Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Golongan Sampai Dengan Tahun 2023.....	II - 161
Tabel II.123 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus.....	II - 162
Tabel II.124 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022..	II - 174
Tabel II.125 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.	II - 177
Tabel II.126 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 186
Tabel II.127 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 187



	Halaman
Tabel II.128 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022	II - 189
Tabel II.129 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2022	II - 193
Tabel II.130 Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus	II - 200
Tabel III.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020 Kabupaten Tanggamus	III - 3
Tabel III.2 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2023.....	III - 5
Tabel III.3. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III - 9
Tabel III.4. Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III - 9
Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III - 12
Tabel III.6. Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III - 13
Tabel III.7. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021.....	III - 18
Tabel III.8. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020.....	III - 27
Tabel III.9. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2022.....	III - 27
Tabel III.10. Analisis Proporsi Anggaran Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	III - 29



	Halaman
Tabel III.11. Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III - 31
Tabel III.12. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III - 33
Tabel III.13. Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III - 33
Tabel III.14. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III - 34
Tabel III.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III - 35
Tabel III.16 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Tanggamus.....	III - 41
Tabel III.17 Paket Kebijakan Pinjaman Daerah Kabupaten Tanggamus Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	III - 45
Tabel III.18. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	III - 47
Tabel III.19. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	III - 48
Tabel III.20 Skema Penganggaran Pelaksanaan SPM Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	III - 50
Tabel IV.1. Identifikasi Isu Strategis Daerah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus.....	IV - 19
Tabel V.1 Proses Perumusan Konsep RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 3
Tabel V.2 Formulasi Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 12
Tabel V.3 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 23

	Halaman
Tabel V.4 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Rencana Aksi Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	V - 42
Tabel VI.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	VI - 5
Tabel VI.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	VI - 8
Tabel VI.3. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	VI - 11
Tabel VII.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Tanggamus.....	VII - 4
Tabel VII.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	VII - 6
Tabel VIII.1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	VIII - 2
Tabel VIII.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	VIII - 3
Tabel VIII.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.....	VIII - 13



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RPD



42 TANGGAMUS 012



**“Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju,
kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi,
pandai melihat, pandai mendengar,
pandai menganalisis”**

• H.M. Soeharto •

BAB I **Pendahuluan**



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak secara Nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Tanggamus akan terdapat masa transisi menjelang Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 dikarenakan akan habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus pada Bulan September Tahun 2023.

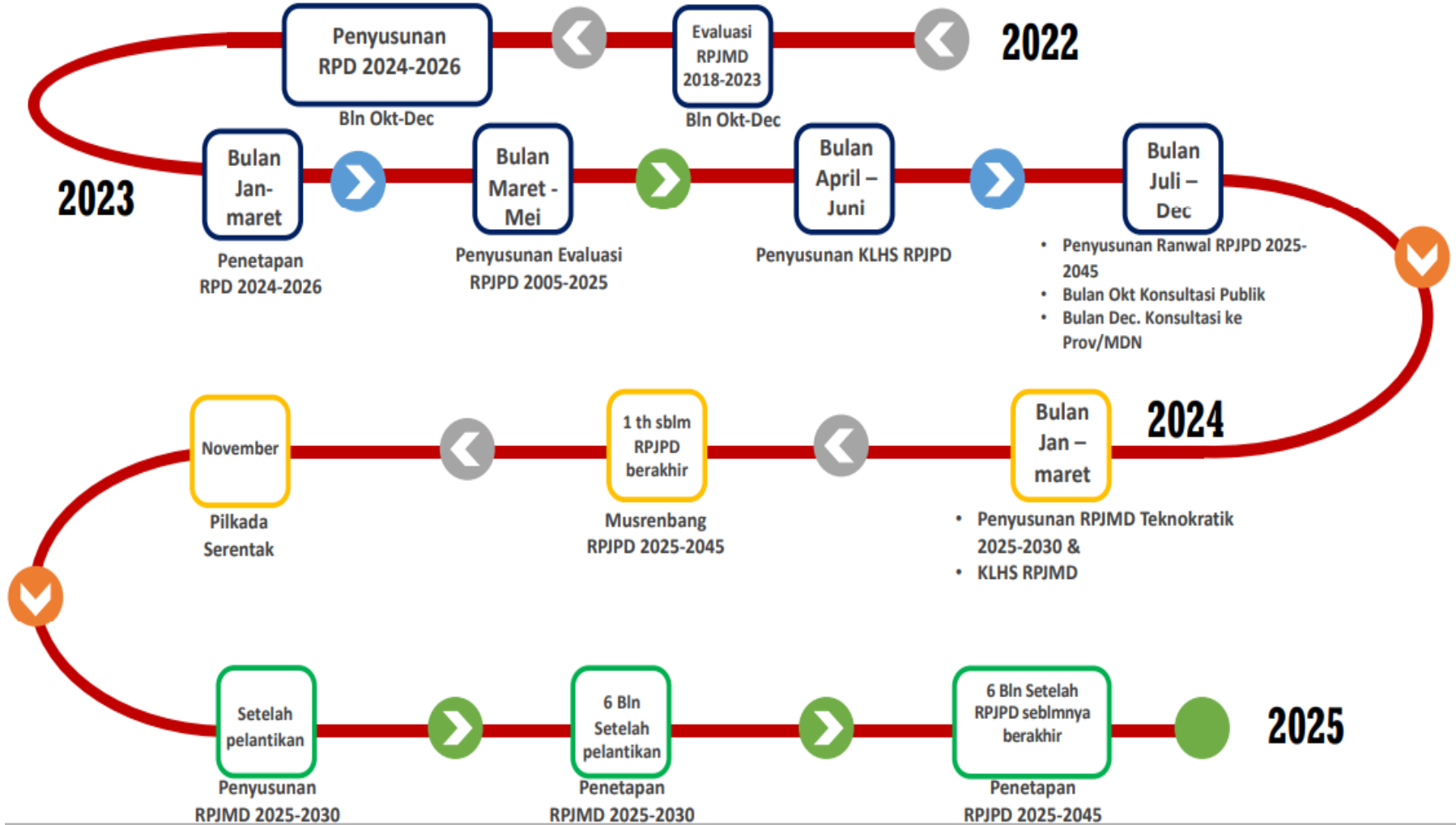
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak mulai tahun 2022 sampai dengan Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak Secara Nasional Tahun 2024.



Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Tanggamus tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah dalam bentuk RPJMD, menunggu Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dalam bentuk RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024- 2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD Tahun 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Sebagian besar indikator kinerja dapat mencapai target sebagaimana telah ditetapkan, sementara itu beberapa indikator belum dapat mencapai target meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Data-data hasil kinerja tersebut meskipun beberapa masih bersifat sementara menunjukkan bahwa Kabupaten Tanggamus cukup terdampak Pandemi Covid-19 yang secara signifikan mempengaruhi kinerja pembangunan di masa-masa menjelang akhir RPJMD Tahun 2018-2023. Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi di antaranya kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, pelayanan publik yang belum optimal dan permasalahan lain yang harus segera diselesaikan agar dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanggamus yang sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom, sebagaimana Visi RPJPD Tahun 2005-2025.

Gambar I.1. Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Kepala Daerahnya Berakhir Pada Tahun 2023



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2023

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Sejumlah peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 yang dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Landasan Operasional yaitu sebagai berikut :
 - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 14) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
- 26) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);

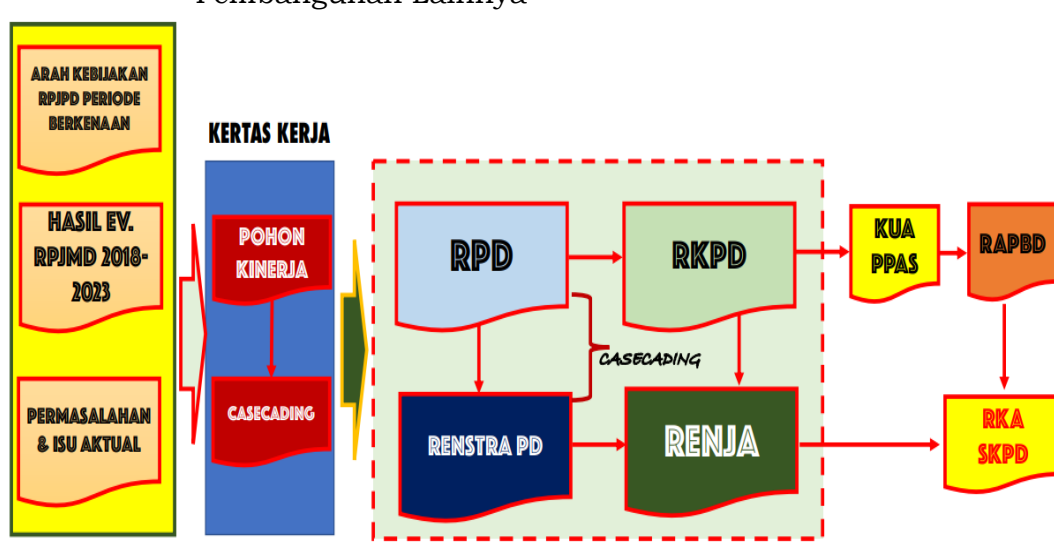
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
- 28) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 11);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);
- 32) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJPD harus menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), selanjutnya RPD Kabupaten Tanggamus yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Kemudian RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahunnya. Pola hubungan RPD dengan dokumen lainnya digambarkan sebagai berikut:

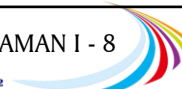
Gambar I.2. Hubungan RPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2023

1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 juga memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian pencapaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.





Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, isu strategis kewilayahan tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Penurunan ketimpangan antar wilayah.
- 2) Penguatan pusat pertumbuhan wilayah.
- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah.
- 4) Pengelolaan urbanisasi.
- 5) Pemanfaatan ruang.

Dari kelima isu strategis kewilayahan tersebut diatas, yang keterkaitannya sangat besar dengan Kabupaten Tanggamus yaitu isu strategis tentang penguatan pusat pertumbuhan wilayah karena Kabupaten Tanggamus menjadi salah satu daerah yang ditetapkan menjadi Kawasan Industri (KI) sebagai Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang diarahkan untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional tersebut harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.



Tabel I.1. Hubungan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

NO	RPJMN								RPD			
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
1.	PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi KP : Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas ProP : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah P : Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³) Tambahkan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik) (m3/detik) Tambahkan penyediaan air baku (m3/detik) (m3/detik) Tambahkan debit air baku di kawasan strategis lainnya (m3/detik) (m3/detik)	4,0 4,3 4,3 -	4,4 11,3 11,3 0,1	4,7 11,4 11,4 0,1	5,1 11,4 11,4 0,7	5,4 11,4 11,4 0,7	283.664,7 16.838,5 16.838,5 535,2	 KI/KEK termasuk KI Tanggamus	 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	 Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.	PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen) Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)8,1 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen) Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen) Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun) Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	3,7 6,5 5,0 4,8 1.189 – 1.214 5,6	3,7 6,9 5,5 5,0 1.314 – 1.333 6,2	3,9 7,2 6,5 5,2 1.439 – 1.452 6,9	4,0 7,5 7,5 5,3 1.564 – 1.570 7,8	4,1 7,8 8,1 5,5 1.689 8,4	800.341,9				



NO	RPJMN							RPD				
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
	KP : Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa ProP : Pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi Jalan Akses KI Tanggamus	Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7 – 3,0	2,7 – 3,0	2,7 – 3,0	2,7 – 3,0	2,7 – 3,0	370.385,2				
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)		3,0 – 3,3	3,1 – 3,5	3,2 – 3,7	3,2 – 4,0	3,5 – 4,5						
Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)		14,2	14,6	15,0	15,3	15,7						
Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)		19,7	20,3	20,9	21,4	22,0						
Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)		13,0	13,5	14,0	14,5	15,0						
Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)		19,0	20,0	20,0	21,0	21,0						
	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KI-KEK Industri)	5 KI – 8 KEK	9 KI – 8 KEK	12 KI – 8 KEK	15 KI – 8 KEK	16 KI – 8 KEK	296.235,0					
	Panjang jalan yang dibangun (km)	-	-	-	-	2,0	20,0	KI Tanggamus	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	
3.	PP : Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4%, BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1%, BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	1.383.141,9				



NO	RPJMN							RPD									
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG					
			2020	2021	2022	2023	2024										
	KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	38.748,0									
		Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325										
		Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik)	4,27	11,43	11,43	11,43	11,43										
		Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan Pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai)	-	5	17	21	21										
		Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management) (unit)	-	7	8	9	10										
	Prop : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Tambahan penyediaan air baku (m3/detik)	4,27	11,43	11,43	11,43	11,43						37.938,7				
		Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah (unit)	3	5	7	9	10										
		Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah (unit)	3	5	7	9	10										
		Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	-	0,58	0,64	0,70	0,72										
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)						856,7	KI/KEK termasuk KI Tanggamus	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							



NO	RPJMN								RPD			
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
4	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1213 orang	1021 orang	948 orang	876 orang	803 orang	224,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1,2	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah,	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Administrasi Pemerintahan Desa



NO	RPJMN							RPD				
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
									Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan			
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	0,6	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan	683 desa	680 desa	404 desa	593 desa	408 desa	57,1	Lampung Barat,	Kementerian Desa,	Meningkatkan Nilai Tambah	Program Pemberdayaan



NO	RPJMN							RPD				
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
		mengembangkan Desa Digital							Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
	Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat



NO	RPJMN							RPD				
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
									Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan			
	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat,	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat



NO	RPJMN								RPD			
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
									Tulang Bawang, Way Kanan			
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat



NO	RPJMN								RPD			
	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (PROP)/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					TOTAL INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
			2020	2021	2022	2023	2024					
5.	KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan komoditas unggulan kopi Kawasan Kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung Kawasan Kopi (ha)	-	-	-	-	799,25	50,67	Provinsi Lampung, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan	Kementerian Pertanian	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Kegiatan Pengembangan komoditas unggulan lada Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	-	-	-	-	1.933,67	42,13	Provinsi Lampung, Lampung Utara, Lampung Timur, Tanggamus, Way Kanan	Kementerian Pertanian	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sumber : RPJMN 2020-2024

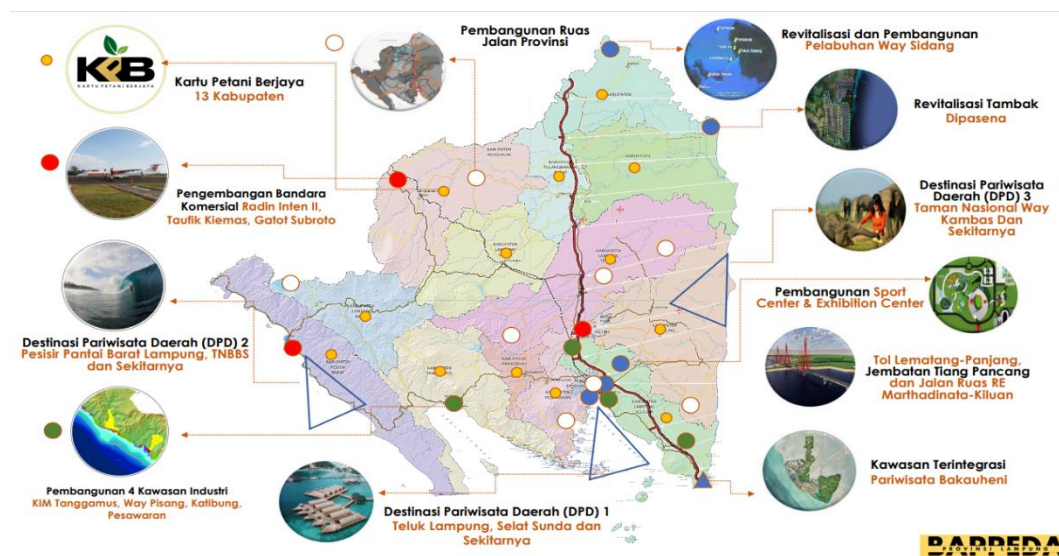
1.3.2 Hubungan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, ditetapkan Visi Provinsi Lampung yaitu “Rakyat Lampung Berjaya” (*aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera*), dengan misi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
- 2) Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
- 4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- 5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- 6) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Untuk melaksanakan strategi pembangunan daerah tersebut maka telah ditetapkan rencana pengembangan Kawasan yang salah satunya berupa 4 (empat) Kawasan Provinsi Lampung yaitu Kawasan Industri Tanggamus, Way Pisang, Katibung dan Pesawaran.

Gambar I.3. Pengembangan Kawasan Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023

1.3.3 Hubungan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 saat ini telah direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Pada Peraturan Daerah tersebut tercantum Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, yaitu:

- 1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Pariwisata Pantai Barat;
- 2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu Kawasan Resapan Air Bendungan Batu Tegi.

Struktur dan pola ruang Provinsi Lampung yang terkait dengan Kabupaten Tanggamus meliputi :

- 1) Perwujudan Sistem Perkotaan yaitu PKW Kota Agung;
- 2) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat (Sistem Jaringan Jalan) Pemantapan dan Pemeliharaan Jalan Nasional yaitu Pembangunan Jalan Tol Jalur Pelabuhan Panjang – Padang Cermin - Sp. Kota Agung sepanjang 163 Km dan Pengembangan Terminal Tipe B yaitu Terminal Kota Agung;
- 3) Perwujudan Sistem Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu Pengembangan pelabuhan penyeberangan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan arus penyeberangan berupa Pelabuhan Batu Balai dan Pengembangan Pelabuhan penyeberangan yang berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau-pulau terluar berupa Pelabuhan Pulau Kiluan, Pelabuhan Kota Agung dan Pelabuhan Pulau Tabuan;
- 4) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut yaitu Pemantapan pelabuhan pengumpul berupa Pelabuhan Batu Balai dan Pelabuhan Batu Balai, Pemantapan pelabuhan pengumpan berupa Pelabuhan Kelumbayan, Pelabuhan Kiluan, dan Pelabuhan Pulau Tabuan serta Pemantapan dan pengembangan pelabuhan khusus yakni Pelabuhan Batu Balai;

- 5) Perwujudan Sistem Jaringan Energi Infrastruktur Ketenagalistrikan yaitu PLTA Batu Tegi, PLTA Semangka, PLTU Ulu Belu, PLTP Ulu Belu, PLTD Talang Padang, PLTS Suka Banjar Pulau Tabuan, Jaringan GI PLTA Semangka – Kota Agung, Jaringan GI KIM Tanggamus – Kota Agung, Jaringan GI Krui – Kota Agung/KIM;
- 6) Perwujudan Sistem Sistem Jaringan Telekomunikasi Pengembangan jaringan mikro digital yakni Kabupaten Tanggamus;
- 7) Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pengembangan bendung yaitu Bendungan Batu Tegi dan Pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) yakni Way Tebu, Way Nagrip I, Way Ngison, Way Semangka, Bulok Sukamara III, Way Guring, dan Way Manak I;
- 8) Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perwujudan Kawasan Konservasi Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan, Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, Perwujudan Kawasan Rawan Bencana, Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove;
- 9) Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budi Daya yaitu Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri berupa Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Pariwisata berupa Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar yaitu Kawasan Strategik Pariwisata Daerah (KSPD) Kiluan dan Kelumbayan, Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya yaitu Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) pesisir pantai Kota Agung dan sekitarnya, serta Kawasan Permukiman berkepadatan sedang.

1.3.4 Hubungan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Dokumen RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20

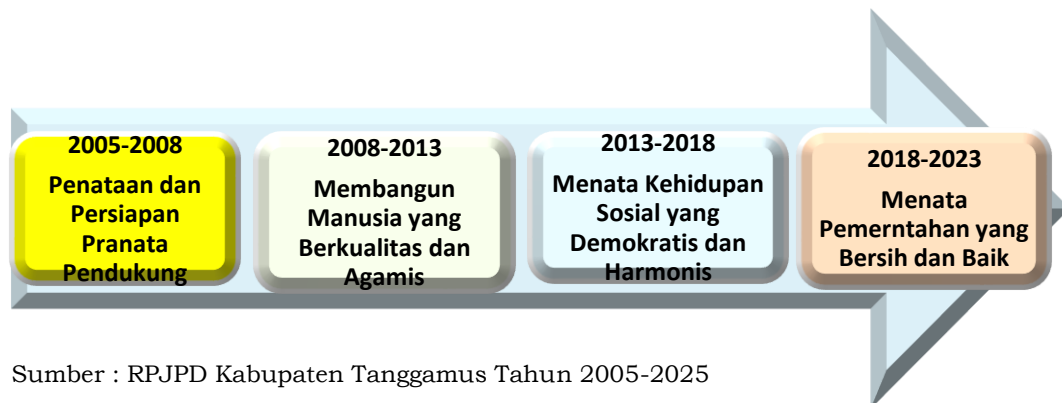
tahun kedepan merupakan salah satu pedoman bagi penyusunan RPD. Penyusunan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap keempat atau tahap terakhir dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 yang memuat visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang daerah yaitu :

- 1) Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis;
- 2) Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis;
- 3) Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik;
- 4) Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan.

Secara ringkas, tahapan pembangunan dan arahan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar I.4. Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025



Sumber : RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025

Dalam kaitannya dengan dokumen Renstra-PD dan Renja-PD, RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra-PD Tahun 2024-2026 dan Renja-PD setiap tahunnya. Renstra-PD merupakan rencana kerja jangka menengah Perangkat Daerah yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPD ini serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Selanjutnya, RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan daerah Kabupaten Tanggamus. RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD.

1.3.5 Hubungan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011, didalam peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas:

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di perkotaan Kota Agung, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, perikanan dan minapolitan, dan industri.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di perkotaan Wonosobo, yang berfungsi sebagai Pertanian, Perdagangan dan Jasa, Kehutanan dan Minapolitan.
- 3) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
 - a. Perkotaan Talang Padang, yang berfungsi sebagai Perdagangan dan Jasa, Pertanian dan Pendukung Kegiatan Pertanian; dan
 - b. Perkotaan Gisting, yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan Jasa dan Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian.
- 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 - a. Perkotaan Srikunoro (Semaka), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Lindung;
 - b. Perkotaan Putih Doh (Cukuh Balak), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Pertanian; dan
 - c. Tekad Kecamatan Pulau Panggung yang berfungsi Perdagangan.
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berada di Ngarib Kecamatan Ulu Belu, Margoyoso Kecamatan Sumberejo, Sukamara Kecamatan Bulok, Kuripan Kecamatan Limau, Napal Kecamatan Kelumbayan, dan Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat.

Tabel I.2. Hubungan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

NO	RTRW												RPD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031				
1	Kawasan Lindung															
1.1	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	1 Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		2 Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		3 Penyusunan program rehabilitasi hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		4 Penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		5 Rehabilitasi kawasan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		6 Penegakan hukum pemberantasan	Dinas Kehutanan Dan	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang	Program Pengelolaan Keanekaragam

NO	RTRW												RPD					
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG		
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
		pembalakan liar (<i>illegal logging</i>)	Perkebunan Kabupaten													Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	an Hayati (HAYATI)	
	7	Penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
	8	Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
	9	Mengendalikan perambahan hutan dan alih fungsi hutan yang berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung hutan yang bersangkutan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
	10	Mengendalikan pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan rawan bencana terutama di patahan/ sesar Semangka	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan / Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)

NO	RTRW												RPD													
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG										
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV														
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031														
		penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir																								
		5 Memelihara DAS Way Sekampung dan Way Semangka yang merupakan bagian dari DAS penting yang terdapat di Prov.Lampung	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx				Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)	
1.3	Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	1 Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam laut	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx																			Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)	
		2 Pengelolaan TNBBS diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, membangun dan memberdayakan masyarakat sekitar Taman Nasional.	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten			xxx	xxx																		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		3 Perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten			xxx																			Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)

NO	RTRW												RPD									
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG						
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV										
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031										
		4	Penggalangan kerjasama pemulih fungsi dan peran TNBBS (rencana aksi bersama)	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)		
		5	Pemantauan dan evaluasi	Dinas Kehutanan & SDA Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)		
1.4	Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam	1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah														APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
		2	Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana agar tersusunnya peta risiko bencana gempa bumi yang memenuhi kaidah pemetaan dan memiliki legitimasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	xxx	xxx												xxx	xxx		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana



NO	RTRW											RPD							
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG				
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III					IV			
2011				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031								
		3	Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, dengan cara Percepatan Pembuatan Peta Dasar (Rupabumi) Skala Besar, Penyusunan Data Akurat, Informasi, dan Pemutakhiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	xxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana		
		4	Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang Terbangunnya system pengawasan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan UU.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
		5	Pengaturan pembangunan dan tata bangunan sehingga Tersusunnya peraturan pembangunan tata bangunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana

NO	RTRW											RPD				
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III					IV
2011				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		6	Pengaturan pembangunan dan tata bangunan sehingga Tersusunnya peraturan pembangunan tata bangunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			xxx	xxx					APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
		7	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			xxx	xxx					APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
		8	Meningkatnya komitmen bersama pemerintah dan stakeholder dalam penanggulangan multi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
		9	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana Peningkatan kesiapan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
1.5	Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya	1	Identifikasi dan pemetaan kawasan lindung lainnya	Dinas Kehutanan & SDA	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)



NO	RTRW												RPD				
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		2	Penyusunan dan atau penguatan program pengembangan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		3	Pelaksanaan program pengembangan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		4	Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		5	Pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		6	Pengamanan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		7	Pengamanan kawasan lindung lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)

NO	RTRW											RPD						
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG			
	PROGRAM	KEGIATAN		I				II	III	IV								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026					2027-2031		
		6	Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan	Dinas PU Kabupaten			xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	
		7	Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx								APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	
		9	Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan; Penyediaan KPR - RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Perumahan
		10	Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan; Penyediaan KPR - RSH bersubsidi, Pengembangan	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Perumahan



NO	RTRW												RPD					
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG		
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
		perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/ Lisiba.																
	11	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan	Dinas PU Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh		
	12	Revitalisasi kawasan tradisional/ etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting	Dinas PU Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan	Program Pengembangan Permukiman

NO	RTRW											RPD					
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		3	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, dan damar mata kucing).										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)	
		4	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, dan damar mata kucing).	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
		5	Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)	
		6	Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)
2.3	Pengembangan kawasan pertanian	1	Perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis pada areal-areal potensial terutama di Pugung, Talang Padang, Kota Agung Timur, Kotaagung Barat, Wonosobo, Semaka	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	xxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	RTRW											RPD											
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG							
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV											
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031											
		2	Peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		3	Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		4	Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		5	Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura																	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyuluhan Pertanian	
2.4	Pengembangan Kawasan Perkebunan	1	Penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada		xxx	xxx														xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana



NO	RTRW											RPD				
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III					IV
2011				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
		pada kawasan lindung dan atau TNBBS													sosial, budaya dan keagamaan	Pertanian
		2 Penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung dan atau TNBBS	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		3 Pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan yaitu pengembangan komoditi perkebunan antara lain : kopi, kelapa dalam, kakao, dan lada											APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab /Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		4 Peningkatan produktifitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan dan peningkatan keterampilan petani kebun		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab /Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		5 Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/ kawasan yang diprogramkan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab /Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	RTRW											RPD					
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG		
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III					IV	
2011				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031						
		6	Pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
2.5	Pengembangan kawasan peternakan	1	Pengembangan kawasan agribisnis peternakan	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		2	Pengembangan kawasan integrasi peternakan - tanaman pangan dan hortikultura (<i>organic farm</i>)	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		3	Pengembangan kawasan integrasi peternakan - perkebunan (kakao, lada, kopi)	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan /Dinas Kehutanan dan Perkebunan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		4	Pengembangan kawasan integrasi peternakan - perikanan		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



NO	RTRW											RPD				
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III					IV
2011				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031					
2.6	Pengembangan Kawasan Perikanan Dan Kelautan	1 Pengembangan perikanan tangkap laut dalam	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab /Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		2 Pengembangan perikanan tangkap laut dalam	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab /Masy	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		3 Pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		4 Pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		5 Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		6 Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



NO	RTRW												RPD													
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG											
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III					IV										
2011				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031															
		7	Pengembangan kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Wonosobo	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		8	Pengembangan kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Wonosobo	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
2.7	Pengembangan Kawasan Pertambangan	1	Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx																	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
		2	Pengembangan pertambangan tertutup (open pit) pada kawasan hutan lindung	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		3	Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx																	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		4	Penetapan aturan zonasi penambangan	Dinas Pertambangan dan Energi	xxx	xxx	xxx	xxx																	Meningkatkan nilai tambah ekonomi,	Program Perekonomian dan

NO	RTRW												RPD			
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III					IV
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026					2027-2031
		rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan	Kabupaten												kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Pembangunan
	5	Menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx							APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
	6	Rehabilitasi lahan pasca tambang	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Pemkab	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
	7	Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan
	8	Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	xxx	xxx	xxx	xxx						APBN/ APBD Prov/ APBD Kab		Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perekonomian dan Pembangunan



NO	RTRW												RPD					
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG			
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III					IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026					2027-2031		
2.8	Pengembangan Kawasan Industri Unggulan	1 Pengembangan industri pengolahan hasil laut	Dinas Koperindag / Dinas Kelautan dan Perikanan / Dinas Kehutanan dan Perkebunan / Swasta	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		2 Pengembangan industri pengolahan hasil laut	Dinas Koperindag	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		3 Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kopi, kelapa dalam, damar mata kucing	Dinas Koperindag														Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		4 Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kopi, kelapa dalam, damar mata kucing	Dinas Koperindag	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2.9	Pengembangan Kawasan Pariwisata	1 Pengembangan Kawasan Ekowisata di TNBBS	Dinas Pariwisata / Dinas Kehutanan dan Perkebunan / Swasta	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

NO	RTRW											RPD											
	RENCANA POLA RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG							
	PROGRAM	KEGIATAN		I						II	III	IV											
2011				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031												
		2	Pengembangan Kawasan Ekowisata di TNBBS	Dinas Pariwisata	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		3	Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya	Dinas Pariwisata																		Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Dalam konteks penataan ruang, Perubahan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 juga diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah Kabupaten Tanggamus, meliputi:

1) Kawasan Pemanfaatan Umum;

a. Zona Pelabuhan

- Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
 - Perairan disekitar Pelabuhan Kota Agung dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-2;
 - Pelabuhan Pengumpul, meliputi Pelabuhan Kota Agung dan Pelabuhan Batu Balai;
 - Pelabuhan Pengumpan, meliputi Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu Pelabuhan Tabuan, Pelabuhan Kelumbayan;
 - Rencana lokasi Terminal Khusus, meliputi Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Limau, Putih Doh Kecamatan Kelumbayan, Teluk Paku Kecamatan Kelumbayan, dan Teluk Umbar Kecamatan Kelumbayan;
- Sub Zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
 - PPP Kota Agung dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-2;
 - PPI Guring dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-7;
 - PPI Karang Anyar dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-8;
 - PPI Tegineneng dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-9;
 - PPI Badak dengan kode sub zona KPU- PL-WKO-10;
 - PPI Putih Doh dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-11;
 - PPI Penyandingan dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-12;

- b. Zona Perikanan Tangkap
 - Sub zona pelagis meliputi Perairan Teluk Semaka dengan kode sub zona KPU-PT-P-2
- c. Zona Perikanan Budi Daya
 - Sub zona budi daya laut meliputi Kecamatan Pematang Sawa yaitu Karang Bera dengan kode sub zona (KPU-BD-BL-49); Kecamatan Cukuh Balak yaitu Teluk Tengor (KPU-BD-BL-50); Kecamatan Kelumbayan yaitu Teluk Umbar (KPU-BD-BL-51, KPU-BD-BL-52), Kelumbayan (KPU-BD-BL-53 sampai KPU-BD-BL-55);
- d. Zona Industri
 - Sub zona industri maritim meliputi: perairan Kota Agung Timur yang masuk dalam wilayah DLKr/DLKp Pelabuhan Kota Agung; perairan Kecamatan Limau dengan kode sub zona KPU-ID-MR-1; dan perairan Kecamatan Cukuh Balak dengan kode sub zona KPU-ID-MR-2;

2) Kawasan Konservasi;

- a. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
 - KKP Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan dan Zona Pemanfaatan meliputi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan-Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus dengan kode KKP-TWP-KT
- b. Kawasan Suaka Alam
 - Cagar alam laut Bukit Barisan Selatan dengan kode KSA-CAL-2 di Kecamatan Pematang Sawa

3) Kawasan Strategis Nasional Tertentu;

Kawasan Strategis Nasional Tertentu berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar tidak ada yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus.

4) Alur Laut.

- a. Alur Pelayaran
 - Alur pelayaran internasional/nasional, meliputi alur pelayaran di Perairan Teluk Semaka yaitu dari Pelabuhan Kota Agung menuju Selat Sunda melalui perairan diantara Pematang Sawa dan Pulau Tabuhandengan kode (AL-AP-PI-1);

- Alur pelayaran regional, meliputi alur pelayaran Perairan Teluk Semaka yaitu Kelumbayan-Pulau Betuah dengan kode AL-AP-PR-1;
 - Alur pelayaran lokal, meliputi alur pelayaran di Teluk Semaka yaitu Kota Agung-Pematang Sawa (AL-AP-PL-5), Kota Agung Cukuh Balak (AL-AP-PL-6), Cukuh Balak-Pulau Tabuan (AL-AP-PL-7);
- b. Alur Pipa/Kabel Bawah Laut
- Rencana alur kabel PLN, meliputi Pulau Sawang Balak kode AL-APK-KL-3 (Pekon Doh Cukuh Balak-Pulau Sawang Balak) dengan kode AL-APK-KL-3;
- c. Migrasi Biota Laut
- Alur migrasi penyu, meliputi sekitar Perairan Lemong-Pulau Pisang-Bengkunat-Pulau Betuah-Belimbing-Pulau Tabuhan-Kelumbayan-Punduh Pidada-Padang Cermin-Katibung-Kalianda-Sebesi-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau Batang, dengan kode AL-AMB-MP;
 - Alur migrasi mamalia laut, meliputi sekitar Perairan Lemong-Pulau Pisang-Pulau Betuah-Kiluan-Sebesi-Selat Sunda/Bakauheni-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau Batang, dengan kode AL-AMB-MM.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Menentukan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanggamus pada periode 2024-2026;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 3) Menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 4) Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Tanggamus;
- 5) Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026;

- 6) Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024-2026;
- 7) Sebagai instrument pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan.

Sehubungan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan ke dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 2) Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat;
- 4) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- 5) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, social dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

II. Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisa, gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan deskripsi dan statistik tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJMD 2018-2023, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018- 2023, data-data pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelarasan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta perkembangan penanganan pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus.

III. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta proyeksi keuangan daerah selama lima tahun.

IV. Permasalahan dan Isu Strategis

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan yang akandiperbaiki dan diselesaikan melalui pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

V. Tujuan dan Sasaran

Dalam Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang berpedoman pada pencapaian Visi dan Misi RPJPD.

VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

IX. Penutup

Pada bagian ini dicantumkan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun terkait dengan pengendalian dan evaluasi.



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RPD



**422
TANGGAMUS
02**

“Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu”

• Gus Dur •



BAB II

Gambaran Umum

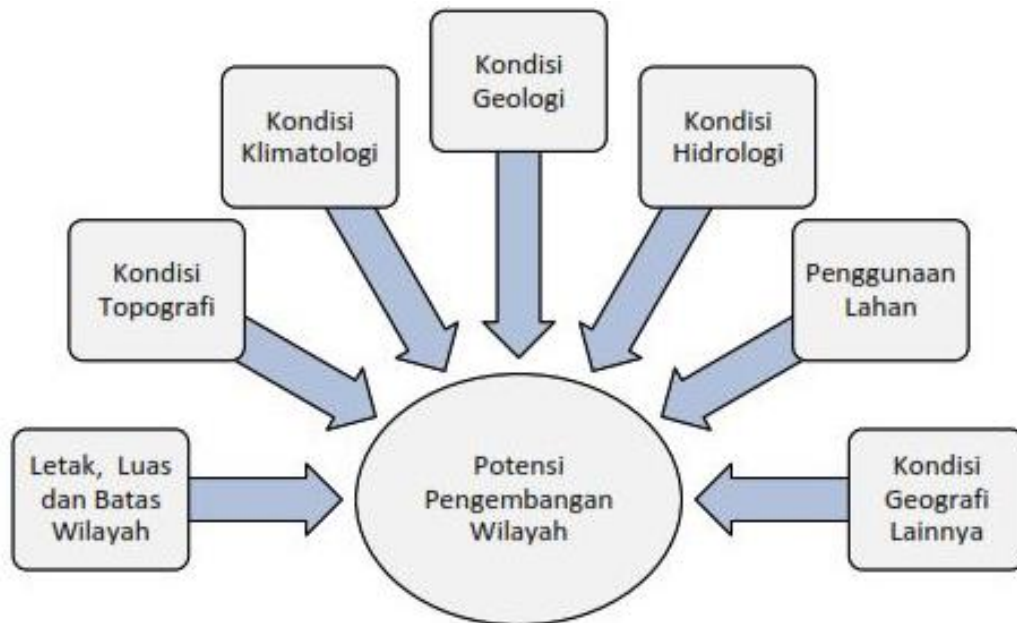


BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar yang sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Aspek ini menjelaskan tentang kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi dengan potensi pengembangan kawasan budidaya seperti gambar berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas pengembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus sangat didukung oleh berbagai aspek, utamanya aspek letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, serta aspek penggunaan lahan. Disamping itu dijelaskan pula tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, serta distribusi penduduk per Kecamatan.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

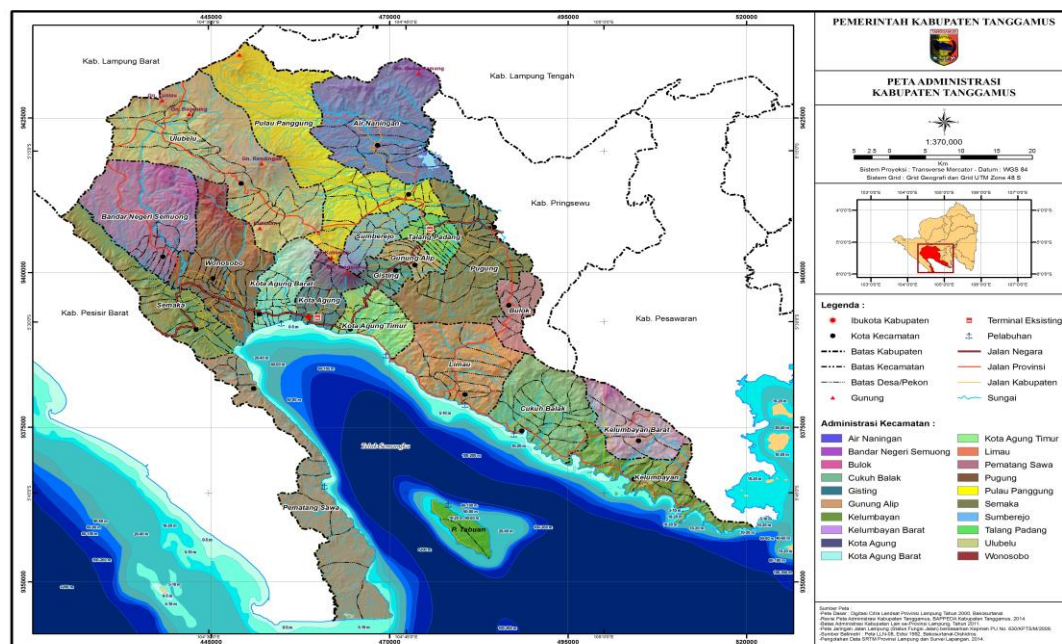
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau maka saat ini Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah 4.747,092 Km² yang terdiri dari daratan 2.947,592 Km² dan lautan 1.799,500 Km² yang memiliki garis pantai sepanjang 202 Km dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar II.2. Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023



Wilayah Kabupaten Tanggamus dimasuki oleh penjajah Belanda pada tanggal 24 Agustus 1682 melalui ekspedisi perdagangan VOC. Hal ini terjadi akibat imbas dari berkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1682 sampai 1799 perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung namun sejak tahun 1856 perlawanan terhadap pemerintahan Belanda mulai surut selanjutnya di wilayah Tanggamus dibentuk Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Controlir di Kota Agung. Pada saat itu Pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Adat yang disebut Marga yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa Kampung, 5 (lima) Marga tersebut adalah :

- 1) Marga Gunung Alip.
- 2) Marga Benawang.
- 3) Marga Belunguh.
- 4) Marga Pematang Sawa.
- 5) Marga Ngarip.

Selanjutnya pada tahun 1944 berdiri Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanaan, serta pada tahun 1953 berdiri pula Pemerintahan Negeri sekaligus menghapus Pemerintahan Adat/Marga.

Pada masa Pemerintahan Kewedanaan Kota Agung mengkoordinir 4 (empat) wilayah Kecamatan yang meliputi Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau Panggung. Pada Tahun 1964 Pemerintahan Kewedanaan di hapuskan yang selanjutnya pada Tahun 1971 Pemerintahan Negeri juga dihapuskan.

Untuk meningkatkan pelayanan birokrasi, maka pada tahun 1979 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendali dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Desa dan 3 Kelurahan serta 4 Desa Persiapan.



Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari 2004 Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan Kepala Adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V. Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat yang pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu :

- 1) Marga Gunung Alip (Talang Padang).
- 2) Marga Benawang.
- 3) Marga Belunguh.
- 4) Marga Pematang Sawa.
- 5) Marga Ngarip.
- 6) Marga Negara Batin.

Bupati Tanggamus pertama adalah Drs. Achmad Syah Putra yang memimpin Kabupaten Tanggamus sampai tahun 2003, kemudian pada tanggal 15 Februari 2003 dilantik Drs. H. Fauzan Sya'ie, M.Sc. dan Bambang Kurniawan, S.T. sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2008 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Sujadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2008-2013 hasil Pilkada langsung yang pertama dilakukan di kabupaten ini. Kemudian sesuai hasil Pilkada kedua di Kabupaten Tanggamus tahun 2012, pada tanggal 15 Februari 2013 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Samsul Hadi, S.Pd.I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2013-2018.

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2017, Gubernur Lampung secara resmi melantik H. Samsul Hadi, M.Pd.I sebagai Bupati Tanggamus defenitif sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan Bupati Tanggamus Tahun 2013-2018 yaitu pada tanggal 14 Februari 2018. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan maka Sekretaris Daerah Andi Wijaya, S.T., M.M. ditunjuk menjadi Plh. Bupati Tanggamus dari tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018, selanjutnya

Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Lampung Didik Suprayitno melantik Ir. Zainal Abidin, M.T. menjadi Penjabat Bupati Tanggamus sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 21 September 2018.

Berdasarkan hasil Pemilukada Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 27 Juni 2018 maka telah dilantik Kepala Daerah Terpilih Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. dan Hi. AM. Syafi'i, S.Ag. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2023 oleh Gubernur Lampung pada tanggal 20 September 2018 dan dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 21 September 2018 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus.

Secara administratif ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan 6 (enam) Wilayah Perwakilan Kecamatan. Pada tanggal 19 Juni 2000 disyahkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya kecamatan bertambah 6 (enam) Kecamatan sehingga menjadi 17 Kecamatan. Pada Tahun 2004 terdapat 7 Kelurahan serta 317 Pekon/Desa. Pada pertengahan tahun 2005 telah terbentuk kembali 7 Kecamatan baru hasil pemekaran berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005 yaitu Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Limau sehingga jumlahnya menjadi 24 Kecamatan dengan 7 Kelurahan dan 323 Pekon/Desa. Kemudian dengan disyahnkannya Perda Nomor 15 Tahun 2006, maka dibentuklah 4 kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Nanningan, Bulok dan Kelumbayan Barat sehingga sampai tahun 2007 Kabupaten Tanggamus telah memiliki 28 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 371 Pekon/Desa.

Pada tanggal 26 November 2008, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pringsewu yang terdiri atas 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Ambarawa, Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Adiluwih dan Sukoharjo. Jadi sampai dengan

pertengahan tahun 2011 Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 275 Pekon dan 3 Kelurahan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 19 Desember 2011 telah dilakukan pemekaran 24 Pekon yang tersebar di 16 Kecamatan sehingga mulai tahun 2012 sampai sekarang, Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 299 Pekon dan 3 Kelurahan.

Tabel II.1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS (Km ²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Wonosobo	Tanjung Kurung	209.63	4.50
2	Semaka	Sukaraja	170.90	3.67
3	Bandar Negeri Semuong	Sanggi	98.12	2.11
4	Kota Agung	Kuripan	76.93	1.65
5	Pematang Sawa	Way Nipah	185.29	3.98
6	Kota Agung Timur	Kagungan	73.33	1.58
7	Kota Agung Barat	Negara Batin	101.30	2.18
8	Pulau Panggung	Tekad	437.21	9.39
9	Ulu Belu	Ngarip	323.08	6.94
10	Air Naningan	Air Naningan	186.35	4.00
11	Talang Padang	Talang Padang	45.13	0.97
12	Sumberejo	Margoyoso	56.77	1.22
13	Gisting	Kuta Dalam	32.53	0.70
14	Gunung Alip	Banjar Negeri	25.68	0.55
15	Pugung	Rantau Tijang	232.40	4.99
16	Bulok	Sukamara	51.68	1.11
17	Cukuh Balak	Putih Doh	133.76	2.87
18	Kelumbayan	Napal	121.09	2.60
19	Limau	Kuripan	240.61	5.17
20	Kelumbayan Barat	Sidoarjo	53.67	1.15
		LUAS DARATAN	2,855.46	
		LUAS LAUTAN	1,799.50	
		LUAS KABUPATEN TANGGAMUS*)	4,654.96	

Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2023

*) Luas per kecamatan masih berdasarkan luas wilayah yang lama karena untuk luas wilayah yang baru belum dipublish sampai dengan luas wilayah per kecamatan

Gambar II.3. Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2023

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tanggamus berada di pesisir Barat Provinsi Lampung dengan letak geografis 104°18' BT – 105°12' BT dan 5°05' LS – 5°56' LS. Pada bagian Barat semakin ke Utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semangka. Di Teluk Semangka terdapat sebuah pelabuhan yang merupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan.

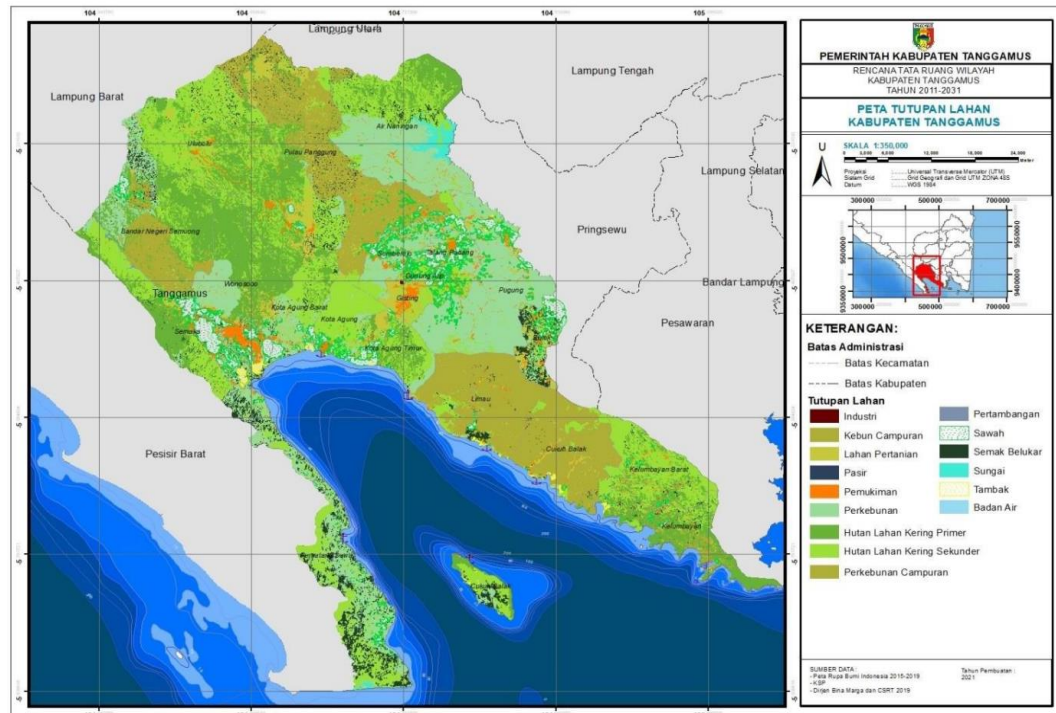
Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tanggamus terdiri dari hutan lahan sekunder, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering/semak, semak belukar, tambak dan tubuh air. Pertanian lahan kering campur semak merupakan jenis tutupan lahan yang mendominasi di Kabupaten Tanggamus, dengan prosentase 62%. Sedangkan jenis tutupan lahan sawah memiliki prosentase 5% dari total luas daratan. Tutupan lahan yang luasnya terkecil adalah lahan tambak sebesar 1%. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.2. Kelas Penutupan Lahan Di Kabupaten Tanggamus

NO	KELAS PENUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)
1	Hutan lahan kering primer	287,17
2	Hutan lahan kering sekunder	28.331,60
3	Hutan mangrove sekunder	69,00
4	Perkebunan	485,48
5	Pemukiman	8.541,77
6	Pertambangan	71,74
7	Pertambangan	3.267,16
8	Pertanian lahan kering campur semak	226.626,97
9	Sawah	16.584,13
10	Semak belukar	6.783,44
11	Semak belukar rawa	140,28
12	Tambak	402,25
13	Tanah terbuka	206,15
14	Tubuh air	1.067,43
	Total Luas (Ha)	292.864,58

Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2022

Gambar II.4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus



Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2022

2.1.1.3 Topografi

Kondisi topografi perbukitan bergelombang menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus seperti di Kecamatan Wonosobo, Pulau Pangung, Kota Agung, Talang Padang dan Cukuh Balak dengan ketinggian antara 700 – 1.500 meter diatas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kategorinya, kemiringan lereng yang membentuk permukaan ruang wilayah Kabupaten Tanggamus dibedakan kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu kemiringan lereng antara 0 – 2 %, 2 – 5 %, 15 - 40 % dan > 40 %.

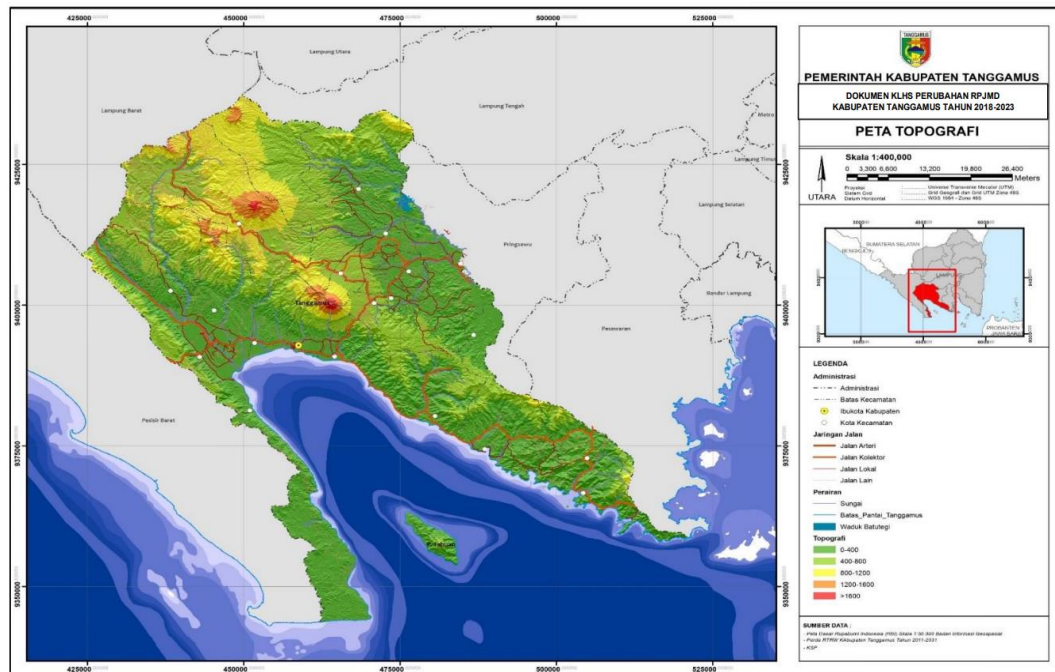
Tabel II.3. Kemiringan Lereng Yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus

KEMIRINGAN LERENG ANTARA	KETERANGAN
0 – 2 %	Luas kemiringan lereng pada kelompok ini sebesar 19,28 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan sangat datar (0 – 2 %).
2 – 5 %	sekitar 10,86 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus merupakan lahan dengan kemiringan cukup datar. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan cukup datar (2 – 15 %) paling dominan adalah Kecamatan Kota Agung yaitu 8.580 Ha atau 23,47 %.
15 - 40 %	Kemiringan dengan kategori ini adalah sebesar 58.179 Ha atau 17,33 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan yang memiliki kemiringan 15 – 40 % paling besar yaitu 14.604 (25,10 %).
> 40 %	Kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah kemiringan > 40 % sebesar 165.215 Ha atau 49,22 % dari total wilayah Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Cukuh Balak dan Kelumbayan yaitu sebesar 37.127 Ha atau 22,47 %.

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Kabupaten Tanggamus terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 2.115 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Tanggamus terbentuk dengan kondisi topografi wilayah yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi (berbukit dan bergunung), Secara fisiografi wilayah Kabupaten Tanggamus dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yang mencerminkan keadaan topografi wilayahnya, yaitu dataran rendah, perbukitan, bergelombang, dataran tinggi, pegunungan dan perbukitan, serta kerucut gunung api. Bentang alamnya terdiri dari daratan 65 % yang dimanfaatkan untuk perumahan dan pekarangan sebanyak 37,10%, perkantoran sebanyak 37,04% dan lebih kurang 35% dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan/pertanian sebanyak 40,71% dan fasilitas lainnya sebanyak 59,29%

Gambar II.5. Peta Topografi Kabupaten Tanggamus



Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

2.1.1.4 Geologi

Berdasarkan jenisnya, batuan yang membentuk wilayah Kabupaten Tanggamus terdiri atas Batuan Pra Tertier, Batuan Tertier yang meliputi batuan gunung api andesit formasi tua, dan Batuan Kwartar berupa endapan gunung api muda. Batuan Tertier tersebar cukup luas di wilayah Kabupaten Tanggamus. Batuan Kwartar tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus, namun yang cukup mendominasi terdapat di Kecamatan Pulau Panggung dan Wonosobo. Sementara Alluvium yang berupa endapan permukaan lebih banyak terdapat di Kecamatan Wonosobo.

Wilayah Kabupaten Tanggamus secara geologis termasuk dalam formasi kwarter. Berdasarkan formasinya, formasi yang terdapat di Kabupaten Tanggamus merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan berupa satu rangkaian yang terletak di sebelah barat patahan (sesar) Semangka dan lainnya terletak di bagian timur patahan (sesar) Semangka. Tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus terbagi dalam beberapa jenis tanah. Penentuan jenis tanah tersebut ditinjau dari berbagai klasifikasi, yaitu :

- 1) Klasifikasi menurut USDA (*United States Department of Agriculture*).
- 2) Versi unit lahan menurut Pusat Penelitian Tanah (PPT).
- 3) Versi unit lahan menurut Repport.

Berdasarkan klasifikasi USDA, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus meliputi jenis-jenis tanah alluvial, latosol, andosol, regosol dan hidromorf kelabu. Lebih rincinya, jenis batuan dalam asosiainya dengan jenis tanah di Kabupaten Tanggamus dalam kaitannya dengan bentuk fisiografi wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Satuan tanah latosol yang berasal dari bahan induk kompleks tufa batuan gunung api intermedier dan basis dengan fisiografi pegunungan lipatan.
- 2) Satuan andosol coklat kekuningan yang berasal dari bahan induk kompleks tufa intermedier dan basis pada fisiografi pegunungan patahan.
- 3) Satuan tanah andosol coklat, kompleks tufa dan batuan tufa intermedier.
- 4) Satuan tanah podsolik merah kuning yang berasal dari bahan induk kompleks sedimen tufa dengan batuan metamorf pada fisiografi dataran.
- 5) Asosiasi podsoli merah kekuningan dan litosol yang berasal dari kompleks batuan kukuh plutonik masam dan metamorf pada fisiografi pegunungan.
- 6) Satuan tanah alluvial hydromorf yang berasal dari bahan induk endapan marin dengan fisiografi dataran.

Saat ini berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Tanggamus. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Biji Besi
Biji besi yang ada di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Padang Ratu dan Pekon Tegineneng Kecamatan Limau, Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok serta Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan. Biji besi di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral magnetik yang memiliki kadar Fe antara 55-65%.

2) Mangan

Mangan di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral piroklorit dengan kadar Mn antara 25-45% dan banyak dijumpai di Pekon Tanjung Kemala, Pekon Tanjung Agung, Pekon Gunung Kasih yang terdapat di Kecamatan Pugung. Terdapat beberapa perusahaan industri yang mengelola mangan tersebut.

3) Emas

Bahan galian emas di Kabupaten Tanggamus memiliki sebaran cukup luas dengan jumlah cadangan yang cukup besar yang terdapat di Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat, Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan, Pekon Way Linggo dan Way Semong di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.

4) Galena

Galena di Wilayah Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat serta Pekon Umar dan Pekon Paku di Kecamatan Kelumbayan.

5) Pasir Besi

Pasir besi di Wilayah Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai tersebar disepanjang pesisir pantai seperti Pekon Tegineneng dan Pekon Badak Kecamatan Limau, pesisir pantai Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, pesisir pantai Pekon Napal dan Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan. Pasir besi di Kabupaten Tanggamus memiliki ketebalan deposit berkisar antara 0,5 – 2,5 m.

6) Batu Bara

Batu bara di Kabupaten Tanggamus umumnya memiliki kalori berkisar antara 5.500-6300 dan dapat dijumpai di Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Gading Pertiwi Kecamatan Pugung, Teluk Berak Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa, Pekon Way Harong Kecamatan Air Nanningan, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat dan Pekon Penyandingan Kecamatan Kelumbayan.

7) Zeolit

Bahan galian Zeolit di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai di Pekon Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya : 720.000 m³), Pekon Pertiwi Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 2000.000 m³) pengelola PT Peragon Perdana Mining, Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 600.000 m³).

8) Andesit

Batu Andesit di Kabupaten Tanggamus tersebar merata di beberapa Kecamatan diantaranya Pekon Toto Margo Kecamatan Air Nainingan (sumber daya tereka 2.000.000 m³), Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 600.000 m³), Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 2.700.000 m³), Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya tereka 140.000 m³), Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa (sumber daya tereka 3.000.000 m³), Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok (sumber daya tereka 5.250.000 m³), Pekon Balak Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 18.000.000 m³), Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 3.800.000 m³), Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 18.750.000 m³), Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 6.000.000 m³).

9) Batu Gamping

Batu Gamping atau Batu Kapur di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai pada beberapa wilayah di Kecamatan Pugung seperti di Pekon Gunung Kasih (sumber daya tereka 200.000 m³) dan Pekon Tanjung Kemala (sumber daya tereka 700.000 m³).

10) Bentonit

Jenis mineral bentonit di Kabupaten Tanggamus terdiri dari dua jenis yang banyak di jumpai di Dusun Umbul Solo Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung dengan jumlah sumber daya sebesar 600.000 m³

11) Belerang

Belerang di Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai di Pekon Suka Indah Kecamatan Ulu Belu. Kegunaannya adalah untuk industri farmasi (obat-obatan)

12) Batu Apung

Bahan galian jenis batu apung di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Tampang Kecamatan Pematang Sawa dan banyak digunakan sebagai bahan poles atau penggosok, bahan bangunan konstruksi ringan, bahan pengisi dan sebagai isolator temperatur tinggi.

13) Pasir

Pasir di Kabupaten Tanggamus banyak di temui di Pekon Sri Kuncoro dan Pekon Karang Rejo Kecamatan Samaka, disepanjang aliran sungai Way Semaka Pekon Tugu Rejo dan Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Baros Kecamatan Kota Agung.

14) Granit

Batu granit merupakan bahan galian yang sangat ekonomis dan di Kabupaten Tanggamus di jumpai di Pekon Talang Asahan dengan sumber daya sebanyak 6.000.000 m³ dan Pekon Kali Pasir Kecamatan Semaka dan Kecamatan Wonosobo.

15) Lempung

Lempung di wilayah Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Gunung Kasih dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung dengan banyaknya sumber daya sebesar 22.500.000 m³

16) Silika

Mineral Silika atau Batu Kuarsa banyak dijumpai di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 600.000 m³) dan Pekon Air Kubang serta Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan.

17) Sirtu

Sirtu di Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo, Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semoung dan Pekon Sri Kuncoro Kecamatan Semaka.

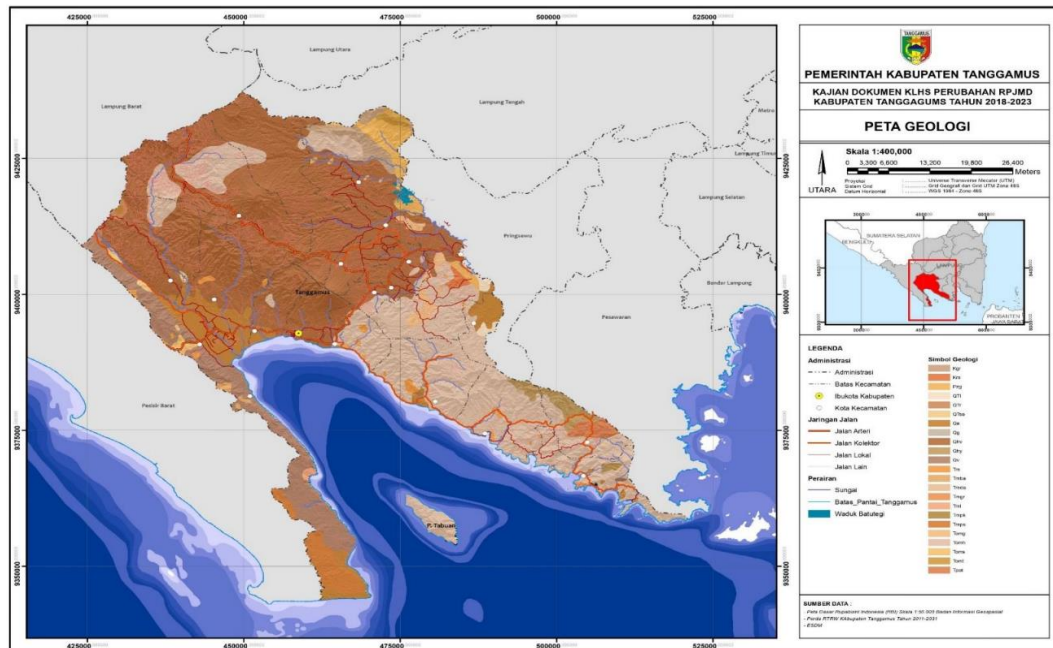
18) Marmer

Bahan Galian Marmer di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 780.000 m³) dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 3.240.000 m³).

19) Seng

Bahan Galian Seng di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung.

Gambar II.6. Peta Geologi Kabupaten Tanggamus



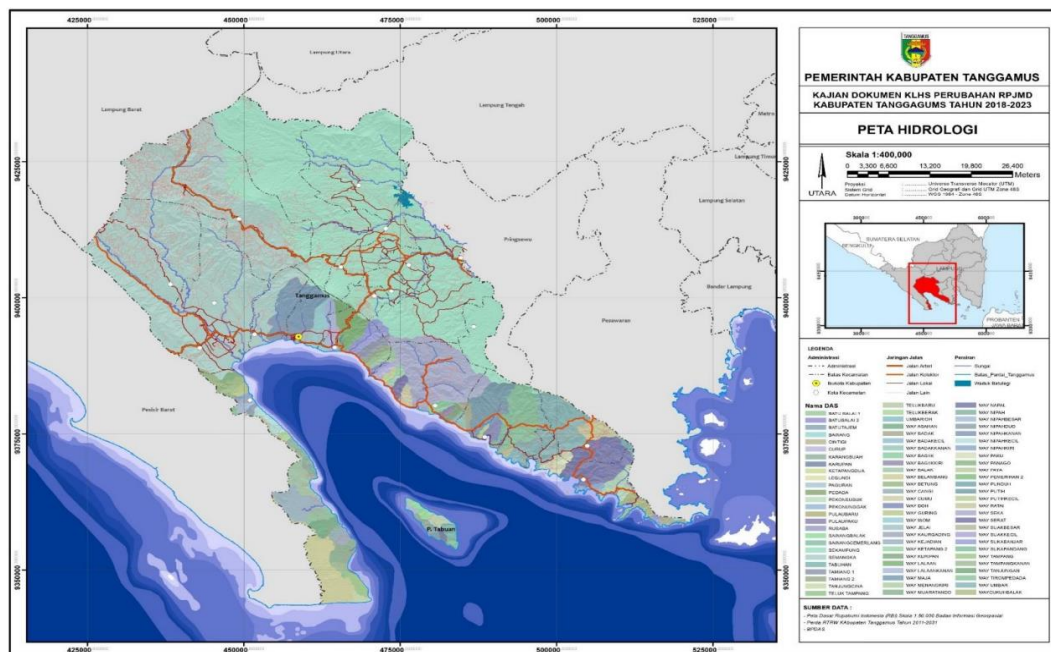
Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1993

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Keberadaan sungai dan anak sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Tanggamus sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi sumber air bagi penduduk di wilayah Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya.

Sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Tanggamus karena manfaatnya yang sangat besar bagi aktivitas penduduk adalah sungai Way Sekampung termasuk daerah-daerah aliran sungainya. Sungai dan anak sungai ini merupakan sumber air untuk Bendungan Batu Tegi yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Nainingan yang dibangun pada tahun 2002, dengan luas genangan 25 Km², yang diperuntukkan sebagai pembangkit tenaga listrik, air baku, pariwisata, pengendalian banjir dan pengembangan perikanan air tawar. Pola aliran sungai Way Sekampung menganut pola aliran dendritik yang mengalir melintasi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Panggung, Air Nainingan, Talang Padang, Pugung, dan Bulok. Luas keseluruhan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung adalah 479.252 Km².

Gambar II.7. Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus



Sumber: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tanggamus, 2020

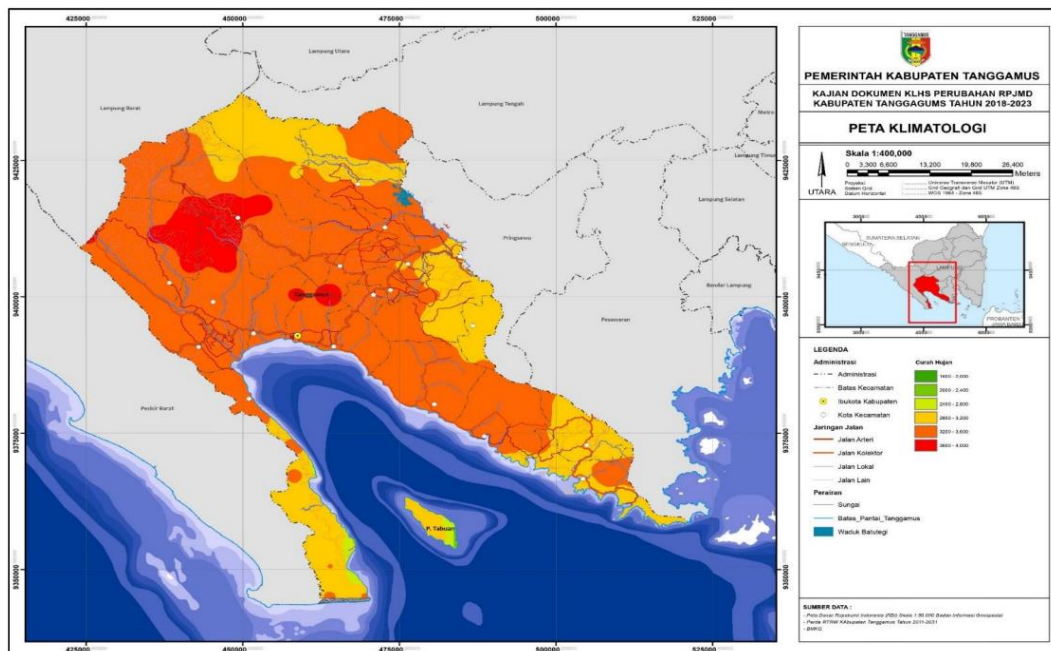
2.1.1.6 Klimatologi

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut yaitu Teluk Semangka yang merupakan bagian dari Samudera Indonesia menyebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan dataran dengan temperatur udara berkisar rata-rata antara 26 °C (Derajat Celcius) sampai 30 °C pada ketinggian 20-60 m di atas permukaan laut sedangkan pada daerah yang lebih rendah temperatur udara di wilayah ini dapat mencapai 33 °C.

Wilayah dengan udara sejuk (pegunungan) berada di sekitar daerah Kecamatan Gisting dan Kota Agung Timur yang berada pada ketinggian 500 mdpl sampai dengan 2.000 mdpl (Gunung Tanggamus). Kecepatan angin rata-rata adalah 5,83 km/jam, dengan kelembaban udara yang cukup tinggi yaitu 80%-88%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Tanggamus juga cukup tinggi berkisar antara 1.750 mm per tahun sampai dengan 3.000 mm per tahun. Type-type iklim berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh L. R. Oldeman (1978) dibedakan berdasarkan panjang bulan basah dan bulan kering yang berlangsung di wilayah Kabupaten Tanggamus. Atas dasar klasifikasi tersebut, sebagian

besar wilayah Kabupaten Tanggamus termasuk pada zona B – 1 dimana jumlah bulan basah adalah 7 sampai dengan 9 bulan dan Zona C dengan jumlah bulan basah 7 bulan.

Gambar II.8. Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus



Sumber: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tanggamus, 2020

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Aspek fisik alam yang merupakan faktor pembatas bagi perkembangan ruang wilayah adalah ketersediaan lahan dan sumberdaya air. Hal ini disebabkan keadaan kedua sumberdaya tersebut bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan). Selain itu, secara alamiah kuantitasnya tetap namun keadaan dan sifat kualitasnya akan berbeda dari waktu ke waktu sehingga dapat membatasi pemakaian dan manfaat yang diberikan. Oleh karena itu, ketersediaan lahan dan sumberdaya air ini akan menentukan sebaran dan besaran luas daya tampung ruang untuk pemanfaatan lahan pada wilayah tersebut.

Penetapan daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mengkonversi lahan-lahan yang tidak termasuk dalam kategori kawasan lindung dan sawah beririgasi teknis.

Berdasarkan pada kondisi dan analisa potensi lahan serta bangunan maka daya tampung lahan di Kabupaten Tanggamus sampai dengan Tahun 2031 masih tercukupi. Luas daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di masa yang akan datang adalah 115.360 Ha atau 40%. Untuk lebih jelasnya ketersediaan dan daya tampung lahan Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4. Daya Tampung Lahan Di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	PERMU KIMAN	SAWAH	HUTAN	DAYA TAMPUNG LAHAN	%
1	Wonosobo	20.963	218	3.183	11.295	6.267	5,4
2	Semaka	17.090	220	2.420	1.505	12.945	11,2
3	B. Negeri Semuong	9.812	113	-	-	9.699	8,4
4	Kota Agung	7.693	238	1.465	-	5.990	5,2
5	Pematang Sawa	18.529	110	1.298	-	17.121	14,8
6	Kota Agung Timur	7.333	116	3.358	2.013	1.846	1,6
7	Kota Agung Barat	10.130	115	2.917	3.765	3.333	2,9
8	Pulau Panggung	43.721	184	2.404	38.211	2.077	1,8
9	Air Naningan	32.308	162	-	29.562	2.584	2,2
10	Ulu Belu	18.635	229	1.200	15.203	2.003	1,7
11	Talang Padang	4.513	270	2.000	2.013	230	0,2
12	Sumberejo	5.677	188	1.388	-	4.101	3,6
13	Gisting	3.253	211	793	-	2.249	1,9
14	Gunung Alip	2.568	116	2.100	-	352	0,3
15	Pugung	23.240	336	3.544	15.156	4.204	3,6
16	Bulok	5.168	125	-	-	5.043	4,4
17	Cukuh Balak	13.376	142	1.425	11.546	263	0,2
18	Kelumbayan	12.108,60	70	1.223	4.054	6.762	5,9
19	Limau	24.061	122	953	-	22.986	19,9
20	Kelumbayan Barat	5.367,40	62	-	-	5.306	4,6
	JUMLAH	285.546	3.347	31.671	134.324	116.204	100

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

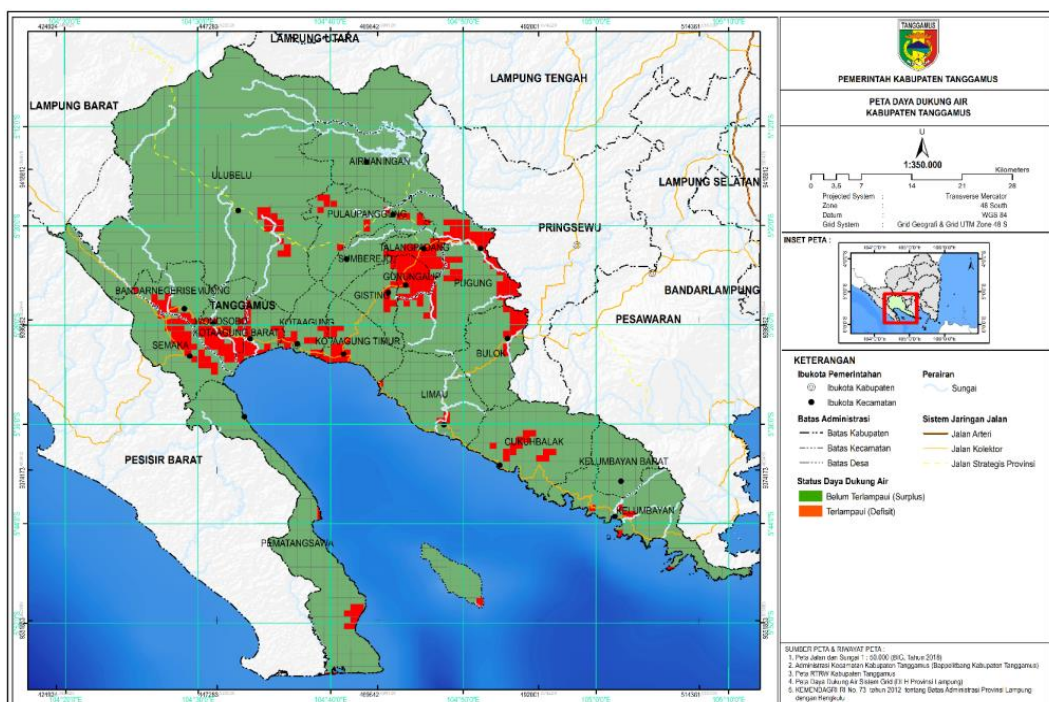
Berdasarkan hasil analisa, kebutuhan pengembangan wilayah Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2031 adalah untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung sebesar 30% dari luas wilayah menjadi prioritas dalam pengalokasiannya. Untuk kawasan budidaya terdiri atas kebutuhan pengembangan perumahan seluas 5.185 Ha dan pengembangan prasarana dan sarana seluas 3.486 Ha.

Tabel II.5. Alokasi Kebutuhan Lahan Tahun 2031

NO	JENIS KEGIATAN	KEBUTUHAN LAHAN (Ha)	KETERANGAN
I	Daya Tampung	116.204	
II	Kebutuhan Pengembangan		
1	Kawasan Lindung	85.664	Dari luas wilayah 30%
2	Kawasan Budidaya		
	- Perumahan	5.185	
	- Prasarana	2.324	Dari luas perumahan 30%
	- Sarana	1.162	Dari luas perumahan 20%
III	Jumlah (1+2)	94.335	
IV	Cadangan (I – (1+2))	21.869	

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Gambar II.9. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

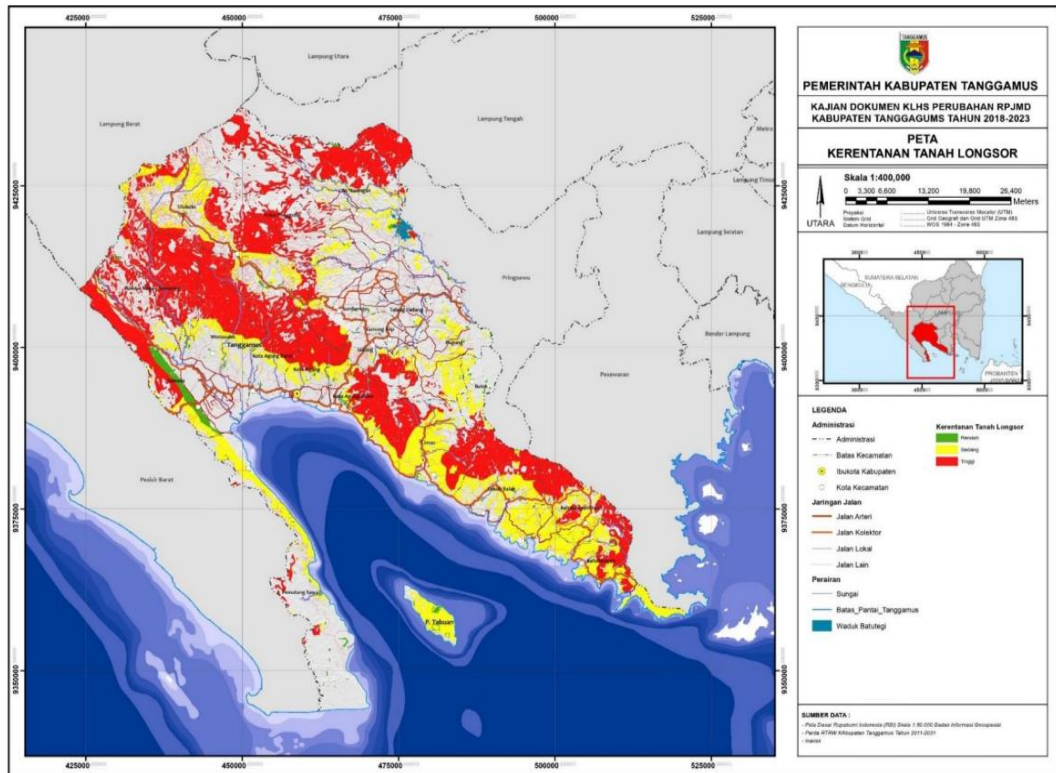
Kondisi fisik Wilayah Kabupaten Tanggamus yang sangat variatif, dimana mempunyai kemiringan yang bervariasi mulai dari 0 hingga > 40 %, banyaknya daerah aliran sungai, terdapatnya beberapa gunung serta terletak di dekat patahan semangka, menyebabkan wilayah

Kabupaten Tanggamus cenderung mempunyai potensi daerah rawan bencana yang cukup besar. Di bawah ini adalah jenis bencana alam dan perkiraan daerah yang terkena dampak bencana tersebut.

2.1.2.1 Bencana Longsor dan Pergerakan Tanah

Merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, dan atau material lain yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Umumnya longsor yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (*debrisavalanches*) dan nendatan (*slumps/rotational slides*). Topogafi alam Kabupaten Tanggamus lebih banyak berkarakter pegunungan dan perbukitan dengan struktur tanah yang rata-rata labil, dan hal ini membawa konsekuensi bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki banyak daerah rawan bencana pergerakan tanah. Kecamatan yang memiliki daerah rawan bencana longsor/pergerakan tanah antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, Ulu Belu, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Bulok, dan Air Nanningan, Gisting.

Gambar II.10. Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus

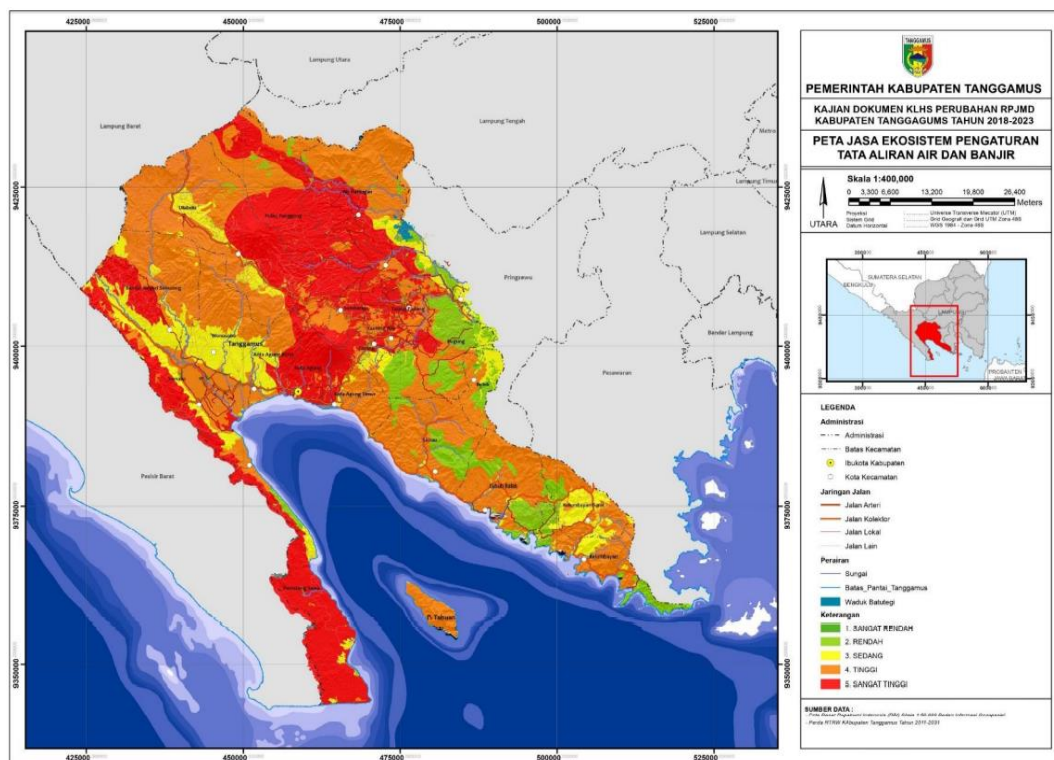


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.2 Bencana Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Tanggamus dari tahun ke tahun makin meningkat, baik luasan areal terdampaknya maupun frekuensi terjadinya. Beberapa penyebab terjadinya peningkatan tersebut antarlain adalah maraknya alih fungsi lahan, berkurangnya luasan ruang terbuka hijau, perilaku tidak tertib masyarakat akibat rendahnya kesadaran masyarakat, pesatnya pembangunan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, dan sebagainya. Daerah potensial banjir di Kabupaten Tanggamus antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Pugung, Talang Padang, Gisting, Cukuh Balak, dan Limau, untuk Tahun 2018 yang sering terjadi banjir yaitu di daerah Semaka dan Bandar Negeri Semuong yang mengakibatkan putusnya jalan Nasional.

Gambar II.11. Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus

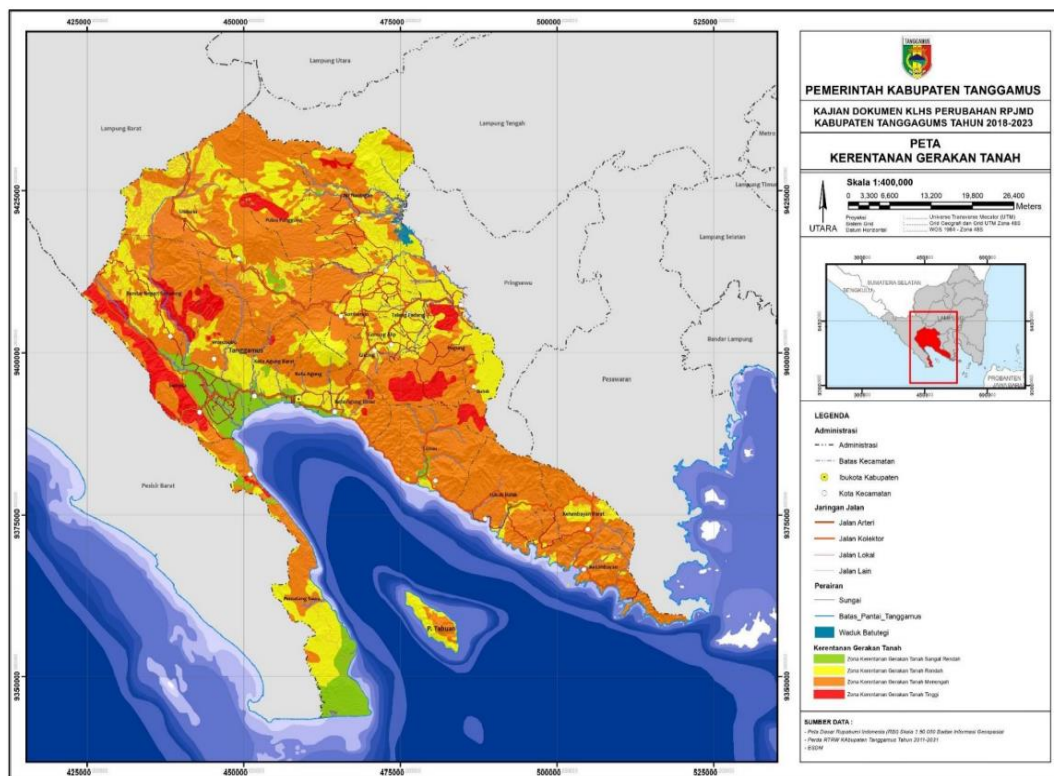


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.3 Gempa Bumi

Gempa bumi disebabkan oleh baik aktivitas kegunung apian (*vulkanik*) maupun akibat dari tumbukan beberapa lempeng bumi, ataupun reruntuhan batuan (*tektonik*). Kabupaten Tanggamus juga tidak luput dari kerawanan gempa bumi karena dilewati oleh patahan/sesar Semangko. Beberapa kecamatan yang terlewati oleh sesar ini adalah Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Semaka, Wonosobo, Pematang Sawa, dan Kota Agung Barat. Daerah lain yang juga potensial akan terjadinya bencana gempa bumi adalah Ulu Belu, Kota Agung Barat, Kota Agung, Limau, Cukuh Balak, Kelumbayan Barat, dan Kelumbayan.

Gambar II.12. Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus



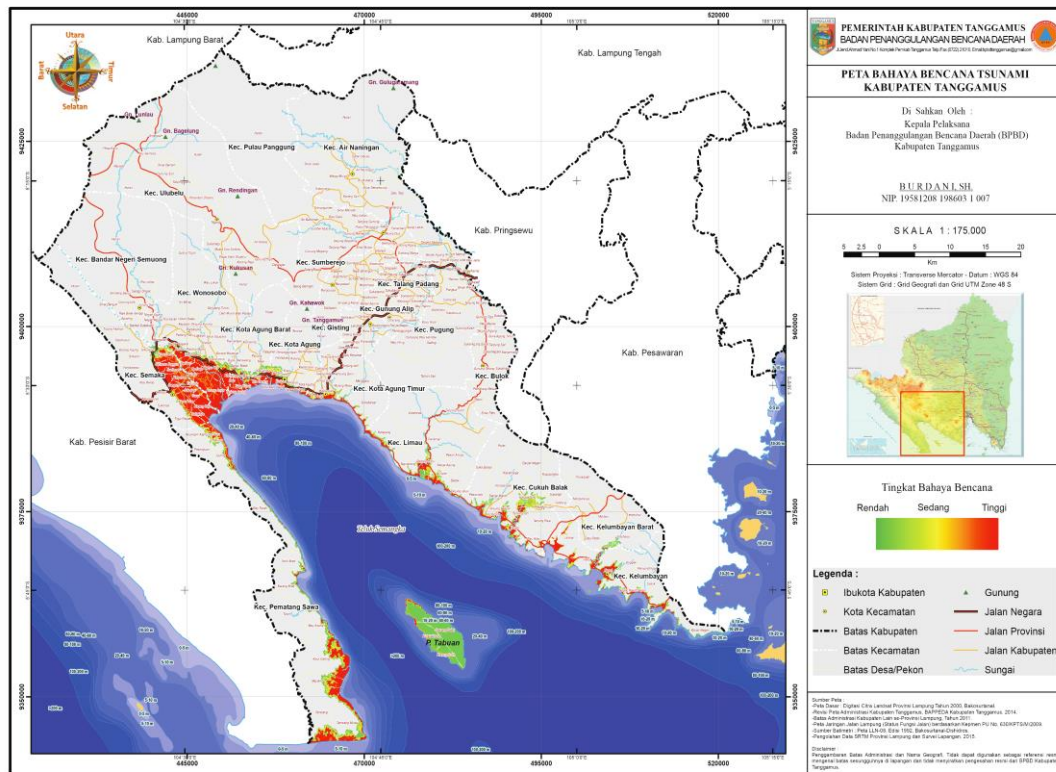
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.4 Bencana Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut dengan periode panjang yang menghantam daratan dan disebabkan adanya gangguan impulsif. Gangguan impulsif ini sendiri dipicu oleh beberapa sebab antarlain seperti gempa bumi dasar laut, dan erupsi vulkanik/gunung meletus, longsor dan hantaman material dengan volume besar ke laut.

Tsunami besar yang pernah menghantam daerah pesisir Kabupaten Tanggamus adalah ketika terjadi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Beberapa daerah yang rawan terjadi bencana tsunami adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, dan Kelumbayan.

Gambar II.13. Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus



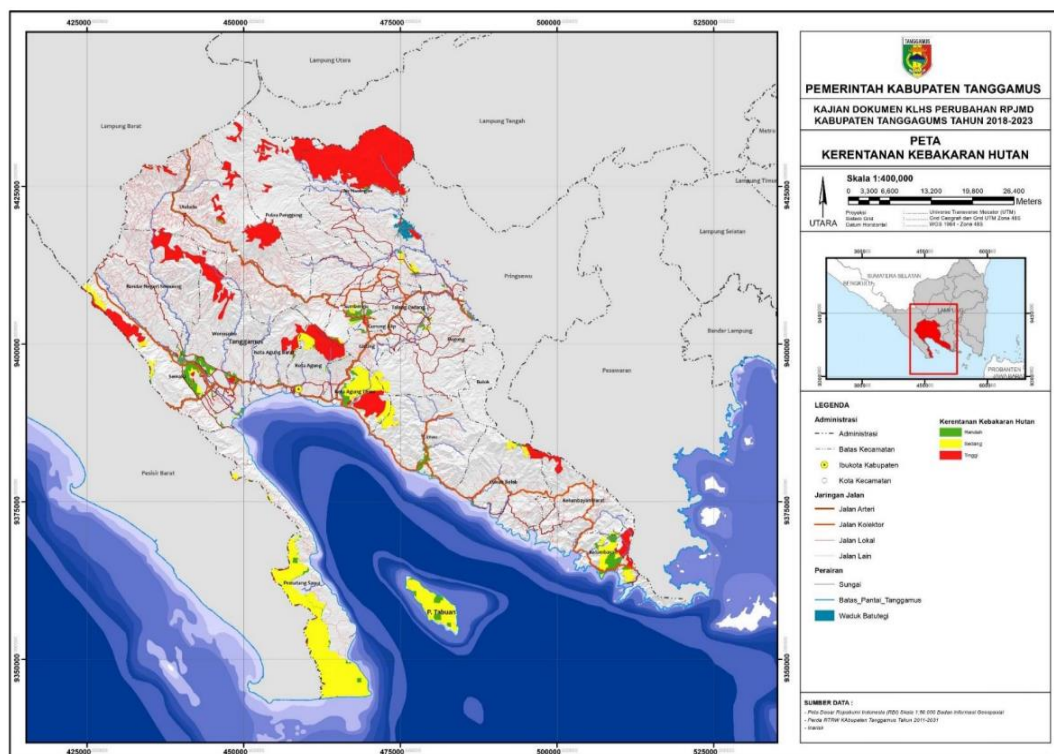
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.5 Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran yang mungkin menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah bencana kebakaran hutan dan bangunan. Untuk kebakaran hutan, potensi pencetus kebakaran paling mungkin disebabkan oleh kebakaran yang berasal dari lahan kritis/bongkor berisi semak/alang-alang yang berada di sekitar hutan. Untuk bencana kebakaran bangunan/rumah, daerah yang paling potensial terjadi kebakaran adalah daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dengan pola tata letak bangunan yang rapat. Hal ini bisa terlihat di kecamatan perkotaan seperti Talang Padang, Kota Agung, dan Gisting, juga di kecamatan-kecamatan padat seperti Wonosobo dan Kota Agung Barat.

Berdasarkan Indeks Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus memiliki kelas kerentanan kebakaran hutan lindung dengan kelas resiko 1 yaitu rendah. Kemudian tingkat kerentanan kebakaran terhadap hutan alam dengan kelas resiko 2 yaitu sedang dan hutan bakau dengan kelas resiko 1 yaitu rendah.

Gambar II.14. Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.6 Bencana Gelombang Tinggi Air Laut

Potensi bencana gelombang tinggi air laut yang terjadi adalah akibat gelombang pasang laut yang menyebabkan beberapa wilayah sekitarnya mengalami gangguan akibat arus pasang laut. Kawasan rawan bencana gelombang pasang laut terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Hanya beberapa kecamatan yang mengalami gelombang pasang laut, yaitu Kecamatan Kelumbayan, Cukuh Balak, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka serta Pematang Sawa.

2.1.3 Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebanyak 659.818 jiwa, dengan luas wilayah daratan 2.855,46 Km² maka kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 adalah 231 jiwa per km².

Tabel II.6. Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS (Km2)	JUMLAH PENDUDUK			KEPADATAN
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Wonosobo	209.63	22,119	20,422	42,541	202.93
2	Semaka	170.90	21,001	19,703	40,704	238.17
3	Bandar Negeri Semuong	98.12	9,291	8,518	17,809	181.50
4	Kota Agung	76.93	25,005	23,581	48,586	631.56
5	Pematang Sawa	185.29	9,785	8,591	18,376	99.17
6	Kota Agung Timur	73.33	11,320	10,920	22,240	303.29
7	Kota Agung Barat	101.30	12,299	11,237	23,536	232.34
8	Pulau Panggung	437.21	21,318	20,222	41,540	95.01
9	Ulu Belu	323.08	23,455	21,685	45,140	139.72
10	Air Nanningan	186.35	16,729	15,461	32,190	172.74
11	Talang Padang	45.13	28,032	26,892	54,924	1,217.02
12	Sumberejo	56.77	19,027	18,130	37,157	654.52
13	Gisting	32.53	22,754	21,609	44,363	1,363.76
14	Gunung Alip	25.68	11,745	11,082	22,827	888.90
15	Pugung	232.40	35,274	32,933	68,207	293.49
16	Bulok	51.68	12,807	12,069	24,876	481.35
17	Cukuh Balak	133.76	13,335	12,269	25,604	191.42
18	Kelumbayan	121.09	6,646	5,963	12,609	104.13
19	Limau	240.61	11,623	10,703	22,326	92.79
20	Kelumbayan Barat	53.67	7,398	6,865	14,263	265.75
	JUMLAH	2,855.46	340,963	318,855	659,818	231.07

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Gisting dengan kepadatan 1.363 jiwa/Km², sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Limau dengan kepadatan sebesar 92 jiwa/Km².

2.1.4 Potensi Sumber Daya

Kebijakan struktur ruang wilayah nasional yang berlaku untuk Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung
- 2) Jalan Nasional : adalah jalan yang membentang di sepanjang pantai barat yang merupakan jalan lintas Barat Sumatera (Pringsewu - Kota Agung - Bengkunt Belimbing).

Sedangkan kebijakan RTRW Provinsi Lampung dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : adalah Wonosobo dengan kegiatan utama pusat pengembangan perdagangan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.
- 3) Sistem jaringan jalan, yaitu :
 - a) Jaringan jalan Kolektor Primer jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari Rantau Tjiang - Kota Agung - Wonosobo – Sanggi.
 - b) Jaringan jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jaringan jalan strategis merupakan jalan yang memiliki status sebagai jalan provinsi terdiri dari Talang Padang - Ulu Belu - Ulu Semong – Suoh - Sukabumi;

Tabel II.7. Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (Km)	FUNGSI	TITIK REFERENSI	
					AWAL RUAS	AKHIR RUAS
1	036	Sukamara - Kuripan	21,777	JKP-3	Sp. Tiga Pasar Sukamara	Sp. Tiga Kuripan
2	044	Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar	25,157	JKP-2	Sp. Teluk Kiluan	Sp. Umbar
3	045	Sp. Umbar - Putih Doh	20,000	JKP-2	Sp. Tiga Umbar	Sp. Tiga Putih Doh
4	046	Putih Doh - Kuripan	11,746	JKP-2	Sp. Tiga Putih Doh	Sp. Tiga Kuripan
5	047	Kuripan - Sp. Kota Agung	22,215	JKP-2	Sp. Tiga Kuripan	Sp. Tiga Kagungan (Jalan Nasional)
6	050	Sp. Blok 9 - Sanggi	20,873	JKP-3	Sp. Tiga Blok 9	Sp. Tiga Sanggi (Jalan Nasional)
7	056	Talang Padang - Ngarip	35,600	JSP	Sp. Tiga Pasar Talang Padang (Jalan Nasional)	Bts. Desa Ngarip
8	057	Ngarip - Ulu Semong	21,500	JSP	Bts. Desa Ngarip	Sp. Tiga Ulu Semong
9	058	Ulu Semong - Sp. Trimulyo	9,660	JSP	Sp. Tiga Ulu Semong	Sp. Tiga Ke Trimulyo
10	060	Tekad - Batu Tegi	8,000	JSP	Sp. Tiga Tekad	Sp. Empat Bendungan Batu Tegi
		JUMLAH	196,528			

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.A/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Lampung

Secara garis besar rencana sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Tanggamus dirumuskan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.8. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

NO	LOKASI	HIRARKI FUNGSI	FUNGSI
1	Kota Agung	PKW	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Minapolitan • Industri
2	Wonosobo	PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perdagangan dan Jasa • Kehutanan • Minapolitan

Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman.

2.1.4.1 Kawasan Hutan Rakyat

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah agraris yang sektor perkonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Saat ini di Kabupaten Tanggamus terdapat penggunaan lahan berupa hutan rakyat, yaitu seluas 35.383 Ha merupakan luasan yang relatif besar dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.

2.1.4.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Selain berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 8 yang menetapkan luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebesar 18.690 Ha. Menindaklanjuti hal tersebut maka untuk menjaga ketersediaan pangan dan mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Tanggamus ditetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.381/22/08/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus. Peraturan tersebut disusun dengan cara melakukan updating dan pemetaan lahan pertanian secara geospasial yang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga ditetapkan luasan LP2B seluas 16.331,65 Ha.

Tabel II.9. Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LP2B (Ha)	LUAS LCP2B (Ha)
1	Air Nangingan	302,54	57,89
2	Bandar Negeri Semuong	653,93	32,51
3	Bulok	796,30	0
4	Cukuh Balak	581,71	0

NO	KECAMATAN	LUAS LP2B (Ha)	LUAS LCP2B (Ha)
5	Gisting	343,02	0
6	Gunung Alip	1.160,57	164,52
7	Kelumbayan	502,84	85,73
8	Kelumbayan Barat	273,78	126,90
9	Kota Agung	431,15	6,76
10	Kota Agung Barat	757,14	0
11	Kota Agung Timur	834,64	0
12	Limau	192,32	2,36
13	Pematang Sawa	636,56	0
14	Pugung	1.850,66	367,19
15	Pulau Pangung	1.097,18	125,35
16	Semaka	1.824,99	358,02
17	Sumberejo	792,50	0
18	Talang Padang	1.029,54	0
19	Ulu Belu	587,60	108,89
20	Wonosobo	1.682,69	0
	Jumlah	16.331,65	1.436,12

Sumber : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.381/22/08/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus

Dalam rangka mengantisipasi perubahan luasan LP2B, ditetapkan juga luasan Lahan Cadangan P2B seluas 1.436,12 Ha.

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi beberapa kawasan yaitu :

a) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 31.671 Hektar terdapat di Kecamatan Pugung, Talang Padang, Gunung Alip, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka dengan komoditas unggulan padi dan jagung.

b) Kawasan Peruntukan Holtikultura

Kawasan peruntukan holtikultura dengan luas kurang lebih 9.957 Hektar berada di Kecamatan Gisting, Sumberejo, Pematang Sawa, Pulau Pangung, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Limau dan Cukuh Balak dengan komoditas unggulan sayur-sayuran, buah manggis, dan buah durian.

c) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Keadaan topografi Kabupaten Tanggamus yang hampir 50% nya adalah wilayah bukit dan pegunungan membuat Kabupaten Tanggamus potensial akan daerah perkebunan. Luas total areal

rencana peruntukan perkebunan di Kabupaten Tanggamus adalah 69.971 Ha tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, yang didominasi oleh Kelapa, Kopi dan Kakao. Komoditas Kelapa, Kopi dan Kakao hampir merata tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Dari ketiga komoditas yang dominan tersebut, komoditas kopi robusta dan kakao menjadi komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif. Luas lahan kopi robusta dan kakao cukup dominan jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Bahkan untuk kopi robusta, Pemerintah Provinsi Lampung akan menjalankan program penanaman bibit kopi robusta dengan teknologi kultur jaringan.

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 102.110,76 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kota Agung di Kabupaten Tanggamus dengan komoditas unggulan Kelapa, Kopi, dan Kakao.

d) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

e) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Tanggamus dibedakan menjadi tiga jenis ternak sesuai dengan ukuran dan jenis ternak yaitu ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Peternakan besar di arahkan di Kecamatan Wonosobo, Gisting, Talang Padang dan Sumberejo. Sedangkan kawasan peternakan kecil diarahkan di Kecamatan Gisting, Pulau Panggung, Talang Padang, Sumberejo, Kota Agung Timur dan Kota Agung Barat. Untuk kawasan peternakan unggas diarahkan di Kecamatan Talang Padang dan Sumberejo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/KPTS/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk beberapa komoditas. Komoditas yang akan dikembangkan di Kabupaten Tanggamus antara lain padi (tanaman pangan), cabai, bawang merah,

bawang putih, pisang dan manga (hortikultura), kopi dan lada (perkebunan) serta kambing (peternakan).

2.1.4.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tanggamus berasal dari 3 (tiga) jenis perikanan, yaitu (1) Perikanan tangkap, yang terdiri dari penangkapan laut dan perairan umum, (2) Perikanan budidaya, yang terdiri dari budidaya air tawar, payau dan laut dan (3) Pengolahan Hasil Perikanan.

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap tahun 2022 yaitu perikanan laut sebanyak 5.703 rumah tangga dan perairan umum sejumlah 212 rumah tangga. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan laut terbanyak adalah Kecamatan Kota Agung dengan 1.389 rumah tangga sedangkan untuk perairan umum yaitu Kecamatan Air Naningan dengan 212 rumah tangga. Produksi perikanan laut pada tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus mencapai 41.263,43 ton mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 27.573,54 ton, sedangkan untuk produksi perairan umum mencapai 367,89 ton yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 318,95 ton. Sebanding dengan jumlah rumah tangga perikananannya, Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan dengan produksi perikanan laut terbanyak dari 10.942,73 ton pada tahun 2021 menjadi 11.141,12 ton pada tahun 2022.

Jumlah rumah tangga perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebanyak 2.808 rumah tangga yang terdiri dari perikanan budidaya tambak sebanyak 205 rumah tangga dan kolam sebanyak 2.603 rumah tangga. Produksi perikanan budidaya sebesar 4.740,63 ton yang terdiri atas produksi perikanan tambak sebesar 2.314 ton dan kolam 2.427 ton. Produksi perikanan budidaya tambak terbesar pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Kota Agung dengan 657,89 ton dan kolam terdapat di Kecamatan Pugung dengan 1.140,45 ton. Sedangkan jumlah perahu/kapal pada tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus menurut jenisnya, yaitu perahu tanpa motor sebanyak 135 perahu, perahu motor tempel sebanyak 1.415 perahu dan kapal motor sebanyak 291 perahu.

Hasil tangkapan di laut terbesar bersumber dari Kecamatan Kota Agung yang merupakan wilayah kawasan minapolitan tangkap. Hasil tangkapan yang didapat antara lain layang, selar, kapas-kapas, kurisi, tongkol, kembang, layur, bentong dan lain-lain. Untuk produksi budidaya perikanan air tawar terbesar di sumbang oleh Kecamatan Pugung, Wonosobo dan Talang Padang yang didominasi oleh ikan mas, lele, nila dan gurame. Budidaya perikanan tambak (payau) terbesar disumbang oleh Kecamatan Limau, Kota Agung Barat, Kelumbayan dan Cukuh Balak yang didominasi oleh udang vaname, nila, bandeng dan jenis udang lainnya. Sedangkan untuk sentra produksi pengolahan hasil perikanan seperti penggaraman, pengasapan, dan jelly ikan terpusat di Kecamatan Limau.

Gambar II.15. Produksi Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2022



Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2023

2.1.4.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat. Wilayah usaha pertambangan terdiri atas peruntukan pertambangan mineral, pertambangan batu bara dan Panas Bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan dikecualikan Kota Agung, daerah perkotaan dan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanggamus.

- b) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu Bara
Kawasan peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Pugung, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat dan Kecamatan Air Nanningan.
- c) Kawasan Peruntukan Pertambangan Panas Bumi
Kawasan peruntukan panas bumi terdapat di Kecamatan Ulu Belu.

Sedangkan wilayah pertambangan rakyat meliputi mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kota Agung dengan potensi pertambangan paling banyak terdapat di Kecamatan Pugung.

Tabel II.10. Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	POTENSI TAMBANG
1	Wonosobo	Pasir, Granit, Silika/Batu Kuarsa, Andesit, Sirtu, Pasir
2	Semaka	Granit, Andesit, Sirtu, Pasir
3	Bandar Negeri Semuong	Emas, Andesit, Pasir, Sirtu
4	Kota Agung	Andesit, Pasir, Sirtu...
5	Pematang Sawa	Andesit, Batu Apung, Batu Bara, Sirtu, Pasir
6	Kota Agung Timur	Zeolit, Andesit, Sirtu, Pasir
7	Kota Agung Barat	Andesit, Pasir, Sirtu
8	Pulau Panggung	Andesit, Batubara
9	Air Nanningan	Batubara, Silika/Batu Kuarsa, Andesit
10	Ulu Belu	Belerang (Panas Bumi), Andesit
11	Talang Padang	Andesit
12	Sumberrejo	Andesit
13	Gisting	Andesit
14	Gunung Alip	Andesit
15	Pugung	Mangan, Batubara, Batu Gamping, Bentonit, Lempung, Silika (Batu Kuarsa), Pasir Kuarsa, Andesit, Marmer, Seng
16	Bulok	Bijih Besi, Andesit
17	Cukuh Balak	Emas, Pasir Besi, Zeolit, Andesit, Pasir, Sirtu
18	Kelumbayan	Batubara, Emas, Galena, Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Sirtu, Pasir
19	Limau	Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Pasir, Sirtu
20	Kelumbayan Barat	Emas, Galena, Batubara, Andesit, Sirtu, Pasir

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

Disamping pengembangan Kawasan Industri Tanggamus, di Kabupaten Tanggamus juga direncanakan akan dibangun Kawasan Industri Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan RI dengan membangun PT. Pindad dan PT. PAL yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan Kawasan Industri Tanggamus atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka telah ditandatangani MoU antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Pj. Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin, M.T. dengan Rektor Unhan Mayjen TNI DR. Yoedhi Swastanto, disamping itu juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait pembangunan Kawasan Industri Pertahanan.

Secara umum pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- a) Kawasan peruntukan industri besar, dikembangkan industri maritim berupa industri perkapalan dan manufaktur yang terdapat di Teluk Semangka berlokasi di Kecamatan Kota Agung Timur, Limau dan Cukuh Balak, industri pertahanan yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan KIT atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27 serta Kecamatan Pulau Panggung untuk industri olahan hasil pertanian.
- b) Kawasan peruntukan industri sedang, dikembangkan di Kecamatan Gisting, Talang Padang, Pulau Panggung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Kota Agung, Sumberejo, Wonosobo, Semaka dan Pematang Sawa.
- c) Kawasan peruntukan industri kecil, dikembangkan di seluruh Kabupaten Tanggamus, dikembangkan dalam bentuk klaster industri.

2.1.4.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kondisi fisik geografis Kabupaten Tanggamus yang bervariasi dengan bentuk daratan berupa bukit dan pegunungan serta berbatasan

langsung dengan Teluk Semangka cukup banyak memberikan potensi wisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus, obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tanggamus cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, dengan jenis wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan. Wisata-wisata yang ada di Kabupaten ini umumnya masih belum diolah secara optimal.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanggamus selain meningkatkan pengelolaan yang ada juga menggali potensi pariwisata yang belum dikelola. Pulau Tabuan salah satu pulau kecil di Kabupaten Tanggamus memiliki prospek pengembangan untuk kegiatan pariwisata.

Tabel II.11. Obyek Wisata Bahari Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Pantai Mulang Sayang	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
2	Pantai Bahari	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
3	Pantai Mutiara	Pekon Betung Kec. Pematang Sawa
4	Pantai Batu Malang	Pekon Telukbrak Kec. Pematang Sawa
5	Pantai Batu Kebo	Pekon Kaur Gading Kec. Pematang Sawa
6	Pantai Cukuh Pandan	Pekon Tampang Tua Kec. Pematang Sawa
7	Pantai Harapan	Pekon Guring Kec. Pematang Sawa
8	Pantai Soumil	Pekon Karang Anyar Kec. Wonosobo
9	Pantai Harapan	Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung Barat
10	Pantai Digul	Pekon Tanjung Agung Kec. Semaka
11	Pantai Karang Teritos	Pekon Talagening Kec. Kota Agung Barat
12	Pantai Terbaya	Pekon Terbaya Kec. Kota Agung
13	Pantai Teba	Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur
14	Pantai Pihabung	Pekon Suka banjar Kec. Kota Agung Timur
15	Pantai Kerta	Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur
16	Pantai Karang Putih	Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak
17	Pantai Teluk Tengor	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
18	Pantai Cumuk	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
19	Pantai Badak Indah	Pekon Badak Kec. Cukuh Balak
20	Pantai Karang Indah	Pekon Ketapang Kec. Limau
21	Pantai Karang Bolong	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
22	Pantai Harapan Jaya	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
23	Pantai Batu Naga	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
24	Pantai Selancar	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
25	Pantai Pasir Putih	Pekon Kiluan Kec. Kelumbayan
26	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
27	Pantai Karang Mulya	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
28	Pantai Harapan	Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan
29	Pantai Batu Suluh	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
30	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
31	Pantai Karang Bebay	Pekon Tengor Kec. Cukuh Balak

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.12. Obyek Wisata Alam Buatan Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Waduk Batu Tegi	Way Harong Kec. Air Nanningan
2	Dam Margo Tirto	Landsbaw Kec Gisting

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.13. Obyek Wisata Tirta Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Air Terjun Way Lalaan	Kampung Baru K Kec. Kota Agung Timur
2	Air Terjun Lembah Pelangi	Suka Maju Kec. Ulu Belu
3	Air Terjun Tirai	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
4	Air Terjun Jarum	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
5	Air Terjun Ratu	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
6	Air Terjun Beranak	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
7	Air Terjun Batu Lapis	Talang Beringin Kec. Pulau Panggung
8	Air Terjun Curup	Air Bakoman Kec. Pulau Panggung
9	Air Terjun Talang Ogan	Talang Ogan Kec. Sumberjo
10	Air Terjun Jeram Semaka TNBBS	Kec.Semaka
11	Air Terjun Curup Way Kerap	Way Kerap Kec. Semaka
12	Air Terjun Mak Kunyana	Teratas Kec. Kota Agung
13	Air Terjun Lamuran	Teratas Kec. Kota Agung
14	Air Terjun Batu Kramat Sari	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
15	Air Terjun Cihandak	Kec. Air Nanningan
16	Air Terjun Tirta Rima	Margoyoso Kec. Sumberjo
17	Air Terjun Kelahang	Taman Sari Kec. Limau
18	Air Terjun Asmara	Datarajan Kec. Ulu Belu

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.14. Obyek Wisata Alam Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Ekowisata Tampang Blimbing	Kec. Pematang Sawa
2	TNBBS	Sedayu Kec. Semaka
3	Lembah Sanggi	Sanggi Kec. Semaka
4	Gua Walet Putih	Kec. Kelumbayan
5	Karang Bebay	Kec. Cukuh Balak
6	Pulau Kelapa (Kiluan)	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
7	Pulau Tabuan	Tabuan Kec. Cukuh Balak
8	Eko Wisata Cikal Negri	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
9	Base Camp Sono Keling	Sidokaton Kec. Gisting
10	Danau Hijau	Muara Dua Kec. Ulu Belu
11	Sumber Air Panas Ulu Belu	Muara Dua Kec. Ulu Belu
12	Pulau Tanjungan	Air Nanningan Kec. Air Nanningan
13	Puncak Batu Kapal	Way Harong Kec. Air Nanningan
14	Tanjung Harapan	Way Harong Kec. Air Nanningan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.15. Obyek Wisata Kolam Renang Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KOLAM RENANG	ALAMAT
1	Villa Q	Gisting Bawah Kec. Gisting
2	Buterfly	Gisting Atas Kec. Gisting
3	Hosana	Gisting Bawah Kec. Gisting
4	VIP	Gisting Bawah Kec. Gisting
5	Villa Batu Kramat	Batu Kramat Kec. Kota Agung Timur
6	Kodim	Waysem Kec. Kota Agung Timur
7	Suharto	Pasar Madang Kec. Kota Agung

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.16. Obyek Wisata Budaya Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	PEKON	KECAMATAN
1	Makam Gunung Putri	Tiuh Memon	Pugung
2	Makam Ratu Sangkhira	Tiuh Memon	Pugung
3	Gua Semedi	Penyandingan	Kelumbayan
4	Makam Kuno	Padang Manis	Wonosobo
5	Gunung Dalom	Karangbrak	Pematang Sawa

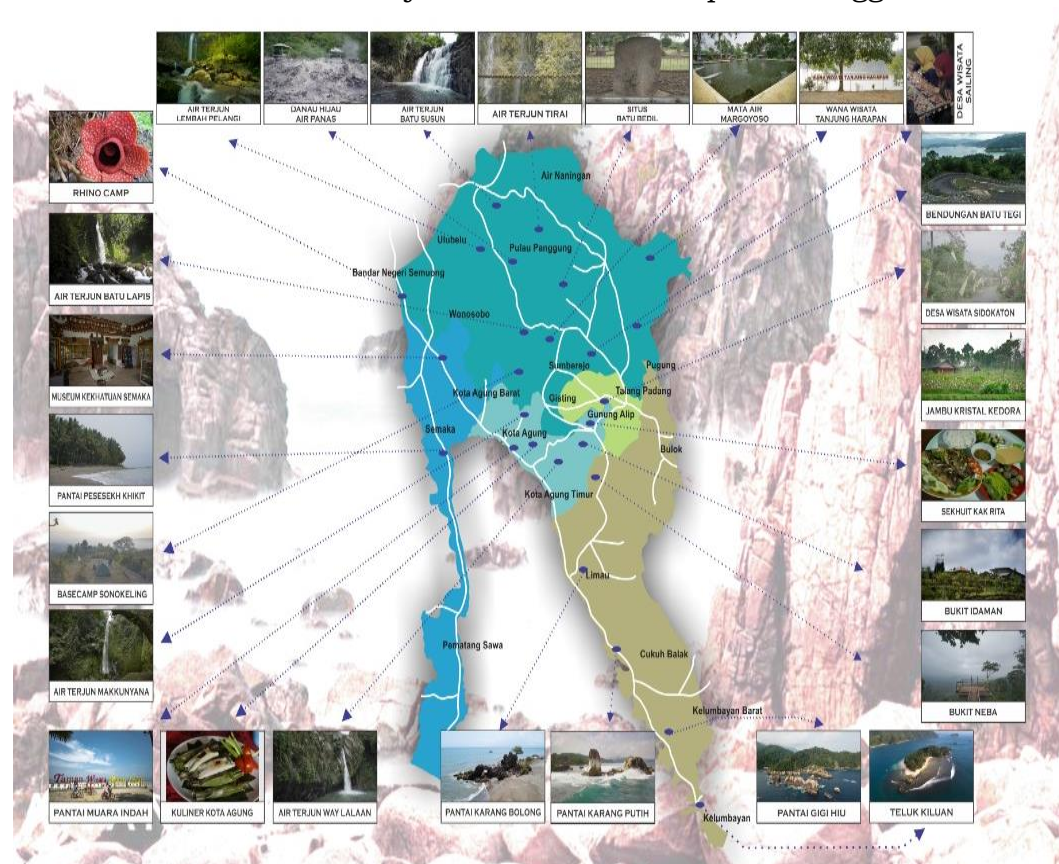
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.17. Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah Kabupaten Tanggamus

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	Megalitik Batu Gajah	Budaya Hindu Budha	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
2	Arca Nandi	Hindu	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
3	Situs Batu Tulis	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
4	Prasasti Batu Bedil	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
5	Meriam Belanda	Peninggalan Belanda	Negeri Kelumbayan	Kelumbayan
6	Pusaka Kuno	-	N. Kelumbayan	Kelumbayan
7	Keris Singa Khalang	-	Pekon Unggak	Kelumbayan
8	Tugu Pidato Presiden RI	-	Kelurahan Kuripan	Kota Agung
9	Japan	Japan	Pantai Laut	Kota Agung
10	Barang Pusaka	Kerajaan Pajajaran	Pajajaran	Kota Agung Barat
11	Taboh Adat Beban	Adat	Tala Gening	Kota Agung Barat
12	Barang-Barang Kuno	Warisan	Sanggi Unggak	Bandar Negeri Semuong

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Gambar II.17. Peta Pola Perjalanan Wisata Kabupaten Tanggamus



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.4.7 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Tanggamus dibagi kedalam kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

a) Permukiman Perkotaan

Mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Tanggamus maka Kecamatan Kota Agung, Wonosobo, Gisting, dan Talang Padang akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan. Kawasan ini memiliki ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai, beberapa sektor perkotaan terkonsentrasi di keempat kecamatan tersebut. Secara eksisting, jumlah penduduk di Kawasan perkotaan mencapai 184.774 jiwa. Untuk perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Talang Padang dan Gisting. Sedangkan Kecamatan Wonosobo, diarahkan untuk perumahan dengan kepadatan menengah.

Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dikembangkan di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

b) Permukiman Pedesaan

Pemukiman pedesaan merupakan permukiman yang cukup dominan berada di Kabupaten Tanggamus. Secara umum kawasan permukiman perdesaan ini memiliki karakter, sebagian besar penduduk bekerja sektor pertanian, kondisi perumahan yang cukup renggang, distribusi mengelompok namun tersebar dan memiliki keterbatasan pelayanan sarana dan prasarana. Secara eksisting masyarakat pedesaan di Kabupaten Tanggamus mencapai 399.901 jiwa. Kawasan perumahan pedesaan merupakan perumahan dengan kepadatan rendah.

Kawasan peruntukan pemukiman pedesaan dikembangkan menyebar pada wilayah Kabupaten Tanggamus, terutama pada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lokal.

2.1.4.8 Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya

Kawasan budidaya peruntukan lainnya di Kabupaten Tanggamus meliputi peruntukan pertahanan dan keamanan, kawasan pengembangan sektor informal, kawasan pesisir, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), dan ruang dalam bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

1. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Kota Agung Timur dan Kota Agung;
2. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa dan Kelumbayan;
3. Komando Rayon Militer (Koramil) dan menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus; dan
4. Kantor Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
5. Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.

b) Kawasan Pengembangan Sektor Informal

Kawasan pengembangan sektor informal diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi:

1. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tanggamus diarahkan di pusat perkotaan Kota Agung; dan
2. Kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan di Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

c) Kawasan Pesisir

Pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Peluang tersebut adalah dalam keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat yang didukung oleh potensi masing-masing sumber daya, baik barang maupun jasa. Di sisi lain perpaduan kewilayahan ini juga akan membuka peluang

untuk timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah pengembangan ini. Dalam rangka untuk menjalankan tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Tanggamus pada umumnya dan pembangunan kawasan pesisir dan laut pada khususnya, maka diperlukan strategi pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Tanggamus yang matang dan terarah dengan melibatkan peran serta semua stakeholder. Strategi ini akan memberikan arah dan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan yang lebih terinci seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi di masa mendatang.

Visi yang dikembangkan dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus adalah “Terwujudnya Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus yang Bersih, Indah, Aman, Tertata dan Produktif yang Dikelola secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat”

d) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

e) Pengembangan Ruang Dalam Bumi

Rencana ruang dalam bumi meliputi :

1. Wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/ eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau

- kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;
2. Wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan;
 3. Wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. Pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat dua jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel II.18. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,511,112.02	41.49	4,413,190.50	41.32	4,323,364.55	39.56	4,393,393.00	38.59
B Pertambangan dan Penggalian	768,753.82	7.07	787,976.37	7.38	740,068.63	6.77	705,894.24	6.20
C Industri Pengolahan	715,748.43	6.58	690,048.44	6.46	721,039.93	6.60	729,253.00	6.41
D Pengadaan Listrik dan Gas	8,926.88	0.08	9,277.40	0.09	8,352.37	0.08	8,930.24	0.08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,308.77	0.11	13,428.81	0.13	13,938.40	0.13	14,564.86	0.13
F Konstruksi	773,853.57	7.12	754,423.98	7.06	826,812.41	7.57	863,128.67	7.58
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,176,374.28	10.82	1,079,900.49	10.11	1,241,874.47	11.36	1,409,706.02	12.38
H Transportasi dan Pergudangan	567,141.63	5.22	538,508.85	5.04	569,373.49	5.21	694,036.12	6.10
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194,636.24	1.79	182,411.28	1.71	179,806.00	1.65	205,218.04	1.80
J Informasi dan Komunikasi	419,888.37	3.86	455,741.01	4.27	485,999.28	4.45	487,939.97	4.29
K Jasa Keuangan dan Asuransi	196,404.88	1.81	202,299.84	1.89	207,841.03	1.90	207,416.04	1.82
L Real Estate	330,095.29	3.04	319,097.31	2.99	324,276.66	2.97	336,513.74	2.96

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
M, N Jasa Perusahaan	8,608.21	0.08	8,494.93	0.08	8,536.83	0.08	10,062.75	0.09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452,089.48	4.16	469,695.44	4.40	491,260.42	4.49	485,631.64	4.27
P Jasa Pendidikan	465,073.41	4.28	476,849.83	4.46	484,545.08	4.43	498,133.53	4.38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,846.63	1.28	153,550.40	1.44	179,821.04	1.65	179,529.22	1.58
R,S,T,U Jasa Lainnya	132,240.36	1.22	124,925.82	1.17	122,313.38	1.12	154,984.40	1.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10,872,102.25	100.00	10,679,820.71	100.00	10,929,223.96	100.00	11,384,335.47	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 mencapai Rp.11,384,335.47 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.10,929,223.96 hal ini masih dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19*, dari distribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 38.59% sedangkan distribusi yang paling rendah berasal dari Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,08%.

Tabel II.19. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,507,735.22	41.79	6,413,053.04	41.46	6,482,994.83	39.68	7,051,238.40	38.91
B Pertambangan dan Penggalian	1,064,145.83	6.83	1,041,414.04	6.73	1,159,436.04	7.10	1,361,696.54	7.51
C Industri Pengolahan	1,077,214.02	6.92	1,074,562.40	6.95	1,155,924.69	7.08	1,213,826.50	6.70
D Pengadaan Listrik dan Gas	12,447.54	0.08	12,828.44	0.08	11,054.47	0.07	11,914.96	0.07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,810.46	0.11	20,385.38	0.13	21,334.17	0.13	22,654.36	0.12
F Konstruksi	1,066,144.35	6.85	1,043,498.00	6.75	1,179,800.10	7.22	1,288,864.13	7.11
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,577,114.94	10.13	1,500,563.24	9.70	1,748,986.57	10.71	2,105,148.15	11.62
H Transportasi dan Pergudangan	798,316.63	5.13	795,881.91	5.15	856,768.66	5.24	1,141,965.85	6.30
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	308,703.44	1.98	296,631.06	1.92	294,130.96	1.80	340,256.48	1.88
J Informasi dan Komunikasi	581,222.98	3.73	636,181.19	4.11	659,999.55	4.04	666,324.71	3.68
K Jasa Keuangan dan Asuransi	296,737.07	1.91	304,896.73	1.97	328,465.17	2.01	343,986.28	1.90
L Real Estate	479,895.30	3.08	458,004.33	2.96	468,936.00	2.87	498,292.79	2.75
M, N Jasa Perusahaan	13,190.21	0.08	13,444.75	0.09	13,632.75	0.08	16,682.50	0.09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734,802.25	4.72	768,861.67	4.97	802,385.93	4.91	809,123.72	4.46
P Jasa Pendidikan	646,332.95	4.15	685,154.42	4.43	710,239.95	4.35	754,850.63	4.16

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201,249.41	1.29	223,503.53	1.44	266,854.49	1.63	266,701.25	1.47
R,S,T,U Jasa Lainnya	187,994.15	1.21	178,791.73	1.16	176,230.14	1.08	230,232.17	1.27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15,571,056.75	100.00	15,467,655.86	100.00	16,337,174.45	100.00	18,123,759.42	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 mencapai Rp.18,123,759.42 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.16,337,174.45 peningkatan yang tidak terlalu signifikan tersebut masih disebabkan dari dampak pandemi *Covid-19* yang mulai melanda dunia di awal tahun 2020. Distribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 38.91 % sedangkan distribusi yang paling rendah berasal dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,07%.

Tabel II.20. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022

PDRB PENGELUARAN (SERI 2010)	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,952,881.98	70.25	11,030,427.90	71.31	11,614,319.16	71.09	12,980,346.88	71.62
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	250,712.66	1.61	243,967.49	1.58	260,377.63	1.59	276,520.64	1.53
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,665,140.96	10.68	1,650,484.14	10.67	1,667,846.53	10.21	1,615,877.12	8.92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,981,789.18	25.54	3,853,351.27	24.91	4,104,179.23	25.12	4,528,387.29	24.99
Perubahan Inventori	3,722.11	0.02	52,072.09	0.34	39,040.94	0.24	50,184.44	0.28
Net Ekspor Barang dan Jasa	1,263,315.89	(8.10)	(1,362,647.04)	(8.81)	(1,348,589.05)	(8.25)	(1,327,556.95)	(7.32)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15,590,931.00	100.00	15,467,655.86	100.00	16,337,174.45	100.00	18,123,759.42	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran pada tahun 2022 mencapai Rp.18,123,759.42 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.16,337,174.45 peningkatan yang tidak terlalu signifikan tersebut juga masih adanya imbas dari pandemi *Covid-19*. Distribusi Pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 71.62%

sedangkan distribusi yang paling rendah berasal dari Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -7.32%.

Tabel II.21. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022

PDRB PENGELUARAN (SERI 2010)	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,395,773.61	68.03	7,293,654.46	68.29	7,435,176.00	68.03	7,807,568.24	68.58
Pengeluaran Konsumsi LNPR	162,451.87	1.49	155,859.69	1.46	162,942.50	1.49	165,022.75	1.45
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,052,487.01	9.68	1,037,071.18	9.71	1,040,330.40	9.52	992,810.60	8.72
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,839,154.57	26.11	2,668,717.68	24.99	2,769,935.27	25.34	2,852,386.43	25.06
Perubahan Inventori	(36,549.64)	(0.34)	18,028.83	0.17	9,437.50	0.09	8,598.02	0.08
Net Ekspor Barang dan Jasa	(541,215.17)	(4.98)	(493,511.14)	(4.62)	(488,597.71)	(4.47)	(442,050.57)	(3.88)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10,872,102.25	100.00	10,679,820.71	100.00	10,929,223.96	100.00	11,384,335.47	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagai akibat adanya pandemi *Covid-19* pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran pada tahun 2021 sebesar Rp.10,929,223.96 mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.11,384,335.47. Distribusi pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu 68.58% sedangkan distribusi pengeluaran yang paling rendah berasal dari Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -3.88%.

Tabel II.22. Perkembangan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA	2019		2020		2021		2022	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.79	41.49	41.46	41.32	39.68	39.56	38.91	38.59
B Pertambangan dan Penggalian	6.83	7.07	6.73	7.38	7.10	6.77	7.51	6.20
C Industri Pengolahan	6.92	6.58	6.95	6.46	7.08	6.60	6.70	6.41
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13
F Konstruksi	6.85	7.12	6.75	7.06	7.22	7.57	7.11	7.58
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.13	10.82	9.70	10.11	10.71	11.36	11.62	12.38

LAPANGAN USAHA	2019		2020		2021		2022	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%
H Transportasi dan Pergudangan	5.13	5.22	5.15	5.04	5.24	5.21	6.30	6.10
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.98	1.79	1.92	1.71	1.80	1.65	1.88	1.80
J Informasi dan Komunikasi	3.73	3.86	4.11	4.27	4.04	4.45	3.68	4.29
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.91	1.81	1.97	1.89	2.01	1.90	1.90	1.82
L Real Estate	3.08	3.04	2.96	2.99	2.87	2.97	2.75	2.96
M, N Jasa Perusahaan	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.72	4.16	4.97	4.40	4.91	4.49	4.46	4.27
P Jasa Pendidikan	4.15	4.28	4.43	4.46	4.35	4.43	4.16	4.38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.29	1.28	1.44	1.44	1.63	1.65	1.47	1.58
R,S,T,U Jasa Lainnya	1.21	1.22	1.16	1.17	1.08	1.12	1.27	1.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Perkembangan distribusi sektor PDRB dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif pada beberapa sektor sedangkan pada beberapa sektor yang lain mengalami perubahan yang tidak signifikan.

Tabel II.23. Laju Pertumbuhan Riel PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN			
	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.03	(2.17)	(2.04)	1.62
B Pertambangan dan Penggalian	5.61	2.50	(6.08)	(4.62)
C Industri Pengolahan	5.05	(3.59)	4.49	1.14
D Pengadaan Listrik dan Gas	11.59	3.93	(9.97)	6.92
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.36	9.10	3.79	4.49
F Konstruksi	9.62	(2.51)	9.60	4.39
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.64	(8.20)	15.00	13.51
H Transportasi dan Pergudangan	9.48	(5.05)	5.73	21.89
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.04	(6.28)	(1.43)	14.13
J Informasi dan Komunikasi	9.68	8.54	6.64	0.40
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3.61	3.00	2.74	(0.20)
L Real Estate	6.66	(3.33)	1.62	3.77
M, N Jasa Perusahaan	3.20	(1.32)	0.49	17.87
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.21	3.89	4.59	(1.15)
P Jasa Pendidikan	9.86	2.53	1.61	2.80
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.60	10.59	17.11	(0.16)
R,S,T,U Jasa Lainnya	9.43	(5.53)	(2.09)	26.71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.02	(1.77)	2.34	4.16

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.24. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2022

PDRB PENGELUARAN (SERI 2010)	PERTUMBUHAN			
	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.34	(1.38)	1.94	5.01
Pengeluaran Konsumsi LNPR	9.90	(4.06)	4.54	1.28
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.96	(1.46)	0.31	(4.57)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.15	(6.00)	3.79	2.98
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.02	(1.77)	2.34	4.16

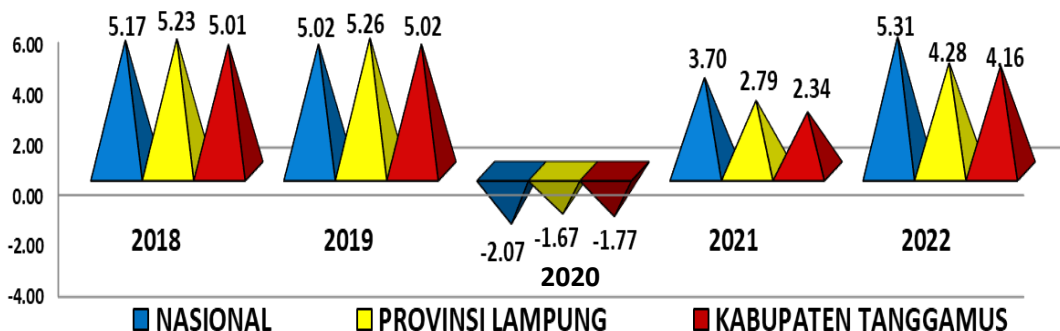
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,77% selanjutnya menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 dengan berhasil tumbuh sebesar 2,34% dan kembali menunjukkan peningkatan dengan tumbuh sebesar 4,16% pada tahun 2022.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi *Covid-19* mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, sejak pertama kali pandemi *Covid-19* ditemukan di Provinsi Wuhan-Tiongkok, Bank Dunia mencatatkan setidaknya hanya terdapat 3 negara yang aman dari kontraksi ekonomi. Namun demikian, pandemi yang belum mereda menjadi momok yang menyebabkan semua perekonomian negara tumbang, tidak terkecuali di Indonesia dan tingkatan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gambar II.18. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



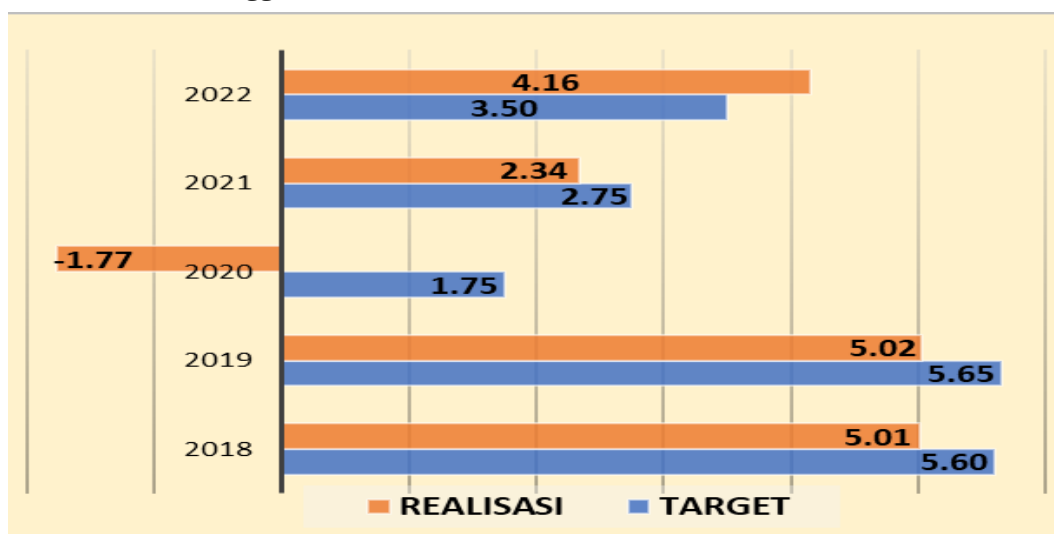
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,02%. Namun akibat adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,77%, hal ini selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang juga mengalami kontraksi pada angka -1,67% dan Nasional pada angka -2,07%.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus mengalami perbaikan menjadi 2,34% dan terus menunjukkan kinerja yang membaik dengan tumbuh 4,16% pada tahun 2022. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,28% dan 5,31%.

Fenomena penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus sangat mempengaruhi kinerja berbagai sektor lapangan usaha. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas para pelaku ekonomi yakni rumah tangga, perusahaan dan pemerintah melalui regulasi pemerintah daerah sebagai upaya preventif dan kekhawatiran para pelaku ekonomi akan penularan *Covid-19*.

Gambar II.19. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren positif dengan berhasil tumbuh diatas angka 5% meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Namun sejak tahun 2020, pandemi *Covid-19* menimbulkan dampak yang signifikan sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Ekonomi Kabupaten Tanggamus tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,77%, jauh lebih rendah dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,02%, sedangkan pada tahun 2021 berhasil bangkit dengan tumbuh positif sebesar 2,34% meskipun belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2,75% Selanjutnya pada tahun 2022 berhasil tumbuh 4,6% dengan melampaui target yang telah ditentukan sebesar 3,50%.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Selama tahun 2016 tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus mencapai 2,51%, angka ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang mencapai 3,71%. Inflasi di Kabupaten Tanggamus sepanjang tahun 2016 berfluktuasi, hal ini terjadi karena terdapat beberapa indeks komoditas disektor makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, pendidikan, rekreasi, dan olah raga, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami kenaikan. Dengan tingkat inflasi sebesar 2,51% ditahun 2016, maka tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Bandar Lampung sebesar 2,75% dan inflasi Nasional sebesar 3,02%. Sedangkan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, BPS Kabupaten Tanggamus tidak melakukan perhitungan inflasi.

Tabel II.25. Perkembangan Nilai Inflasi Tahun 2016-2022

TAHUN	INDONESIA	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	METRO	TANGGAMUS
2016	3.02	2.78	2.75	2.92	2.51
2017	3.61	3.02	3.14	2.32	-
2018	3.13	2.73	2.92	1.64	-
2019	2.72	3.44	3.53	2.97	-
2020	1.68	2.00	1.93	2.53	-
2021	1.87	2.19	2.13	2.74	-
2022	5.51	5.51	5.52	5.37	-

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Keterangan : Mulai Tahun 2017 BPS tidak lagi melakukan perhitungan inflasi di Kabupaten Tanggamus.

Untuk melihat kondisi inflasi yang ada maka capaian inflasi Provinsi Lampung dijadikan pedoman dalam penentuan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selama kurun waktu 2016-2022, tingkat inflasi di Provinsi Lampung yang paling baik terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,00% sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 5,51%.

2.2.1.4 PDRB Perkapita

PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel II.26. PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

NO.	WILAYAH	PDRB PER KAPITA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Tanggamus	24.535.780	26.034.307	25.515.871	25.621.173	27.758.945
2	Provinsi Lampung	39.862.790	42.172.315	39.346.531	41.208.386	45.129.335

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanggamus Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami kenaikan, pada tahun 2018 PDRB perkapita tercatat sebesar Rp.24.535.780,- terus meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi Rp.26.034.307,-. Pada tahun 2020, PDRB perkapita Kabupaten Tanggamus mengalami penurunan -1,99% menjadi Rp.25.515.871,- yang diakibatkan karena pandemi *Covid-19*, namun berhasil bangkit dengan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp.25.621.173,- dan tahun 2022 kembali mengalami perbaikan menjadi Rp.27.758945 atau meningkat sebesar 8,34%.

Tabel II.27. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	TAHUN	PDRB ADHB	PERTUMBUHAN
1	2016	21,241,150.00	9.52
2	2017	22,868,022.00	7.66
3	2018	24,535,780.00	7.29
4	2019	26,034,307.00	6.11
5	2020	25,515,871.00	-1.99
6	2021	25,621,173.00	0.41
7	2022	27,758,945.00	8.34

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.5 Indeks Gini

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gini rasio mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu daerah. Pendapatan dikatakan merata jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gininya adalah sama dengan nol (Gini Ratio = 0). Rasio Gini adalah rasio tentang distribusi pendapatan dengan angka kisaran 0 sampai dengan 1. Jika Gini rasio mendekati 0 berarti distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut adalah arti nilai dari besaran gini rasio:

- Gini Rasio < 0.3 : artinya ketimpangan rendah.
- $0.3 \leq$ Gini Rasio ≤ 0.5 : artinya ketimpangan sedang.
- Gini Rasio > 0.5 : artinya ketimpangan tinggi.

Tabel II.28. Perkembangan Nilai Gini Rasio Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022

NO	WILAYAH	GINI RATIO				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pesawaran	0.316	0.310	0.288	0.299	0.251
2	Lampung Selatan	0.353	0.331	0.299	0.268	0.260
3	Tanggamus	0.289	0.314	0.293	0.265	0.261
4	Tulang Bawang Barat	0.316	0.316	0.272	0.282	0.261
5	Pringsewu	0.318	0.295	0.310	0.277	0.272

NO	WILAYAH	GINI RATIO				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Mesuji	0.290	0.286	0.308	0.272	0.280
7	Way Kanan	0.307	0.299	0.311	0.283	0.283
8	Lampung Timur	0.346	0.302	0.315	0.284	0.283
9	Lampung Utara	0.311	0.309	0.301	0.275	0.284
10	Lampung Barat	0.314	0.296	0.295	0.281	0.284
11	Tulang Bawang	0.352	0.322	0.279	0.292	0.287
12	Pesisir Barat	-	0.330	0.281	0.322	0.290
13	Lampung Tengah	0.315	0.308	0.304	0.291	0.299
14	Metro	0.334	0.342	0.299	0.309	0.299
	Provinsi Lampung	0.346	0.329	0.327	0.323	0.314
15	Bandar Lampung	0.342	0.316	0.359	0.344	0.369
	Indonesia	0.384	0.380	0.385	0.381	0.381

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Perkembangan gini rasio Kabupaten Tanggamus terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 gini rasio Kabupaten Tanggamus sebesar 0,261 yang merupakan ketimpangan rendah, pencapaian ini merupakan terbaik ketiga di Provinsi Lampung yang rata-rata 0,314 dan juga lebih baik dari pencapaian Nasional 0,381.

2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Regional

Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan antar wilayah/regional, umumnya digunakan Indeks Ketimpangan Regional. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk masing-masing daerah. Besarnya Indeks Ketimpangan Regional antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 0, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam katagori rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah cenderung merata. Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 1, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam kategori tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah cenderung tidak merata. Tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masih termasuk kategori ketimpangan rendah.

Tabel II.29. Tingkat Ketimpangan Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019

NO	WILAYAH	2019
1	Kabupaten Lampung Barat	0,45
2	Kabupaten Tanggamus	0,58
3	Kabupaten Lampung Selatan	0,04
4	Kabupaten Lampung Timur	0,50
5	Kabupaten Lampung Tengah	1,93
6	Kabupaten Lampung Utara	0,49
7	Kabupaten Way Kanan	0,34
8	Kabupaten Tulang Bawang	0,25
9	Kabupaten Pesawaran	0,15
10	Kabupaten Pringsewu	0,40
11	Kabupaten Mesuji	0,16
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,02
13	Kabupaten Pesisir Barat	0,02
14	Kota Bandar Lampung	0,53
15	Kota Metro	0,09

Sumber : BPS, Data Diolah Hasil Analisis Kajian Resha Moniyana dan Ahmad Dhea Pratama, Universitas Lampung, 2021

2.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis karena sudah ada sejak peradaban kuno, karena sifatnya sangat dinamis dan memerlukan penanganan dengan pendekatan inklusif untuk mencapai kesamaan persepsi diantara *stakeholder*. Demikian juga persoalan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dimana jumlah penduduk miskin yang tersebar di 20 kecamatan dengan tingkat kemiskinan bervariasi sehingga memerlukan strategi tersendiri dalam upaya penanganannya. Pendekatan yang bisa digunakan hendaknya bersifat *local strategys* melalui pelibatan *local stakeholder* sehingga permasalahan kemiskinan ini dapat ditanggulangi bersama.

Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebanyak 67.430 jiwa, angka tersebut menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 71.890 jiwa.

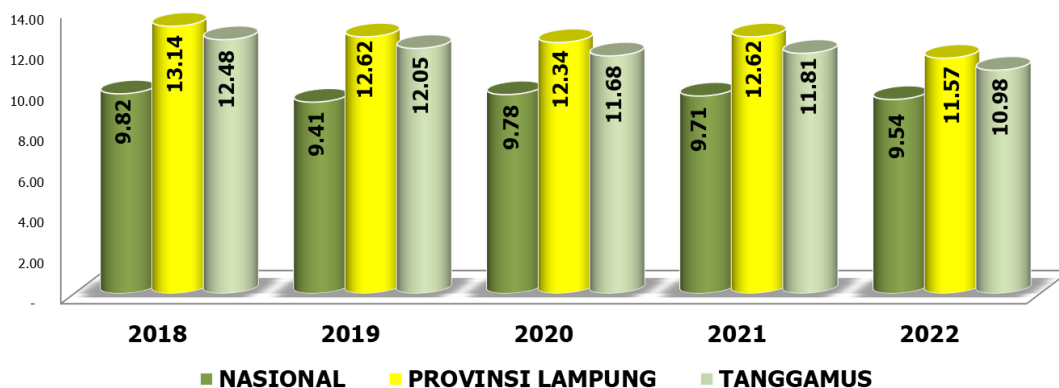
Tabel II.30. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Metro	15.06	14.49	14.31	15.32	13.68
2	Mesuji	15.01	14.94	14.72	15.24	13.88
3	Tulang Bawang Barat	21.93	21.14	20.29	23.03	20.72
4	Pesisir Barat	22.98	22.38	22.24	23.23	21.85
5	Lampung Barat	40.62	39.05	38.12	39.36	36.20
6	Pringsewu	41.64	40.55	40.12	41.04	38.18
7	Tulang Bawang	43.10	42.06	42.43	44.53	39.19
8	Way Kanan	60.16	58.72	58.41	59.89	54.28
9	Pesawaran	70.14	67.36	66.04	68.31	63.17
10	Tanggamus	73.77	71.90	70.37	71.89	67.43
11	Bandar Lampung	93.04	91.24	93.74	98.76	90.51
12	Lampung Utara	128.02	122.65	119.35	121.91	114.67
13	Lampung Selatan	148.54	144.44	143.33	145.85	136.21
14	Lampung Tengah	160.12	153.84	152.28	155.77	143.34
15	Lampung Timur	162.94	158.90	153.57	159.79	149.12
	Provinsi Lampung	1,097.05	1,063.66	1,049.32	1,083.92	1,002.43
	Indonesia	25,670.00	24,780.00	27,550.00	26,500.00	26,160.00

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 sebesar 12,48% angka tersebut terus menunjukkan perbaikan pada tahun 2022 yang hanya 10,98%.

Gambar II.20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Dengan tingkat kemiskinan 10,98% pada tahun 2022 maka saat ini Kabupaten Tanggamus berada pada peringkat kedelapan dari lima belas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

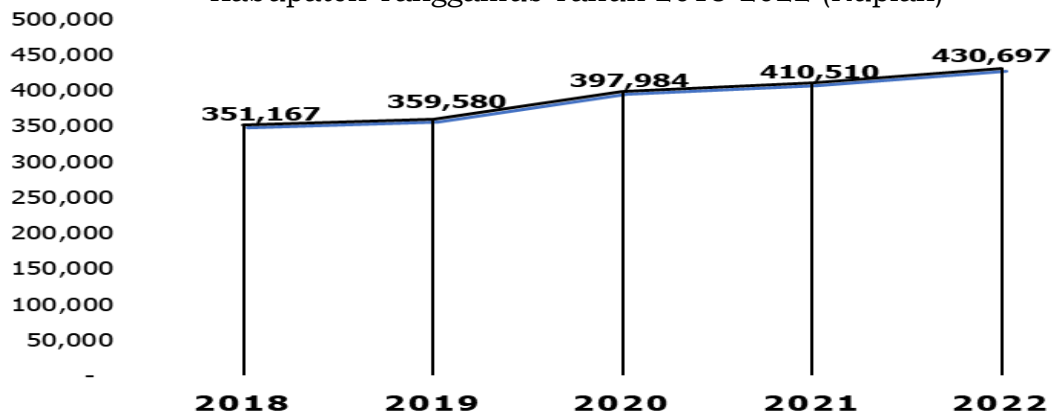
Tabel II.31. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022

NO	WILAYAH	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PERSEN)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mesuji	7.55	7.47	7.33	7.54	6.84
2	Tulang Bawang Barat	8.10	7.75	7.39	8.32	7.44
3	Metro	9.14	8.68	8.47	8.93	7.87
4	Bandar Lampung	9.04	8.71	8.81	9.11	8.21
5	Tulang Bawang	9.70	9.35	9.33	9.67	8.42
	Indonesia	9.82	9.41	9.78	9.71	9.54
6	Pringsewu	10.50	10.15	9.97	10.11	9.34
7	Lampung Tengah	12.62	12.03	11.82	11.99	10.96
8	Tanggamus	12.48	12.05	11.68	11.81	10.98
	Provinsi Lampung	13.14	12.62	12.34	12.62	11.57
9	Lampung Barat	13.54	12.92	12.52	12.82	11.71
10	Way Kanan	13.52	13.07	12.90	13.09	11.76
11	Lampung Selatan	14.86	14.31	14.08	14.19	13.14
12	Pesisir Barat	14.98	14.48	14.29	14.81	13.84
13	Pesawaran	15.97	15.19	14.76	15.11	13.85
14	Lampung Timur	15.76	15.24	14.62	15.08	13.98
15	Lampung Utara	20.85	19.90	19.30	19.63	18.41

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jikat tidak terjadi peningkatan pendapatan. Selama periode 2019 sampai dengan 2022, Garis Kemiskinan Kabupaten Tanggamus terus mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp.359.580,- per kapita per bulan menjadi Rp.430.697,- per kapita per bulan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada disekitar garis kemiskinan belum mampu mengimbangi kenaikan harga pada saat garis kemiskinan mengalami kenaikan.

Gambar II.21. Perkembangan Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Sumber : BPS RI, 2023

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah index kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P1 dan index keparahan kemiskinan (*distributionally sensitive index*) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Indikator P1 mengukur kesenjangan (jarak) rata-rata antara pengeluaran masing-masing penduduk miskin dan GK. Semakin tinggi P1 berarti semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 yang sama tetapi daerah A memiliki P1 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini menunjukkan bahwa walau persentase penduduk miskin di kedua daerah tersebut sama, penduduk miskin di daerah A secara rata-rata lebih miskin dibanding penduduk miskin di daerah B. Indikator P2 merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 berarti pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menyebar dari nilai rata-ratanya. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 dan P1 yang sama tetapi daerah A memiliki P2 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini berarti persentase penduduk daerah miskin kedua daerah tersebut berarti sama dan secara rata-rata penduduk miskin di kedua daerah tersebut sama miskinnya. Namun demikian tingkat kemiskinan penduduk miskin di daerah A lebih beragam dibanding daerah B. Dengan demikian P2 merupakan ukuran tingkat keparahan kemiskinan.

Tabel II.32. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

WILAYAH	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) (PERSEN)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tanggamus	2.01	1.81	2.36	1.24	1.36	1.26	1.42

Sumber : BPS RI, 2023

Tabel II.33. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

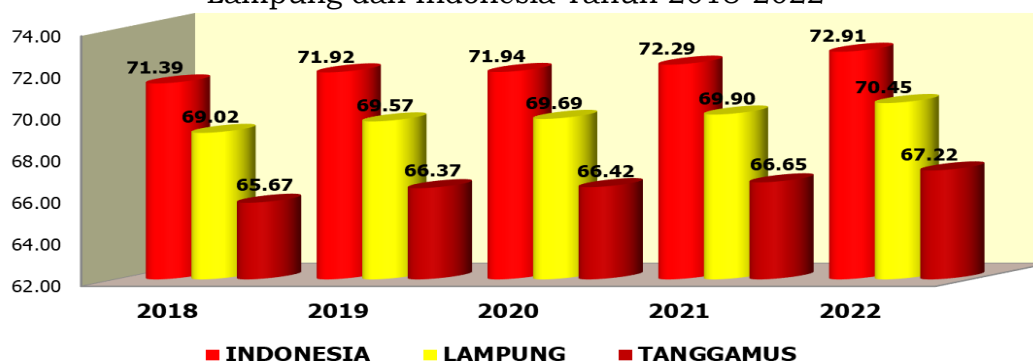
WILAYAH	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) (PERSEN)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tanggamus	0.43	0.35	0.62	0.21	0.24	0.23	0.29

Sumber : BPS RI, 2023

2.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengacu pada *Human Development Report* pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia di Kabupaten Tanggamus menunjukkan arah yang positif, selama lima tahun terakhir ini nilai IPM Kabupaten Tanggamus terus mengalami peningkatan meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada Tahun 2016 IPM Kabupaten Tanggamus mencapai 64,61 dan kemudian terus meningkat menjadi 67,22 pada tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional dan Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Tanggamus masih lebih rendah, angka IPM Nasional pada tahun 2022 mencapai 72,91 sedangkan angka IPM Provinsi Lampung mencapai 70,45.

Gambar II.22. Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018-2022



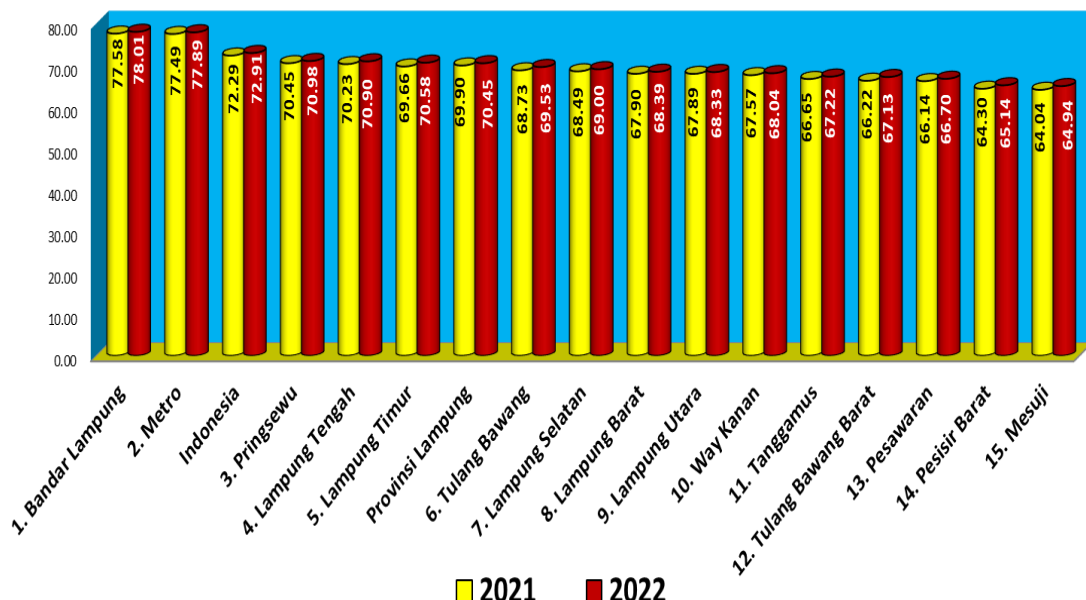
Sumber : BPS RI, 2023

Sebagaimana ditunjukkan oleh diagram diatas baik IPM Nasional, Provinsi Lampung, maupun Kabupaten Tanggamus setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan status capaian pembangunan manusia, IPM Kabupaten Tanggamus di tahun 2022 berada pada peringkat kesebelas dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang termasuk dalam kategori sedang (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) yang tergabung dalam 10 kabupaten, sedangkan yang memiliki status pembangunan manusia berkategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) terdapat 5 Kabupaten/Kota yaitu adalah Kota Bandar Lampung (78,01), Kota Metro (77,89), Kabupaten Pringsewu (70,98), Kabupaten Lampung Tengah (70,90) dan Kabupaten Lampung Timur (70,58).

Diantara 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung yang tercatat memiliki nilai IPM tertinggi dengan nilai 78,01 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mesuji dengan IPM sebesar 64,94.

Gambar II.23. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pembangunan manusia yang terbentuk dari indikator-indikator pada tiga dimensi

kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan, penghitungan dilakukan berdasarkan dua ukuran yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada dimensi kesehatan digunakan Angka Harapan hidup (AHH), adapun pada dimensi ekonomi, indikator yang digunakan adalah Pengeluaran Perkapita Penduduk.

Tabel II.34. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021 ke 2022

NO	WILAYAH	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA					PERTUMBUHAN 2021 KE 2022 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Bandar Lampung	76.63	77.33	77.44	77.58	78.01	0.55
2	Metro	76.22	76.77	77.19	77.49	77.89	0.52
	Indonesia	71.39	71.92	71.94	72.29	72.91	0.86
3	Pringsewu	69.42	69.97	70.30	70.45	70.98	0.75
4	Lampung Tengah	69.73	70.04	70.16	70.23	70.90	0.95
5	Lampung Timur	69.04	69.34	69.37	69.66	70.58	1.32
	Provinsi Lampung	69.02	69.57	69.69	69.90	70.45	0.79
6	Tulang Bawang	67.70	68.23	68.52	68.73	69.53	1.16
7	Lampung Selatan	67.68	68.22	68.36	68.49	69.00	0.74
8	Lampung Barat	66.74	67.50	67.80	67.90	68.39	0.72
9	Lampung Utara	67.17	67.63	67.67	67.89	68.33	0.65
10	Way Kanan	66.63	67.19	67.44	67.57	68.04	0.70
11	Tanggamus	65.67	66.37	66.42	66.65	67.22	0.86
12	Tulang Bawang Barat	65.30	65.93	65.97	66.22	67.13	1.37
13	Pesawaran	64.97	65.75	65.79	66.14	66.70	0.85
14	Pesisir Barat	62.96	63.79	63.91	64.30	65.14	1.31
15	Mesuji	62.88	63.52	63.63	64.04	64.94	1.41

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Peningkatan IPM Kabupaten Tanggamus dari 2021 ke 2022 berhasil tumbuh sebesar 0,86% sama dengan pertumbuhan IPM Nasional yang juga tumbuh 0,86% hal tersebut sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Provinsi Lampung yang sebesar 0,79%.

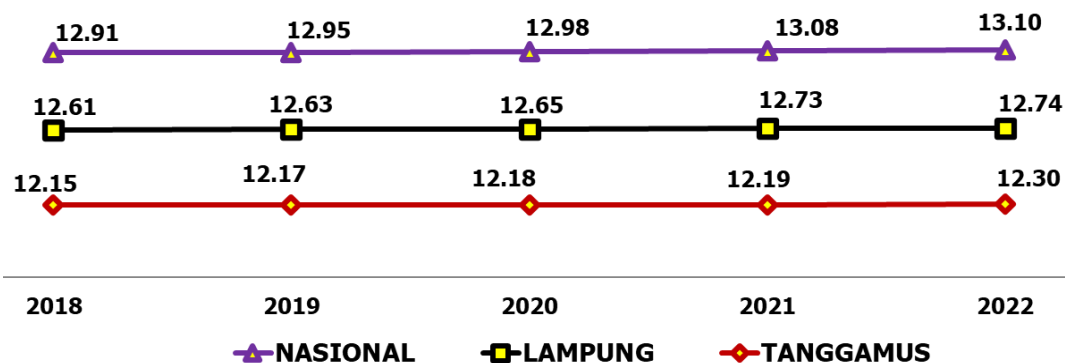
2.2.1.9 Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanggamus dari tahun 2018 ke tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, bila di tahun 2018 HLS Kabupaten Tanggamus masih 12,15 tahun maka pada tahun 2022 telah mencapai 12,30 tahun.

Dengan nilai HLS Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 12,30 tahun, hal ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Kabupaten Tanggamus baru mencapai tingkat 3 SLTA. Kondisi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Lampung 12,74 tahun dan Nasional sebesar 13,10 tahun. Dengan demikian baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional harapan untuk bersekolah sudah sampai pada tingkat selesai SLTA.

Sebagaimana pula terlihat pada gambar, HLS Kabupaten Tanggamus semakin menyusul ketertinggalan dengan HLS Provinsi Lampung, hal ini menjadi indikasi perkembangan HLS Kabupaten Tanggamus yang meningkat lebih tinggi dari pada HLS Provinsi Lampung. Dalam periode ini memang HLS Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun sedangkan HLS Kabupaten Tanggamus meningkat 0,11 tahun sedangkan HLS Nasional meningkat 0,02 tahun, hal ini dapat menjadi pacuan untuk terus meningkatkan HLS Kabupaten Tanggamus.

Gambar II.24. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



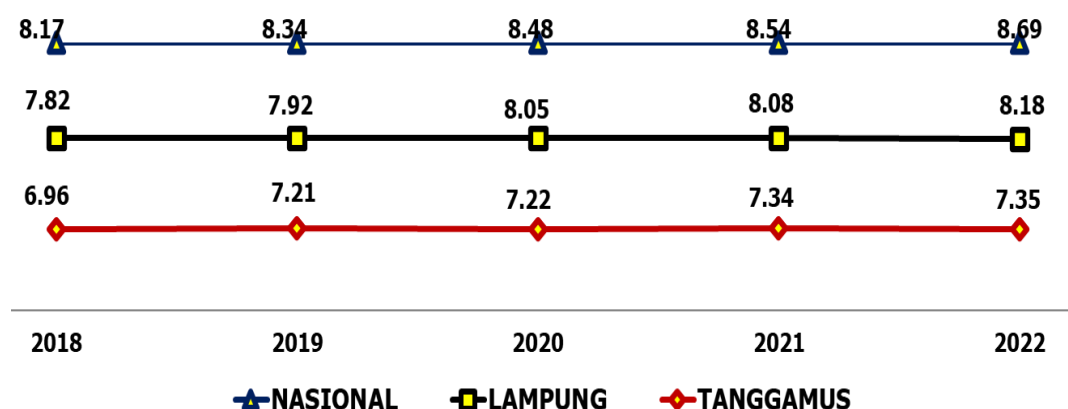
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2.2.1.10 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi bahwa dalam kondisi normal RLS suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk usia > 25 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus tahun 2022 baru mencapai 7,35 tahun meningkat dari tahun sebelumnya 7,34 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanggamus usia 25 tahun keatas masih cukup jauh dibawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun demikian kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Provinsi Lampung secara umum dimana angka RLS Provinsi Lampung baru mencapai 8,18 tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, RLS di Kabupaten Tanggamus konstan menunjukkan peningkatan namun masih berada di bawah RLS Provinsi Lampung dan Nasional. Faktor yang mempengaruhi rendahnya RLS dan belum terdapat akselerasi angka RLS yaitu masih terdapat siswa yang putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Gambar II.25. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2.2.1.11 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2018-2020, capaian Angka Melek Huruf cukup mengalami penurunan. AMH pada tahun 2018 sebesar 97,95% dan tahun 2020 turun menjadi 96,84%. Di tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 97,00%, namun kembali menurun menjadi 96,62% di tahun 2022.

Tabel II.35. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

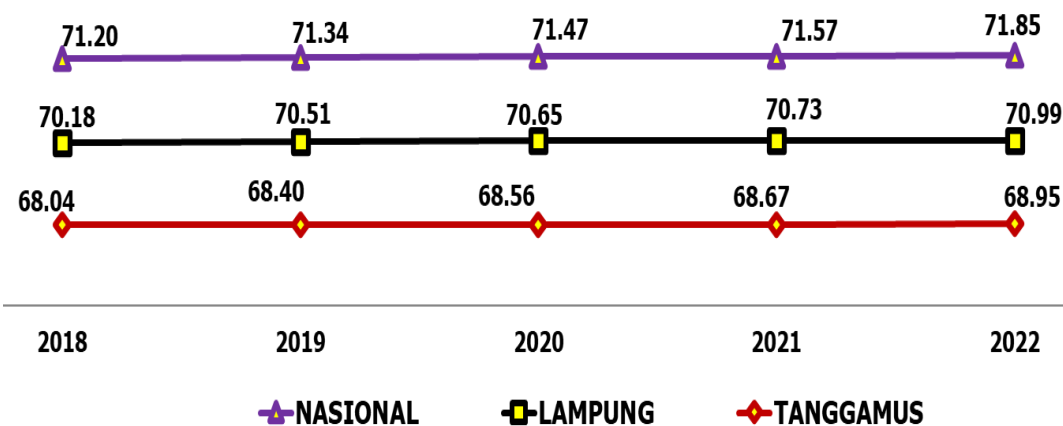
WILAYAH	ANGKA MELEK HURUF (PERSEN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanggamus	97,95	97,00	96,84	97,00	96,62

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.12 Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, tingginya AHH mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 mencapai 68,95 tahun meningkat dibanding tahun 2021 yang mencapai 68,67 tahun, meskipun demikian capaian AHH ini masih dibawah capaian AHH Provinsi Lampung sebesar 70,99 tahun dan Nasional yang mencapai 71,85 tahun.

Gambar II.26. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2.2.1.13 Balita Gizi Buruk

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan dengan peningkatan status gizinya, terutama pada kelompok umur balita. Penentuan status gizi balita dibagi atas gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah

Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 terdapat 17,7% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan gizi kurang sebesar 13,8%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Tanggamus. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2022, pada tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak terdapat kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tanggamus, namun di tahun 2020 dan 2021 ditemukan masing-masing 2 Kasus Gizi Buruk sedangkan di tahun 2022 terdapat 4 Kasus Gizi Buruk, seluruh penderita gizi buruk tersebut telah mendapatkan penanganan 100% sesuai target SPM.

Tabel II.36. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

URAIAN	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Balita Gizi Buruk	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	4 Kasus
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	0 Kasus (100%)	0 Kasus (100%)	0 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	4 Kasus (100%)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

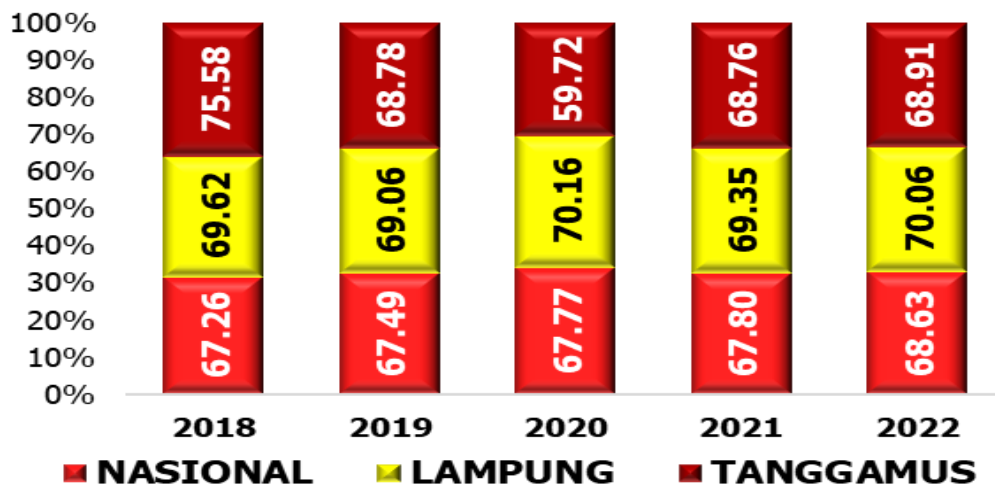
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanggamus berjumlah 318.614 orang terdiri dari 209.241 laki-laki dan 109.373 perempuan sedangkan yang bukan angkata kerja sebanyak 143.732 orang yang terdiri dari 32.411 laki-laki dan 111.321 perempuan.

Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 96,30% dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 68,91%. Berdasarkan status pekerjaannya, penduduk yang bekerja

di Kabupaten Tanggamus 2022 mayoritas berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yakni sebanyak 76.409 orang. Jumlah pencari kerja di kabupaten tanggamus tahun 2022 ada sebanyak 3.616 orang. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.649 orang. Mayoritas pencari kerja merupakan lulusan SMA/SMK/ sederajat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 68,91% lebih rendah dari capaian TPAK Provinsi Lampung sebesar 70,06% dan lebih tinggi dari TPAK Nasional sebesar 68,63%, secara lebih lengkap, perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.27. Perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.15 Tingkat Pengangguran Terbuka

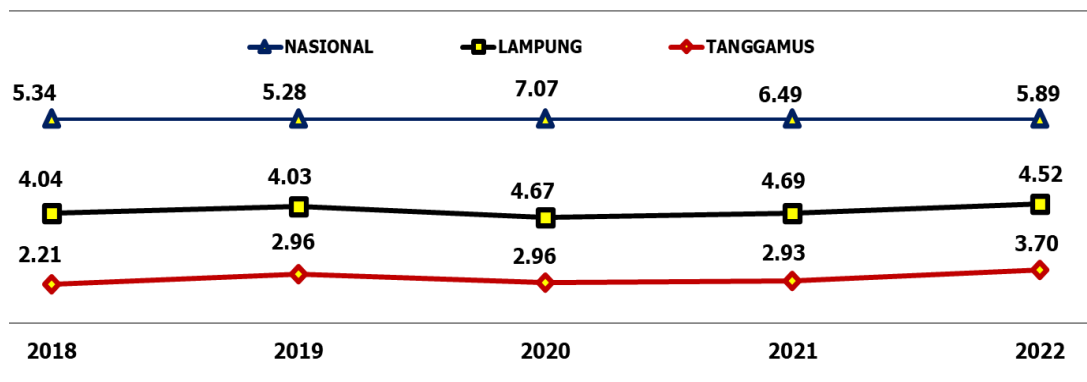
Salah satu Penilaian terhadap Indikator ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu merupakan ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau dengan kata lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja,

sedangkan Angkatan Kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Terjadinya pandemi *Covid-19* yang bersifat global, membawa dampak buruk pada perekonomian dan dunia usaha sehingga terjadi pengurangan pekerja yang bersifat masal, hal ini terlihat pada meningkatnya angka pengangguran terbuka pada Provinsi Lampung dan Nasional di tahun 2020. Namun Tingkat pengangguran Kabupaten Tanggamus di tahun tersebut cenderung tetap dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,96%. Hal ini karena mayoritas pekerja di Kabupaten Tanggamus bekerja di sektor informal, sehingga tidak terlalu terdampak dengan pengurangan pekerja.

TPT Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 3,70% mengalami peningkatan disbanding tahun 2021 yang hanya 2,93%, angka tersebut juga lebih baik dari TPT Provinsi Lampung sebesar 4,52% dan TPT Nasional yang mencapai 5,89%.

Gambar II.28. Perkembangan TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.16 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berdasarkan Hasil Survey pada Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus berada pada Indeks 87,01 dengan Kategori “B” mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan nilai 86,43.

Tabel II.37. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Tanggamus	73.30	73.47	77.14	75,27	70,93	86,43	87,01

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.17 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah dari tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 karena dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan sebagian besar realisasi PAD tidak tercapai.

Tabel II.38. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	7.91%	4.65%	5.43%	5,76%	6.71%	6.27%
2	Persentase Realisasi PAD	43.18%	81.31%	78.14%	76.09%	76.91%	48.01%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.18 Opini BPK

Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada kurun waktu tahun 2016-2021 berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun di tahun 2022, Kabupaten Tanggamus mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel II.39. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.19 Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Kinerja Bidang Ketahanan Pangan difokuskan pada kegiatan peningkatan kesejahteraan petani serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk melihat capaian pembangunan Bidang Ketahanan Pangan maka disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus disusun untuk penyediaan data dan informasi tentang situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang akurat dan komprehensif yang dapat dinilai dari 3 aspek yaitu, 1) Ketersediaan Pangan; 2) Akses Terhadap Pangan; dan 3) Pemanfaatan Pangan (konsumsi pangan, kesehatan, dan gizi), sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan ketahanan pangan secara menyeluruh dan perencanaan program-program yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan dan gizi secara umum, kemiskinan dan stunting sehingga dapat dilakukan intervensi secara lebih tepat, efektif, dan efisien. Disamping itu, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini dapat dijadikan upaya deteksi dini (*Early Warning System*) untuk permasalahan kerawanan pangan dan gizi.

Dari 3 aspek selanjutnya dijabarkan menjadi 6 Indikator yaitu, 1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; 2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; 3) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; 4) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara; 5) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa; 6) Rasio jumlah tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk desa.

Pekon/Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Wilayah Rentan Pangan dengan klasifikasi :
 - a) Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi;
 - b) Prioritas 2 rentan pangan sedang; dan
 - c) Prioritas 3 rentan pangan rendah.
- 2) Wilayah Tahan Pangan dengan klasifikasi :
 - a) Prioritas 4 tahan pangan rendah;
 - b) Prioritas 5 tahan pangan sedang; dan
 - c) Prioritas 6 tahan pangan tinggi.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 20 desa (6,62 %) dari 302 desa yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang terdiri dari 0 desa (0 %) Prioritas 1; 7 desa (2,32 %) Prioritas 2; 13 desa (4,30%) Prioritas 3; sedangkan Prioritas 4-6 terdiri dari 108 desa (35,76 %) prioritas 4: 115 desa (38,08 %) Prioritas 5: dan 59 desa (19,50 %) Prioritas 6.

Penjabaran Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 untuk masing-masing kecamatan dan pekon sebagai berikut:

- 1) Wilayah Rentan Pangan:
 - a) Desa Prioritas 1 sebanyak 0 desa (0 %);
 - b) Desa Prioritas 2 sebanyak 7 desa (2,32 %), tersebar di Kecamatan Pugung (2 desa), Kecamatan Kelumbayan (4 desa), Kecamatan Limau (1 desa);
 - c) Desa Prioritas 3 sebanyak 13 desa (4,30 %), tersebar di Kecamatan Wonosobo (1 desa), Kecamatan Semaka (2 desa), Kecamatan Kota Agung (1 desa), Kecamatan Pematang Sawa (3 desa), Kecamatan Air Nainingan (1 desa), Kecamatan Talang Padang (1 desa), Kecamatan Pugung (3 desa), dan Kelumbayan (1 desa).
- 2) Wilayah Tahan Pangan:
 - a) Desa Prioritas 4 sebanyak 108 desa (38,08 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (8 desa), Semaka (8 desa), Bandar Negeri Semuong (6 desa), Kota Agung (7 desa), Pematang Sawa (8 desa), Kotaagung Timur (1 desa), Kotaagung Barat (2 desa), Pulau Panggung (10 desa), Ullu Belu (5 desa), Air Nainingan (4 desa),

Talang Padang (6 desa), Sumberejo (1 desa), Gisting (2 desa), Gunung Alip (4 desa), Pugung (9 desa), Bulok (9 desa), Cuku Balak (8 desa), Kelumbayan (2 desa), Limau (6 desa), Kelumbayan Barat (1 desa).

- b) Desa Prioritas 5 sebanyak 115 desa (38,08 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (14 desa), Semaka (5 desa), Bandar Negeri semuong (5 desa), Kota Agung (7 desa), Pematang Sawa (3 desa), Kotaagung Timur (4 desa), Kotaagung Barat (11 desa), Pulau Panggung (6 desa), Ulu Belu (11 desa), Air Nainingan (5 desa), Talang Padang (9 desa), Sumberejo (2 desa), gisting (6 desa), Gunung Alip (6 desa), Pugung (6 desa), Bulok (1 desa), Cukuh Balak (8 desa), Limau (2 desa), Kelumbayan (4 desa).
- c) Desa Prioritas 6 sebanyak 59 desa (19,50 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (5 desa), Semaka (7 desa), Kota Agung (1 desa), Kotaagung Timur (1 desa), Kotaagung Barat (3 desa), Pulau Panggung (5 desa), Sumberejo (10 desa), Gisting (1 desa), Gunung Alip (2 desa), Pugung (7 desa), Cukuh Balak (3 desa), Kelumbayan (1 desa), Limau (2 desa), Kelumbayan Barat (1 desa).

Gambar II.29. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel II.40. Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program KOBER	10%	10.5%	35,0 %	28,85%	47,07%	69,96%
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program SPS	58%	61%	2,0 %	2,70%	2,72%	69,20%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 sebesar 69,96% mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 47,07%, hal tersebut menandakan peningkatan minat masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk menyekolahkan anak-anaknya sejak jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2020). APK dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (BPS, 2020).

Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang untuk jenjang SD mengalami penurunan dari 104,69% pada tahun 2021 menjadi 103,69% di tahun 2022. Meski demikian, APK jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan. Pada jenjang SMP/MTs, APK meningkat sebesar 14,16 persen, dari 92,89% pada tahun 2021 menjadi 107,05% di tahun 2022. Sementara APK SMA/SMK/MA yang mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen dari 78,11% pada tahun 2021 menjadi 78,33% di tahun 2022.

Tabel II.41. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	11.87	113.63	108,80	107,80	105,93	104,69	103.69
2	SMP/MTs	105.4	91.67	92,95	90,09	92,78	92,89	107.05
3	SMA/SMK/MA	75.8	78.86	82,57	77,99	77,91	78,11	78.33

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

3) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah yang dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi.

Tabel II.42. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	97.23%	102.1%	94,93 %	95,47%	73,23%	96,82%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 96,82%, mengalami peningkatan dari 73,23% pada tahun 2021.

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat (Kemendikbud, 2020).

Tabel II.43. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	99.04	100.00	97,83	98,33	98,17	97,27	99,96
2	SMP/MTs	80.4	78.44	77,40	77,33	78,88	80,79	80.01
3	SMA/SMK/MA	55.57	53.87	57,94	57,17	56,96	56,34	55.72

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

APM Kabupaten Tanggamus untuk jenjang SD/MI pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 nilai APM SD/MI naik menjadi

sebesar 99,96% dibanding tahun 2021 dengan APM sebesar 97,27. Peningkatan ini disinyalir karena daya tampung lembaga pendidikan di tingkat SD/MI yang lebih baik. Namun terjadi penurunan APM untuk jenjang SMP/MTs yakni dari 80,79% pada tahun 2021 menjadi 80,01% di tahun 2022. Demikian pula untuk jenjang SMA/SMK/MA yang mana di tahun 2021 APM sebesar 56,34% menjadi 55,72 di tahun 2022.

5) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan disektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah.

Tabel II.44. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	90%	94.5%	98,58%	95,90%	94,41%	93,82%
2	SMP	46%	48.0%	88,00%	86,85%	87,08%	78,03%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

6) Angka Putus Sekolah dan Mengulang

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa padatingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dandinyatakan dalam persentase. Rumus APtS adalah jumlah siswa yang tidakmelanjutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang tertentu yang sesuai tahun t-1 dikali 100%. Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS digunakan untuk mengetahui

banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang.

Tabel II.45. Angka Putus Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN PUTUS SEKOLAH					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	0,11%	0,16%	0,12%	0,02%	0,17%	0,45%
2	SMP	0,14%	0,94%	1,00%	0,09%	0,49%	1,43%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Angka putus sekolah yang terbesar di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 terdapat pada jenjang SMP sebesar 1,43% sedangkan putus sekolah pada jenjang SD sebesar 0,45%.

Tabel II.46. Angka Mengulang Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN MENGULANG					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	1,71%	1,14%	0,96%	0,09%	0,30%	0,72%
2	SMP	0,09%	0,04%	0,33%	0,00%	0,01%	0,02%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Angka mengulang yang terbesar di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 terdapat pada jenjang SD sebesar 0,72% sedangkan pada jenjang SMP hanya sebesar 0,02%.

7) Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Pada tahun 2017 ruang kelas kondisi baik pada pendidikan dasar sebesar 52,54% dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 80,62%.

Tabel II.47. Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar dengan kondisi baik	52,54%	54%	66,86%	66,59%	33,35%	80,62%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

8) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2017-2019, ketersediaan jumlah ketersediaan sekolah SD tidak ada penambahan sekolah. Sejak tahun 2020, mengalami peningkatan hingga sebesar 66,66% di tahun 2021. Sedangkan jumlah ketersediaan sekolah untuk SMP, terjadi peningkatan di tahun 2018 dan 2019 menjadi 16%, dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga di tahun 2021 Rasio Ketersediaan SMP mencapai 39,67%.

Tabel II.48. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	4%	4%	4%	66,28%	66,66%	66,10%
2	SMP	15%	16%	16%	39,30%	39,67%	40,01%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

9) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Rasio ini menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Khusus di Kabupaten Tanggamus, pemenuhan jumlah guru maupun jumlah sekolah terhadap murid sudah memenuhi syarat. Namun permasalahan mendasar pada pendidikan di

Kabupaten Tanggamus adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran pelayanan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendidikan dan program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat.

Tabel II.49. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Guru/Murid	1:20	1:20	1:12	1:13	1:11	1:8
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:28	1:28	1:22	1:21	1:20	1:13

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2018 Rasio Guru/Murid maupun Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus tidak mengalami perubahan. Sejuak tahun 2019 mengalami perbaikan sampai dengan tahun 2022 menjadi 1:8 dan 1:13.

10) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama

Rasio guru terhadap murid penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.

Tabel II.50. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Guru/Murid	1:30	1:20	1:11	1:12	1:11	1:8
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:25	1:28	1:29	1:28	1:29	1:32

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Rasio Guru/Murid sebesar 1:30, dan mengalami perbaikan sejak tahun 2018 sehingga menjadi 1:8 pada tahun 2022. Berbeda halnya dengan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2017 mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 dengan rasio 1:32.

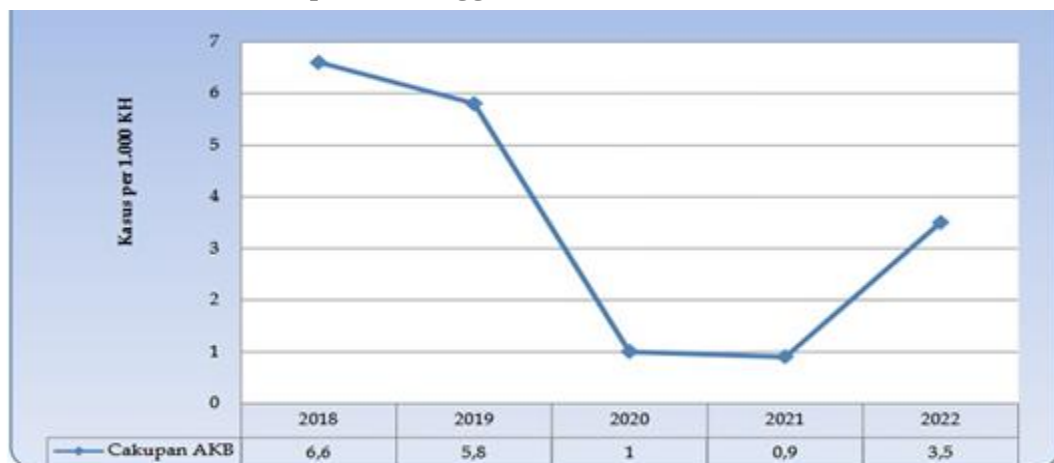
2.3.1.2 Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi

Kematian bayi perlu mendapatkan perhatian pemangku kebijakan. AKB mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat. Angka ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi program serta kebijakan kependudukan dan kesehatan suatu negara di seluruh dunia. AKB adalah banyaknya kematian bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup (KH) di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri. Kematian bayi sangat berkaitan dengan kondisi kehamilan ibu, pertolongan persalinan yang aman dan perawatan bayi yang baru lahir. Penyebab langsung kematian bayi baru lahir adalah infeksi serta bayi baru lahir dengan berat rendah. Sedangkan penyebab tidak langsungnya antara lain tingkat pendidikan ibu yang masih rendah, tingkat ekonomi yang masih rendah, serta keadaan sosial budaya yang tidak mendukung gizi ibu hamil.

Pada tahun 2022 terjadi 36 kasus kematian bayi termasuk neonatal, yaitu 17 bayi laki-laki dan 19 bayi perempuan, meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 10 kasus. Dari 10.347 sasaran bayi lahir hidup di dapat angka kematian bayi 3,5 per 1.000 KH.

Gambar II.30. Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2023

Beberapa penyebab kematian bayi adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 2,5 kilogram dan asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh) pada bayi usia 0 – 28 hari (*neonatal*), sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan (*post neonatal*) didominasi oleh penyebab lain, kelainan saluran cerna dan diare.

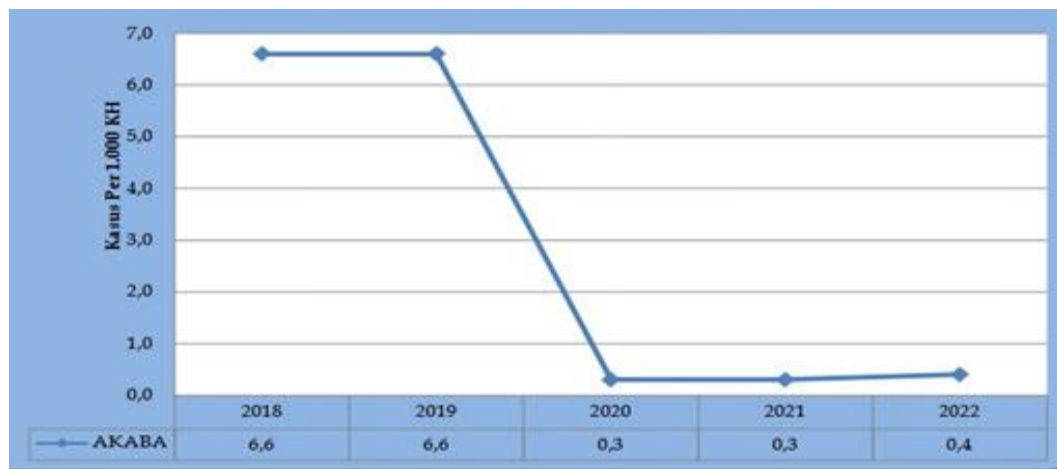
Secara garis besar ada beberapa hal yang mendukung terjadinya penurunan AKB di Kabupaten Tanggamus yaitu peningkatan pelayanan ANC (*Antenatal Care*/pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil), Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar, Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat darurat bayi, Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan, Melakukan Audit MaternalPerinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian neonatal dan pelaksanaan Program “Bumil Ceria” yang melibatkan lintas-sektor. Bumil Ceria adalah layanan yang diberikan bukan hanya sebatas pelayanan ibu hamil sampai dengan melahirkan dengan selamat, akan tetapi diintegrasikan juga dengan upaya pencegahan *stunting* sejak ibu mengandung yang tumbuh kembangnya dipantau secara berkala, sehingga dengan pelaksanaan program ini dapat mengoptimalkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan *prevelansi stunting*.

2) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah jumlah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan dengan angka per 1.000 KH dalam satu tahun tertentu. Angka Kematian Balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan.

Pada Tahun 2022 terjadi 4 kasus kematian balita yang terjadi pada 3 balita laki-laki dan 1 balita perempuan. Angka kematian balita sebesar 0,4 per 1.000 KH. Gambaran angka kematian balita per 1.000 KH dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Gambar II.31. Trend Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2023

3) Angka Kematian Ibu

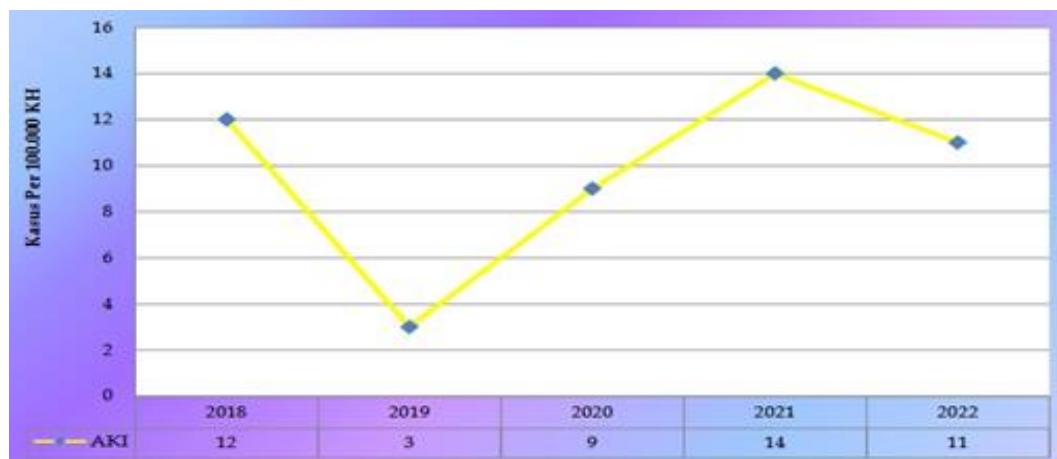
Peran ibu sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Sosok seorang ibu yang melahirkan dan mengantarkan generasi penerus menjadi manusia yang kelak berguna bagi negara. Indikator kesehatan ibu yang utama bisa dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) di suatu wilayah. AKI adalah banyaknya kematian ibu yang dinyatakan dalam per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun yang sama. Suatu kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan pada perempuan.

Dari hasil pencatatan dan pelaporan di wilayah Kabupaten Tanggamus, AKI telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan kesehatan masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir senantiasa menjadi prioritas dalam pembangunan, dimana hal ini dilakukan dengan kegiatan antara lain pelatihan dukun bayi,

pengembangan Puskesmas, pengembangan klinik kesehatan ibu dan anak, pembangunan rumah sakit, pondok bersalin desa (polindes) dan posyandu, penempatan bidan di desa, gerakan masyarakat untuk menyelamatkan ibu hamil dan bersalin, Audit Maternal Perinatal (AMP) dan pengadaan alat kesehatan berupa bidan KIT serta monitoring pelaksanaan kegiatan KIA dan pemasangan stiker ibu hamil. Angka kematian ibu menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas.

Pada Tahun 2022 terjadi 11 kasus kematian ibu maternal yang masing-masing disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dan lain-lain. Melihat penyebab kematian ibu diatas, perlu peningkatan upaya promotif pencegahan perdarahan dan hipertensi pada ibu hamil, peningkatan kepatuhan minum tablet tambah darah (Fe), peningkatan kunjungan ibu bersalin dan ibu nifas, serta monitoring pada ibu pasca persalinan yang mempunyai penyakit penyulit yang memungkinkan resiko penyebab kematian ibu nifas.

Gambar II.32. Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2023

4) Cakupan P2M dan PTM

a) Tuberculosis

Salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah sangat serius di masyarakat sampai saat ini adalah tuberculosis (TBC) atau yang lebih dikenal dengan TB Paru. TB Paru merupakan penyakit tropis yang

sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Terduga Tuberkulosis adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk >2 minggu disertai dengan panas badan, selama tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus terdapat 6.373 orang terduga Tuberkulosis, dan 795 orang telah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar atau cakupan 95,8 %.

Jumlah seluruh penderita TB Paru sepanjang Tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus pada sebanyak 795 orang yang terdiri dari laki - laki sebanyak 514 kasus dan perempuan sebanyak 281 kasus. Kasus Tuberkulosis anak 0-14 tahun sebanyak 67 kasus. Case Detection Rate (CDR) adalah merupakan persentase jumlah pasien TB (BTA+) yang diobati dan dilaporkan dibandingkan jumlah semua pasien TB (BTA+) yang diperkirakan ada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan perkiraan insiden tuberkulosis sebanyak 1.942 kasus, maka CDR di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2022 sebesar 40,9%.

Dari seluruh kasus Tuberkulosis yang terdaftar dan mendapat pengobatan, jumlah penderita yang sembuh sebanyak 185 orang dengan akan kesembuhan (cure rate) 33,6 % dan penderita yang melalukan pengobatan lengkap (complete rate) sebanyak 484 orang (60,9 %). Sedangkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan mendapat pengobatan lengkap atau Success rate TB 484 orang (60,9 %), sedangkan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis sebanyak 21 jiwa (2,6 %).

b) HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP).

Estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV sebanyak 14.231 orang, sebanyak 10.175 orang (71,5 %) yang mendapat pelayanan standar meliputi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang

e) Malaria

Penyakit malaria di Kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh kondisi geografis dimana masih banyak tempat perindukan nyamuk penular malaria, disamping itu pencegahan dan penanggulangan malaria belum dilaksanakan secara komprehensif. Penanganan malaria hanya terbatas pada penemuan kasus secara pasif di Puskesmas dan pengobatan, belum melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyakit malaria tersebut diantaranya adalah intervensi terhadap tempat perindukan vektor dan perbaikan perilaku masyarakat khususnya dalam pencegahan dan perilaku minum obat yang kurang terkontrol sehingga menyebabkan resistensi terhadap obat malaria.

Konfirmasi terhadap penderita dengan gejala klinis malaria (suspek) yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator pelaksanaan program malaria. Konfirmasi dilakukan secara mikroskopis dan rapid diagnost Test (RDT). Pada Tahun 2022 terdapat 5 suspek yang dilakukan pemeriksaan sediaan darah tidak ada kasus positif malaria dan tidak ada kejadian kasus meninggal.

Kabupaten Tanggamus termasuk daerah endemis rendah dengan Angka kesakitan malaria (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk < 1.

f) Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi.

Pada Tahun 2022 sasaran penderita hipertensi sebanyak 121.821 jiwa, pelayanan telah diberikan pada 75.605 jiwa (62,06%), sehingga masih ada kesenjangan. Belum tercapainya target pelayanan ini antara lain karena :

- Target/sasaran merupakan perkiraan/estimasi, belum ada sasaran riil penderita hipertensi.
- Belum terinventarisirnya kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Swasta/Klinik Swasta
- Tingkat kepatuhan Petugas dalam pencatatan dan pelaporan kurang.

Tabel II.51. Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tb-Paru	412	729	725	822	577	795
2	HIV-AIDS	7	37	43	31	36	53
3	Kusta	7	16	-	4	12	8
4	DBD	40	108	257	167	124	212
5	Malaria	1	-	8	2	1	-
6	Hipertensi	38.294	12.336	33.894	24.220	42.295	75.605

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2023

5) Rasio Posyandu, Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Rumah Sakit

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular

dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang di lakukan melalui penimbangan balita.

Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor, dan kantor RW.

Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat menjangkau semua sasaran.

Tabel II.52. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	672	686	689	690	693	694
2	Jumlah Balita	55.504	54.742	53.966	44.445	43.043	49.950
3	Rasio Per 100 Balita	1,21	1,25	1,28	1,55	1,61	1,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 adalah 1,25 kemudian meningkat menjadi 1,28 pada tahun 2019. Rasio ini terus meningkat sehingga pada tahun 2021 rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus menjadi 1 : 1,61. Pada tahun 2022, terjadi penurunan rasio Posyandu terhadap jumlah Balita dikarenakan meningkatnya jumlah balita yang cukup signifikan yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Posyandu di Kabupaten Tanggamus.

b) Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Tabel II.53. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2017-2022 di Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas	23	23	24	24	24	24
2	Jumlah Klinik	16	18	16	17	17	21
3	Jumlah Pustu	55	54	54	54	54	53
4	Jumlah Penduduk	586,624	592.603	598,299	603.706	645.807	652.898

NO	PUSKESMAS	AKREDITASI KEMENTERIAN KESEHATAN
	6. Puskesmas Kedaloman	Madya
	7. Puskesmas Sumberejo	Belum Terakreditasi
	8. Puskesmas Martanda	Belum Terakreditasi
II.	Puskesmas Rawat Inap	
	1. Puskesmas Putihdoh	Madya
	2. Puskesmas Antabrak	Madya
	3. Puskesmas Talang Padang	Utama
	4. Puskesmas Gisting	Madya
	5. Puskesmas Ngarip	Madya
	6. Puskesmas Siring Betik	Madya
	7. Puskesmas Air Naningan	Madya
	8. Puskesmas Sukaraja	Madya
	9. Puskesmas Kelumbayan	Madya
	10. Puskesmas Kelumbayan Barat	Madya
	11. Puskesmas Bulok Sukamara	Madya
	12. Puskesmas Sumanda	Madya
	13. Puskesmas Rantau Tijing	Madya
	14. Puskesmas Pulau Panggung	Madya
	15. Puskesmas Margoyoso	Madya
	16. Puskesmas Sanggi	Madya
	17. Puskesmas Way Nipah	Dasar
	18. Puskesmas Gunung Sari	Belum Terakreditasi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun 2022, terdapat 4 Puskesmas yang mendapatkan Akreditasi Utama, 18 Puskesmas yang mendapatkan Akreditasi Madya, 1 Puskesmas yang mendapatkan Akreditasi Dasar dan 3 Puskesmas yang Belum Terakreditasi.

c) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh dibagi pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel II.55. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2017-2022 Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah Penduduk	586.624	592.603	598.299	603.706	645.807	652.898
7	Rasio per per Jumlah Penduduk	1:293.312	1:296.301	1:299.149	1:301853	1: 322.904	1:326.449

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Kabupaten Tanggamus memiliki dua Rumah Sakit yang terdiri atas satu Rumah Sakit Pemerintah dan satu Rumah Sakit Swasta, angka Rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 1: 326.449 yang artinya satu Rumah Sakit melayani kurang lebih 326.449 jiwa, idealnya satu Rumah Sakit melayani 100.000 jiwa sehingga Kabupaten Tanggamus dengan penduduk sebesar 652.898 jiwa membutuhkan minimal 4-6 Rumah Sakit.

6) Rasio Dokter dan Tenaga Medis

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di Kabupaten Tanggamus belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis yang tidak merata serta kualitas para dokter masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.56. Jumlah Tenaga Medis Dokter Sepesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter	68	83	80	75	91	97

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Penduduk	586.624	592.603	598.299	603.706	645.807	652.898
3	Rasio Per per Jumlah Penduduk	1:8626,8	1:7139,8	1:7139,8	1:8049,4	1:7096,8	1:6730,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tenaga medis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga medis perlu terus menerus ditambahkan agar rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga medis. Keberadaan tenaga medis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel II.57. Jumlah Dokter Spesialis Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	DOKTER SPESIALIS	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Spesialis Penyakit Dalam	2	2	2	2	3	3
2	Spesialis Kandungan	3	3	3	3	3	3
3	Spesialis Anak	2	2	2	2	2	2
4	Spesialis Bedah	1	1	1	1	2	2
5	Spesialis Anastesi	1	1	1	1	2	2
6	Spesialis Radiologi	1	1	1	1	2	2
7	Spesialis Orthopedi	1	1	1	1	0	0
8	Spesialis Paru	0	1	1	1	1	1
9	Spesialis Patologi	0	0	1	1	2	2

Sumber : RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.58. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2022 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TENAGA MEDIS	PER 100.000 PENDUDUK
1	Wonosobo	42,095	3	7.13
2	Semaka	40,277	2	4.97
3	Bandar Negeri Semuong	17,623	1	5.67
4	Kota Agung	48,077	39	81.12
5	Pematang Sawa	18,184	2	11.00
6	Kota Agung Timur	22,006	2	9.09
7	Kota Agung Barat	23,289	2	8.59
8	Pulau Panggung	41,105	5	12.16
9	Ulubelu	44,667	2	4.48
10	Air Nanningan	31,853	4	12.56
11	Talang Padang	54,348	3	5.52
12	Sumberejo	36,767	3	8.16
13	Gisting	43,898	17	38.73

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TENAGA MEDIS	PER 100.000 PENDUDUK
14	Gunung Alip	22,588	1	4.43
15	Pugung	67,487	4	5.93
16	Bulok	24,615	2	8.13
17	Cukuh Balak	25,336	2	7.89
18	Kelumbayan	12,477	3	24.04
19	Limau	22,092	3	13.58
20	Kelumbayan Barat	14,114	3	21.26
	JUMLAH	652,898	103	15.78

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

7) Analisis Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Berikut analisis ketercukupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2021

Tabel II.59. Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan dan SDM Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Dokter Umum	1 : 2.500	1:8.479	Kurang
2	Dokter Spesialis	1 :16.000	1 : 32.645	Kurang
3	Rumah Sakit	>1	>1	Cukup
4	Puskesmas	1 : 16000	1:27.204	Kurang
5	Puskesmas Pembantu	1 : 1500	1:12.319	Kurang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

8) Prevalensi Balita Kurang Gizi (*underweight*), Pendek (*stunting*), Kurus (*wasting*) dan Gemuk

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 maka di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 terjadi penurunan Balita Kurang Gizi (*underweight*), Pendek (*stunting*), Kurus (*wasting*) dan Gemuk tetapi angka masih cukup besar sehingga diperlukan kegiatan **intervensi spesifik** di bidang kesehatan yang hasilnya dapat dilihat dalam waktu

relatif pendek dan kegiatan **intervensi sensitif** yang merupakan berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dalam mendukung penyelesaian masalah Balita Kurang Gizi (*underweight*), Pendek (*stunting*), Kurus (*wasting*) dan Gemuk. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu melaksanakan Gerakan Bersama Atasi Pendek/*Stunting* Tanggamus (Gebrak Tanggamus) yang melibatkan seluruh sektor dalam mengatasi masalah tersebut.

Tabel II.60. Hasil Pemantauan Masalah Gizi Balita Tahun 2017-2022

TAHUN	WILAYAH	MASALAH GIZI BALITA				KATEGORI
		UNDERWEIGHT	STUNTING	WASTING	GEMUK	
2017	Tanggamus	19,20%	37,30%	6,80%	3,10%	Akut Kronis
2018	Tanggamus	15,50%	29,87%	2,40%	3,10%	Akut Kronis
2019	Tanggamus	2,13%	27,39%	1,29%	0,66%	Akut Kronis
2021	Tanggamus	14,20%	25,00%	5,70%	0,66%	Akut Kronis
2022	Tanggamus	16,70%	20,40%	7,80%	1,90%	Akut Kronis

Sumber : RISKESDAS, SSGBI, SSGI, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

SSGI merupakan sebuah riset yang dilakukan sebagai amanat yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan untuk mempublikasikan data stunting per tahun yang merupakan salah satu bentuk pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting. Indikator dalam penentuan stunting yaitu TB/U atau PB/U.

Sedangkan EPPGBM merupakan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat dan menggambarkan tiap individu yang dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran balita di posyandu.

Hasil SSGI digunakan untuk pengambilan Kebijakan terkait stunting sedangkan hasil EPPGBM digunakan untuk intervensi stunting yang akan diberikan.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil prevalensi stunting berdasarkan hasil SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) dengan EPPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Berdasarkan data SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting masih tinggi yaitu 20,40% sedangkan berdasarkan EPPGBM, prevalensi

stunting Kabupaten Tanggamus sudah dibawah target penurunan stunting nasional yakni 3,31%.

Tabel II.61. Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Tahun 2018-2022

NO	TAHUN LOKUS	JUMLAH BALITA	STATUS PENDEK + SANGAT PENDEK	PREVALANSI STUNTING
1	2018	53.892	2.089	4,87
2	2019	49.873	1.675	3,80
3	2020	43.430	2.019	5,18
4	2021	41.442	1.371	3,31
5	2022	37.945	1.128	3,00

Sumber : Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Strategi intervensi penurunan stunting yang telah dilakukan adalah :

- Pendataan cepat stunting di Pekon Lokus Stunting;
- Menjalni komitmen dan dukungan lintas program dan lintas sektor di tingkat kabupaten dan kecamatan ;
- Sosialisasi dan pelaksanaan 1.000 hari pertama kehidupan kepada lintas sektor dan masyarakat ;
- Program Jaminan Persalinan;
- Pelaksanaan Bulan Sayang Ibu dan Anak (BSIA);
- Pelaksanaan Inovasi Daerah penurunan stunting yang terintegrasi.

9) Penanganan Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh *Novel Coronavirus 2019-nCoV*), jenis baru *coronavirus* yang pada manusia menyebabkan penyakit mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit yang disebabkan 2019-nCov, yaitu **Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)**.

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita *Covid-19*, penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di

sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi *Covid-19*. Seseorang juga bisa terinfeksi *Covid-19* ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.

Gejala umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita *Covid-19*, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosis.

Tabel II.62. Kasus *Covid-19* Kabupaten Tanggamus Mulai 18 Maret 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2022

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KASUS KONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL	ANGKA KESEMBUHAN (RR)	ANGKA KEMATIAN (CFR)
1	Tanggamus	4.003	3.853	145	96,25	3,62

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Jumlah Kasus *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 4.003 kasus positif dengan tingkat kesembuhan 96,25% dan tingkat kematian 3,62%.

Tabel II.63. Sasaran dan Cakupan Vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus Sampai Dengan Tahun 2022

WILAYAH	SASARAN	DOSIS 1		DOSIS 2		DOSIS 3		DOSIS 4	
		VAKSINASI	%	VAKSINASI	%	VAKSINASI	%	VAKSINASI	%
Tanggamus	536,701	420,393	78.33	322,194	60.03	85,139	20.83	998	1.88

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Pencapaian vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2022 untuk dosis pertama mencapai 78,33%, dosis kedua 60,03%, dosis ketiga 20,83% dan dosis keempat 1,88% dari total sasaran 536.701 orang.

Secara umum, terdapat beberapa sektor cukup terdampak akibat mewabahnya pandemi *Covid-19* ini, khususnya perekonomian rakyat yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya program *physical distancing* yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi terdampak seperti sektor pariwisata, sektor akomodasi, UMKM hingga sektor jasa. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak pandemi *Covid-19* untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam penanganan *Covid-19* adalah :

1. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan protokol *Covid-19* untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi;
2. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran belanja dan *refocusing* belanja untuk mendukung percepatan penanganan dan pemulihan pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

1) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan pembangunan dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum.

Tabel II.64. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

TAHUN	KONDISI JALAN (KM)				JUMLAH	JALAN KONDISI BAIK DAN SEDANG (KM)	PERSENTASE JALAN MANTAP (%)
	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT			
2018	426.93	197.92	237.58	476.94	1,339.37	624.85	46.65
2019	381.91	271.22	160.48	525.76	1,339.37	653.13	48.76
2020	394.23	265.46	245.03	434.65	1,339.37	659.69	49.25
2021	412.75	251.67	315.63	359.31	1,339.37	664.42	49.61
2022	319.38	182.15	82.1	755.74	1,339.37	501.53	37.45
2023	290.09	206.6	96.1	746.59	1,339.37	496.68	37.08

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase kemantapan infrastruktur jalan Kabupaten mengalami fluktuasi, persentase jalan mantap mengalami peningkatan dari 46,65% pada tahun 2018 menjadi 49,61% di tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase jalan mantap yang menjadi 37,45% dan tahun Kembali di tahun 2023 menjadi 37,08%, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan sebagai dampak dari *refocusing* anggaran akibat pandemi *Covid-19*, selain itu kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih sering terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelayakan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur. Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan total panjang jembatan Kabupaten.

Evaluasi terhadap 199 unit jembatan di Kabupaten Tanggamus, yang berkondisi baik pada tahun 2022 sebanyak 7 unit sedangkan yang rusak ringan dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin sebanyak 122 sehingga Persentase Jembatan Mantap sebesar 64,82%.

Tabel II.65. Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	KONDISI JEMBATAN (UNIT)	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik dan Tanpa Kerusakan	59	59	9	9	7
2	Rusak Ringan, Hanya Memerlukan Pemeliharaan Rutin	26	26	101	103	122
3	Kerusakan yang Memerlukan Pemantauan dan Pemeliharaan Berkala	47	47	12	12	26
4	Kerusakan yang Secara Struktur Memerlukan Tindakan Secepatnya	15	15	19	19	17
5	Kritis	7	7	3	3	14
6	Tidak Berfungsi atau Runtuh	1	1	11	9	13
	Jumlah	155	155	155	155	199
	Jembatan Mantap	85	85	110	112	129
	Persentase Jembatan Mantap	54.84%	54.84%	70.97%	72.26%	64.82%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

2) Infrastruktur Irigasi

Pengelolaan irigasi merupakan salah satu sektor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian, terutama dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Namun dalam perkembangannya, kinerja pengelolaan irigasi telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kegiatan perawatan, perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda (*divert maintenance*), kerusakan karena ulah manusia dan bencana alam. Keterbatasan dana, fasilitas, petugas operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat juga berpotensi menjadi penyebab penurunan kondisi jaringan irigasi dan pada tingkat lanjut dapat menyebabkan terganggunya fungsi jaringan irigasi dalam pendistribusian air, tentunya kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi yang lebih mahal karena jaringan irigasi tersebut harus direhabilitasi.

Tabel II.66 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	KONDISI IRIGASI (M)	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	41,522.15	42,524.15	44,624.04	54,604.00	57,198.70
2	Sedang	49,453.42	49,941.42	48,510.38	39,690.00	37,694.10
3	Rusak Ringan	33,412.24	33,321.67	34,285.11	34,081.53	36,835.83
4	Rusak Berat	22,454.00	21,054.57	19,422.28	18,466.28	15,413.18
	Jumlah	146,841.81	146,841.81	146,841.81	146,841.81	147,141.81
	Irigasi Mantap	90,975.57	92,465.57	93,134.42	94,294.00	94,892.80
	Persentase Irigasi Mantap	61.95%	62.97%	63.43%	64.21%	64.49%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Dari tabel di atas, terdapat total panjang jaringan irigasi di Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2022 sepanjang 147.141,81 meter. Pada tahun 2018, persentase irigasi mantap sebesar 61,59% terus mengalami peningkatan menjadi 64,49% pada tahun 2022. Namun demikian, meskipun terus mengalami peningkatan, irigasi dalam kondisi rusak ringan sampai berat masih cukup besar, yakni sepanjang 52.249,01 meter atau mencapai 35,51%.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (*livable*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel II.67. Rumah Layak Huni Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	2018		2019		2020		2021		2022	
		UNIT	%	UNIT	%	UNIT	%	UNIT	%	UNIT	%
1	Jumlah Rumah yang Ditangani	455	3,85	1.336	11,75	2.151	21,44	2.433	30,87	3.047	30,95
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	11.368	96,15	10.032	88,25	7.881	78,56	5.448	69,13	5.448	69,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 455 rumah yang ditangani. Persentase rumah yang tertangani terus mengalami trend yang meningkat di setiap tahunnya dan sampai tahun 2022 ini telah mencapai 30,95% meskipun demikian dengan keterbatasan anggaran yang tersedia berdampak terhadap rumah tidak

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase pemukiman yang tertata	73,0%	74,0%	75,0%	75,5%	76,0%
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	63,0%	65,0%	67,0%	67,5%	68,0%
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	73,0%	72,1%	71,0%	70,2%	69,2%
6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	55,0%	51,0%	50,5%	49,0%	48,0%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen). Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban suatu daerah sangat memengaruhi proses pembangunan daerah, bahkan ini menjadi salah satu prasyarat untuk investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Tabel II.69. Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	80%	85%	70%	80%	87%	88%
2	Keberadaan Ancaman Terorisme dan Konflik SARA	0%	0%	25%	0%	0%	0%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.1.6 Sosial

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan lain yang ditangani dalam

urusan sosial adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kementerian Sosial telah mengganti sebutan bagi penerima bantuan sosial dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

PPKS merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Tanggamus hingga saat ini, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum dapat mengatasi permasalahan PPKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PPKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PPKS skala kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Tabel II.70. Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	70	75	86	96,21	74,93	79,72
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	65	73	75	78	87,86	75,85

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan capaian kinerja pelayanan urusan sosial di Kabupaten Tanggamus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi diperlukan keterlibatan dan peranserta masyarakat secaraapenun umum mengingat kompleksnya permasalahan ini.

Tabel II.71. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	JENIS PPKS	JUMLAH PERMASALAHAN					KETERANGAN
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	10	7	0	0	0	Bidang Rehsos
2	Anak Telantar (AT)	73	67	300	466	420	Bidang Rehsos
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	3	3	32	3	3	Bidang Rehsos

NO	JENIS PPKS	JUMLAH PERMASALAHAN					KETERANGAN
		2018	2019	2020	2021	2022	
4	Anak Jalanan	26	23	0	0	0	Bidang Rehsos
5	Anak Dengan Kesabiltasan (ADK)	77	70	0	0	0	Bidang Rehsos
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan Salah	18	18	0	0	0	Bidang Rehsos
7	Anak yang Memerlukan kebutuhan khusus	10	10	0	0	0	Bidang Rehsos
8	Lanjut Usia Terlantar	2903	1.903	1.806	1.792	1.650	Bidang Rehsos
9	Penyandang Disabilitas	978	2.086	744	1.528	1.380	Bidang Rehsos
10	Tuna Susila	0	0	0	0	0	Bidang Rehsos
11	Gelandangan	8	5	1	4	0	Bidang Rehsos
12	Pengemis	1	2	0	0	0	Bidang Rehsos
13	Pemulung	2	2	0	0	0	Bidang Rehsos
14	Kelompok Minoritas	1	1	0	0	0	Bidang Rehsos
15	Berkas warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	1	1	0	0	0	Bidang Rehsos
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	Bidang Rehsos
17	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	2	5	0	0	0	Bidang Rehsos
18	Korban Trafiking	4	0	0	0	0	Bidang Rehsos
19	Korban Tindak Kekerasan	18	10	0	0	0	Bidang Bansos
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	50	50	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
21	Korban Bencana alam	675	151	603	8	0	Bidang Bansos
22	Korban Bencana Sosial	1	7	69	76	0	Bidang Bansos
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	60	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
24	Fakir Miskin	82.159	81.325	82.675	82.675	82.217	Bidang Pengembangan
25	Komunitas Adat terpencil	0	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
26	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	60	60	100	60	60	Bidang Pemberdayaan
Jumlah Jiwa		87.140	85.806	86.330	86.612	85.730	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti

Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi.

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Laju pertumbuhan pembangunan ketenagakerjaan, merupakan bagian dari upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta rasa percaya diri masyarakat melalui pendidikan dan latihan serta pembinaan tenaga kerja yang terprogram.

Tabel II.72. Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pencari Kerja	4.220	4.758	4.007	3.031	3.649	3.616

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	94,92%	95,50%	95,90%	59,72%	96,70%	97,50%
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 %	100 %	100%	0%	0%	0%
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100 %	100 %	100%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pencari kerja di Kabupaten Tanggamus selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sebanyak 4.220 orang meningkat menjadi 4.758 orang pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 4.007 orang (2019) dan 3.031 orang (2020). Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 3.649 orang dan tahun 2022 menjadi 3.616 orang. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 94,92% dan terus meningkat hingga mencapai 97,50% pada tahun 2022. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 59,72%, hal ini merupakan dampak pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Sedangkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi serta besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2020-2022 adalah 0%. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana terutama disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang memaksa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan refocusing APBD sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pelaksanaannya menjadi terhambat.

Tabel II.73. Perkembangan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2021			2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	6	5	11	17	1	18

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2021			2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	84	69	153	110	101	211
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	855	945	1.800	877	819	1.696
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK)	784	630	1.414	889	593	1.482
5	Diploma I, II/Akta I, II,III	13	25	38	23	26	49
6	Universitas	80	153	143	62	98	160
	JUMLAH	1.822	1.827	3.649	1.978	1.638	3.616

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat tergambar bahwa para pencari kerja di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 didominasi oleh pencari kerja yang memiliki tingkat Pendidikan tertinggi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1.696 orang atau 46,90%.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

2.3.2.3 Pangan

Kecukupan pangan merupakan salah satu komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta kedaulatan suatu bangsa. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemenuhan hak atas pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pangan daerah merupakan salah satu indikator perhatian pemerintah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang selalu meningkat dirasakan sangat perlu memperhatikan stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.76. Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	147.689	201.846	366.248	225.338	191.426	173.927
2	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	85%	88%	105%	141%	158%	160%
3	Pola Pangan Harapan (PPH)	83,28	83,50	84,60	85,20	86,40	87,61

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

Rasio ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mencapai kemandirian pangan. Rasio ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan pangan utama (ton per tahun) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun (jiwa). Dari tabel di atas terlihat bahwa ketersediaan pangan utama selalu meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 hingga menjadi 173.927. Peningkatan ini

merupakan dampak dari dilaksanakannya Program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi yang dimulai sejak tahun 2016. Sedangkan penurunan ketersediaan pangan utama sejak tahun 2020 disebabkan terjadinya pengurangan luas baku sawah berdasarkan data pengamatan segmen dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Terkait dengan persentase ketersediaan energi dan protein per Kapita pada tahun 2017 sebesar 85% dan terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2022 mencapai 160%. Demikian pula halnya dengan Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun 2017 Skor PPH di Kabupaten Tanggamus sebesar 83,28 dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 87,61 di tahun 2022.

2.3.2.4 Pertanian

Dalam era otonomi daerah saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Tabel II.77. Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase luas lahan bersertifikat	50%	58%	62%	65%	66,5%	68,5%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tanggamus ditahun 2017 sebesar 50% dan terus meningkat hingga mencapai 68,5% ditahun 2022.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009 yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Selain IKLH, masalah yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanggamus adalah masalah persampahan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebelumnya mengalami kesulitan dalam pengumpulan data timbulan dan komposisi sampah, pengurangan sampah di sumber dan penanganan oleh masyarakat. Hal ini tentunya mempengaruhi kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah. Oleh karena itu pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanggamus meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Tanggamus Ramah Amanah Tangguh dan Unggul (SIPESTA RATU). SIPESTA RATU merupakan Aplikasi yang dibangun untuk mengatasi permasalahan pengumpulan data sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain itu SIPESTA RATU juga bertujuan untuk mendapatkan data sampah guna mengetahui persentase sampah terkelola yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan target dan strategi penanganan sampah kedepannya. Berikut data capaian pengurangan dan penanganan sampah dalam Aplikasi SIPESTA RATU.

Tabel II.78. Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020-2022

NO	URAIAN	CAPAIAN		
		2020 (Ton/Tahun)	2021 (Ton/Tahun)	2022 (Ton/Tahun)
1	Timbulan Sampah	93.480,15	94.286,80	133.520,98
2	Sampah Terkelola	15.095,41	18.144,79	36.289,39
3	Sampah Termanfaatkan	4.905,33	5.558,93	16.380,38

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2023

Selain SIPESTA RATU, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga mengembangkan inovasi lain dalam rangka optimalisasi pengelolaan persampahan yakni Eco ENZYME. Eco ENZYME merupakan salah satu solusi pengolahan sampah organik menjadi produk yang sangat bermanfaat baik untuk kehidupan sehari-hari, kesehatan, air, udara dan tanah serta lahan pertanian dengan sistem pembuatan yang sangat mudah dan sederhana. 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik yang dapat menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan. Pembusukan sampah organik menghasilkan gas metana, dengan Eco ENZYME, sebagian besar sampah dapat diolah dan mengurangi beban TPA.

Selain yang telah disebutkan di atas, capaian kinerja lingkungan hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.79. Perkembangan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerahkabupaten	-	Ada	-	-	Ada	Ada
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	66,5	55,27	62,50	63,76	64,27	62,06
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	59	60	50	53,33	57,92	51.54
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	0-50	0-50	0-50	83,11	84,22	86.78
7	Hasil Pengukuran Kualitas Tutupan Lahan .	30	30	30	53,37	34,42	34.42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Tabel II.80. Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk	58.98%	60.76%	63.50%	69.04%	70.03%
2	Rasio bayi berakte kelahiran	95.81%	94.76%	97.01%	99.43%	99.00%
3	Rasio pasangan berakte nikah	1.60%	5.88%	9.58%	14.10%	17.16%
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98.18%	97.68%	99.88%	99.56%	98.84%
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	237,609	264,710	277,241	289,734	309,423

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2018, rasio penduduk berKTP per satuan penduduk di Kabupaten Tanggamus hanya mencapai 58,98%, rasio ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 70,03% pada tahun 2022.

Demikian pula halnya dengan rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah maupun cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang setiap tahun mengalami trend positif (meningkat), sedangkan capaian untuk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah mencapai 98,84% dan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran mencapai 309.423.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan Daerah Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengenai pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan desa dan kelurahan. Karena desa dan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana desa dan kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepadapihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran desa dan kelurahan di atas menjembatani

program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ditambah dengan pembangunan fisik yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel II.81. Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	58%	60%	65%	70%	85%	85%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68%	70%	78%	85%	90%	95%
3	Persentase LSM aktif	66%	70%	75%	78%	-	-
4	Persentase LPM Berprestasi	57%	60%	78%	80%	-	-
5	Persentase PKK aktif	66%	70%	75%	85%	90%	100%
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	60%	65%	75%	78%	80%	80%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum indikator terkait pemberdayaan masyarakat dan desa semakin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia, oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan BUMDes seperti dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk itu pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial yaitu pajak dan pendapatan asli desa tetapi juga manfaat ekonomi secara luas berupa lapangan kerja dan ekonomi berkelanjutan.

Tabel II.82. Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH BUMDes MENURUT JENIS USAHA					JUMLAH
		TOKO PERTANIAN, TOKO, PERDAGANGAN, PERBENGKELAN	SIMPAN PINJAM	HOME INDUSTRI	PARIWISATA	PENGOLAHAN SAMPAH	
1	Kota Agung	2			1		3
2	Talang Padang	7		2			9
3	Wonosobo	10	2	4		2	18
4	Pulau Pangung	5	1	1			7
5	Cukuh Balak	4		1	5		10
6	Pugung	2	1	1			4
7	Semaka	3	1	2			6
8	Sumberejo	1			1		2
9	Ulu Belu	2		1			3
10	Pematang Sawa	1		1			2
11	Kelumbayan	3			1		4
12	Kota Agung Barat	6		1			7
13	Kota Agung Timur	1		1			2
14	Gisting	1	2		1	4	8
15	Gunung Alip	1					1
16	Limau	1					1
17	Bandar Negeri Semuong						0
18	Air Naningan	3	1	1			5
19	Bulok						0
20	Kelumbayan Barat	1	1	1			3
	JUMLAH	54	9	17	9	6	95

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2023

Disamping hal yang telah disebutkan di atas, keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel II.83. Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pekon Sangat Tertinggal	25	37	4	0	0	0	0
2	Jumlah Pekon Tertinggal	173	174	53	24	6	3	0
3	Jumlah Pekon Berkembang	95	81	218	236	242	220	189
4	Jumlah Pekon Maju	6	7	24	39	51	76	108
5	Jumlah Pekon Mandiri	0	0	0	0	0	0	2
	Total Pekon	299	299	299	299	299	299	299

Sumber : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 terdapat 25 desa/pekon sangat tertinggal namun kondisi tersebut terus mengalami perbaikan hingga tahun 2023 sudah tidak tersisa lagi pekon tertinggal, 189 pekon berkembang, telah memiliki 108 pekon maju dan sampai saat ini di Kabupaten Tanggamus baru terdapat 2 pekon dengan status mandiri.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Sasaran dari program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam

penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Tabel II.84. Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,72 %	2,5 %	2,4%	1,72%	1,15%
2	Persentase akseptor KB MKJP	28,12 %	30,9 %	33.95%	34,26%	38,39%
3	Persentase angka kelahiran pada remaja	34, 1%	32,09%	13,11%	0,0037%	0,0021%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.2.9 Perhubungan

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam Kabupaten Tanggamus, maka penyediaan sarana dan prasarana perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, karena secara langsung maupun tidak langsung akan dapat memperlancar arus barang, jasa dan orang.

Sistem transportasi haruslah dikembangkan dan dikelola secara terpadu untuk mewujudkan sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Selain jalan dalam kondisi mantap, sarana dan prasarana perhubungan lainnya sangat berperan penting terhadap lancarnya mobilitas barang, penumpang dan jasa termasuk informasi antar kecamatan maupun antar daerah.

Tabel II.85. Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	6	6	9	9
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	73.00%	4.30%	21.13%	74.20%	101,71%
3	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1,350	1,450	1,570	1,730	1,800
4	Jumlah Kecelakaan Transportasi	226	232	70	89	75

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus dan Polres Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.86. Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	63%	24%	26%	27%	28%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	75%	63%	66%	68%	70%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Tanggamus memiliki trend positif. Pada tahun 2018 cakupan KIM hanya sebesar 63% dan meningkat menjadi 63% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 24%. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Cakupan Layanan Telekomunikasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berarti bahwa cakupan wilayah yang *tercoverage* oleh layanan telekomunikasi di Kabupaten Tanggamus semakin luas.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan.

Tabel II.88. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JENIS UMKM			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	Wonosobo	42	0	0	42
2	Semaka	382	0	0	382
3	Bandar Negeri Semuong	123	0	0	123
4	Kota Agung	598	0	0	598
5	Pematang Sawa	96	0	0	96
6	Kota Agung Timur	206	0	0	206
7	Kota Agung Barat	171	0	0	171
8	Pulau Panggung	995	0	0	995
9	Ulu Belu	619	0	0	619
10	Air Nanningan	80	0	0	80
11	Talang Padang	403	0	0	403
12	Sumberejo	74	0	0	74
13	Gisting	194	0	0	194
14	Gunung Alip	115	0	0	115
15	Pugung	106	0	0	106
16	Bulok	59	0	0	59
17	Cukuh Balak	126	0	0	126
18	Kelumbayan	188	0	0	188
19	Limau	609	0	0	609
20	Kelumbayan Barat	57	0	0	57
		5.243	0	0	5.243

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Tabel II.89. Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2020	2022
1	Jumlah Investor PMDN	9	10	13	17	20
2	Jumlah Investor PMA	4	3	3	3	5
3	Nilai Investasi PMDN	5,621,279,586,298.00	5,719,142,560,182.00	5,696,702,632,992.00	10,568,993,266,988.00	15,060,486,707.00
4	Nilai Investasi PMA	768,755,494,347.22	3,448,616,492,782.00	3,945,758,789,401.30	3,889,381,740,131.00	45,279,620,435.00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah investor PMDN dan PMA pada tahun 2022 masing-masing sebanyak 20 dan 5 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.15,060,486,707.00 untuk PMDN dan Rp.45,279,620,435.00 untuk PMA.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya penbagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda. Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa.

Tabel II.90. Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40%	42%	52%	52%	55%
2	Cakupan pembinaan olahraga	78%	78%	80%	80%	83%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2023

Data yang tersaji menggambarkan masih perlu dioptimalkannya kinerja dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tanggamus. Rendahnya persentase organisasi pemuda yang aktif mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan masih kurang. Sedangkan dari segi cakupan pembinaan olahraga menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2018 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tanggamus sebesar 78% dan meningkat hingga 83% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah cabang olahraga yang dibina di Kabupaten Tanggamus terhadap jumlah cabang olahraga yang terdaftar semakin banyak.

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan membudayakan olahraga di kalangan masyarakat Kabupaten Tanggamus maka saat ini Kabupaten Tanggamus sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B yang berada di Kecamatan Kota Agung.

Gambar II.33 Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B Kabupaten Tanggamus



Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.2.14 Statistik

Pengembangan statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel II.91. Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2023

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten/Kota. Indikator tersebut selama kurun waktu 2018 s.d 2022 telah terpenuhi. Diharapkan keberadaan dua dokumen tersebut dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

2.3.2.15 Persandian

Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronik (komunikasi elektronik) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan pada industri teknologi informasi mengklaim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

Tabel II.92. Perkembangan Indikator Persandian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Tabel II.93. Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	2	-	-	-
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	1	1	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2016-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya.

2.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, peneitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarkan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Tabel II.94. Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	7.771	4.591	4.992	2.879	3.466
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	648	383	416	240	289
3	Jumlah pengadaan koleksi judul buku perpustakaan	330	1.188	226	561	31
4	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	25%	25%	25%	25%	25%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 mencapai 7.771 orang mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2.879 orang hal tersebut dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang menerapkan PPKM

sehingga mengakibatkan jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 3.466 orang.

Demikian pula halnya dengan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun, jumlah koleksi judul buku perpustakaan serta jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan.

Setelah ditetapkannya Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.56/34/08/2020 dan sebagai Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor : 2675/1/PPM.00.00/III/2020 tentang Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, maka dalam rangka mendukung Program Gubernur Lampung, Kabupaten Tanggamus melaksanakan Program Literasi dan Program *Smart Village* yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2021 pada 5 (lima) pekon yaitu:

1. Perpustakaan Rumah Baca Berlian Pekon Kanoman Kecamatan Semaka;
2. Perpustakaan Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat;
3. Perpustakaan Pekon Suka Negeri Jaya Kecamatan Talangpadang;
4. Perpustakaan Jalosi Sanak Negeri Pekon Air Kubang Kecamatan Air Nanningan;
5. Perpustakaan Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting.

Tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis TIK, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub system sosial dalam sistem kemasyarakatan. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah transformasi layanan perpustakaan dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Perubahan paradigm perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah mentransformasikan fungsi-fungsi perpustakaan menjadi :

1. Koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan tidak lagi menjadi koleksi yang usang dan jarang dalam pemanfaatannya oleh masyarakat karena dalam proses pengadaan bahan pustaka tidak memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat yang dilayaninya, namun beralih menjadi wahana rujukan informasi untuk pencarian solusi permasalahan karena proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang mementingkan kebutuhan informasi pengguna dalam rumus pengadaanya.
2. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku-buku dalam rak-rak panjang karena perpustakaan hadir sebagai fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan.
3. Perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang sunyi karena jarang ada masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan namun keberadaan perpustakaan sendiri sudahlah menjadi makerspace atau tempat masyarakat mengembangkan potensi diri (*makerspace*).
4. Perpustakaan berubah dari yang awalnya sebuah lembaga yang minim sentuhan teknologi informasi menjadi perpustakaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat yang berkedudukan jauh dari lokasi perpustakaan. Untuk bisa mengakses sumberdaya informasi yang ada diperpustakaan sudahlah bukan menjadi barang yang sulit karena perpustakaan bias melayani masyarakat yang berlokasi jauh dari lokasi perpustakaan dengan menggunakan internet sebagai media hubungunya.

5. Merubah paradigma pustakawan yang pasif menjadi perpustakaan aktif yang berperan sebagai agen informasi. Pustakawan dituntut untuk selalu bisa menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkannya (Konsep pustakawan bergerak). Pustakawan menjadi sosok sentral yang menjadi penentu berhasil ataupun tidaknya program ini. Ledakan informasi yang pesat menuntut pustakawan untuk berkolaborasi atau bekerja tidak hanya dengan sesama pustakawan saja, melainkan menuntut pustakawan untuk bekerjasama dengan bidang profesi lain dalam mengelola informasi.

2.3.2.18 Kearsipan

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah melalui pengelolaan kearsipan secara baik dan efisien. Hal ini mengingat bahwa arsip sebagai sumber informasi otentik khususnya terkait dengan bukti kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kinerja kearsipan ini terwakili oleh indikator persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bangsa dan negara.

Tabel II.95. Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	15%	20%	25%	30%	35%
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	10%	25%	30%	30%	35%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang kelautan dan perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.96. Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	SUB SEKTOR PERIKANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA					PRODUKSI (TON)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I	Perikanan Tangkap	5,787	5,916	5,916	5,916	5,915	26,798.16	27,331.04	27,385.70	27,892.49	41,631.32
1	Perikanan Laut	5,704	5,704	5,704	5,704	5,703	26,488.56	27,018.34	27,072.37	27,573.54	41,263.43

NO	SUB SEKTOR PERIKANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA					PRODUKSI (TON)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
2	Perikanan Umum	83	212	212	212	212	309.60	312.70	313.33	318.95	367.89
II	Perikanan Budidaya	2,805	2,805	2,805	2,805	2,808	4,668.21	4,982.96	4,982.98	4,799.52	4,740.63
1	Tambak	202	202	202	202	205	2,042.17	2,356.90	2,356.90	2,401.59	2,314.02
2	Kolam	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,626.04	2,626.06	2,626.08	2,397.93	2,426.61

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang sebanyak 26.798,16 Ton menjadi 41.631,32 Ton, begitu juga dengan produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 telah mencapai 4.740,63 Ton.

Tabel II.97. Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan bina kelompok nelayan	24%	26%	28%	27%	28%
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	54%	57%	60%	62%	63%
3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	85	86%	87%	88%	88%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Tanggamus tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian, namun demikian peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, dan keamanan.

Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.98. Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kunjungan Wisata	458.603	599.891	100.965	121.997	603.038
2	Jumlah Wisatawan Domestik	455.068	597.786	100.965	121.997	602.997
3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	3.535	2.105	-	-	41
4	Persentase PAD Sektor Pariwisata	0.006	0.006	0.003	0.003	0.008

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Tanggamus. Dengan kekayaan alam, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif di berbagai wilayah Kabupaten Tanggamus, menjadi daya tarik yang besar untuk industri pariwisata. Kunjungan wisata pada tahun 2018 sebanyak 458.603 orang dan terus meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi *Covid-19* dan kebijakan untuk pembatasan mobilisasi masyarakat yang berimbas pada penurunan secara signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang hanya mencapai 100.965 orang. Namun di tahun 2021, kunjungan wisata sudah mulai kembali meningkat menjadi 121.997 orang dan mulai bangkit pada tahun 2022 menjadi 603.038 orang. Demikian pula dengan PAD sektor pariwisata yang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Daerah yang pada tahun 2022 hanya mencapai 0,008% hal tersebut dikarenakan obyek wisata yang langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya terdapat 3 obyek wisata yaitu Air Terjun Way Lalaan, Pantai Muara Indah dan Kiluan sedangkan obyek wisata yang lainnya dikelola oleh masyarakat secara pribadi dan adapula yang dikelola melalui Pokdarwis.

2.3.3.3 Partanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Ketersediaan pangan daerah merupakan salah satu perhatian pemerintah demi terciptanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang cenderung terus meningkat, stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.99. Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Distribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	2.37	1.03	-2.17	-2.04	1.62
2	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	57,50	57,31	55,87	57,30	57,00
3	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	60	65	65	68	68

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

Distribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun, pada tahun 2017 pertumbuhan distribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 2,37% dan terus menurun hingga hanya mencapai -2,04% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan meningkatnya distribusi sektor lain terhadap PDRB, namun demikian, pertumbuhan distribusi sektor pertanian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 1,62%.

Pada tahun 2018 produktivitas padi sebesar 57,50 Ku/Ha dan mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir dan pada tahun 2022 mencapai 57,00 Ku/Ha.

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral terdiri atas sub urusan geologi, mineral dan batubara dan sub urusan energi baru dan terbarukan, dan ketenagalistrikan. Pembangunan bidang energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan

peningkatan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan mutu serta pelayanannya. Begitu pula dengan pembangunan dan pengembangan energi kelistrikan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Pembangunan sarana dan prasarana energi kelistrikan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi. Untuk tersedianya pelayanan kelistrikan sampai ke dusun-dusun di semua wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.100. Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	76,48	84,13	92,55	94,29	96,78
2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	89,75	95,60	95,65	96,65	97,50
3	Jumlah EBT yang Terbangun	0	271	0	180	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar 76,48% dan terus meningkat hingga mencapai angka 96,78% di tahun 2022. Persentase ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Demikian pula halnya dengan rasio ketersediaan daya listrik yang semakin meningkat setiap tahun, pada tahun 2018 rasio daya listrik adalah 89,75% dan pada tahun 2022 rasionya meningkat menjadi 97,50%. Sedangkan pembangunan EBT terlaksana pada tahun 2019 dan 2021 masing-masing sebanyak 271 dan 180 unit.

2.3.3.5 Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan

melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Majunya sistem perdagangan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, bidang ini diharapkan mampu bersaing, bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh, berorientasi pasar global sehingga mampu bersaing baik dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, perdagangan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bahan pokok, dengan sistem distribusi yang efisien, efektif dan berkelanjutan, sehingga terbentuk harga yang wajar dan stabil, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku ekonomi lemah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Tabel II.101. Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	(1,081,495.90)	(1,263,315.89)	(1,362,647.04)	(1,348,589.05)	(1,327,556.95)
2	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Konstan (rupiah)	(553,553.51)	(541,215.17)	(493,511.14)	(488,597.71)	(442,050.57)
3	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,053,520.36	10,952,881.98	11,030,427.90	11,614,319.16	12,980,346.88

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2023

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018-2022, nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2018-2022 menunjukkan nilai negatif sebesar Rp.-1,327,556.95 (PDRB ADHB) dan Rp.-442,050.57 (PDRB ADHK) yang berarti nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor.

2.3.3.6 Perindustrian

Pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi tidak terlepas dari peranan bidang industri, oleh sebab itu pembangunan bidang industri sangat dibutuhkan untuk mewujudkan terciptanya lapangan kerja baru, memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang ada di daerah serta mengembangkan potensi lokal.

Pembangunan bidang industri di Kabupaten Tanggamus diupayakan melalui pemberdayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia, di samping itu terus mengupayakan laju pertumbuhan industri kecil dan menengah. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan sektor ini bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu karena masih terbatasnya modal usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah maka perlu mengupayakan kemitraan, baik melalui BUMN maupun dengan bank penyanggah dana serta antara produsen bahan baku dengan pelaku industri kecil dan menengah.

Tabel II.102. Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	11,76%	12,50%	13,10%	14,21%	15,41%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2023

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah keseluruhan kelompok pengrajin. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan sebesar 11,76% dan terus meningkat hingga mencapai 15,41% pada tahun 2022.

2.3.3.7 Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi kedepan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan transmigrasi.

Tujuan pelaksanaan urusan transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

Tabel II.103. Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Transmigran Swakarsa	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	15 KK	5 KK	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di Kabupaten Tanggamus tidak pernah dilaksanakan transmigrasi secara swakarsa. Transmigrasi yang dilaksanakan adalah transmigrasi umum yang merupakan program dari pemerintah. Tingkat keikutsertaan transmigrasi di Kabupaten Tanggamus fluktuatif. Pada tahun 2016 masyarakat yang mengikuti program ini sebanyak 15 KK, pada tahun 2017 terdapat 5 KK yang mengikuti program transmigrasi sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 tidak ada masyarakat yang mengikuti program transmigrasi ini.

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel II.104. Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, 2023

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus telah tersedia atau ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, sedangkan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus juga telah tersedia atau ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah juga telah tersedia atau ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031. Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah Jumlah Program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 penjabaran mencapai persentase sebesar 100%. Demikian pula dengan penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD yang mencapai persentase 100%.

2.3.4.2 Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan



Keuangan Daerah dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistik, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Tabel II.105. Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	94,20	95,53	93,01	89,07	88,56
3	Persentase Realisasi Belanja Daerah	92,71	92,51	91,20	83,48	87,07
4	Persentase Realisasi Pembiayaan Daerah	99,60	98,91	104,56	29,29	90,46
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

Sejak tahun 2017-2021 Kabupaten Tanggamus telah memperoleh Opini BPK dengan predikat WTP lima kali berturut-turut dan tahun 2022 mendapatkan WDP. Persentase Pendapatan Daerah pada tahun 2018 sebesar 94,20% menjadi 88,56% pada tahun 2022 begitu pula dengan Persentase Realisasi Belanja Daerah juga mengalami penurunan dari 92,71% pada tahun 2018 menjadi 87,07% pada tahun 2022. Sedangkan untuk Realisasi Pembiayaan Daerah mengalami fluktuatif dengan realisasi terendah pada tahun 2021 yang hanya 29,29% hal tersebut dikarenakan Rencana Pinjaman Daerah melalui Program PEN pada tahun 2021 belum dapat terrealisasi dan baru terealisasi pada tahun 2022.

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi prioritas utama sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Upaya yang

dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran langsung di tempat bekerja secara informal, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu merancang program khususnya sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilindungi Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.106. Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020	2021	2022
1	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	8,36	7,40	7,06	9,04
2	Nilai Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	5,92	7,40	8,49	8,05
3	Nilai Profesionalitas ASN	-	67,50	52,28	54,23
4	Nilai Merit System	-	-	136,50	173,5

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2023

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun *corporate*. Hal-hal yang menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 mendapatkan nilai 70,14 dengan dengan Kategori

Sangat Inovatif yang mengantarkan posisi Kabupaten Tanggamus berada peringkat 8 dari 415 Kabupaten se-Indonesia, nilai tersebut meningkat dari tahun 2021 yang baru mencapai 62,32.

Terkait Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), berdasarkan Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022, Kabupaten Tanggamus mendapatkan skor 2,53 skor tersebut meningkat dari tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar 1,85055 dan 2,429, meskipun demikian skor tersebut masih dibawah skor Provinsi Lampung yang telah mencapai 3,02 dan Nasional 3,26. Penilaian IDSD ini terdiri dari 4 aspek dan 12 pilar, yakni Aspek Lingkungan Pendukung dengan 4 pilar, Aspek SDM dengan 2 pilar, Aspek Pasar dengan 4 pilar dan Aspek Ekosistem Inovasi dengan 2 pilar.

Tabel II.107. Rincian Aspek Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	Aspek Lingkungan Pendukung	
	Pilar 1 Institusi	4,01
	Pilar 2 Infrastruktur	1,83
	Pilar 3 Adopsi TIK	2,93
	Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro	2,74
2	Aspek SDM	
	Pilar 5 Kesehatan	3,77
	Pilar 6 Keterampilan	2,71
3	Aspek Pasar	
	Pilar 7 Pasar Produk	2,55
	Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja	1,51
	Pilar 9 Sistem Keuangan	2,56
	Pilar 10 Ukuran Pasar	0,72
4	Aspek Ekosistem Inovasi	
	Pilar 11 Dinamisme Bisnis	5,00
	Pilar 12 Kapabilitas Inovasi	0,07
	Skor Indeks Daya Saing Daerah	2,53
	Predikat	SEDANG

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Selain IID dan IDSD, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD

bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. IPKD Provinsi diukur oleh Menteri melalui Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/Kota diukur oleh Gubernur, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. Hasil penilaian dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu :

- Kategori A : Baik
- Kategori B : Perlu Perbaikan
- Kategori C : Sangat perlu Perbaikan

Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.108. Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

NO	TAHUN	IPKD	KATEGORI	KLASTER
1	2018	72,9389	Baik	Sedang
2	2019	67,8997	Baik	Sedang
3	2020	77,2524	Baik	Sedang
4	2021	48,3465	Sangat Perlu Perbaikan	Sedang

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/725/VI.06/HK/2021 dan Aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2019, nilai IPKD mengalami penurunan dari 72,9389 di tahun 2018 menjadi 67,8997 pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 77,2524.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota, sampai dengan dokumen ini disusun Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 belum diterima oleh Kabupaten Tanggamus.

Nilai IPKD untuk tahun 2022 berdasarkan nilai yang terdapat pada aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id Kabupaten Tanggamus mendapatkan nilai 48,3465 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dimensi 1 : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sebesar 8.384
2. Dimensi 2 : Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD sebesar 13.793
3. Dimensi 3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 14.224
4. Dimensi 4 : Penyerapan Anggaran sebesar 10
5. Dimensi 5 : Kondisi Keuangan Daerah sebesar 1.945
6. Sedangkan untuk Dimensi 6 : Opini BPK, tidak dilakukan pengukuran oleh Pihak Provinsi Lampung melalui aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id sehingga nilai IPKD Kabupaten Tanggamus masuk kategori sangat perlu perbaikan padahal untuk penilaian IPKD tahun 2021, Dimensi 6 tersebut mendapatkan bobot 15, karena Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu WTP selama 3 tahun terakhir berturut-turut (2018-2021).

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai peningkatan IPKD dan IID antara lain yaitu :

- 1) Penyusunan dokumen penganggaran harus benar-benar mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
- 2) Memastikan belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan anggaran untuk mendukung program prioritas;
- 3) Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang akuntabel dan keterbukaan publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan memaksimalkan peran tim percepatan penyerapan anggaran dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa;
- 5) Menjaga kapasitas fiskal daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 6) Mengoptimalkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan pembinaan dan pendampingan dari APIP, BPKP dan BPK;

- 7) Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan inovasi daerah;
- 8) Melaksanakan program satu inovasi satu pekan.

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang disingkat dengan Bappelitbang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah Pasal 66 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) *BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.*
- (2) *Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.*

serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Kabupaten Tanggamus saat ini telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Implikasi dari hal tersebut maka mulai 2 Januari 2023 Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, dan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang disingkat dengan Bapperida.

Salah satu fokus utama yang dilaksanakan oleh Bapperida adalah mendorong seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten



Tanggamus untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Gambar II.34. Transformasi Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

Terkait dengan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk Kabupaten Tanggamus saat belum menyusun dan akan disusun pada periode RPJMD berikutnya termasuk juga dengan Rencana Prioritas Penelitian (RPP).

Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan Riset serta Pengendali Mutu Riset dan Pelaksana Riset untuk Kabupaten Tanggamus saat ini belum dibentuk.

Untuk jumlah SDM Peneliti berupa jabatan fungsional penelitian, saat ini di Kabupaten Tanggamus baru terdapat 1 orang peneliti sedangkan untuk jabatan fungsional perencana berjumlah 34 orang.

Untuk Indikator Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (ITKPD), Kabupaten Tanggamus belum melakukan pengukuran dan akan mulai dilaksanakan pada tahun mendatang.

2.3.4.5 Pengawasan

Dalam upaya menuju terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kinerja pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.109. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan APIP Inspektorat dan BPK, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	TAHUN	TEMUAN	STATUS		
			S	DP	B
I.	APIP INSPEKTORAT				
1	2016	635	561	56	18
2	2017	614	539	53	22
3	2018	583	481	41	61
4	2019	711	524	34	153
5	2020	788	369	23	396
6	2021	1,198	674	17	507
7	2022	634	377	34	223
	JUMLAH I	5,163	3,525	258	1,380
II	BPK				
1	2016	39	36	3	-
2	2017	46	45	1	-
3	2018	64	52	12	-
4	2019	58	44	14	-
5	2020	17	11	6	-
6	2021	84	23	61	-
7	2022	55	11	43	1
	JUMLAH II	363	222	140	1
	TOTAL	5,526	3,747	398	1,381

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.110. Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Inspektorat	97.17%	96.42%	89.54%	78.48%	49.75%	57.68%	64.83%
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.18%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase tindak lanjut temuan APIP Inspektorat selama tahun 2016-2022 mengalami fluktuasi, tindak lanjut yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 49,75%, sedangkan tindak lanjut temuan tertinggi dilakukan pada tahun 2016 sebesar 97,17%.

Sedangkan untuk persentase tindak lanjut temuan BPK selama tahun 2016-2022 tercatat telah ditindaklanjuti 100% kecuali di tahun 2022 yang baru mencapai 98,18%.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) merupakan salah satu instrumen pengawasan di Daerah, berikut disajikan data formasi Auditor dan PPUPD di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.111. Analisis Kebutuhan Auditor dan PPUPD Kabupaten Tanggamus

NO	JABATAN	JUMLAH SAAT INI	KEBUTUHAN HASIL ANALISA BEBAN KERJA	KEKURANGAN
I	AUDITOR			
1	Utama			-
2	Madya	2	7	5
3	Muda	9	15	6
4	Pertama	1	30	29
5	Pelaksana Lanjutan	1	1	-
	JUMLAH I	13	53	40
II	PPUPD			
1	Utama			-
2	Madya	15	26	11
3	Muda	27	30	3
4	Pertama	-	26	26
	JUMLAH II	42	82	40
	TOTAL	55	135	80

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa saat ini terdapat 55 jabatan fungsional yang sudah terisi terdiri dari 13 orang auditor dan 42 orang PPUPD, berdasarkan hasil analisis beban kerja, masih dibutuhkan sejumlah 40 orang auditor dan 40 orang PPUPD.

2.3.4.6 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat Dewan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.112. Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana KerjaTahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi Program- Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

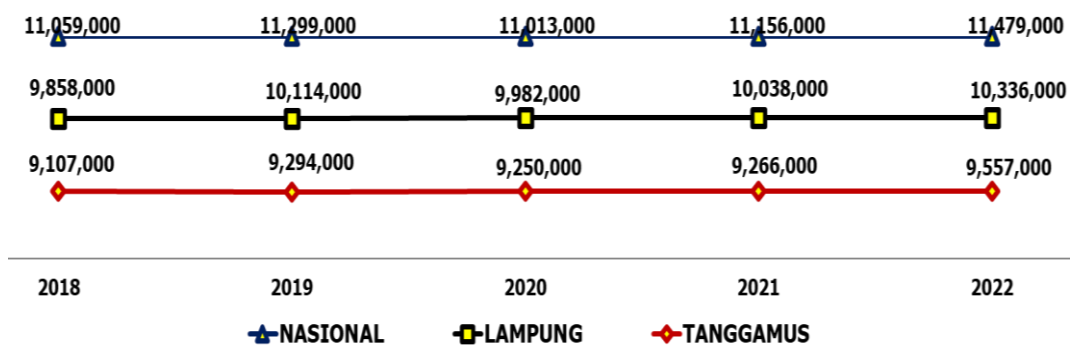
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dari dimensi ekonomi, capaian pembangunan manusia yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dari pada capaian dalam dimensi pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 sebesar Rp.9.266.000,- meningkat menjadi Rp.9.557.000,- pada tahun 2022.

Gambar II.35. Pengeluaran Perkapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan grafik di atas, terlihat pengeluaran per kapita yang merupakan representasi dimensi standar hidup layak senantiasa mengalami tren peningkatan, pada tahun 2018 pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus mencapai Rp.9.107.000,- dan terus meningkat sampai tahun 2022 menjadi sebesar Rp.9.557.000,- meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp.9.250.000,- akibat mewabahnya pandemi *Covid-19* yang menghambat kemampuan daya beli masyarakat. Pengeluaran per kapita ypenanang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi nilai tersebut masih dibawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional.

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan penambahan pendapatan petani sangat erat, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP>100, berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- NTP=100, berarti petani mengalami **impas/breakeven**. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase



kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.

- NTP<100, berarti petani mengalami **defisit**. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Tabel II.113. Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	KECAMATAN	NILAI TUKAR PETANI (NTP)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cukuh Balak	143.88	195.87	165.74	46,83	64,10	91.80
2	Pugung	140.22	76.99	64.23	71,17	73,49	110.07
3	Talang Padang	140.12	181.57	174.03	77,09	78,95	106.04
4	Pulau Panggung	133.20	122.00	146.62	81,28	81,77	93.13
5	Kota Agung	141.37	221.26	204.41	39,50	78,95	100.93
6	Wonosobo	133.39	144.50	153.30	93,24	95,49	104.72
7	Kelumbayan	136.74	297.54	189.99	54,58	59,95	45.08
8	Sumberejo	138.79	200.77	181.71	37,72	75,57	103.63
9	Ulu Belu	130.61	413.17	303.41	32,62	80,97	107.92
10	Pematang Sawa	148.97	115.44	102.01	41,52	68,38	89.16
11	Semaka	143.23	53.89	60.25	95,65	95,98	99.25
12	Gisting	142.41	361.05	403.58	66,23	129,53	103.63
13	Kota Agung Timur	139.84	105.78	92.60	178,75	135,14	112.26
14	Kota Agung Barat	132.72	102.84	124.48	123,45	116,73	101.77
15	Air Nanningan	136.31	698.23	442.22	23,77	89,69	102.24
16	Limau	135.26	555.50	404.24	17,00	80,97	46.30
17	Gunung Alip	138.62	120.80	103.30	125,51	131,69	114.26
18	Bandar Negeri Semong	135.34	120.16	181.02	69,06	73,86	90.14
19	Bulok	138.59	95.73	124.25	119,01	119,20	113.61
20	Kelumbayan Barat	136.21	496.99	275.97	47,57	81,63	88.70
	Jumlah Rata-Rata	140.72	147.14	140.10	71,09	88,03	101.20

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai nilai yang lebih besar dari 100 (surplus). Namun pada tahun 2020, NTP mengalami penurunan menjadi 71,09 (defisit), hal ini disebabkan adanya pandemi *Covid-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mempunyai dampak pada sektor

ekonomi. Pada tahun 2021, nilai NTP kembali meningkat walaupun masih bernilai dibawah 100 yaitu 88,03 dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 101,20.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 302 Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus, 49 Pekon masuk dalam prioritas 1 (16.23 %), 24 Pekon prioritas 2 (7.95 %), 61 Pekon prioritas 3 (20.20 %), 81 Pekon prioritas 4 (28.82 %), 44 Pekon prioritas 5 (14.57 %) dan 43 Pekon prioritas 6 (14.24 %). Kecamatan yang memiliki rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Ulu Belu, Air Naningan, Pematang Sawa, Wonosobo, Semaka, Kotaagung Pusat, Gisting, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Cuku Balak dan kecamatan lain yaitu sebanyak 134 Pekon.

Tabel II.114. Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022

NO	PRIORITAS	RASIO LAHAN SAWAH	JUMLAH PEKON/KELURAHAN	PERSENTASE
1	1	≤ 0.0804	49	16.23 %
2	2	$> 0.0804 - 0.1117$	24	7.95 %
3	3	$> 0.1117 - 0.1721$	61	20.20 %
4	4	$> 0.1117 - 0.1721$	81	28.82 %
5	5	$> 0.2846 - 0.4573$	44	14.57 %
6	6	> 0.4573	43	14.24 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

2.4.2.2 Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 302 Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus, 44 Pekon masuk dalam prioritas 1 (14.57 %), 42 Pekon prioritas 2 (13.91 %), 64 Pekon prioritas 3 (21.19 %), 61 Pekon priorias 4 (2020 %), 44 Pekon prioritas 5 (14.57 %) dan 47 Pekon prioritas 6 (15.56 %).

Tabel II.115. Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022

NO	PRIORITAS	RASIO SARANA PRASARANA EKONOMI	JUMLAH PEKON/KELURAHAN	PERSENTASE
1	1	≤ 0.0233	44	14.57 %
2	2	$> 0.0233 - 0.0321$	42	13.91 %
3	3	$> 0.0321 - 0.0425$	64	21.19 %
4	4	$> 0.0425 - 0.0544$	61	20.20 %
5	5	$> 0.0544 - 0.0660$	44	14.57 %
6	6	> 0.0660	47	15.56 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

2.4.2.3 Akses Transportasi

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang

memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (farm gate price) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021 yang dipublish oleh BPS di Kabupaten Tanggamus, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 2 atau roda 4. Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Tanggamus, akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi alternatif penting untuk memperpendek waktu tempuh dan transportasi barang ke daerah lain. Masyarakat sebagian menggunakan perahu

motor sebagai moda transportasinya, seperti di wilayah Kecamatan Pematang Sawa (Tamang Tua, Kaur Gading, Tirom, Teluk Brak, Karang Brak, Way Asahan, Tamang Muda, dan Matanda) serta sebagian kecil Kecamatan Cukuh Balak (Kuta Kakhang, Karang Buah, Suka Banjar dan Sawang Balak).

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Salah satu penyumbang iklim berinvestasi adalah faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.116. Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Tanggamus	24.98	30.85	32.23	29.92	40.58	36.54	44.88

Sumber : Kepolisian Resort, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Tanggamus terjadi secara fluktuatif, angka kriminalitas di tahun 2021 mengalami perbaikan dari tahun 2020 yang semula 40,58 menjadi 36,54 akan tetapi sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 44,88 yang berarti dalam setiap 100.000 penduduk terjadi 44 tindak kriminalitas.

2.4.3.2 Jenis Tindak Kriminal

Seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas, maka dipastikan jenis tindak kriminal yang terjadi juga semakin tinggi, hal tersebut tentu saja menjadi fokus perhatian untuk ditangani dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tabel II.117. Jenis Tindak Kriminal Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	JENIS TINDAK KRIMINAL	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus Narkoba	70	78	79	105	89	103	104
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	2	2	1	-	2	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	23	17	21	8	36	22	28
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	29	36	35	13	41	40	18
5	Jumlah Kasus Pencurian	12	21	23	23	46	39	113
6	Jumlah Kasus Penipuan	9	27	30	29	32	30	30
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	-	1	-	1	-	-
	Jumlah Tindak Kriminal Selama Satu Tahun	145	181	191	179	245	236	293

Sumber : Kepolisian Resort, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2023

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

Tingkat pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Tanggamus masih didominasi dengan tamatan SD/ sederajat yang mencapai 30,17% sedangkan yang memiliki ijazah tertinggi SMA/keatas baru mencapai 24,44%.

Tabel II.118. Persentase Penduduk Kabupaten Tanggamus Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2022

NO	KARAKTERISTIK	TIDAK PUNYA IJAZAH SD	SD/ SEDERAJAT	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ KEATAS
1	Jenis Kelamin				
	Laki-Laki	16.22	30.47	28.32	24.99
	Perempuan	21.46	29.84	24.87	23.83
2	Kelompok Pengeluaran				
	40 Persen Terbawah	21.19	31.20	23.15	24.45
	40 Persen Tengah	17.14	31.96	30.53	20.09
	20 Persen Teratas	16.91	25.03	25.58	32.48
	Kabupaten Tanggamus	18.74	30.17	26.66	24.44

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel II.119 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2022

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
1	Kabupaten Tanggamus	51,03	50,31	47,84	46,67	46,31	46,08	45,96

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2022 rasio ketergantungan Kabupaten Tanggamus terus menurun, apabila pada tahun 2010 rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tanggamus sebesar 51,03% maka pada tahun 2022 menjadi 45,96%. Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Kabupaten Tanggamus mulai memasuki bonus demografi pada tahun 2014 pada saat RK di bawah 50%. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan.

Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Berdasarkan data diatas maka dengan nilai RK tahun 2022 sebesar 45,96 berarti setiap 100 penduduk angkatan kerja (produktif) menanggung sebanyak 45 penduduk usia non produktif.

2.4.4.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan publik, kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur memegang peranan yang sangat penting, sampai saat ini sumber daya apatur di Kabupaten Tanggamus sebanyak 10.544 orang yang terdiri dari 5.003 orang PNS, 1.418 orang PPPK dan 4.123 orang Non ASN.

Tabel II.120. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Tahun 2023

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	PNS	2,167	2,836	5,003	47.45%
2	PPPK	457	961	1,418	13.45%
3	NON ASN	2,047	2,076	4,123	39.10%
JUMLAH		4,671	5,873	10,544	100.00%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data diatas, sumber daya aparatur di Kabupaten Tanggamus paling banyak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 5.873 orang dan sisanya laki-laki sebanyak 4.671 orang.

Tabel II.121. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SUMBER DAYA APARATUR			JUMLAH	%
		PNS	PPPK	NON ASN		
1	S3	-	-	-	-	0.00%
2	S2	340	-	12	352	3.34%
3	S1	3,362	1,368	1,315	6,045	57.33%
4	D4	128	1	33	162	1.54%
5	D3	608	37	608	1,253	11.88%
6	D2	130	-	149	279	2.65%
7	D1	17	-	34	51	0.48%
8	SMA	401	12	1,687	2,100	19.92%
9	SMP	12	-	144	156	1.48%
10	SD	5	-	141	146	1.38%
JUMLAH		5,003	1,418	4,123	10,544	100.00%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2023

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki, sumber daya aparatur di Kabupaten Tanggamus paling banyak berpendidikan setingkat S1 yang mencapai 57,33% dan yang paling sedikit berpendidikan setingkat D1 yang hanya 0,48%.

Tabel II.122. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Golongan Sampai Dengan Tahun 2023

NO	GOLONGAN	PNS	PPPK	JUMLAH	TOTAL	%
1	IV/d / XVI	1	-	1	1.351	21,04%
	IV/c / XV	33	-	33		
	IV/b / XIV	741	-	741		
	IV/a / XIII	576	-	576		
2	III/d / XII	813	-	813	4.429	68,98%
	III/c / XI	731	-	731		
	III/b / X	798	9	807		
	III/a / IX	719	1,359	2,078		
3	II/d / VIII	297	-	297	627	9,76%
	II/c / VII	202	37	239		
	II/b / VI	50	-	50		
	II/a / V	29	12	41		
4	I/d / IV	9	1	10	14	0,22%
	I/c / III	3	-	3		
	I/b / II	1	-	1		
	I/a / I	-	-	-		
JUMLAH		5,003	1,418	6,421	6,421	100,00%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data diatas, apabila dilihat dari sisi golongan yang dimiliki maka komposisi terbanyak berada pada Golongan III/a – III/d atau IX – XII yang mencapai 68,98% sedangkan yang paling sedikit berada pada Golongan I/a – I/d atau I – IV yang hanya 0,22%.

Selain capaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa capaian kinerja pembangunan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.



Tabel II.123. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
I	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1.1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar							
A	Pendidikan							
1	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program KOBER	10.5%	35,0 %	28,85%	47,07%	69,96%	65%	>
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program SPS	61%	2,0 %	2,70%	2,72%	69,20%	65%	>
3	Angka Partisipasi Kasar:							
	SD/MI	108,80	107,80	105,93	104,69	103.69	100	>
	SMP/MTs	92,95	90,09	92,78	92,89	107.05	100	>
	SMA/SMK/MA	82,57	77,99	77,91	78,11	78.33	100	<
4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	102.1%	94,93 %	95,47%	73,23%	96,82%	100	<
5	Angka Partisipasi Murni:							
	SD/MI	97,83	98,33	98,17	97,27	99,96	100	<
	SMP/MTs	77,40	77,33	78,88	80,79	80.01	100	<
	SMA/SMK/MA	57,94	57,17	56,96	56,34	55.72	100	<
6	Angka Partisipasi Sekolah:							
	SD	94.5%	98,58%	95,90%	94,41%	93,82%	100	<
	SMP	48.0%	88,00%	86,85%	87,08%	78,03%	100	<
7	Angka Putus Sekolah:							
	SD	0,16%	0,12%	0,02%	0,17%	0,45%	0	<
	SMP	0,94%	1,00%	0,09%	0,49%	1,43%	0	<
8	Angka Mengulang:							
	SD	1,14%	0,96%	0,09%	0,30%	0,72%	0	<
	SMP	0,04%	0,33%	0,00%	0,01%	0,02%	0	<
9	Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar dengan kondisi baik	54%	66,86%	66,59%	33,35%	80,62%	100%	<
10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah:							
	SD	4%	4%	66,28%	66,66%	66,10%	100%	<
	SMP	16%	16%	39,30%	39,67%	40,01%	100%	<
11	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar:							
	Rasio Guru/Murid	1:20	1:12	1:13	1:11	1:8	1:20	>
	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:28	1:22	1:21	1:20	1:13	1:20	>
12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama:							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
	Rasio Guru/Murid	1:20	1:11	1:12	1:11	1:8	1:20	>
	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:28	1:29	1;28	1:29	1:32	1:20	<
B	Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH	6.6	5.8	1.0	0.9	3.5	0	<
2	Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 KH	6.6	6.6	0.3	0.3	0.4	0	<
3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	12	3	9	14	11	0	<
4	Cakupan P2M dan PTM:							
	Tb-Paru	729	725	822	577	795	0	<
	HIV-AIDS	37	43	31	36	53	0	<
	Kusta	16	-	4	12	8	0	<
	DBD	108	257	167	124	212	0	<
	Malaria	-	8	2	1	-	0	=
	Hipertensi	12.336	33.894	24.220	42.295	75.605	0	<
5	Jumlah Posyandu	686	689	690	693	694		=
6	Jumlah Balita	54.742	53.966	44.445	43.043	49.950		=
7	Rasio Per 100 Balita	1,25	1,28	1,55	1,61	1,4		=
8	Jumlah Puskesmas	23	24	24	24	24		=
9	Jumlah Klinik	18	16	17	17	21		=
10	Jumlah Pustu	54	54	54	54	53		=
11	Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk	1:25.765,3	1:24.929,1	1:25.154,4	1:26.908,6	1:27.204,1		=
12	Rasio Klinik per Jumlah Penduduk	1:32.922,4	1:37.393,7	1:35.512,1	1:30.752,7	1:31.090,4		=
13	Rasio Pustu per Jumlah Penduduk	1:10.974,1	1:11.079,6	1:11.179,7	1:11.959,4	1:12.318,8		=
14	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1		=
15	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0		=
16	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0		=
17	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1		=
18	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2		=
19	Rasio per Jumlah Penduduk	1:296.301	1:299.149	1:301853	1: 322.904	1:326.449		=
20	Jumlah Dokter	83	80	75	91	97		<
21	Rasio Per per Jumlah Penduduk	1:7139,8	1:7139,8	1:8049,4	1:7096,8	1:6730,9		<
22	Spesialis Penyakit Dalam	2	2	2	3	3		<
23	Spesialis Kandungan	3	3	3	3	3		<
24	Spesialis Anak	2	2	2	2	2		<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
25	Spesialis Bedah	1	1	1	2	2		<
26	Spesialis Anastesi	1	1	1	2	2		<
27	Specialis Radiologi	1	1	1	2	2		<
28	Specialis Orthopedi	1	1	1	0	0		<
29	Specialis Paru	1	1	1	1	1		<
30	Specialis Patologi	0	1	1	2	2		<
31	<i>Underweight</i>	15,50%	2,13%	2,13%	14,20%	16,70%		<
32	<i>Stunting</i>	29,87%	27,39%	27,39%	25,00%	20,40%		<
33	<i>Wasting</i>	2,40%	1,29%	1,29%	5,70%	7,80%		<
34	Gemuk	3,10%	0,66%	0,66%	0,66%	1,90%		<
C	Pekerjaan Umum							
1	Persentase Jalan Mantap	46.65%	48.76%	49.25%	49.61%	37.45%	70,00%	<
2	Persentase Jembatan Mantap	54.84%	54.84%	70.97%	72.26%	64.82%	70,00%	<
3	Persentase Irigasi Mantap	61.95%	62.97%	63.43%	64.21%	64.49%	70,00%	<
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1	Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	3,85%	11,75%	21,44%	30,87%	30,95%	100%	<
2	Rumah Tidak Layak Huni	96,15%	88,25%	78,56%	69,13%	69,05%	70%	>
E	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	85%	70%	80%	87%	88%	100%	<
2	Keberadaan Ancaman Terorisme dan Konflik SARA	0%	25%	0%	0%	0%	0%	=
F	Sosial							
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	75%	86%	96,21%	74,93%	79,72%	80%	<
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	73%	75%	78%	87,86%	75,85%	80%	<
1.2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
A	Tenaga Kerja							
1	Jumlah Pencari Kerja	4.758	4.007	3.031	3.649	3.616		=
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	95,50%	95,90%	59.72%	96,70%	97,50%	100%	<
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 %	100%	0%	0%	0%	100%	<
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100 %	100%	0%	0%	0%	100%	<
5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
	Ditamatkan:							
	Sekolah Dasar (SD)				11	18		<
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)				153	211		<
	Sekolah Menengah Atas (SMA)				1.800	1.696		<
	Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK)				1.414	1.482		<
	Diploma I, II/Akta I, II,III				38	49		<
	Universitas				143	160		<
B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Kekerasan Terhadap Anak	34	23	22	33	38	0	<
2	Kekerasan Terhadap Perempuan	16	10	1	2	5	0	<
3	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	>
4	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	47%	51.84%	53.63	55.45%	55.45%	30%	>
5	Nilai Kabupaten Layak Anak	-	-	-	563.95	736.15	500	>
6	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	>
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.90	56.97	56.80	56.39	56.54	90	<
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.14	90.88	91.13	90.98	91.10	90	>
C	Pangan							
1	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	201.846	366.248	225.338	191.426	173.927		=
2	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	88%	105%	141%	158%	160%		=
3	Pola Pangan Harapan (PPH)	83,50	84,60	85,20	86,40	87,61		=
D	Pertanahan							
1	Persentase luas lahan bersertifikat	58%	62%	65%	66,5%	68,5%	100%	<
E	Lingkungan Hidup							
1	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)			93.480,15	94.286,80	133.520,98		<
2	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)			15.095,41	18.144,79	36.289,39		<
3	Sampah Termanfaatkan (Ton/Tahun)			4.905,33	5.558,93	16.380,38		<
4	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
6	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerahkabupaten	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	=
7	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	55,27	62,50	63,76	64,27	62,06	80,00	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
8	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	60	50	53,33	57,92	51.54	80,00	<
9	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	0-50	0-50	83,11	84,22	86.78	80,00	<
10	Hasil Pengukuran Kualitas Tutupan Lahan .	30	30	53,37	34,42	34.42	80,00	<
F Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	58.98%	60.76%	63.50%	69.04%	70.03%	100%	<
2	Rasio bayi berakte kelahiran	95.81%	94.76%	97.01%	99.43%	99.00%	100%	<
3	Rasio pasangan berakte nikah	1.60%	5.88%	9.58%	14.10%	17.16%	100%	<
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98.18%	97.68%	99.88%	99.56%	98.84%	100%	<
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	237,609	264,710	277,241	289,734	309,423		=
G Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	60%	65%	70%	85%	85%	100%	<
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	70%	78%	85%	90%	95%	100%	<
3	Persentase LSM aktif	70%	75%	78%	-	-	100%	<
4	Persentase LPM Berprestasi	60%	78%	80%	-	-	100%	<
5	Persentase PKK aktif	70%	75%	85%	90%	100%	100%	=
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	65%	75%	78%	80%	80%	100%	<
7	Jumlah Pekon Sangat Tertinggal	37	4	0	0	0	0	=
8	Jumlah Pekon Tertinggal	174	53	24	6	3	0	<
9	Jumlah Pekon Berkembang	81	218	236	242	220		<
10	Jumlah Pekon Maju	7	24	39	51	76		<
11	Jumlah Pekon Mandiri	0	0	0	0	0		<
H Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Persentase Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,72 %	2,5 %	2,4%	1,72%	1,15%	1,00%	<
2	Persentase akseptor KB MKJP	28,12 %	30,9 %	33.95%	34,26%	38,39%	100%	<
3	Persentase angka kelahiran pada remaja	34, 1%	32,09%	13,11%	0,0037%	0,0021%	0%	=
I Perhubungan								
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	6	6	9	9		=
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	73.00%	4.30%	21.13%	74.20%	101,71%		=



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
3	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1,350	1,450	1,570	1,730	1,800		=
4	Jumlah Kecelakaan Transportasi	226	232	70	89	75	0	<
J Komunikasi dan Informatika								
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	63%	24%	26%	27%	28%	100%	<
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	75%	63%	66%	68%	70%	100%	<
K Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Jumlah Koperasi Aktif		94	75	97	71		<
L Penanaman Modal								
1	Jumlah Investor PMDN	10	10	13	17	20		<
2	Jumlah Investor PMA	3	3	3	3	5		<
3	Nilai Investasi PMDN	5,633,081,763,793.00	5,719,142,560,182.00	5,696,702,632,992.00	10,573,543,266,988.00	10,588,603,753,695.00		<
4	Nilai Investasi PMA	756,953,316,852.22	3,448,616,492,782.75	3,945,758,789,401.30	3,889,381,740,131.00	3,934,661,360,566.00		<
M Kepemudaan dan Olah Raga								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40%	42%	52%	52%	55%	100%	<
2	Cakupan pembinaan olahraga	78%	78%	80%	80%	83%	100%	<
N Statistik								
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
O Persandian								
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	51	<
P Kebudayaan								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	2	-	-	-	2	<
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs		=
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	1	1	-	-		<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
Q	Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	7.771	4.591	4.992	2.879	3.466		<
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	648	383	416	240	289		<
3	Jumlah pengadaan koleksi judul buku perpustakaan	330	1.188	226	561	31		<
4	Persentase pustakawan, tenaga teknis,dan penilai yang memiliki sertifikat	25%	25%	25%	25%	25%		<
R	Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	15%	20%	25%	30%	35%	100%	<
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	10%	25%	30%	30%	35%	100%	<
1.3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan							
A	Pariwisata							
1	Jumlah Kunjungan Wisata	458.603	599.891	100.965	121.997	603.038		>
2	Persentase PAD Sektor Pariwisata	0.006	0.006	0.003	0.003	0.008		<
B	Pertanian							
1	Pertumbuhan Distribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	2.37	1.03	-2.17	-2.04	1.62		<
2	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	57,50	57,31	55,87	57,30	57,00		<
3	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	60	65	65	68	68		<
C	Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	76,48	84,13	92,55	94,29	96,78	100%	<
2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	89,75	95,60	95,65	96,65	97,50	100%	<
3	Jumlah EBT yang Terbangun	0	271	0	180	0		<
D	Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	(1,081,495.90)	(1,263,315.89)	(1,362,647.04)	(1,348,589.05)	(1,327,556.95)		<
2	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Konstan (rupiah)	(553,553.51)	(541,215.17)	(493,511.14)	(488,597.71)	(442,050.57)		<
3	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,053,520.36	10,952,881.98	11,030,427.90	11,614,319.16	12,980,346.88		<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
E	Perindustrian							
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	11,76%	12,50%	13,10%	14,21%	15,41%		<
F	Transmigrasi							
1	Persentase Transmigran Swakarsa	0%	0%	0%	0%	0%		<
2	Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	-	-	-	-	-		<
G	Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Rumah Tangga:							
	Perikanan Laut	5,704	5,704	5,704	5,704	5,703		=
	Perikanan Umum	83	212	212	212	212		=
	Perikanan Tangkap	5,787	5,916	5,916	5,916	5,915		=
	Tambak	202	202	202	202	205		=
	Kolam	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603		=
	Perikanan Budidaya	2,805	2,805	2,805	2,805	2,808		=
2	Produksi (Ton):							
	Perikanan Laut	26,488.56	27,018.34	27,072.37	27,573.54	41,263.43		=
	Perikanan Umum	309.60	312.70	313.33	318.95	367.89		=
	Perikanan Tangkap	26,798.16	27,331.04	27,385.70	27,892.49	41,631.32		=
	Tambak	2,042.17	2,356.90	2,356.90	2,401.59	2,314.02		=
	Kolam	2,626.04	2,626.06	2,626.08	2,397.93	2,426.61		=
	Perikanan Budidaya	4,668.21	4,982.96	4,982.98	4,799.52	4,740.63		=
3	Cakupan bina kelompok nelayan	24%	26%	28%	27%	28%		<
4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	54%	57%	60%	62%	63%		<
5	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	85	86%	87%	88%	88%		<
1.4	Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan							
A	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	=
B Keuangan								
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	=
2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	94,20	95,53	93,01	89,07	89,06	95,00	
3	Persentase Realisasi Belanja Daerah	92,71	92,51	91,20	83,48	87,07	95,00	
4	Persentase Realisasi Pembiayaan Daerah	99,60	98,91	104,56	29,29	90,46	95,00	
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
C Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
1	Nilai Kualitas Pelayanan Publik		8,36	7,40	7,06	9,04	10,00	<
2	Nilai Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN		5,92	7,40	8,49	8,05	10,00	<
3	Nilai Profesionalitas ASN		-	67,50	52,28	54,23	100,00	<
4	Nilai Merit System		-	-	136,50	173,5	400,00	<
D Penelitian dan Pengembangan								
1	Indeks Daya Saing Daerah	-	-	1.8506	2.4290	2.5300		=
2	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	62,32	70,14		>
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,9389	67,8997	77,2524	48,3465	-		<
E Pengawasan								
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	84,49%	83,80%	96,70%				<
F Sekretariat Dewan								
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
	Rencana Tahunan (RKPD)							
3	Terintegrasi Program- Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
2.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	9.107.000	9.294.000	9.250.000	9.266.000	9.557.000		<
B	Nilai Tukar Petani	147.14	140.10	71,09	88,03	101.20	100.00	>
2.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
A	Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk							
1	Prioritas 1					16.23 %		=
2	Prioritas 2					7.95 %		=
3	Prioritas 3					20.20 %		=
4	Prioritas 4					28.82 %		=
5	Prioritas 5					14.57 %		=
6	Prioritas 6					14.24 %		=
B	Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga							
1	Prioritas 1					14.57 %		=
2	Prioritas 2					13.91 %		=
3	Prioritas 3					21.19 %		=
4	Prioritas 4					20.20 %		=
5	Prioritas 5					14.57 %		=
6	Prioritas 6					15.56 %		=
2.3	Fokus Iklim Berinvestasi							
A	Angka Kriminalitas	32.23	29.92	40.58	36.54	44.88		<
B	Jenis Tindak Kriminal							
1	Jumlah Kasus Narkoba	79	105	89	103	104		<
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	1	-	2	0		<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022		
3	Jumlah Kejahatan Seksual	21	8	36	22	28		<
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	35	13	41	40	18		<
5	Jumlah Kasus Pencurian	23	23	46	39	113		<
6	Jumlah Kasus Penipuan	30	29	32	30	30		<
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	1	-	1	-	-		>
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama Satu Tahun	191	179	245	236	293		<
2.4 Fokus Sumber Daya Manusia								
A	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik danbencana Ijazah Tertinggi yang Dimiliki							
1	Tidak Punya Ijazah SD					18,74		<
2	SD/Sederajat					30,17		<
3	SMP/Sederajat					26,66		<
4	SMA/Keatas					24,44		<
B	Rasio Ketergantungan	46,31		46,08		45,96		<

Sumber : Perangkat Daerah Terkait, 2023

2.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pada Sub Bab khusus Standar Pelayanan Minimal ini akan diuraikan terkait dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal berupa realisasi SPM yang telah dicapai pada tahun 2019-2020 serta target yang akan dicapai pada tahun 2021-2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat 6 jenis SPM yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
6. Sosial.

2.5.1 Target dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.124. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PRATAMA			73.64%
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini				77.52%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.42%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	21,846	17,318	4,528	79%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.11%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1 . Buku gambar	34,636	31,414	3,222	90.70%
	2 . Alat mewarnai	34,636	31,414	3,222	90.70%
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	9,424,200,000	9,375,056,000	49,144,000	99.48%
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	496	213	283	42.94%
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,176	339	837	28.83%
	JUMLAH	9,424,270,944	9,375,119,380	49,151,564	99.48%
2 .	Pendidikan Dasar				95.21%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.34%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	97,904	93,430	4,474	95.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.86%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1 . Buku teks pelajaran	186,860	186,860	0	100.00%
	2 . Perlengkapan belajar	169,064	152,589	16,475	90.26%
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	488	488	0	100.00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	793	711	82	89.66%
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3,808	3,626	182	95.22%
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	73,031,424,274	70,105,611,266	2,925,813,008	95.99%
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5,756	4,851	905	84.28%
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	488	484	4	99.18%
	JUMLAH	73,031,791,531	70,105,960,875	2,925,830,656	95.99%
3 .	Pendidikan Kesetaraan				48.19%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	30.82%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	15,707	6,052	9,655	39%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.37%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1 . Modul belajar	3,334	1,861	1,473	55.82%
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	190	179	11	94.21%
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	3,642,100,000	3,474,756,000	167,344,000	95.41%
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	166	141	25	84.94%
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	21	21	0	100.00%
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	20	18	2	90.00%
	7 . Perlengkapan belajar	1,134	956	178	84.30%
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	20	18	2	90.00%
	JUMLAH	3,642,104,885	3,474,759,194	167,345,691	95.41%

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023



2.5.2 Target dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.125. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	BELUM TUNTAS			56.17%
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				84.03%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.68%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	11,311	10,700	611	95%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8.35%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) - (Unit)	11,311	1,000	10,311	8.84%
	2 . Tablet tambah darah	11,311	8,670	2,641	76.65%
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	11,311	1,000	10,311	8.84%
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	11,311	311	11,000	2.75%
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11,311	10,700	611	94.60%
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	56	24	32	42.86%
	7 . Bidan	400	302	98	75.50%
	8 . Perawat	100	24	76	24.00%
	JUMLAH	57,111	22,031	35,080	38.58%
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				81.34%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.72%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10,797	9,680	1,117	90%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				9.61%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Formulir Partograf	10,797	0	10,797	0%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	10,797	100	10,697	0.93%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10,797	9,680	1,117	89.65%
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	80	24	56	30.00%
	5 . Bidan	400	302	98	75.50%
	6 . Perawat	26	24	2	92.31%
	JUMLAH	32,897	10,130	22,767	30.79%
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				85.41%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.89%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10,283	9,883	400	96%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8.52%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Vaksin Hepatitis B0	10,283	1,000	9,283	9.72%
	2 . Vitamin K1 injeksi	10,283	0	10,283	0%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	10,283	1,000	9,283	9.72%
	4 . Formulir bayi baru lahir	10,283	1,000	9,283	9.72%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	10,283	0	10,283	0%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10,283	9,680	603	94.14%
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	26	24	2	92.31%
	8 . Bidan	400	302	98	75.50%
	9 . Perawat	26	24	2	92.31%
	JUMLAH	62,150	13,030	49,120	20.97%
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita				63.11%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	55.25%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	49,950	34,497	15,453	69%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				7.86%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	49,950	24	49,926	0.05%
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	49,950	24	49,926	0.05%
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	49,950	9,680	40,270	19.38%
4	Vitamin A Biru	10,283	9,092	1,191	88.42%
5	Vitamin A Merah	40,199	34,497	5,702	85.82%
6	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	49,950	9,879	40,071	19.78%
7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	49,950	8,258	41,692	16.53%
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	49,950	12,000	37,950	24.02%
9	Peralatan Anafilaktik	26	2	24	7.69%
10	Bidan	400	302	98	75.50%
11	Dokter	42	24	18	57.14%
12	Perawat	120	24	96	20.00%
13	Ahli Gizi	26	12	14	46.15%
14	Guru PAUD	302	125	177	41.39%
15	Kader Kesehatan	1,260	1,100	160	87.30%
	JUMLAH	352,358	85,043	267,315	24.14%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				53.38%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	47.49%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	83,916	49,812	34,104	59%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				5.89%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Buku raport kesehatanku	83,916	15,000	68,916	17.88%
2	Buku pemantauan kesehatan	83,916	0	83,916	0%
3	Kuesioner skrining kesehatan	83,916	24	83,892	0.03%
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	83,916	303	83,613	0.36%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	83,916	303	83,613	0.36%
	6 . Dokter/Dokter gigi	55	24	31	43.64%
	7 . Bidan	400	302	98	75.50%
	8 . Perawat	124	24	100	19.35%
	9 . Ahli Gizi	26	12	14	46.15%
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	26	12	14	46.15%
	11 . Guru	1,200	340	860	28.33%
	12 . Kader Kesehatan	1,450	1,100	350	75.86%
	JUMLAH	422,861	17,444	405,417	4.13%
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				46.14%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	37.60%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	394,052	185,220	208,832	47%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8.53%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	24	2	92.31%
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	26	24	2	92.31%
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	0	26	0%
	4 . Dokter	68	24	44	35.29%
	5 . Bidan	700	302	398	43.14%
	6 . Perawat	460	24	436	5.22%
	7 . Ahli Gizi	28	12	16	42.86%
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	12	16	42.86%
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	10	3	7	30.00%
	JUMLAH	1,372	425	947	30.98%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				23.66%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	17.26%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	67,390	14,536	52,854	22%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				6.40%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	67,390	1,000	66,390	1.48%
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	67,390	100	67,290	0.15%
	3 . Buku kesehatan lansia	67,390	1,308	66,082	1.94%
	4 . Dokter	60	24	36	40.00%
	5 . Bidan	400	302	98	75.50%
	6 . Perawat	120	24	96	20.00%
	7 . Ahli Gizi	26	12	14	46.15%
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	12	16	42.86%
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	5	3	2	60.00%
	JUMLAH	202,809	2,785	200,024	1.37%
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				36.65%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	27.72%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	121,821	42,205	79,616	35%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8.94%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	24	2	92.31%
	2 . Tensimeter	26	24	2	92.31%
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	0	26	0%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Dokter	78	24	54	30.77%
	5 . Bidan	650	302	348	46.46%
	6 . Perawat	500	24	476	4.80%
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	26	12	14	46.15%
	JUMLAH	1,332	410	922	30.78%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				43.41%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	34.60%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3,692	1,597	2,095	43%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8.81%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	26	24	2	92.31%
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	0	26	0%
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	24	2	92.31%
	4 . Dokter	78	24	54	30.77%
	5 . Bidan	650	302	348	46.46%
	6 . Perawat	500	24	476	4.80%
	7 . Ahli Gizi	28	12	16	42.86%
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	12	16	42.86%
	JUMLAH	1,362	422	940	30.98%
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				48.70%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	40.99%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,046	536	510	51%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				7.71%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				58.02%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	52.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	14,231	9,250	4,981	65%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				6.02%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	60	60	0	100.00%
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	14,231	1,000	13,231	7.03%
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	14,231	1,342	12,889	9.43%
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	26	0	26	0%
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	26	24	2	92.31%
	6 . Perawat	26	24	2	92.31%
	7 . Bidan	26	0	26	0%
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	26	0	26	0%
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	26	0	26	0%
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	5	0	5	0%
	JUMLAH	28,683	2,450	26,233	8.54%

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023



2.5.3 Target dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.126. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PRATAMA			74.94%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				65.83%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	58.64%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	604,556	443,125	161,431	73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				7.19%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	604,556	277,038	327,518	45.83%
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	604,556	433,125	171,431	71.64%
	3 . Jaringan perpipaan	604,556	59,663	544,893	9.87%
	4 . Jaringan bukan perpipaan	604,556	99,597	504,959	16.47%
	JUMLAH	2,418,224	869,423	1,548,801	35.95%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				84.05%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	604,556	604,556	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				4.05%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	604,556	92,864	511,692	15.36%
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	604,556	62,866	541,690	10.40%
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	604,556	472,825	131,731	78.21%
	4 . Sub-sistem pengangkutan	604,556	42,866	561,690	7.09%
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	604,556	30,866	573,690	5.11%
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	604,556	31,986	572,570	5.29%
	JUMLAH	3,627,336	734,273	2,893,063	20.24%

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.127. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			97.50%
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				95.00%
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	50	50	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0%
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	48	48	0	100.00%
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100.00%
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	1	1	0	100.00%
	JUMLAH	50	50	0	100.00%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10	10	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	2	2	0	100.00%
	2 . Subsidi uang sewa	2	2	0	100.00%
	3 . Penyediaan rumah layak huni	6	6	0	100.00%
	JUMLAH	10	10	0	100.00%

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

2.5.4 Target dan Realisasi SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas tiga Sub Urusan yaitu, Sub Urusan Bencana Daerah, Sub Urusan Kebakaran Daerah dan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Bencana Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Kebakaran Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.128. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			88.56%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM	TUNTAS UTAMA			96.67%
1 .	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				96.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	558	558	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.67%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0%
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	12	12	0	100.00%
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	20	20	0	100.00%
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	9	9	0	100.00%
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	172	172	0	100.00%
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	15	15	0	100.00%
	JUMLAH	228	228	0	100.00%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	TUNTAS UTAMA			97.33%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	74,554	74,554	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100.00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	289,479	289,479	0	100.00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	1	1	0	100.00%
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	11	11	0	100.00%
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	289,479	289,479	0	100.00%
	JUMLAH	578,971	578,971	0	100.00%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	74,554	74,554	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	1	1	0	100.00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	25	25	0	100.00%
	JUMLAH	26	26	0	100.00%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				92.00%
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1,500	1,500	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.00%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	13	13	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	13	13	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	0	0	0	0%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	13	13	0	100.00%
	JUMLAH	39	39	0	100.00%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR	TUNTAS PRATAMA			71.67%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				71.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	53.33%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	6	4	2	66.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.33%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	6	4	2	66.67%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	20	20	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	5	5	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	98	98	0	100.00%
	JUMLAH	129	127	2	98.45%

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus, 2023



2.5.5 Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel II.129. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			93.07%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				92.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	895	895	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	4	4	0	100.00%
	4 . Penyediaan permakanan	427	427	0	100.00%
	5 . Penyediaan sandang	400	400	0	100.00%
	6 . Penyediaan alat bantu	52	52	0	100.00%
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	0	0	0%
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	10	10	0	100.00%
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	11 . Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
	14 . Layanan rujukan	4	4	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	JUMLAH	900	900	0	100.00%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				93.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	885	885	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				13.33%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00%
	2 . Penyediaan permakanaan	253	253	0	100.00%
	3 . Penyediaan sandang	253	253	0	100.00%
	4 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	253	253	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1	1	0	100.00%
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	9 . Akses ke layanan pendidikan	123	123	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
	12 . Layanan rujukan	2	2	0	100.00%
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	0%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	JUMLAH	889	889	0	100.00%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				90.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,330	1,330	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.67%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan permakanaan	435	435	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	435	435	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	24	24	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	435	435	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	0	0	0	0%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	10 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	0%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
	13 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00%
	JUMLAH	1,333	1,333	0	100.00%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				93.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	73	73	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				13.33%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan permakanaan	10	10	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	10	10	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	10	10	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	10	10	0	100.00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	10 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	0%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	10	10	0	100.00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00%
	JUMLAH	73	73	0	100.00%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				96.00%
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	61	61	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu
	1 . Penyediaan permakanaan	30	30	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	30	30	0	100.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	100.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0	0%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	30	30	0	100.00%
	JUMLAH	91	91	0	100.00%

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2023

2.6 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum), 17 tujuan dari SDGs adalah, yaitu:

1. Menghapus kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan dan kesejahteraan;
4. Kualitas pendidikan yang baik;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi;
7. Akses ke energi yang terjangkau;
8. Pertumbuhan ekonomi;
9. Inovasi dan infrastruktur;
10. Mengurangi ketimpangan;
11. Pembangunan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mencegah dampak perubahan iklim;
14. Menjaga sumberdaya laut;
15. Menjaga ekosistem darat;
16. Perdamaian dan keadilan; dan
17. Revitalisasi kemitraan global.



SDGs ditetapkan oleh PBB pada akhir September 2015 di New York dengan masa berlaku mulai Januari 2016 hingga Desember 2030 dan ada sekitar 193 negara anggota PBB yang berkomitmen untuk melaksanakan SDGs.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel II.130. Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
PILAR SOSIAL													
TUJUAN : 1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan													
1	Tersusunnya Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	%	0	100	Naik	100	100	-	100	100	100	100	100
2	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus	%	14.05	13.14	Turun	1.44	-1.05	-1	12.00	10.52	11.31	10.94	10.84
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	2.01	1.81	Turun	0.1	-0.2	-	1.61	1.41	1.21	1.01	0.81
4	Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0.43	0.35	Turun	0	-0.08	-	0.27	0.19	0.11	0.03	0
5	Pendampingan Program perlindungan sosial	N/A	N/A	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
6	Pengembangan sistem pengaduan masyarakat miskin	N/A	N/A	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
7	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	%	8.23	8.50	Naik	11,74	0.27	-	8.77	9.04	9.31	9.58	9.85
8	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	%	89	89	Naik	89.00	0	-	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
9	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	44	45	Naik	57.00	1	-	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	1	1	Naik	1.00	0	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	91	91	Naik	91.00	0	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
12	Rasio Bayi berakte kelahiran	%	35	35.64	Naik	43.3	0.64	-	36.27	36.91	37.55	38.19	38.82



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
13	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	per 100000 penduduk	-	-	Turun	0	0	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Desa Sigap Bencana	5	10	Naik	70	5	-	15	20	25	30	35
15	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
16	Berkurangnya Wilayah Rawan Banjir	Kecamatan	3	2	Turun	0	-1	-	1	0	0	0	0
TUJUAN : 2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan													
1	Prevalensi Kasus Gizi Buruk	%	1	1	Turun	0	0	3.2	0	0	0	0	0
2	Rasio Ahli Gizi per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	0.03	0.03	Naik	0.03	0	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	N/A	100.00	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
4	Luas areal lahan sawah (Ha)	Hektar	23080	23080	Naik	23080	0	-	23080	23080	23080	23080	23080
5	Luasan panen tanaman padi (sawah/ladang)	Hektar	24884	24884	Naik	24884	0	-	24884	24884	24884	24884	24884
6	Luasan panen tanaman jagung dan kedelai (Ha)	Hektar	3ke615	3977	Naik	8318	362	-	4338	4700	5061	5423	5784
7	Luasan panen tanaman ubi kayu dan ubi jalar (Ha)	Hektar	618	607	Naik	717	11	-	596	607	618	629	640
8	Luasan panen tanaman sayuran (Ha)	Hektar	485	534	Naik	1119	49	-	582	631	679	728	776



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
9	Produksi ikan budidaya (ton)	Ton	17732	19370	Naik	39026	1638	-	21008	22646	24284	25922	27560
TUJUAN : 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia													
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	%	39.3	30	Turun	0	-9	-6	20.70	11.40	2.10	0.00	0.00
2	Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terampil	%	93	94	Naik	100	1	1.2	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00
3	Angka Kematian Bayi (0-1 th) per 1000 KH	Kasus	11.50	11.00	Turun	1.5	-1	-2.2	10.50	10.00	9.50	9.00	8.5
4	Angka Kematian Balita (0-5 Th) per 1000 KH	Kasus	5	5	Turun	0	0	-1	0	0	0	0	0
5	Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun	%	0	0	Turun	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Malaria per 1.000 orang	API per 1000 penduduk	-	-	Turun	0	0	-	0	0	0	0	0
7	Angka Kesakitan DBD	Jumlah	398	358	Turun	0	-40	-	318	278	238	198	158
8	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Orang	0	0	Turun	0	0	-	0	0	0	0	0
9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	49	55	Naik	100	6	3.36	61.00	67.00	73.00	79.00	85.00
10	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	Puskesmas	1 : 24641	1 : 24641	Naik	1:1600 0	0	-	3 : 24641	2 : 24641	1 : 24641	0 : 24641	1 : 24641
11	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
12	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Dokter/ 100.000 penduduk	7.24	7.42	Naik	9.58	0	-	7.60	7.78	7.96	8.14	8.32

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
13	Rasio Tenaga Apoteker per 100.000 penduduk	Apoteker/100.000 penduduk	2.76	2.83	Naik	3.66	0	-	2.89	2.96	3.03	3.10	3.17
14	Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk	Perawat/100.000 penduduk	49.45	50.69	Naik	63.87	1	-	51.92	53.16	54.40	55.63	56.87
15	Rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk	Bidan/100.000 penduduk	90.46	90.46	Naik	90.46	0	-	90.46	90.46	90.46	90.46	90.46
TUJUAN : 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua													
1	APK SD/MI	%	97.05	92.43	Naik	97.75	0.10	0.584	97.05	97.05	97.05	97.05	97.05
2	APM SD/MI	%	99.05	79.8	Naik	100	0.05	-	83.7	87.9	92.3	96.9	98.0
3	APK SMP/MTS	%	93.00	61.12	Naik	98.35	0.05	0.058	64.18	67.38	70.75	74.29	78.01
4	APM SMP/MTS	%	90.06	34.7	Naik	44.55	0.05	-	36.4	38.2	40.1	42.1	44.2
5	Rasio Guru/Murid (SD)	%	1 : 30	1 : 20	Naik	1 : 20	-1	-	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
6	Rasio Guru/Murid (SMP)	-	1 : 30	1 : 20	Naik	1 : 30	0	-	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	46.5	47.5	Naik	59.5	1	5.94	48.5	49.5	50.5	51.5	52.5
8	Angka Melek Huruf	%	95.90	97.22	Naik	100	1	-	98.19	98.69	98.78	99.28	99.78
TUJUAN : 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan													
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	38.50	39	Naik	39.1	0.01	-	39.01	39.01	39.02	39.02	39.03
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	20	20	-	30	0	-	20	20	20	30	30
3	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah KDRT	Kasus	4	4	Turun	0	0	-	0	0	0	0	0

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
PILAR EKONOMI													
TUJUAN : 7. Menjamin Akses Energi Bersih dan Terjangkau													
1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	68.5	89.60	Naik	100	3.43	4.935	95.3	96.1	97.0	97.5	98.0
2	Rasio elektrifikasi perdesaan	%	95	96	Naik	100	1	0.8	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0
TUJUAN : 8. Meningkatkan Pertumbuhan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi													
1	Laju Pertumbuhan PDRB	%	5.18	5.02	Naik	7.58	0.26	-	5.20	5.25	3.20	4.00	4.05
2	PDRB Perkapita (Berlaku)	Juta Rp	21.24	24.53	Naik	28.14	-	-	26.02	25.74	26.76	27.51	28.60
3	PDRB atas harga Konstan	Juta Rp	9.37	10.35	Naik	19.57	22.55	-	10.17	10.68	10.36	11.41	12.50
4	Persentase Kontribusi sub sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1.86	1.91	Naik	2.49	0.05	1.22	1.95	2.00	2.05	2.09	2.14
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68.46	75.67	Naik	90.7	1.71	-	75.88	76.00	76.59	61.28	78.73
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.72	2.21	Turun	1.22	-0.14	-0.02	2.22	2.22	2.95	2.90	2.89
7	Jumlah Bank yang beroperasi di Kab Tanggamus	Unit	-	-	Naik	-	0	-	-	-	-	-	-
TUJUAN : 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi													
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	27.45	46.65	Naik	100	5.49	8	37.64	51.88	51.10	51.50	52.00
2	Jalan Kondisi Terpelihara (%)	%	75	75	Naik	100	0	5	75.00	75.00	75.00	75.00	90.00
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	6.82	6.97	Naik	7.33	0.07	-	7.00	7.03	7.06	7.09	7.12
4	Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	%	8.88	8.97	Naik	10,04	0.09	-	9.06	9.15	9.24	9.32	9.41

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
5	Persentase tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan	%	75.40	79.17	Naik	99	3.77	-	82.94	86.71	90.48	94.25	98.02
TUJUAN :10. Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara													
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	58	54	Turun	0	-4	-	50	46	42	38	34
2	Jumlah desa mandiri	Desa	30	34	Naik	299	4	-	38	42	46	50	54
3	Gini Rasio	Nilai	0,405	0,378	Turun	0,250	-0,027	-	0,359	0,349	0,344	0,339	0,338
PILAR LINGKUNGAN													
TUJUAN : 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua													
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	65	66.63	Naik	83.30	1.63	3.33	68.26	69.89	71.52	73.15	74.78
2	Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak	%	52.70	55	Naik	100.00	2.3	9	57.30	59.60	61.90	64.20	66.50
3	Penangan Limbah	%	NA	10	Naik	100.00	10	18	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
TUJUAN :11. Membangun Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
1	Luas Kawasan Kumuh	%	25	23.75	Turun	0	-1.25	-4.75	22.50	21.25	20.00	18.75	17.5
2	Persentase sampah yang dapat diangkut	%	69	70.67	Naik	65.83	1.67	-0.97	72.34	74.01	75.68	77.35	79.02
PILAR HUKUM													
TUJUAN :16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh													
1	Jumlah kasus kejahatan	Kasus	284	281	Turun	0	-3	-56.2	278	275	272	269	266
2	Persentase kasus kejahatan yang tertangani	%	48.5	53.35	Naik	45	4.85	-1.67	58.20	63.05	67.90	72.75	77.60
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	Naik	WTP	0	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
4	Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Skor	CC	CC	Naik	A	0	-	B	B	BB	BB	BB
5	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	64.00	67.20	Naik	85.00	3.2	3.56	70.40	73.60	76.80	80.00	83.20

Sumber : Analisis Data Diolah, 2022



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RPD



**422
TANGGAMUS
092**

**“Berilah aku 1.000 ORANG TUA,
niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya,
berilah aku 10 PEMUDA,
niscaya akan kuguncangkan dunia”
- Soekarno -**



BAB III

Gambaran Keuangan Daerah



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila rencana penyelenggaraan program pembangunan daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah (*money follow programs*). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan daerah.

Untuk memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah serta rencana kerangka pendanaan pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan analisis pengelolaan keuangan daerah merupakan analisis terhadap potensi, kapasitas dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus dalam mendanai pembangunan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pola/*trend* pengelolaan keuangan, digunakan analisis timeseries terhadap data lima tahun terakhir. Adapun yang dimaksud dengan analisis rencana kerangka pendanaan pembangunan yaitu prakiraan kemampuan pendanaan daerah berdasarkan hasil proyeksi gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun terakhir.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah pada kurun waktu tahun 2018-2023 berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perkembangan Pelaksanaan APBD Tahun 2018-2023 yang merupakan kinerja keuangan masa lalu yaitu pada periode RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai salah satu referensi dalam penentuan kerangka pendanaan periode RPD Tahun 2024-2026.

Penghitungan rata-rata pertumbuhan APBD Tahun 2018-2023 dibagi kedalam dua bagian yaitu APBD 2018-2020 dan APBD 2021-2023 karena pada tahun 2018-2020 pedoman yang digunakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sedangkan untuk APBD 2021-2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dengan adanya kedua peraturan perundang-undangan tersebut terjadi perubahan pada komponen struktur APBD.



Tabel III.1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2020 Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	PENDAPATAN	1,631,619,474,036.93	1,792,040,255,121.27	1,757,062,983,559.00	3.77%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	75,901,363,793.95	97,328,147,574.94	100,965,303,213.28	15.34%
1.1.1	Pajak Daerah	22,743,715,740.49	33,988,873,118.23	35,668,045,917.08	25.23%
1.1.2	Retribusi Daerah	4,438,300,000.00	4,531,630,000.00	4,890,815,000.00	4.97%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,984,379,451.55	4,184,379,400.00	4,900,000,000.00	10.90%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44,734,968,601.91	54,623,265,056.71	55,506,442,296.20	11.39%
1.2	Dana Perimbangan	1,073,793,422,199.00	1,146,214,708,816.00	1,086,546,887,197.00	0.59%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55,527,622,000.00	68,155,007,342.00	63,940,797,131.00	7.31%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	778,605,786,000.00	798,148,818,000.00	725,176,840,000.00	-3.49%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	239,660,014,199.00	279,910,883,474.00	297,429,250,066.00	11.40%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	481,924,688,043.98	548,497,398,730.33	569,550,793,148.72	8.71%
1.3.1	Pendapatan Hibah	62,189,200,000.00	61,485,000,000.00	77,968,245,647.00	11.97%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	134,769,351,029.98	165,158,294,432.33	130,056,803,965.14	-1.76%
1.3.6	Pendapatan Lainnya	284,966,137,014.00	321,854,104,298.00	361,525,743,536.58	12.63%
2	BELANJA	1,647,834,231,117.93	1,814,735,408,301.66	1,807,630,524,556.50	4.74%
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,046,754,626,769.75	1,093,735,542,157.37	1,123,455,801,352.07	3.60%
2.1.1	Belanja Pegawai	621,511,902,108.20	654,019,543,025.57	634,226,563,270.38	1.02%
2.1.4	Belanja Hibah	87,470,781,277.55	50,986,340,300.00	56,695,259,450.00	-19.49%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	287,000,000.00	1,022,622,010.00	1,022,622,010.00	88.76%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2,718,201,574.00	3,904,146,821.80	5,132,723,782.49	37.41%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	331,994,119,800.00	382,649,390,000.00	378,900,441,142.20	6.83%
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	772,622,010.00	0.00	0.00	-100.00%
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,153,500,000.00	47,478,191,697.00	387.23%
2.2.	Belanja Langsung	601,079,604,348.18	720,999,866,144.29	684,174,723,204.43	6.69%
2.2.1	Belanja Pegawai	103,690,171,791.00	92,103,433,062.00	95,094,257,500.00	-4.23%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292,918,534,060.80	346,191,904,029.29	359,034,802,361.16	10.71%
2.2.3	Belanja Modal	204,470,898,496.38	282,704,529,053.00	230,045,663,343.27	6.07%



NO	URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16,214,757,081.00)	(22,695,153,180.39)	(50,567,540,997.50)	76.60%
3	PEMBIAYAAN	16,214,757,081.00	22,695,153,180.39	50,567,540,997.50	76.60%
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	16,214,757,081.00	25,395,153,180.39	55,668,990,997.50	85.29%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16,214,757,081.00	25,395,153,180.39	55,668,990,997.50	85.29%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	2,700,000,000.00	5,101,450,000.00	100.00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	2,700,000,000.00	5,101,450,000.00	100.00%
	PEMBIAYAAN NETTO	16,214,757,081.00	22,695,153,180.39	50,567,540,997.50	76.60%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	(0.00)	0.00	0.00%

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2020

Tabel III.2 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Tanggamus

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1,854,943,611,446.00	1,853,478,211,642.00	1,870,941,910,400.00	0.43%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	124,540,693,327.00	116,123,536,576.00	138,457,248,445.00	5.44%
4.1.01	Pajak Daerah;	50,437,031,841.00	39,462,913,471.00	20,046,287,778.00	-36.96%
4.1.02	Retribusi Daerah;	4,876,630,000.00	6,111,630,000.00	3,742,908,001.00	-12.39%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	6,784,379,400.00	7,851,691,019.00	6,129,714,547.00	-4.95%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;	62,442,652,086.00	62,697,302,086.00	108,538,338,119.00	31.84%
4.2	Pendapatan Transfer	1,529,330,169,853.00	1,619,686,175,066.00	1,560,943,972,207.00	1.03%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1,369,011,459,083.00	1,484,297,686,577.00	1,436,469,878,027.00	2.43%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,078,560,138,083.00	1,222,909,386,577.00	1,178,189,747,027.00	4.52%
4.2.01.01	Dana Transfer Umum	774,770,885,131.00	831,182,962,690.00	871,047,525,027.00	6.03%
4.2.01.01.01	DBH	63,053,025,131.00	120,312,513,690.00	125,854,288,027.00	41.28%
4.2.01.01.02	DAU	711,717,860,000.00	710,870,449,000.00	745,193,237,000.00	2.32%
4.2.01.01	Dana Transfer Khusus	303,789,252,952.00	391,726,423,887.00	307,142,222,000.00	0.55%
4.2.01.01.03	DAK Fisik	127,840,251,000.00	134,713,963,912.00	56,969,805,000.00	-33.24%
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	175,949,001,952.00	257,012,459,975.00	250,172,417,000.00	19.24%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.2.01.05	Dana Desa	290,451,321,000.00	261,388,300,000.00	258,280,131,000.00	-5.70%
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	160,318,710,770.00	135,388,488,489.00	124,474,094,180.00	-11.89%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	160,318,710,770.00	135,388,488,489.00	124,474,094,180.00	-11.89%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	201,072,748,266.00	117,668,500,000.00	171,540,689,748.00	-7.64%
4.3.01	Hibah	51,048,983,000.00	49,668,500,000.00	0.00	-100.00%
4.3.02	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	150,023,765,266.00	68,000,000,000.00	171,540,689,748.00	6.93%
5	BELANJA DAERAH	1,986,334,724,658.65	1,979,909,917,392.00	1,869,941,910,400.00	-2.97%
5.1	Belanja Operasi	1,252,096,797,748.65	1,318,630,932,241.00	1,255,333,221,737.00	0.13%
5.1.01	Belanja Pegawai	659,990,820,680.70	669,693,888,288.00	693,307,022,049.00	2.49%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539,908,869,602.95	590,296,828,615.00	487,909,032,915.00	-4.94%
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	3,753,654,295.00	5,070,000,000.00	100.00%
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00%



KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
5.1.05	Belanja Hibah	52,197,107,465.00	52,260,363,043.00	68,978,166,773.00	14.96%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	2,626,198,000.00	69,000,000.00	100.00%
5.2	Belanja Modal	336,490,392,325.00	303,595,558,719.00	239,248,505,997.00	-15.68%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7,230,000,000.00	5,500,000,000.00	1,830,000,000.00	-49.69%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,724,780,430.00	51,481,342,084.00	40,705,956,924.00	-3.51%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,154,096,784.00	67,947,280,295.00	66,700,322,159.00	3.59%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	217,292,220,727.00	174,194,046,340.00	108,079,296,914.00	-29.47%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,089,294,384.00	4,472,890,000.00	21,932,930,000.00	89.79%
5.3	Belanja Tidak Terduga	14,089,803,986.00	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00	-20.08%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14,089,803,986.00	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00	-20.08%
5.4	Belanja Transfer	383,657,730,599.00	345,683,426,432.00	366,360,182,666.00	-2.28%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,221,961,185.00	5,800,840,318.00	3,691,889,224.00	-22.97%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	377,435,769,414.00	339,882,586,114.00	362,668,293,442.00	-1.98%
	SURPLUS/(DEFISIT)	(131,391,113,212.65)	(126,431,705,750.00)	1,000,000,000.00	3.40%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	131,391,113,212.65	126,431,705,750.00	(1,000,000,000.00)	-69.01%
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	133,491,113,212.65	127,431,705,750.00	0.00	-100.00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38,491,113,212.65	32,431,705,750.00	0.00	-100.00%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00	0.00	-100.00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,100,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-30.99%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,100,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-30.99%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	100.00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus 2021-2022 dan APBD Kabupaten Tanggamus 2023

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran Komponen Pendapatan Daerah antara lain meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - a) Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Tanggamus meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Tanggamus meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.
 - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan ini meliputi bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan ini meliputi penerimaan jasa giro dan bunga deposito, penjualan hasil pertanian, penjualan hasil peternakan, dan lainnya.
- 2) Pendapatan Transfer, meliputi:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - i. Dana Bagi Hasil Pajak
 - ii. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
 - iii. Dana Alokasi Umum
 - iv. Dana Alokasi Khusus
 - b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
 - i. Dana Penyesuaian

- c) Transfer Pemerintah Provinsi
 - i. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi:
 - a) Pendapatan Hibah
 - b) Pendapatan Lainnya

Kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2018-2023) selalu mengalami peningkatan, rata-rata pertumbuhannya sekitar 2,10% per tahun, rinciannya sebagai berikut:

- 1) Pos pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pos Pendapatan Asli Daerah rata-rata 10,39% per tahun. Namun tingginya kenaikan dan pertumbuhan pos PAD lebih disebabkan kenaikan pada Lain-lain PAD yang Sah karena masuknya penerimaan dari dana yang sebelumnya tidak termasuk dalam penerimaan ini seperti Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP;
- 2) Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer tumbuh rata-rata sebesar 0,81% per tahun, dengan peningkatan terbesar pada Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) rata-rata sebesar 3,97% per tahun.
- 3) Pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh rata-rata sekitar 0,54% per tahun;

Ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2018-2023, rinciannya sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer merupakan pos pendapatan dengan kontribusi tertinggi, yaitu rata-rata 83,43% per tahun.
- 2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata 9,17% per tahun; dan
- 3) PAD memberikan kontribusi sebesar 7,40% per tahun.

Secara lebih rinci, pos pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terbesar adalah Dana Transfer Umum rata-rata 39,83% per tahun dan Dana Transfer Khusus sebesar 16,42% per tahun.

Tingginya kontribusi Dana Perimbangan (DBH+DAU+DAK) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus jika dibandingkan dengan tingkat kontribusi PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal, khususnya pemerintah pusat, atau dapat juga dikatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Tanggamus dalam posisi yang rendah.

Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	PENDAPATAN DAERAH	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2018	1,631,619,474,036.93	1,536,957,134,296.44	94.20
2	2019	1,792,040,255,121.27	1,711,964,522,615.11	95.53
3	2020	1,757,062,983,559.00	1,634,262,482,308.40	93.01
4	2021	1,854,943,611,446.00	1,652,125,879,036.16	89.07
5	2022	1,853,478,211,642.00	1,641,482,999,413.62	88.56
			Rata-Rata	92.07

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2018-2022 sebagaimana tabel diatas, antara target dan realisasi rata-rata tercapai 92,07%. Capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sekitar 88,56% dan tertinggi pada tahun 2019 mencapai 95,53%.

Dalam penerimaan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki posisi yang penting untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Tingkat pencapaian penerimaan PAD Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2018	75,901,363,793.95	61,714,421,073.25	81.31
2	2019	97,328,147,574.94	76,050,778,580.12	78.14

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
3	2020	100,965,303,213.28	76,828,494,694.47	76.09
4	2021	124,540,693,327.00	95,786,639,301.16	76.91
5	2022 *)	116,123,536,576.00	70,451,728,508.62	60.67
			Rata-Rata	74.62

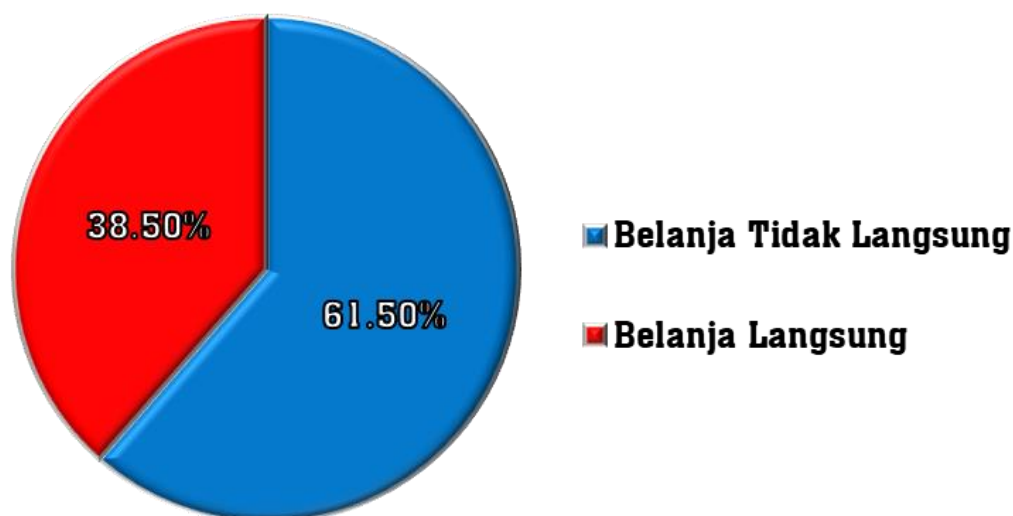
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2018-2022 mengalami fluktuatif, rata-rata capaian perolehan PAD adalah 74,62% pertahun.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, kinerja belanja daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2018-2023 selalu mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan Belanja Daerah rata-rata 0,88% per tahun.

Gambar III.1 Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020

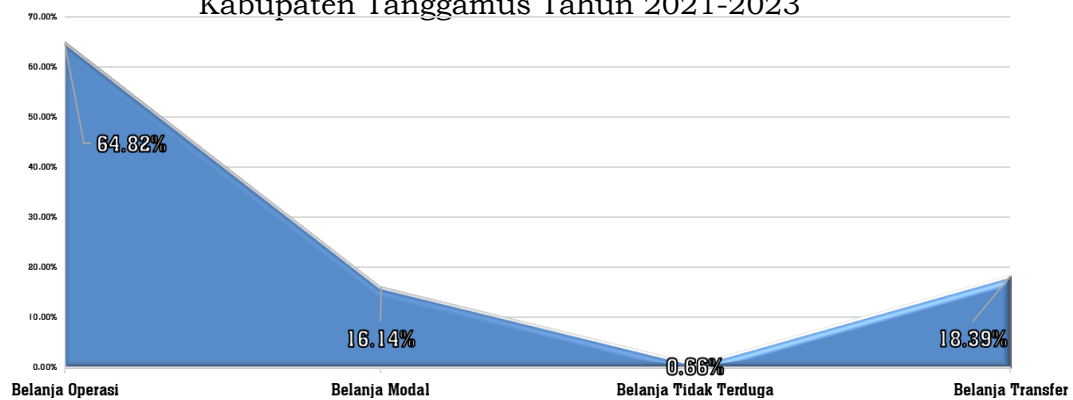


Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2020

Porsi anggaran Belanja Daerah selama 2018-2020 didominasi untuk Belanja Tidak Langsung rata-rata 61,50% per tahun sedangkan untuk Belanja Langsung sekitar 38,50% per tahun.

Mulai Tahun Anggaran 2021 sudah tidak ada lagi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berubah menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Gambar III.2 Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023



Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus 2021-2022 dan APBD Kabupaten Tanggamus 2023

Dalam pos Belanja Daerah Tahun 2021-2023 yang memiliki kontribusi terbesar adalah pos Belanja Operasi mencapai 63,82%, sedangkan yang terendah yaitu Belanja Tidak Terduga hanya sekitar 0,66%.

Kinerja pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus, pada periode 2018-2023 dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan rata-rata Belanja Daerah selama kurun waktu tahun 2018-2023 rata-rata mencapai 0,88% per tahun;
- 2) Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018-2020 setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,60% per tahun;
- 3) Belanja Langsung pada tahun 2018-2020 setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,69% per tahun;

- 4) Belanja Operasi pada tahun 2021-2023 setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,13% per tahun;
- 5) Belanja Modal pada tahun 2021-2023 setiap tahunnya mengalami penurunan rata-rata sebesar 15,68% per tahun;
- 6) Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021-2023 setiap tahunnya mengalami penurunan rata-rata sebesar 20,08% per tahun;
- 7) Belanja Transfer pada tahun 2021-2023 setiap tahunnya mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,28% per tahun;

Tabel III.5 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	BELANJA DAERAH	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2018	1,647,834,231,117.93	1,527,711,794,512.80	92.71
2	2019	1,814,735,408,301.66	1,678,742,417,518.67	92.51
3	2020	1,807,630,524,556.50	1,648,643,730,414.86	91.20
4	2021	1,986,334,724,658.65	1,658,185,016,498.79	83.48
5	2022	1,979,909,917,392.00	1,723,897,921,885.94	87.07
Rata-Rata				89.39

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022

Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2018-2022 sebagaimana tabel diatas, antara target dan realisasi rata-rata tercapai 89,39%. Capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sekitar 83,48%, dan tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai 92,71%.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.6 Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2018	16,214,757,081.00	16,149,813,396.75	99.60
2	2019	22,695,153,180.39	22,446,885,901.06	98.91
3	2020	50,567,540,997.50	52,872,361,319.11	104.56
4	2021	131,391,113,212.65	38,490,843,212.65	29.29
5	2022	126,431,705,750.00	114,367,825,395.02	90.46
			Rata-Rata	84.56

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022

Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2018-2022 sebagaimana tabel diatas, antara target dan realisasi rata-rata mencapai 84,56%. Capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sekitar 29,29%, dan tertinggi pada tahun 2020 yang mencapai 104,56%.

3.1.2. Neraca Daerah

3.1.2.1 Perkembangan Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada periode tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sebagaimana mestinya, jumlah aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus selalu mengalami peningkatan selama kurun waktu 2018-2022.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama kurun

waktu 2013-2016 cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 98,79%. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Secara keseluruhan, ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2016 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2013-2016 adalah sebesar 3,01%.

3.1.2.1 Analisis Rasio Keuangan

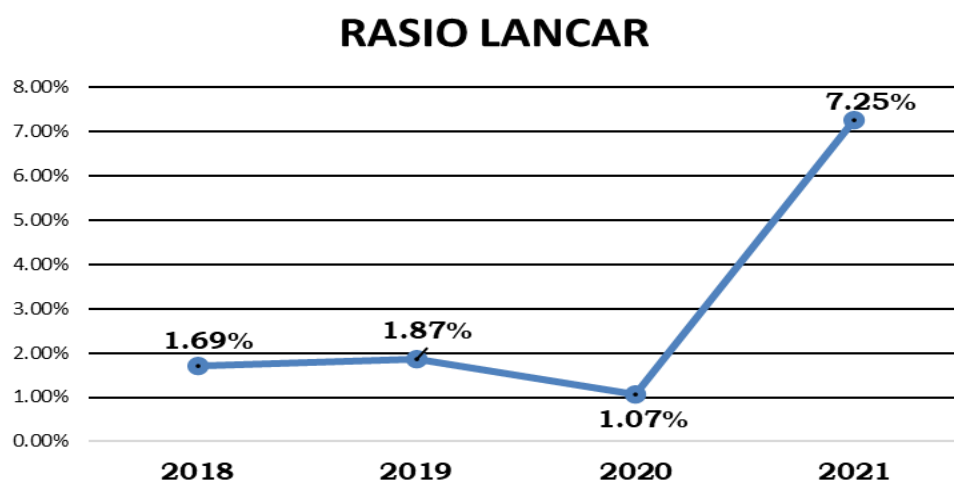
3.1.2.1.1 Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar atau *Current Ratio* adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan negara likuiditas Pemerintah Daerah. Rasio Lancar ini menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya pada 12 bulan ke depan. Rasio Lancar (*current ratio*) Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama 2018-2021 adalah sebagai berikut :

Gambar III.3 Perkembangan Rasio Lancar Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021



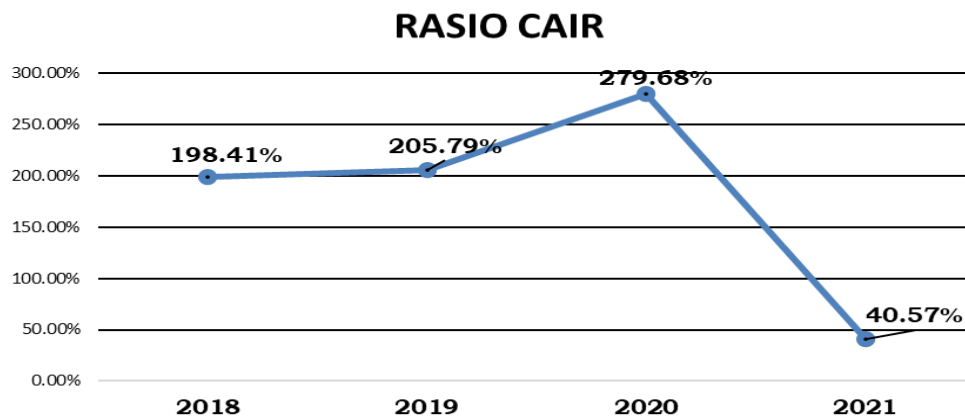
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2021

Dari grafik di atas menunjukkan Rasio Lancar Kabupaten Tanggamus menunjukkan trend peningkatan dan menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, artinya kemampuan kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki kemampuan untuk menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya.

2) Rasio Cair (*Quick Ratio*)

Rasio Cair adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Yang termasuk sebagai Aset Cepat (*Quick Asset*) adalah Aktiva Lancar atau Aset lancar yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dan mendekati nilai bukunya. Secara umum, rasio di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, sedangkan rasio di bawah 100% persen menunjukkan hasil sebaliknya.

Gambar III.4 Perkembangan Rasio Cair (*Quick Ratio*) Keuangan Kabupaten Tanggamus 2018-2021



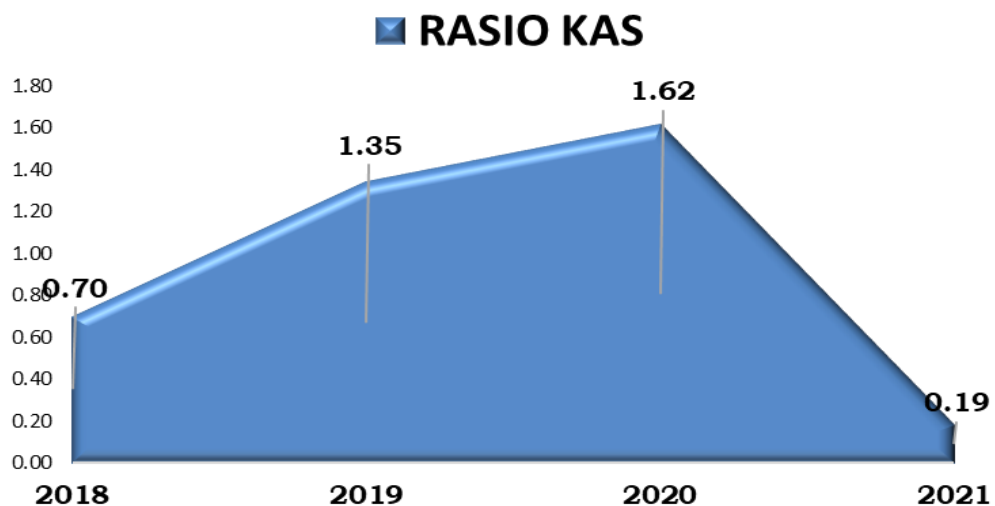
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2021

Rasio Cair Kabupaten Tanggamus periode tahun 2018-2021 sudah menunjukkan kinerja yang baik terutama untuk tahun 2018-2020 karena menunjukan angka positif diatas 100%, sedangkan untuk tahun 2021 turun menjadi 40,57%. Artinya setiap Rp.1,- kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh aset lancar minimal 40 kali pada tahun 2021.

3) Rasio Kas

Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Tanggamus dalam membayar hutang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek (piutang) yang dimiliki.

Gambar III.5 Perkembangan Rasio Kas Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2021

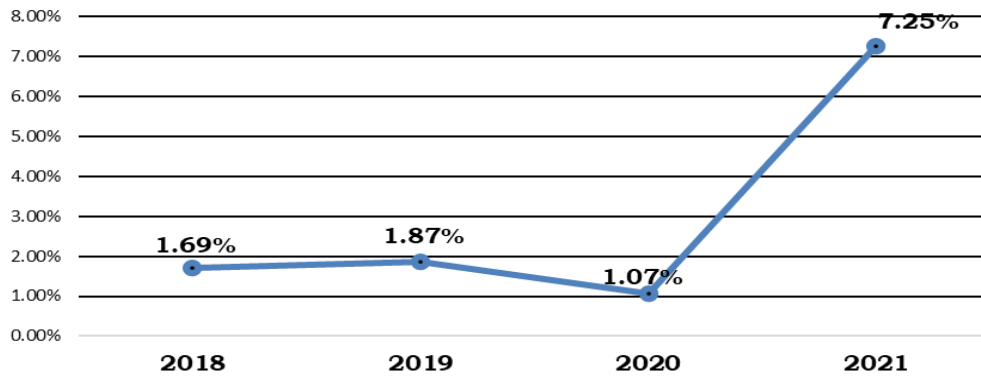
Analisis dari grafik di atas menunjukkan rasio kas yang terus mengalami perbaikan dari tahun 2018-2020 yang mencapai diatas angka 1 tetapi sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,19 yang berarti pemerintah hanya memiliki cukup uang tunai untuk membayar 19% dari kewajiban jangka pendeknya.

4) Rasio Kewajiban Terhadap Total Aset

Rasio Kewajiban Terhadap Total Aset menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanggamus membiayai pembangunan dengan kemampuan sendiri. Dalam pengertian tidak mengandalkan hutang dari pihak lain. Rasio yang semakin kecil menunjukkan hasil yang baik, artinya semakin sedikit dana yang berasal dari hutang untuk pembiayaan daerah. Perkembangan rasio kewajiban terhadap total aset (*debt ratio*) Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Gambar III.6 Perkembangan *Debt Rasio* Pemerintah Kabupaten Tanggamus 2018-2021

RASIO KEWAJIBAN TERHADAP ASET



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2021

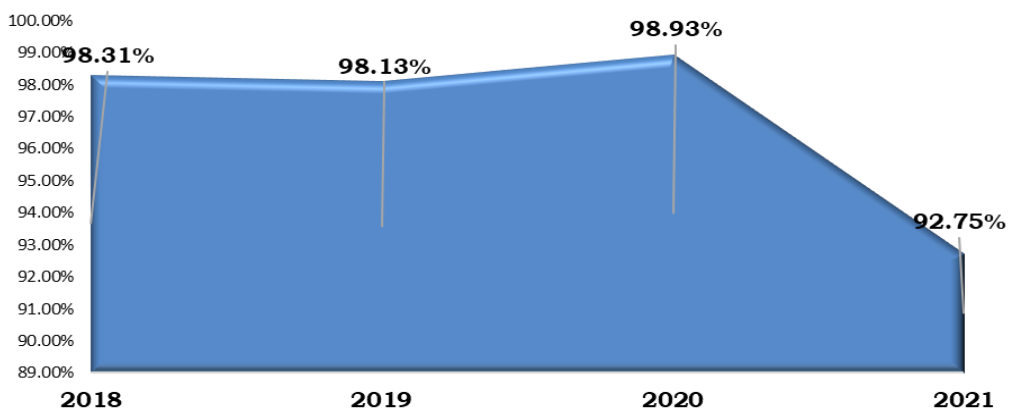
Analisis dari grafik di atas menunjukkan angka rasio yang baik sebesar 7,25% artinya dimana pembiayaan pembangunan hampir seluruhnya ditanggung oleh kemampuan sendiri.

5) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset sehingga yang diukur adalah persentase persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus sendiri dalam membiayai pembangunan. Hasil dari rasio ini yang mendekati angka 100% menunjukkan kondisi yang sangat baik oleh kemampuan sendiri.

Gambar III.7 Perkembangan Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Tanggamus 2018-2021

■ RASIO EKUITAS DANA TERHADAP TOTAL ASET



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2021

Analisis rasio ini berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa hampir 100% dana pembangunan bersumber dari anggaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus, seperti pada tahun 2021 sebesar 92,75% pembiayaan pembangunan ditanggung oleh kemampuan sendiri.

Tabel III.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
ASET	6.66%
ASET LANCAR	1.41%
Kas di Kas Daerah	-40.90%
Kasi di Bendahara Penerimaan	-100.00%
Kas di Bendahara Pengeluaran	100.00%
Kas di BLUD	214.57%
Kas di Bendahara FKTP	-100.00%
Kas di Bendahara BOS	-0.42%
Investasi Jangka Pendek	0.00%
Piutang Pajak	100.00%
Piutang Retribusi Daerah	100.00%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00%
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	100.00%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0.00%
Piutang Transfer Antar Daerah	100.00%
Piutang Pendapatan	-100.00%
Piutang Lainnya	-100.00%
Penyisihan Piutang	23.36%
Beban Dibayar Dimuka	0.00%
Persediaan	8.22%
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0.00%
JUMLAH ASET LANCAR	1.41%
INVESTASI JANGKA PANJANG	8.62%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00%
Investasi Kepada BUMN	0.00%
Investasi Kepada BUMD	0.00%
Investasi Dalam Obligasi	0.00%
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0.00%
Dana Bergulir	0.00%
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00%
Investasi Jangka Panjang Permanen	8.62%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.62%
Investasi Pemberian Pinjaman Daerah	0.00%
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	8.62%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	8.62%

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
ASET TETAP	4.79%
Tanah	12.53%
Peralatan dan Mesin	11.41%
Gedung dan Bangunan	7.14%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.77%
Aset Tetap Lainnya	13.45%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.02%
Akumulasi Penyusutan	14.33%
JUMLAH ASET TETAP	4.79%
DANA CADANGAN	0.00%
Dana Cadangan	0.00%
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00%
ASET LAINNYA	-15.70%
Tagihan Penjualan Angsuran	0.00%
Tuntutan Ganti Rugi	-2.58%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-96.24%
Aset Tak Berwujud	0.00%
Aset Lain-Lain	3.02%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0.00%
Pengelolaan Dana Bergulir	-100.00%
JUMLAH ASET LAINNYA	-15.70%
JUMLAH ASET	4.00%
KEWAJIBAN	68.87%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	68.87%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	157.97%
Utang Bunga	0.00%
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0.00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00%
Pendapatan Diterima Dimuka	-100.00%
Utang Belanja	69.88%
Utang Jangka Pendek Lainnya	69.27%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	68.87%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00%
Utang Kepada Pemerintah Pusat	0.00%
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	0.00%
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00%
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0.00%
Premium (Diskonto) Obligasi	0.00%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00%
EKUITAS	2.00%
EKUITAS	2.00%
Ekuitas	2.00%
JUMLAH EKUITAS	2.00%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.00%

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2021

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2018-2023 meliputi kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan, serta arah kebijakan dana masyarakat dan mitra.

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018-2023, memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
- 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang tidak bias diukur karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2018-2021 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan PAD dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:
 - a) Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional,

- melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b) Penataan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - c) Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - d) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Perangkat Daerah Penghasil PAD;
 - e) Meningkatkan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
 - f) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - g) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 2) Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
- a) Meningkatkan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Lampung, Dana Penyesuaian, dan Dana Bantuan Keuangan yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Makro sehingga diperlukan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi hasil dan berdampak langsung kepada masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018-2023 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- 4) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

- masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 5) Belanja Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat untuk lebih percepatan penurunan angka kemiskinan yang masih mencapai 10,98%;
 - 6) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari volume anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
 - 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 8) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), perikanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
 - 9) Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah rata-rata provinsi diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketenagakerjaan;
 - 10) Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
 - 11) Pengembangan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mempercepat pengentasan pekon berkembang yang hingga tahun 2023 masih terdapat 189 pekon berkembang;

- 12) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- 13) Kegiatan-kegiatan diarahkan untuk berorientasi terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
- 14) Kebijakan untuk belanja rutin meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas;
 - c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - f) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang

bersumber dari pendapatan daerah kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- g) Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
- h) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2013-2017 adalah:

- a) Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- b) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik atau program strategis lainnya.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2018-2023 adalah:

- a) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, dan penyertaan modal BUMD.
- b) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.
- c) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk mengidentifikasi tingkat efektifitas penggunaan anggaran daerah, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap perbandingan atau proporsi penggunaan anggaran. Penilaian proporsi dilakukan terhadap dua aspek yaitu proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, teridentifikasi bahwa hampir seluruh komponen belanja daerah belum terserap secara optimal. Informasi detail mengenai proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Tanggamus dalam kurun lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
2	BELANJA	92.71	92.51	91.20
2.1	Belanja Tidak Langsung	94.42	94.16	92.47
2.1.1	Belanja Pegawai	91.97	91.07	90.15
2.1.4	Belanja Hibah	92.01	90.25	87.66
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	98.26	93.67	93.76
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	99.67	100.00	100.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	99.59	100.00	98.88
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	93.46	-	-
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	97.17	68.00	77.20
2.2.	Belanja Langsung	89.73	89.99	89.13
2.2.1	Belanja Pegawai	95.83	94.54	95.43
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.39	92.45	86.50
2.2.3	Belanja Modal	84.26	85.49	90.64

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2020

Pada komponen Belanja Tidak Langsung dalam kurun tiga tahun 2018-2020 proporsi realisasi terhadap anggaran belanja tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai 94,42% sedangkan untuk Belanja Langsung yang tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan angka sebesar 89,99%.

Tabel III.9 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2022

KODE	URAIAN	2021 (%)	2022 (%)
5	BELANJA DAERAH	83.48	87.07
5.1	Belanja Operasi	87.06	86.43
5.1.01	Belanja Pegawai	93.82	91.71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.64	81.62
5.1.03	Belanja Bunga	-	92.62
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	68.11	73.97
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	58.21
5.2	Belanja Modal	52.21	82.14
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.40	75.09
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.89	84.70
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.96	81.50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	44.76	81.20
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93.65	92.40

KODE	URAIAN	2021 (%)	2022 (%)
5.3	Belanja Tidak Terduga	72.13	76.40
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.13	76.40
5.4	Belanja Transfer	99.63	94.87
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	98.60	78.80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	99.64	95.15

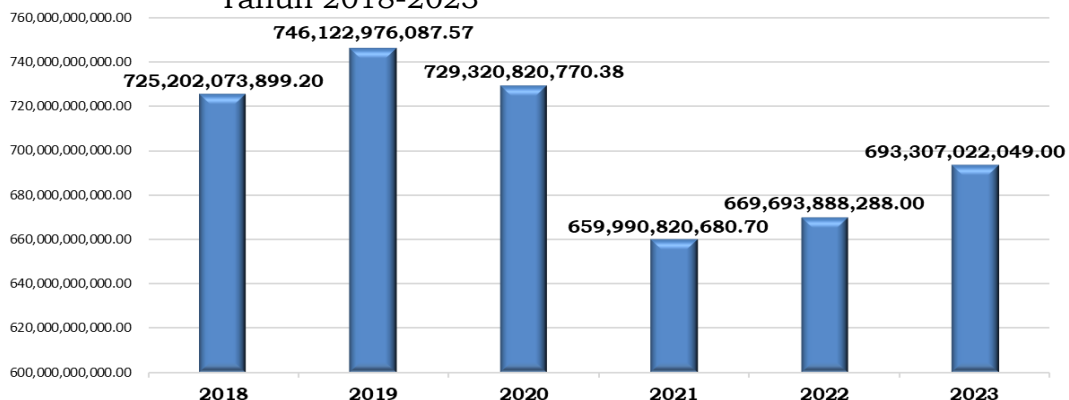
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2021-2022

Pada kurun waktu 2021-2022 komponen Belanja Operasi realisasi terhadap anggaran belanja tertinggi pada tahun 2021 yang mencapai 87,06% sedangkan untuk Belanja Modal yang tertinggi dicapai pada tahun 2022 dengan angka sebesar 82,14% hal tersebut juga sama dengan realisasi Belanja Tidak Terduga yang capaian tertingginya pada tahun 2022 yang mencapai 76,40% sedangkan untuk Belanja Transfer capaian tertinggi pada tahun 2021 yang mencapai 99,63%.

3.2.1.2 Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur

Implementasi rencana pembangunan terkait erat dengan ketersediaan sumber daya aparatur, salah satu indikator efektivitas pembangunan dapat ditinjau dari tingkat keterserapan anggaran belanja bagi pemenuhan kebutuhan aparatur. Secara detail, informasi proporsi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu:

Gambar III.8 Proporsi Anggaran Belanja Pegawai Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023



Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022 dan APBD Kabupaten Tanggamus 2023

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir yaitu tahun 2018-2023 Belanja Pegawai mengalami fluktuatif dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terdapat pada tahun 2018-2020 dengan alokasi terbesar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.746.122.976.087,57;
- 2) Belanja Pegawai pada Belanja Operasi terdapat pada tahun 2021-2023 dengan alokasi terbesar pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.693.307.022.049,00

Tabel III.10 Analisis Proporsi Anggaran Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (Rp.) (a)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (Rp.) (b)	% (a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2018	725,202,073,899.20	1,647,834,231,117.93	44.01
2	Tahun Anggaran 2019	746,122,976,087.57	1,817,435,408,301.66	41.05
3	Tahun Anggaran 2020	729,320,820,770.38	1,812,731,974,556.50	40.23
4	Tahun Anggaran 2021	659,990,820,680.70	1,988,434,724,658.65	33.19
5	Tahun Anggaran 2022	669,693,888,288.00	1,980,909,917,392.00	33.81
6	Tahun Anggaran 2023	693,307,022,049.00	1,870,941,910,400.00	37.06

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022 dan APBD Kabupaten Tanggamus 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun 2018-2021 relatif menurun sedangkan pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan peningkatan total pengeluaran lebih tinggi daripada peningkatan total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.1.3 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat meliputi pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda



pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, belanja jasa dan operasional kantor.

Sementara itu belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Ditinjau berdasarkan komponen penyusunnya, pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat berada dalam komponen belanja langsung, maupun belanja tidak langsung.



Tabel III.11 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	REALISASI 2018 (Rp.)	REALISASI 2019 (Rp.)	REALISASI 2020 (Rp.)	REALISASI 2021 (Rp.)	REALISASI 2022 (Rp.)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
A	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Operasi	1,087,735,445,474.00	1,116,984,962,370.45	1,129,565,612,946.46	1,047,126,488,213.56	991,507,307,496.00	(1.84)
1	Belanja Pegawai	670,959,649,722.00	682,675,468,244.45	662,472,379,520.46	619,192,788,739.56	614,197,971,579.00	(1.75)
2	Belanja Hibah	80,480,172,979.00	46,013,658,600.00	49,698,135,200.00	35,551,259,769.00	38,654,491,414.00	(13.64)
3	Belanja Bantuan Sosial	282,000,000.00	957,863,719.00	958,833,090.00	-	1,528,716,000.00	40.22
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2,709,109,154.00	3,904,146,807.00	5,132,723,782.00	6,135,124,739.00	4,571,046,177.00	11.03
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	330,638,976,121.00	382,649,390,000.00	374,651,395,392.00	376,084,285,441.00	323,387,105,276.00	(0.44)
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	722,126,690.00	-	-	-	-	(100.00)
7	Belanja Tidak Terduga	1,943,410,808.00	784,435,000.00	36,652,145,962.00	10,163,029,525.00	9,167,977,050.00	36.38
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	2,700,000,000.00	2,800,000,000.00	-	1,000,000,000.00	100.00
1	Penyertaan Modal Daerah	-	2,700,000,000.00	2,800,000,000.00	-	1,000,000,000.00	100.00
	Total A + B	1,087,735,445,474.00	1,119,684,962,370.45	1,132,365,612,946.46	1,047,126,488,213.56	992,507,307,496.00	(1.82)

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap data pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tanggamus lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja Operasi yang sifatnya wajib dan mengikat dalam kurun lima tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 1,84%. Pengeluaran ini didominasi oleh Belanja Pegawai yang antara lain meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH.

Adapun untuk komponen Pengeluaran Pembiayaan, dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya sebesar 100%. Komponen belanja ini adalah Belanja Penyertaan Modal Daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi defisit yang harus ditutup oleh penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah maka akan terjadi surplus.

Defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Defisit riil, komposisi penutup Defisit Riil Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu Tahun 2018-2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :





Tabel III.12 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,536,957,134,296.44	1,711,964,522,615.11	1,634,262,482,308.40	1,652,125,879,036.16	1,641,482,999,413.62
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,527,711,794,512.80	1,678,742,417,518.67	1,648,643,730,414.86	1,658,185,016,498.79	1,723,897,921,885.94
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	2,700,000,000.00	2,800,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
	Defisit Riil	9,245,339,783.64	30,522,105,096.44	(17,181,248,106.46)	(6,059,137,462.63)	(83,414,922,472.32)

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022

Berdasarkan data diatas, selama kurun waktu lima tahun terakhir, defisit riil di Kabupaten Tanggamus mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2020-2022 terjadi defisit riil yang negatif yaitu sebesar Rp.83.414.922.472,32 sedangkan kondisi yang terbaik yaitu pada tahun 2018-2019 yang menunjukkan angka yang positif yaitu Rp.9.245.339.783,64 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.30.522.105.096,44

Tabel III.13 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,536,957,134,296.44	1,711,964,522,615.11	1,634,262,482,308.40	1,652,125,879,036.16	1,641,482,999,413.62
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,527,711,794,512.80	1,678,742,417,518.67	1,648,643,730,414.86	1,658,185,016,498.79	1,723,897,921,885.94
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	2,700,000,000.00	2,800,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
A	Defisit Riil	9,245,339,783.64	30,522,105,096.44	(17,181,248,106.46)	(6,059,137,462.63)	(83,414,922,472.32)
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	16,149,813,396.75	25,146,885,901.06	55,672,361,319.11	38,490,843,212.65	32,438,662,856.02
5	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NO	URAIAN	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	82,929,162,539.00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	16,149,813,396.75	25,146,885,901.06	55,672,361,319.11	38,490,843,212.65	115,367,825,395.02
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	25,395,153,180.39	55,668,990,997.50	38,491,113,212.65	32,431,705,750.02	31,952,902,922.70

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022

Tabel III.14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	174.68	82.39	(324.03)	(635.25)	(38.89)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	(99.42)
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022

Tabel III.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	16,149,813,396.75	100.00	25,146,885,901.06	100.00	55,672,361,319.11	100.00	38,490,843,212.65	100.00	32,438,662,856.02	100.00
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa komposisi realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selama lima tahun terakhir rata-rata berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan tahun 2024-2026 perlu dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Analisis ini akan terbagi menjadi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1 Proyeksi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk mengidentifikasi gambaran kemampuan keuangan Kabupaten Tanggamus dalam sisa anggaran perencanaan tiga tahun kedepan, dilakukan proyeksi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Proyeksi disusun dengan menarik tren perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama lima tahun terakhir periode yang lalu yaitu tahun 2018-2023. Di dalam analisis proyeksi, tingkat pertumbuhan dari data keuangan daerah lima tahun terakhir diidentifikasi. Hasil identifikasi terhadap tren pertumbuhan tersebut digunakan sebagai basis untuk menarik perkiraan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus lima tahun kedepan.

Di dalam penyusunan proyeksi ini, memperhitungkan asumsi terjadinya pemulihan perekonomian akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 dan ancaman resesi ekonomi global, dengan demikian, terdapat hasil proyeksi yang sedikit berfluktuasi. Informasi detail mengenai hasil proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel III.16.

Berdasarkan hasil proyeksi terhadap potensi pendapatan daerah, tampak terjadi peningkatan pendapatan, karena APBD 2018, 2019 dan 2020 sudah ditetapkan dan berjalan. Pada tahun 2018 total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus bernilai Rp.1.536.957.134.296,44 sedangkan untuk tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.870.941.910.400,00.

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari obyek-obyek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya memaksimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dana daerah dan menggali obyek-obyek yang baru guna menambah penerimaan daerah, secara singkat upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

- Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (*multikanal*) dan tempat lainnya.
- Melakukan penambahan gerai pajak dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.

b) Peningkatan *Law Enforcement*

- Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- Meningkatkan kerja sama dengan terkait dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

c) Intensifikasi Pajak Daerah

- Membangun sistem informasi pajak daerah yang terkonsolidasi.
- Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
- Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah.
- Membangun sistem terintegrasi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online.
- Meningkatkan kerja sama dengan DJP dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait perpajakan.
- Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah.

d) Ekstensifikasi Pajak Daerah

- Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah.
- Melakukan perluasan basis pajak daerah
 - 1) Pengenaan persewaan seluruh ruangan hotel sebagai objek pajak hotel.
 - 2) Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan.
 - 3) Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan pemerintah menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan.
 - 4) Menyesuaikan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.

2) Retribusi Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah

- Akan menerapkan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
- Akan menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi.
- Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b) Peningkatan *Law Enforcement*

- Menerapkan Perda tentang Retribusi Daerah, terdapat beberapa Perda yang baru ditetapkan sebagai dasar hukum pemungutan retribusi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Akan membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Bank dalam rangka pembayaran retribusi daerah.

- c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah
 - Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi daerah.
 - Melakukan pembaharuan sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi Daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
 - b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
 - c) Memperkuat struktur permodalan BUMD.
 - d) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga.
 - e) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- 4) Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam), serta perolehan DAU dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik).
- 5) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai dana transfer kedaerah seperti alokasi dana desa, dan jaminan kesehatan nasional dan lainnya.



Dari segi belanja, pada tahun 2018 total belanja Kabupaten Tanggamus terealisasi sebesar Rp.1.527.711.794.512,80 dan pada periode tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp.1.869.941.910.400,00 serta untuk menjaga kesehatan keuangan diproyeksikan antara Pendapatan dan Belanja terjadi surplus sehingga Pemerintah Kabupaten Tanggamus bisa memanfaatkannya dalam bentuk penambahan penyertaan modal baik di Bank Lampung maupun pada BUMD di Kabupaten Tanggamus.



Tabel III.16 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Tanggamus

KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	0.18%	1,746,247,405,335.00	1,746,515,973,456.54	1,752,664,719,919.10
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.00%	54,514,050,798.00	55,059,191,305.98	55,609,783,219.04
4.1.01	Pajak Daerah;	1.00%	24,808,247,554.00	25,056,330,029.54	25,306,893,329.84
4.1.02	Retribusi Daerah;	1.00%	2,651,355,488.00	2,677,869,042.88	2,704,647,733.31
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	1.00%	6,022,971,740.00	6,083,201,457.40	6,144,033,471.97
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;	1.00%	21,031,476,016.00	21,241,790,776.16	21,454,208,683.92
4.2	Pendapatan Transfer	0.17%	1,572,789,033,336.00	1,572,512,460,949.56	1,578,110,615,499.06
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	0.12%	1,477,380,007,049.00	1,476,149,344,399.69	1,480,783,867,783.69
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0.00%	1,213,298,749,049.00	1,208,626,702,399.69	1,213,261,225,783.69
4.2.01.01	Dana Transfer Umum	-0.27%	876,200,629,049.00	866,885,271,399.70	871,519,794,783.69
4.2.01.01.01	DBH	-31.98%	131,007,392,049.00	60,019,405,399.70	60,619,599,453.69
4.2.01.01.02	DAU	4.32%	745,193,237,000.00	806,865,866,000.00	810,900,195,330.00
4.2.01.01	Dana Transfer Khusus	0.69%	337,098,120,000.00	341,741,431,000.00	341,741,431,000.00
4.2.01.01.03	DAK Fisik	-1.09%	87,332,473,000.00	85,437,972,000.00	85,437,972,000.00
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	1.30%	249,765,647,000.00	256,303,459,000.00	256,303,459,000.00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.2.01.05	Dana Desa	0.41%	258,280,131,000.00	260,380,041,000.00	260,380,041,000.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0.00%	5,801,127,000.00	7,142,601,000.00	7,142,601,000.00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	1.00%	95,409,026,287.00	96,363,116,549.87	97,326,747,715.37
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	1.00%	95,409,026,287.00	96,363,116,549.87	97,326,747,715.37
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00%	118,944,321,201.00	118,944,321,201.00	118,944,321,201.00
4.3.01	Hibah	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3.02	Dana Darurat	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00%	118,944,321,201.00	118,944,321,201.00	118,944,321,201.00

KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
5	BELANJA DAERAH	0.05%	1,722,211,526,852.00	1,717,872,919,276.88	1,724,021,665,739.43
5.1	Belanja Operasi	-0.80%	1,159,531,841,114.00	1,136,459,810,231.68	1,141,148,450,169.70
5.1.01	Belanja Pegawai	0.94%	691,385,600,794.00	700,182,624,827.58	704,485,490,093.72
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.25%	386,686,676,055.00	394,420,409,576.10	396,392,511,623.98
5.1.03	Belanja Bunga	-52.67%	4,421,976,500.00	2,576,876,550.00	990,549,174.00
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	-28.64%	77,007,667,765.00	39,210,899,278.00	39,210,899,278.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00%	29,920,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
5.2	Belanja Modal	5.25%	187,319,503,072.00	206,052,926,379.20	207,513,032,903.74
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.36%	9,820,000.00	12,275,000.00	12,397,750.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.14%	19,624,481,824.00	21,586,930,006.40	21,694,864,656.43
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.14%	67,576,283,950.00	74,333,912,345.00	74,705,581,906.73
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.40%	78,141,912,298.00	85,956,103,527.80	86,815,664,563.08
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.14%	21,932,930,000.00	24,126,223,000.00	24,246,854,115.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.14%	34,075,000.00	37,482,500.00	37,669,912.50
5.3	Belanja Tidak Terduga	0.00%	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0.00%	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	0.00%	366,360,182,666.00	366,360,182,666.00	366,360,182,666.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0.00%	3,691,889,224.00	3,691,889,224.00	3,691,889,224.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0.00%	362,668,293,442.00	362,668,293,442.00	362,668,293,442.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	0.13%	24,035,878,483.00	28,643,054,179.67	28,643,054,179.67
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-9.16%	(24,035,878,483.00)	(28,643,054,179.67)	(28,643,054,179.67)
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00%	0.00	0.00	0.00



KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.16%	24,035,878,483.00	28,643,054,179.67	28,643,054,179.67
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.54%	23,035,878,483.00	27,643,054,179.67	27,643,054,179.67
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00%	0.00	0.00	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00%	0.00	(0.00)	0.00

Sumber : Proyeksi APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Pada Tabel III.16 diatas dapat terlihat Pendapatan Daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.746.247.405.335,00 sedangkan pada tahun 2025 sebesar Rp.1.746.515.973.456,54 dan tahun 2026 sebesar Rp.1,752.664.719.919,10 atau selama tiga tahun tersebut diproyeksikan rata-rata tumbuh 0,18%.

Sedangkan pada komponen Belanja Daerah pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp.1.722.211.526.852,00 kemudian pada tahun 2025 sebesar Rp.1.717.872.919.276,88 dan tahun 2026 sebesar Rp.1.724.021.665.739,43 atau selama kurun waktu tiga tahun tersebut diproyeksikan rata-rata tumbuh 0,05%.

Pada tahun 2024-2026 juga terdapat proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal Daerah yang diperuntukkan bagi BUMD sebesar Rp.1.000.000.000,00 serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.23.035.878.483,06 pada tahun 2024, kemudian Rp.27.643.054.179,67 pada tahun 2025 sedangkan untuk tahun 2026 sebesar Rp.27.643.054.179,67 hal tersebut merupakan pembayaran cicilan Pinjaman Daerah sebagai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Proses pengajuan pinjaman daerah tersebut telah dimulai sejak tahun 2021 yang diajukan ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI sebagai salah satu *Special Mission Vehicles (SMV)* di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur dan terealisasi pada tahun 2022 yang lalu.

Tabel III.17 Paket Kebijakan Pinjaman Daerah Kabupaten Tanggamus Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

No.	Paket Kebijakan	Sasaran Kebijakan Program	Dampak/Hasil Kebijakan	Keluaran
1	Paket Kebijakan Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Pengurangan Disparitas Infrastruktur Kawasan Perdesaan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	Mengoptimalkan penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan terutama pada lintas-lintas strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan baik daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi
2	Paket Kebijakan Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Pemenuhan Perumahan/ Pemukiman Rakyat yang Memiliki Akses Sanitasi dan Air Bersih serta Tersedianya Fasilitas Ruang Publik	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan serta menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
3	Paket Kebijakan Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Percepatan Pemenuhan Akses Prasarana-Sarana Layanan Dasar Pendidikan Menuju Tanggamus Cerdas	Meningkatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu dan tidak membebani masyarakat

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 akan difokuskan Pemulihan Ekonomi dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Nasional, penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan dampaknya serta peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu dengan meningkatkan PDRB, peningkatan hal tersebut diupayakan melalui berbagai aspek, yaitu:

- 1) Pengeluaran pemerintah, yang bersumber dari potensi keuangan/pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai cara berikut.
 - a) Optimalisasi PAD terutama dengan mendorong penerimaan pada pos terkaitbidang jasa, yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran;
 - b) Peningkatan transparansi objek pajak;

- c) Memberikan insentif pajak daerah untuk peningkatan penerimaan pajak daerah;
- d) Pendataan ulang wajib pajak secara akurat dan aktual;
- e) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan transfer;
- f) Mengaktualisasi data kekayaan alam untuk penghitungan dana bagi hasil yang lebih akurat;
- g) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- h) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Selain optimalisasi pendapatan, terdapat pula kebijakan belanja sebagai berikut.

- a) Peningkatan efisiensi belanja dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik;
- b) Menekan belanja pegawai dengan tidak menambah jumlah aparatur pemerintah di Kabupaten Tanggamus;

Sedangkan pada pembiayaan daerah perlu dilakukan peninjauan secara terukur sehingga dapat terwujud penganggaran yang seimbang.

- 2) Investasi, yang bersumber dari investasi asing dan investasi dalam negeri.

Peningkatan investasi ini dilakukan melalui upaya berikut:

- a) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, yaitu dengan mempermudah perijinan dan memberlakukan sistem insentif bagi usaha yang sejalan dengan rencana pemerintah dan sistem disinsentif bagi usaha yang bertentangan dengan arahan pemerintah/ mencemari lingkungan.
- b) Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, diantaranya dengan membangun infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten Tanggamus, infrastruktur air limbah, dll. Ketersediaan infrastruktur yang dapat diandalkan

efektif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tanggamus.

- c) Pengembangan inovasi daerah, terutama dengan mengembangkan perekonomian kreatif di Kabupaten Tanggamus.
 - d) Penerapan teknologi dengan cara meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.
- 3) Selain untuk konsumsi rumah tangga sendiri, yaitu dengan cara mendorong pembelanjaan di Kabupaten Tanggamus, dikembangkan berbagai komoditi perkebunan dan hortikultura yang dapat mensupply daerah lain terutama kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Pringsewu dan Ibukota Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung. Jalur Lintas Barat dapat dioptimalkan sebagai jalur distribusi utama hasil komoditi perkebunan dan hortikultura.

Sedangkan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel III.18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	1,746,247,405,335.00	1,746,515,973,456.54	1,752,664,719,919.10
2	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00
	Total penerimaan	1,746,247,405,335.00	1,746,515,973,456.54	1,752,664,719,919.10
	Dikurangi :			
1	Pengeluaran Pembiayaan	24,035,878,483.00	28,643,054,179.67	28,643,054,179.67
2	Belanja Pegawai	691,385,600,794.00	700,182,624,827.58	704,485,490,093.72
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,030,825,926,058.00	1,017,690,294,449.30	1,019,536,175,645.72

Sumber : Proyeksi APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 (data diolah)

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2024-2026 adalah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang merupakan kewajiban adanya Pinjaman Daerah yang telah direncanakan sejak tahun 2021 dan terealisasi pada tahun 2022 serta Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa kapasitas riil dialokasikan kedalam tiga prioritas yaitu prioritas pertama untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, prioritas kedua untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan prioritas ketiga untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan mendesak.

Tabel III.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,030,825,926,058.00	1,017,690,294,449.30	1,019,536,175,645.72
2	Prioritas I	366,360,182,666.00	366,360,182,666.00	366,360,182,666.00
3	Prioritas II	574,006,179,127.00	600,473,335,955.30	603,905,544,527.72
4	Prioritas III	90,459,564,265.00	50,856,775,828.00	49,270,448,452.00

Sumber : Proyeksi APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 (data diolah)

Penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai belanja Prioritas I yang diarahkan untuk mendanai belanja wajib dan mengikat, yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Pekon;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa/Pekon;

Belanja Prioritas II diarahkan untuk mendanai belanja pemenuhan program prioritas pembangunan daerah berupa :

- 1) Mengimplementasikan program unggulan yang masuk kedalam 15 Agenda Kerja Utama dan dijabarkan kedalam 55 Aksi Daerah;
- 2) Melaksanakan pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul);
- 3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur daerah;
- 4) Meningkatkan perekonomian daerah dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan;
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 6) Meningkatkan daya saing daerah;
- 7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Sedangkan belanja Prioritas III diarahkan untuk mendanai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, yaitu :

- 1) Belanja Hibah;
- 2) Belanja Bantuan Sosial;
- 3) Belanja Tidak Terduga.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus terus berupaya dalam meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) salah satunya melalui skema penganggaran pelaksanaan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang terdiri atas 6 jenis bidang SPM yaitu Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial yang selanjutnya diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Skema Penganggaran Pelaksanaan SPM Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024-2026 telah dipetakan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel III.20 Skema Penganggaran Pelaksanaan SPM Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	BIDANG SPM	TAHUN		
		2024	2025	2026
1	Pendidikan	76,017,862,930.90	83,619,649,223.99	91,981,614,146.39
2	Kesehatan	4,408,732,790.00	4,849,606,069.00	5,334,566,675.90
3	Pekerjaan Umum	1,700,996,000.00	1,871,095,600.00	2,058,205,160.00
4	Perumahan Rakyat	1,404,075,200.00	1,544,482,720.00	1,698,930,992.00
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1,478,943,840.00	1,626,838,224.00	1,789,522,046.40
6	Sosial	151,336,900.00	166,470,590.00	183,117,649.00

Sumber : Analisis dan data diolah, 2023



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RPD



**TANGGAMUS
TANGGAMUS
TANGGAMUS**

“Hanya sumber daya manusia yang ahli dan produktif saja yang dapat menghadapi tantangan dan memecahkan masalah

• B.J. Habibie •



BAB IV

Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dari analisis berbagai permasalahan dari urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang telah diidentifikasi serta hasil telaah terhadap gambaran umum dan kondisi eksisting daerah. Permasalahan dan isu strategis daerah selanjutnya akan coba dijawab dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

Permasalahan dan isu strategis secara implementatif akan ditangani dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, baik secara sektoral, lintas sektor, bahkan lintas wilayah yang membutuhkan kerjasama dengan daerah sekitar dan provinsi.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib

4.1.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Permasalahan pendidikan yang masih ditemui di Kabupaten Tanggamus meliputi:

- 1) Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 baru mencapai 12,30 tahun, hal ini berarti harapan anak untuk bersekolah baru mencapai tingkat 3 SLTA;



- 2) Meskipun setiap tahun terus mengalami kenaikan, tapi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 baru mencapai 7,35 tahun yang berarti tingkat pendidikan hanya sampai dengan kelas 1 SMP (Kelas 7);
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) perlu terus ditingkatkan dengan capaian untuk jenjang SD pada tahun 2022 sebesar 103,69%, SMP 107,05% dan SMA 78,33%;
- 4) Angka Partisipasi Murni (APM) perlu dioptimalkan yang capaiannya pada tahun 2022 untuk jenjang SD sebesar 99,96%, SMP 80,01% dan SMA 55,72%;
- 5) Belum meratanya akses pendidikan yang salah satunya ditandai dengan kondisi ruang kelas dalam kondisi baik yaitu PAUD sebesar 77,78%, SD 82,89% dan SMP 72,74%;
- 6) Masih terbatasnya ketersediaan guru di semua jenjang pendidikan yang pada tahun 2022 untuk guru PAUD sebanyak 1.418 orang, guru SD 5.515 orang dan guru SMP 2.383 orang.

B. Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Kabupaten Tanggamus yaitu:

- 1) Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 68,95 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung 70,99 tahun dan Nasional 71,85 tahun;
- 2) Masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2022 menurut data SSGI berada pada angka 20,4%;
- 3) Dari 302 Pekon/Kelurahan se-Kabupaten Tanggamus, sampai dengan tahun 2023 yang sudah mencapai ODF sebanyak 200 Pekon atau baru mencapai 66,23%;
- 4) Masih rendahnya rasio ketersediaan sarana kesehatan masyarakat, pada tahun 2022 rasio Puskesmas per jumlah penduduk sebesar 1:27.204, Klinik 1:31.090 dan Pustu 1:12.318;
- 5) Rasio Ketersediaan Rumah Sakit per jumlah penduduk semakin menurun hanya 1:326.449 pada tahun 2022;
- 6) Rasio ketersediaan tenaga medis terhadap per 100.000 penduduk sampai dengan tahun 2022 untuk dokter spesialis baru mencapai

- 3) Masih tingginya proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di tahun 2022 yaitu sebesar 48,0%.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan pembangunan pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka kriminalitas yang pada tahun 2022 mencapai 44,88 per 100.000 penduduk;
- 2) Masih terdapatnya pelanggaran terhadap K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang belum terselesaikan, pada tahun 2022 terdapat 12% pelanggaran yang belum dapat diselesaikan;
- 3) Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat.

F. Sosial

Permasalahan pembangunan pada bidang sosial di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Tanggamus yang belum tertangani pada tahun 2022 mencapai 20,28%;
- 2) Masih rendahnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 3) Disamping permasalahan di atas, masih terdapat permasalahan lain seperti belum optimalnya penanganan bencana sosial.

4.1.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan pada bidang tenaga kerja di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 68,91% angka tersebut masih dibawah TPAK Provinsi Lampung yang telah mencapai 70,06%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan yang ditahun 2021 semula 2,93% menjadi 3,70% pada tahun 2022 meskipun angka tersebut masih lebih baik dibanding TPT Provinsi Lampung 4,52% dan Nasional 5,89%;
- 3) Masih minimnya pelatihan kewirausahaan bagi para pencari tenaga kerja yang baru mencapai 20%;
- 4) Masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja yang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.616 orang yang terdiri dari jenjang Pendidikan SD 18 orang, SMP 211 orang, SMA 1.696 orang, SMK 1.482 orang, Diploma/Akta I, II, III 49 orang dan Perguruan Tinggi 160 orang.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

- 1) Pada tahun 2022 masih terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan masing-masing 38 dan 5 kasus kekerasan;
- 2) Belum semua perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan layanan bantuan hukum;
- 3) Belum optimalnya pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2022 nilainya baru mencapai 91,10 dan 56,54.

C. Pangan

Permasalahan pembangunan pada bidang pangan di Kabupaten Tanggamus yakni :



- 1) Masih adanya beberapa daerah rawan pangan yang perlu mendapatkan penanganan serius. Daerah rawan pangan di Kabupaten Tanggamus yang mengacu pada KK miskin masih diatas 30%;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari;
- 3) Belum optimalnya sinergitas antara program-program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan;
- 4) Belum terciptanya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan;
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan;
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal.

D. Pertanahan

Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tanggamus ditahun 2017 sebesar 50% dan terus meningkat hingga mencapai 68,5% ditahun 2022. Permasalahan pertanahan adalah terkait surat atau bukti kepemilikan atas tanah, penanganan masalah pertanahan ini membutuhkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

E. Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Masih rendahnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 baru mencapai 62,06;
- 2) Terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Tanggamus, yaitu baru 1 lokasi yang saat sudah beroperasi;
- 3) Meningkatnya produksi sampah serta sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu;

- 4) Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan);
- 5) Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 6) Beberapa kecamatan di Kabupaten Tanggamus merupakan wilayah rawan bencana alam seperti Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Kelumbayan, dan Kota Agung Timur. Sedangkan wilayah rawan kebakaran antara lain Kecamatan Talang Padang, Kota Agung, Gisting, Wonosobo dan Kota Agung Barat;

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

- 1) Pemenuhan hak kependudukan masih belum optimal, hal tersebut ditandai dengan masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki KTP, hal ini dapat dilihat dari rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 70,03% artinya masih terdapat 29,97% penduduk >17 tahun yang belum memiliki KTP;
- 2) Masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan;
- 3) Belum optimalnya implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

- 1) Masih terdapat 189 pekon yang masih berstatus pekon berkembang;
- 2) Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Pekon dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan BUMDes dalam peningkatan perekonomian di Pekon.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tanggamus, yaitu :

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB;
- 2) Kurangnya pembinaan masyarakat mengenai penguatan keluarga sejahtera sebagai basis ketahanan sosial masyarakat;
- 3) Cakupan persentase akseptor KB MKJP yang baru mencapai 38,39%.

I. Perhubungan

Permasalahan pembangunan pada bidang perhubungan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Kurang optimalnya fasilitas perlengkapan jalan, seperti rambu-rambu jalan, dan penerangan lampu jalan;
- 2) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum mulai mengalami peningkatan yang pada tahun 2022 mencapai 101,72% tapi masih perlu dioptimalkan lagi;
- 3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perhubungan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- 4) Masih rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan.

J. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan baru mencapai 28% artinya masih terdapat 72% yang belum memiliki KIM;
- 2) Cakupan layanan telekomunikasi baru mencapai 70% artinya belum semua wilayah di Kabupaten Tanggamus *tercovererage* layanan telekomunikasi;
- 3) Penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum dilaksanakan secara optimal yang ditandai dengan nilai SPBE sebesar 1,60 dengan predikat kurang;
- 4) Belum adanya standar keamanan informasi;
- 5) Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Menurunnya jumlah koperasi aktif dari 97 koperasi pada tahun 2021 menjadi hanya 71 koperasi pada tahun 2022;
- 2) Persentase BPR/LKM aktif masih rendah, baru mencapai 4,21%;
- 3) Masih belum optimalnya pemberdayaan pelaku UMKM yang pada tahun 2022 berjumlah 5.243 UMKM;
- 4) Masih rendahnya UMKM yang memiliki penunjang usaha, pada tahun 2022 UMKM yang memiliki penunjang usaha baru mencapai 30%;
- 5) Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengelola usahanya;
- 6) Keterbatasan modal pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah mengakibatkan sulitnya pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah menjalankan dan mengembangkan usahanya;
- 7) Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UMKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga.

L. Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan pada bidang penanaman modal di Kabupaten Tanggamus yakni :

- 1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) masih sedikit, baru berjumlah 20 investor PMDN dan 5 investor PMA di tahun 2022;
- 2) Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat/para pelaku usaha untuk membuat izin atas bangunan maupun izin tempat usaha yang dimiliki;
- 4) Terbatasnya kualitas tenaga kerja lokal atau *unskilled labor* yang dapat berpengaruh terhadap minat investasi.

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pembangunan pada bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Rendahnya persentase organisasi pemuda yang aktif, baru mencapai 55% di tahun 2022, hal ini mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan masih kurang;
- 2) Sangat terbatasnya sarana dan prasarana olahraga serta belum adanya gelanggang pemuda/remaja di Kabupaten Tanggamus;
- 3) Masih perlunya optimalisasi pembinaan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi olahraga;

N. Statistik

Permasalahan pembangunan pada bidang Statistik di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Belum optimalnya koordinasi antar *stakeholders* dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia yang terintegrasi;
- 2) Belum optimalnya dukungan seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan proses pembangunan database yang valid dan akurat;
- 3) Ketersediaan data yang kurang akurat bagi kepentingan perencanaan pembangunan.

O. Persandian

Permasalahan pembangunan pada bidang persandian di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, sampai saat ini baru terdapat 1 Perangkat Daerah;
- 2) Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awarness*);
- 3) Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang masih terbatas.

P. Kebudayaan

Permasalahan pembangunan pada bidang kebudayaan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Rendahnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, yakni hanya 2 sepanjang 5 tahun terakhir;
- 2) Masih terbatasnya penyelenggaraan festival seni dan budaya yang mengangkat kearifan budaya lokal;
- 3) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal.

Q. Perpustakaan

Permasalahan pembangunan pada bidang perpustakaan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan dari 4.992 pengunjung pada tahun 2020, menjadi 3.466 pengunjung pada tahun 2022;
- 2) Minimnya jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat, sampai dengan tahun 2022 jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat hanya sebesar 25%;
- 3) Jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah masih relatif sedikit.

R. Kearsipan

Permasalahan pembangunan pada bidang kearsipan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) SDM pengelola kearsipan masih sangat terbatas;
- 2) Perangkat Daerah atau pencipta arsip belum tertib dalam pengelolaan arsip;
- 3) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2022 hanya sebesar 35%;
- 4) Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Cakupan bina kelompok nelayan masih sangat rendah, hanya sebesar 28% pada tahun 2022;
- 2) Sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik aparatur dan nelayan kapasitasnya masih rendah;
- 3) Kurangnya permodalan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- 4) Masih terdapat beberapa sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dalam kondisi tidak layak.



B. Pariwisata

Permasalahan pembangunan pada bidang pariwisata di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Jumlah kunjungan wisatawan pasca pandemic *Covid-19* mulai bangkit tapi belum menunjukkan performa yang sesuai dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus;
- 2) PAD sektor pariwisata Kabupaten Tanggamus masih sangat kecil, hanya sebesar 0,008% pada tahun 2022, padahal Kabupaten Tanggamus memiliki potensi pariwisata yang sangat baik;
- 3) Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;
- 4) Pemasaran dan promosi wisata masih belum optimal dan terkendala minimnya sarana promosi yang tepat;
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata dalam menjaga kebersihan, keamanan serta fasilitas objek wisata;
- 6) Belum optimalnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata.

C. Pertanian

Permasalahan pembangunan pada bidang pertanian di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dan pada tahun 2022 sebesar 38,91%;
- 2) Perlunya optimalisasi peningkatan produktivitas padi sebagai bahan pangan utama per hektar yang pada tahun 2022 baru mencapai 57 Ku/Ha;
- 3) Adanya penurunan luas lahan pertanian akibat peralihan lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, ditunjang penurunan tingkat kesuburan tanah;
- 4) Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing hasil produk pertanian;
- 5) Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan.

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan pada bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik sebanyak 3,22%;
- 2) Belum meratanya akses terhadap layanan listrik;
- 3) Perlunya optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

E. Perdagangan

Permasalahan pembangunan pada bidang perdagangan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus ke luar daerah dan nasional masih terbatas, hal ini terlihat dari ekspor bersih perdagangan yang masih sangat rendah;
- 2) Pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal masih belum optimal;
- 3) Cakupan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal masih sangat rendah, yakni sebesar 12,03% hal ini berimbas pada terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas;
- 4) Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah.

F. Perindustrian

Permasalahan pembangunan pada bidang perindustrian di Kabupaten Tanggamus antara lain :

- 1) Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, yaitu sebesar 6,70% pada tahun 2022;
- 2) Pertumbuhan sektor industri pengolahan masih tergolong cukup rendah, yakni pada tahun 2022 sebesar 1,14%;
- 3) Kelompok pengrajin yang memperoleh bantuan binaan dari Pemerintah Daerah masih rendah, yakni 15,41% di tahun 2022;
- 4) Pangsa pasar produk industri pengolahan daerah Kabupaten Tanggamus masih terbatas, sebagian besar masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Kabupaten Tanggamus;
- 5) Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah dan masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha karena terbatasnya alokasi anggaran pelatihan.

G. Transmigrasi

Permasalahan pembangunan pada bidang transmigrasi di Kabupaten Tanggamus yakni :

- 1) Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan semangat memperbaiki kehidupan ekonomi masih relatif rendah;
- 2) Kuota transmigran di daerah tujuan transmigrasi juga terbatas sehingga ketika secara kuantitas calon transmigran terpenuhi, belum dibarengi dengan kuota yang tersedia di daerah tujuan transmigrasi;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman dan sarana pendukung di lokasi transmigrasi.

4.1.3. Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan pembangunan pada bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) antar dokumen perencanaan pembangunan antara pusat-daerah dan provinsi-kabupaten belum optimal;
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM Perencana belum memadai;
- 3) Belum optimalnya basis data yang dikelola oleh statistik yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.

B. Keuangan

Permasalahan pembangunan pada bidang keuangan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Masih besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan;
- 2) Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendanaan pembangunan daerah;
- 3) Tingkat pertumbuhan belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja pembangunan yang berdampak pada tingkat belanja modal;
- 4) Ditetapkannya uang persediaan dalam jumlah terbatas sehingga mengakibatkan kegiatan yang direncanakan, khususnya pada awal tahun anggaran tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan *time schedule* yang telah ditetapkan.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan pada bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih rendah, baru mencapai 25%, idealnya setiap pejabat struktural sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan yang diemban;
- 2) Belum optimalnya capaian Nilai Profesionalitas ASN yang pada tahun 2022 baru mencapai 54,23;
- 3) Masih kurangnya sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

D. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan pada bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Belum semua rencana kelitbangan yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan daerah;
- 2) Masih belum meratanya inovasi daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah maupun *stakeholders* lainnya dalam peningkatan pelayanan publik maupun pemerintahan;
- 3) Kebijakan riset dan inovasi daerah yang diterapkan di daerah masih sangat minim;
- 4) Masih terbatasnya SDM Kelitbangan, sampai dengan tahun 2022 baru memiliki 1 orang pejabat fungsional peneliti.

E. Pengawasan

Permasalahan pembangunan pada bidang pengawasan di Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Masih terdapat temuan APIP yang belum ditindaklanjuti sebesar 35,17% dan temuan BPK sebesar 1,82%;
- 2) Masih terbatasnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) yang saat ini baru berjumlah 55 personil sehingga masih kekurangan 80 personil.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat diperoleh beberapa isu strategis di Kabupaten Tanggamus yang dibagi kedalam 4 pilar pembangunan, yaitu:

1) Isu Strategis Pilar Ekonomi :

- a) Percepatan pemulihan ekonomi yang pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 4,16%, terutama Sektor UMKM dan sektor informal lainnya akibat dampak *Covid-19*;
- b) Peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian dan Perikanan yang pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 1,62%;
- c) Peningkatan kontribusi Pendukung Sektor Pariwisata sebagai daya dukung perekonomian Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2022 hanya sebesar 1,88%;
- d) Peningkatan realisasi investasi yang baru mencapai 5,18% dalam rangka mendukung optimalisasi pertumbuhan ekonomi;
- e) Percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanggamus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus;
- f) Pengendalian dan stabilitas ekonomi untuk meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat yang saat ini menopang 71,62% terhadap perekonomian;
- g) Peningkatan Konektivitas Wilayah, saat ini Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten baru mencapai 37,08% hal tersebut masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan.

2) Isu Strategis Pilar Sosial :

- a) Penurunan Tingkat Kemiskinan yang saat ini sebesar 10,98% masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata Nasional 9,54%;
- b) Peningkatan IPM, capaian IPM saat ini masih rendah yaitu sebesar 67,22 dan capaian tersebut masih dibawah Provinsi Lampung 70,45 dan Nasional 72,91 oleh karena itu perlu kolaborasi antar *stakeholders* dalam peningkatan HLS, RLS, AHH dan PPK;
- c) Pencapaian Kabupaten ODF, sampai dengan tahun 2023 baru 200 Pekon dari 302 Pekon/Kelurahan (66,23%) yang berstatus Pekon ODF sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI 2022 sebesar 20,4%;

- d) Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, saat ini Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani masih berada pada angka 20,28%.

3) Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola :

- a) Peningkatan Pelayanan Publik, saat ini Kualitas Pelayanan Publik masih berada pada nilai 4,14. Upaya peningkatannya melalui pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul) pada setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b) Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), saat ini Kualitas SPBE masih berada diangka 1,60 dengan kategori kurang, sehingga harus terus diupayakan dengan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan;
- c) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, saat ini Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) baru berada pada nilai 59,14 dengan predikat CC sehingga perlu dilakukan upaya yang terintegrasi dalam mewujudkan 8 area perubahan reformasi birokrasi.

4) Isu Strategis Pilar Lingkungan :

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, saat ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru mencapai 62,06 (kategori sedang) dan timbulan sampah yang belum termanfaatkan masih cukup tinggi oleh karena itu perlu upaya peningkatan kualitas air, udara dan tututan lahan serta pengelolaan sampah yang terintegrasi;
- b) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim yang saat ini baru berkontribusi sebesar 1,69%;
- c) Peningkatan Ketahanan Terhadap Risiko Bencana, saat ini Indeks Risiko Bencana mencapai 149,46 oleh karena itu Kabupaten Tanggamus sebagai daerah rawan bencana memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis mitigasi bencana.

Disamping isu strategis berdasarkan empat pilar pembangunan diatas, juga diidentifikasi dampak utama pandemi *Covid-19* dan ancaman resesi ekonomi dunia terhadap perekonomian daerah, yaitu:

1. Menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 71,62% terhadap perekonomian;
2. Adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada kelangsungan dunia usaha;
3. Terjadinya fluktuasi harga bahan pokok masyarakat dan penurunan harga komoditas produk unggulan akibat pelemahan ekonomi.

Menindaklanjuti isu-isu strategis diatas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan prioritas pembangunan. Keterkaitan antara isu strategis dengan prioritas pembangunan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Identifikasi Isu Strategis Daerah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS
1	PD 1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	<p>Peningkatan IPM, capaian IPM saat ini masih rendah yaitu sebesar 67,22 dan capaian tersebut dibawah Provinsi Lampung 70,45 dan Nasional 72,91 oleh karena itu perlu kolaborasi antar <i>stakeholders</i> dalam peningkatan HLS, RLS, AHH dan PPK</p> <p>Pencapaian Kabupaten ODF, sampai dengan tahun 2023 baru 200 Pekon dari 302 Pekon/Kelurahan (66,23%) yang berstatus Pekon ODF sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI 2022 sebesar 20,4%</p>
2	PD 2 Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan stabilitas kamtibmas	<p>Percepatan pemulihan ekonomi yang pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 4,16%, terutama Sektor UMKM dan sektor informal lainnya akibat dampak <i>Covid-19</i></p> <p>Peningkatan realisasi investasi yang baru mencapai 5,18% dalam rangka mendukung optimalisasi pertumbuhan ekonomi</p> <p>Pengendalian dan stabilitas ekonomi untuk meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat yang saat ini menopang 71,62% terhadap perekonomian</p> <p>Penurunan Tingkat Kemiskinan, yang saat ini sebesar 10,98% masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata Nasional 9,54%</p> <p>Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, saat ini Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani masih berada pada angka 20,28%</p>
3	PD 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan	<p>Peningkatan Pelayanan Publik, saat ini Kualitas Pelayanan Publik masih berada pada nilai 4,14. Upaya peningkatannya melalui pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul) pada setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat</p> <p>Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks SPBE saat ini masih berada diangka 1,60 dengan kategori kurang sehingga terus diupayakan dengan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan</p> <p>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, saat ini Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) baru berada pada nilai 59,14 dengan predikat CC sehingga perlu dilakukan Upaya yang terintegrasi dalam mewujudkan 8 area perubahan reformasi birokrasi</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS
4	PD 4 Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan	Percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanggamus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus Peningkatan Konektivitas Wilayah, saat ini Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten baru mencapai 37,08% hal tersebut masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan
5	PD 5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah	Peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian dan Perikanan yang pada tahun 2022 baru tumbuh sebesar 1,62% Peningkatan kontribusi Pendukung Sektor Pariwisata sebagai daya dukung perekonomian Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2022 hanya sebesar 1,88%
6	PD 6 Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, saat ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru mencapai 62,06 (kategori sedang) dan timbulan sampah yang belum termanfaatkan masih cukup tinggi oleh karena itu perlu upaya peningkatan kualitas air, udara dan tututan lahan serta pengelolaan sampah yang terintegrasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim yang saat ini baru berkontribusi sebesar 1,69% Peningkatan Ketahanan Terhadap Risiko Bencana, saat ini Indeks Risiko Bencana 149,46 oleh karena itu Kabupaten Tanggamus sebagai daerah rawan bencana memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis mitigasi bencana

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, data diolah, 2023

Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem pembangunan yang lebih luas, sehingga dalam implementasinya pembangunan satu daerah tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah lain disekitarnya. Keterkaitan antar daerah terjadi hampir dalam seluruh aspek pembangunan, baik itu dalam bidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial, pemerintahan maupun pelayanan publik. Pada wilayah-wilayah perbatasan, sering kali terjadi persoalan yang penanganannya perlu melibatkan beberapa Kabupaten/Kota seperti persoalan banjir, persampahan, dan transportasi. Sebagai implikasinya maka diperlukan adanya kerjasama antar daerah. Kerjasama tidak hanya penting dalam menyelesaikan masalah yang bersifat lintas batas, tetapi juga penting untuk membangun simbiosis mutualisme dalam optimalisasi pembangunan daerah.



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RPD



**422
TANGGAMUS
022**

**“Ilmu itu terlaksananya
dengan perbuatan.
Biarpun banyak ilmunya,
kalau tidak diamalkan dan
tidak dipergunakan,
ilmu itu tidak berguna”**

• H.M. Soeharto •

BAB V

Tujuan dan Sasaran

- 1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- 2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
- 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023;
- 4) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- 5) Isu-isu strategis yang berkembang;
- 6) Kebijakan nasional;
- 7) Regulasi yang berlaku.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu:

- 1) Dimensi Manusia (*human*) merupakan dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis;
- 2) Dimensi Kewilayahan dan Lingkungan (*territoriality and environment*) merupakan dimensi perencanaan yang berkaitan dengan dengan pembangunan kewilayahan yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar;
- 3) Dimensi Pemerintahan (*governance*) merupakan dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan kolaborasi pembangunan yang inklusif.;
- 4) Dimensi Perekonomian (*economy*) merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi.

Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada tabel berikut.

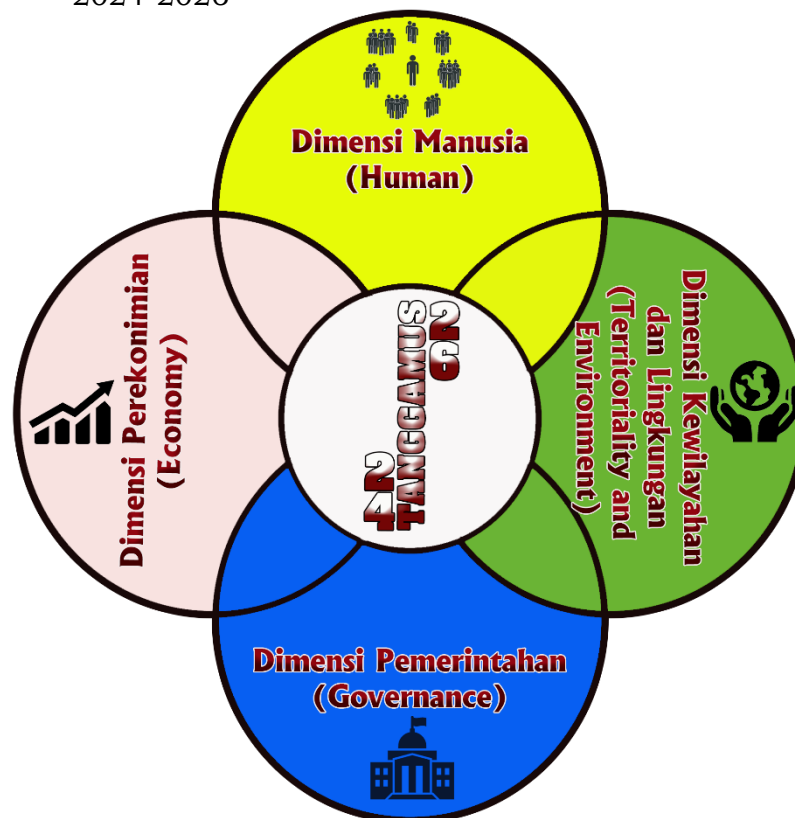
Tabel V.1. Proses Perumusan Konsep RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

MISI RPJPD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005-2025	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2020-2024	MISI RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023	ISU STRATEGIS 2024-2026	DIMENSI PEMBANGUNAN RPD KABUPATEN TANGGAMUS 2024-2026
<ul style="list-style-type: none"> Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Nilai IPM Pencapaian Kabupaten ODF dan Penurunan Prevalensi Stunting Penurunan Tingkat Kemiskinan Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensi Manusia (<i>human</i>)
<ul style="list-style-type: none"> Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis dan Harmonis 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Peningkatan Ketahanan Terhadap Risiko Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensi Kewilayahan dan Lingkungan (<i>territoriality and environment</i>)
<ul style="list-style-type: none"> Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan/Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensi Pemerintahan (<i>governance</i>)
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Konektivitas Wilayah Percepatan Pemulihan Ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Daya Dukung Perekonomian Peningkatan Realisasi Investasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus Pengendalian dan Stabilitas Bahan Pangan Pokok 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensi Perekonomian (<i>economy</i>)

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023

Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah TANGGAMUS: KABUPATEN ASIK, yang merupakan konsep Kabupaten yang Agamis, Sejahtera, Inovatif dan Kondusif dimana seluruh warganya dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

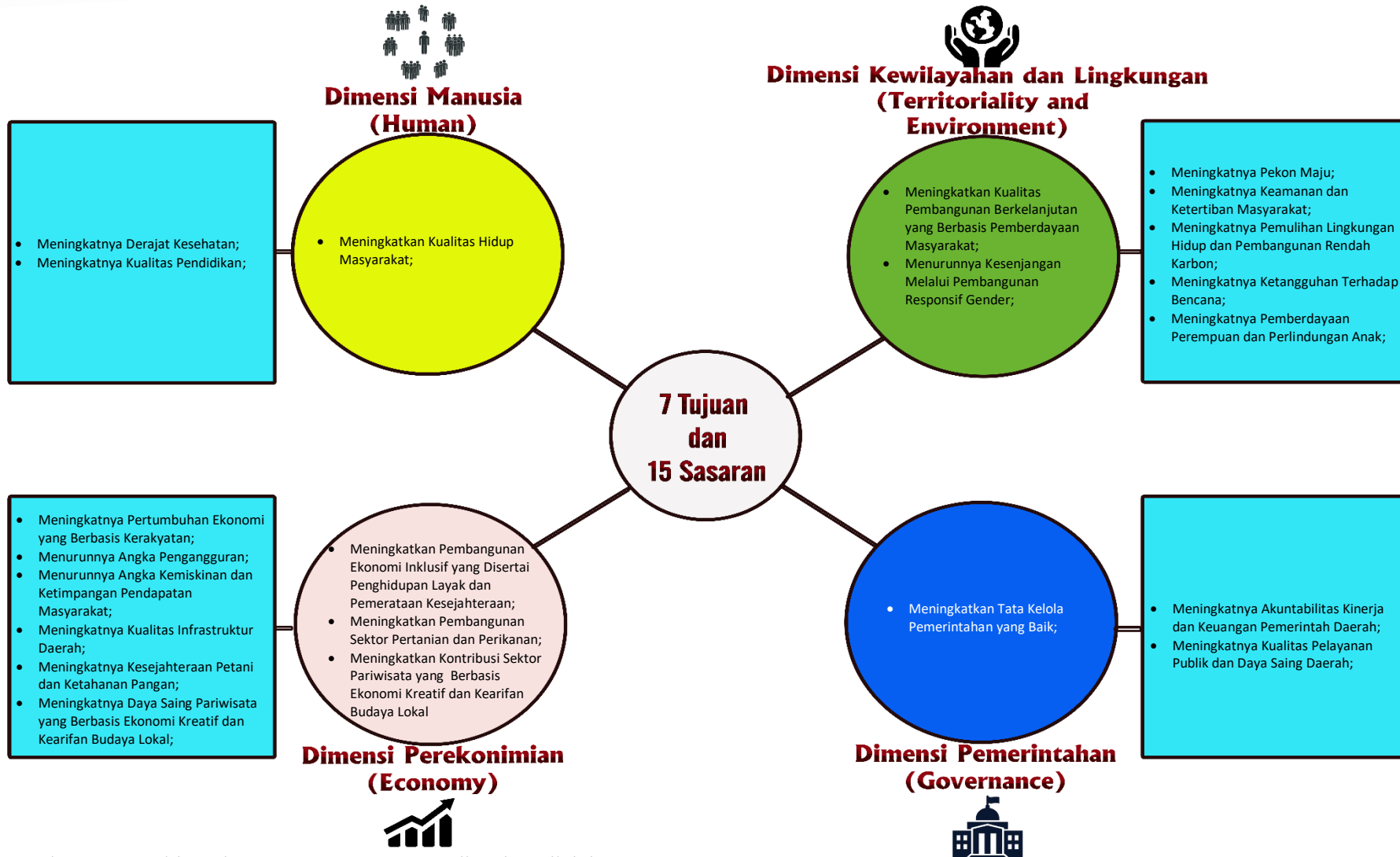
Gambar V.1. Ilustrasi Konsep RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 7 tujuan dengan 15 sasaran turunannya, Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*). Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut selengkapnnya dapat dilihat pada skema berikut.

Gambar V.2. Skema Integrasi Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPD, hal ini karena jika visi dan misi RPJPD tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka program yang dilaksanakan akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Penentuan tujuan dan sasaran di dalam RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 didasarkan pada :

- 1) Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
- 2) Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
- 3) Isu strategis aktual.

Visi Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, sedangkan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, visi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu *“Rakyat Lampung Berjaya” (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, Sejahtera)*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 yaitu *“Terwujudnya*

Masyarakat yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom”. Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 misi jangka panjang daerah, yaitu:

- 1) Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis;
- 2) Misi 2 : Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis;
- 3) Misi 3 : Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik;
- 4) Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan.

Visi dan misi RPJPD tersebut diwujudkan melalui pencapaian Sasaran Pokok sebagai Indikator Keberhasilan Pembangunan, adapun sasaran pokok jangka panjang daerah tersebut meliputi:

- 1) Sasaran Pokok Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis yaitu:
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat meningkat dengan sasaran indeks pendidikan sebesar 80 dan lamanya pendidikan 12 tahun;
 - b. Sekolah semakin berkualitas baik SD, SLTP, SLTA dengan sasaran setiap kecamatan memiliki sekolah berstandar nasional dan lebih dari satu sekolah berstandar internasional;
 - c. Angka partisipasi sekolah untuk SLTP dan SLTA mencapai 75-85%;
 - d. Kesehatan masyarakat semakin baik dengan sasaran indeks kelangsungan hidup mencapai 75 tahun;
 - e. Pelayanan kesehatan makin baik dengan sasaran setiap kecamatan memiliki satu puskesmas rawat inap dan puskesmas pembantu serta rumah sakit daerah kelas B;
 - f. Kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita makin baik dengan sasaran tingkat kematian ibu melahirkan rendah, persalinan dengan tenaga medis mencapai 80 %, dan tidak ada balita kurang gizi serta kematian bayi rendah;
 - g. Agama menjadi kepribadian masyarakat yang tercermin pada nilai-nilai agama mewarnai kehidupan setiap orang secara kental serta terbangunnya kondisi yang menjamin setiap orang menjalankan agamanya.

- 2) Sasaran Pokok Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis yaitu:
 - a. Dinamika politik berjalan normal dan positif yang ditandai dengan berjalannya pendidikan politik, stabilnya partai politik, dan tumbuhnya forum-forum publik;
 - b. Kesadaran dan partisipasi masyarakat makin baik tercermin pada keikutsertaan secara sadar dalam pemilihan kepala pekon, BHP, kepada daerah, kepala negara dan pemilu;
 - c. Kehidupan sosial berkembang sehat yang ditandai dengan ormas yang aktif, kepedulian sosial yang tinggi, berjalannya kerjasama dan kegiatan gotong royong, tumbuhnya tanggungjawab sosial lembaga-lembaga bisnis;
 - d. Kehidupan kebudayaan terus berkembang yang ditandai dengan masih kentalnya identitas budaya dalam kehidupan, berkembang dan tersalurkan kreativitas masyarakat, tumbuhnya lembaga dan sanggar seni;
 - e. Adat istiadat dan budaya terus berkembang ditandai dengan masih kuatnya identitas budaya, lestarnya kegiatan tradisi budaya, berkembangnya kesenian daerah terutama budaya lokal (budaya Lampung sai batin);
- 3) Sasaran Pokok Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik yaitu:
 - a. Pemerintah dipercaya masyarakat yang ditandai dengan stabilnya pemerintahan dan taatnya masyarakat pada kebijakan pemerintah;
 - b. Pemerintahan berkinerja baik yang ditandai dengan rendahnya keluhan masyarakat, disiplin dan dedikasi aparatur yang tinggi, manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - c. Pemerintahan dikelola dengan bersih yang ditandai dengan rendahnya tingkat penyimpangan keuangan, kewenangan, dan administrasi;
 - d. Kemandirian daerah makin meningkat yang ditandai dengan makin besarnya kontribusi PAD dalam membiayai pembangunan daerah;

- e. Lembaga legislatif semakin berwibawa yang ditandai dengan berjalannya fungsi legislasi, budgeter, dan pengawasan secara baik;
- 4) Sasaran Pokok Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan yaitu:
 - a. Perekonomian terus berkembang yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan mencapai rata-rata diatas 5%;
 - b. Daya saing ekonomi meningkat yang ditandai dengan daya dukung infrastruktur memadai dan iklim usaha kondusif, serta meningkatnya investasi;
 - c. Kemiskinan berkurang yang ditandai dengan perluasan kesempatan kerja dan meningkatnya daya beli serta menurunnya jumlah keluarga-orang miskin, dengan indeks daya beli mencapai 65;
 - d. Perekonomian berkembang secara adil yang ditandai dengan berkembangnya usaha mikro dan kecil (UMK), adanya kemitraan usaha antara usaha skala besar dengan UMK dan keterpaduan antara perekonomian desa dan kota, laut dan daratan;
 - e. Perekonomian berkembang secara seimbang yang ditandai dengan struktur ekonomi yang berimbang dan ketimpangan antarwilayah yang rendah, dengan peranan pertanian 35%, industri 20%, dan perdagangan 25%;

Sedangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

- 1) Tahap Konsolidasi (Periode I);

Tahap ini merupakan peletakan dasar bagi kemajuan Kabupaten Tanggamus dalam jangka panjang. Untuk melakukan percepatan dan stabilnya perkembangan Kabupaten Tanggamus maka perlu suatu kerangka dasar yang kokoh sehingga mampu menopang perkembangan yang diinginkan.

Untuk itu, pada tahap ini kegiatan diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan serta

pemulihan kerusakan lingkungan (lahan kritis, hutan gundul, das tidak terpelihara dll). Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, dan sosial. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumber daya manusia.

2) Tahap Pengembangan (Periode II dan III);

Tahap ini merupakan kelanjutan tahapan konsolidasi, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Untuk itu, tahap ini relatif lebih panjang. Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi.

3) Tahap Pemantapan (Periode IV);

Tahap ini merupakan kelanjutan tahap pengembangan, yaitu merupakan tahap pemantapan pengembangan yang sudah dicapai. Kemajuan yang sudah dicapai perlu dipertahankan dan dimantapkan dengan melakukan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap kemajuan yang sudah dicapai sehingga pengembangan tersebut dapat dapat terus berkelanjutan.

Setiap metode dan pendekatan memiliki spesifikasi tertentu terhadap kondisi yang ada, karena itu bila pengembangan telah berhasil merubah kondisi menjadi lebih baik maka kondisi baru tersebut membutuhkan metode dan pendekatan baru yang sesuai. Esensinya bahwa pada tahap ini terjadi proses pembelajaran sehingga dapat merespon setiap perubahan yang terjadi. Akomodasi ini menjadikan metode dan pendekatan selalu efektif menjawab tantangan perubahan.

Dengan demikian maka aspek fisik perlu direhabilitasi dan bahkan diperbaharui sehingga relevan dengan tuntutan perubahan. Aspek pengelolaan juga perlu pembaharuan sehingga metode dan pendekatan disesuaikan dengan tuntutan perubahan.



Sedangkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis, dengan arah kebijakan:
 - a) Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - b) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
 - c) Penciptaan suasana yang mendorong pendalaman dan pengamalan agama;
 - d) Penguatan nilai-nilai budaya;
- 2) Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis, dengan arah kebijakan:
 - a) Penguatan kelembagaan sosial masyarakat;
 - b) Peningkatan kesadaran politik masyarakat;
 - c) Penguatan peran pemuda dan perempuan;
 - d) Berkembangnya kehidupan berkesenian;
- 3) Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik, dengan arah kebijakan:
 - a) Peningkatan kapasitas pemerintah;
 - b) Peningkatan kapasitas lembaga legislatif;
 - c) Penguatan kontrol sosial;
- 4) Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan, dengan arah kebijakan:
 - a) Iklim usaha yang sehat
 - b) Praktek bisnis yang adil
 - c) Produktivitas yang tinggi
 - d) Jaringan usaha dan kerjasama bisnis
 - e) Kelestarian daya dukung sumberdaya

Berdasarkan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 diatas selanjutnya disusun tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tanggamus tahun 2024-2026 yang formulasi dan keterkaitannya dijabarkan seperti tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel V.2. Formulasi Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	VISI DAN MISI RPJPD	RPD				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TAHUN 2021	KONDISI AWAL TAHUN 2022	KONDISI AKHIR TAHUN 2026
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
VISI Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom										
1	Misi 1 Membangun Manusia Yang Berkualitas dan Agamis	T.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	IT.1 Indeks Pembangunan Manusia			$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>IPM = Indeks Pembangunan Manusia I_{kesehatan} = Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup) I_{pendidikan} = Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah) I_{pengeluaran} = Indeks Pengeluaran (Pengeluaran Per Kapita)</p>	Indeks	68,79	69,32	71,79
				S.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan	IS.1 Angka Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup dengan menggunakan paket program Mortpak dengan data estimasi rata-rata jumlah anak lahir hidup pada tahun penghitungan dan estimasi rata-rata jumlah anak masih hidup pada tahun penghitungan				
				S.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.2 Indeks Dimensi Pendidikan *)	$IDP = \frac{HLS + RLS}{2}$ <p>IDP = Indeks Dimensi Pendidikan HLS = Harapan Lama Sekolah RLS = Rata-Rata Lama Sekolah</p>				
2	Misi 2 Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis Dan Harmonis	T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	IT.2 Indeks Desa Membangun			$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$ <p>IDM = Indeks Desa Membangun IKS = Indeks Ketahanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan, Perpustakaan, Gotong Rotong, Ruang Publik, Olahraga, Keamanan, PPKS, Listrik, Internet, Sampah, Air Minum) IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi (Produksi, Pertokoan, Pasar, Warung, Penginapan, Pos dan Jasa Logistik, Bank, Transportasi Umum, Jalan) IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Rawan Bencana, Tanggap Bencana)</p>	Skor	0,6712	0,6888	0,7398

NO	VISI DAN MISI RPJPD	RPD				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TAHUN 2021	KONDISI AWAL TAHUN 2022	KONDISI AKHIR TAHUN 2026
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
				S.3 Meningkatnya Pekon Maju	IS.3 Persentase Pekon Maju	$PPM = \frac{\text{Jumlah Pekon Maju Berdasarkan Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah Seluruh Pekon}} \times 100 \%$ <p>PPM = Persentase Pekon Maju</p>	Persen	17,06	25,42	63,55
				S.4 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IS.4 Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk *)	$AK = \frac{\text{Jumlah Tindak Kriminal Dalam 1 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$ <p>AK = Angka Kriminalitas</p>	Angka	36,54	44,88	36,55
				S.5 Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	IS.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	Angka	64,27	62,06	69,35
					IS.6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	$E_{GRK} = \frac{E \text{ tahun } n - E \text{ tahun } n-1}{E \text{ tahun } n-1} \times 100 \%$ <p>E = A x EF E_{GRK} = Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca E = Jumlah Emisi A = Data Aktivitas (Jumlah Bahan-Bahan Penghasil Emisi) EF = Faktor Emisi</p>	Persen	1,29	1,69	4,94

NO	VISI DAN MISI RPJPD	RPD				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TAHUN 2021	KONDISI AWAL TAHUN 2022	KONDISI AKHIR TAHUN 2026
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
				S.6 Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana	IS.7 Indeks Risiko Bencana	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p>Risiko (risk) = Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonom.</p> <p>Bahaya/ Ancaman (hazard) = Suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.</p> <p>Kerentanan (vulnerability) = Suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards).</p>	Angka	127,97	149,46	92,43
		T.3 Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	IT.3 Indeks Pembangunan Gender			$\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}}$ <p>IPG = Indeks Pembangunan Gender IPM = Indeks Pembangunan Manusia</p>	Angka	90,98	91,10	91,58
				S.7 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS.8 Indeks Pemberdayaan Gender	$\text{IDG} = \frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Lin} + \text{Dist})$ <p>IDG = Indeks Pemberdayaan Gender Ipar = Indeks Keterwakilan di Parlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Lin Dist = Indeks Distribusi Pendapatan</p>	Angka	56,39	56,54	57,14



NO	VISI DAN MISI RPJPD	RPD				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TAHUN 2021	KONDISI AWAL TAHUN 2022	KONDISI AKHIR TAHUN 2026
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
					IS.9 Nilai Kabupaten Layak Anak	Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak yang meliputi: 1. Penguatan Kelembagaan; dan 2. Klaster Hak Asuh (Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; Perlindungan Khusus)	Angka	563,95	736,15	755,01
3	Misi 3 Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik	T.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT.4 Indeks Reformasi Birokrasi			Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang difokuskan pada 8 area perubahan yaitu: 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tata Laksana; 5. Penataan Sumber Daya Manusia; 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7. Penguatan Pengawasan; 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Nilai	57,55	59,14	71,52

NO	VISI DAN MISI RPJPD	RPD				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TAHUN 2021	KONDISI AWAL TAHUN 2022	KONDISI AKHIR TAHUN 2026
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
				S.8 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.10 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap: 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Kinerja; dan 5. Capaian Kinerja.	Nilai	64,25	64,69	65,90
					IS.11 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	$IPKD = D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6$ IPKD = Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah D.1 = Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran D.2 = Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD D.3 = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah D.4 = Penyerapan Anggaran D.5 = Kondisi Keuangan Daerah D.6 = Opini BPK	Angka	63,3465	63,5000	75,0000
				S.9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	IS.12 Indeks Kepuasan Masyarakat	$SKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$ $IKM = SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ SKM = Survey Kepuasan Masyarakat IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,43	86,95	91,36
					IS.13 Indeks Daya Saing Daerah *)	$IDSD = \frac{A.1 + A.2 + A.3 + A.4}{4}$ IDSD = Indeks Daya Saing Daerah A.1 = Aspek Ekosistem Inovasi A.2 = Aspek Penguat A.3 = Aspek Sumber Daya Manusia A.4 = Aspek Pasar	Angka	2,4290	2,5300	2,9778



NO	VISI DAN MISI RPJPD	RPD				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TAHUN 2021	KONDISI AWAL TAHUN 2022	KONDISI AKHIR TAHUN 2026
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
4	Misi 4 Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkeadilan	T.5 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	IT.5 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif *)			Penilaian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terhadap tingkat inklusivitas pembangunan melalui 3 Pilar yaitu: 1. Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi (terdiri dari 3 Sub Pilar yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Infrastruktur Ekonomi); 2. Pilar Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan (terdiri dari 2 Sub Pilar yaitu Ketimpangan dan Kemiskinan); 3. Pilar Perluasan Akses dan Kesempatan (terdiri dari 3 Sub Pilar yaitu Kapabilitas Manusia, Infrastruktur Dasar dan Keuangan Inklusif).	Angka	5,55	5,80	6,92
				S.10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	IS.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi *)	$LPE = \frac{PDRB_n - PDRB_{n-1}}{PDRB_{n-1}} \times 100\%$ <p>LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB_n = PDRB Tahun Pengamatan PDRB_{n-1} = PDRB Tahun Sebelumnya</p>	Persen	2,34	4,16	5,66
				S.11 Menurunnya Angka Pengangguran	IS.15 Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <p>TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka</p>	Persen	2,93	3,70	2,79

NO	VISI DAN MISI RPJPD	RPD				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TAHUN 2021	KONDISI AWAL TAHUN 2022	KONDISI AKHIR TAHUN 2026
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
				S.12 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.16 Angka Kemiskinan *)	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p> P = Angka Kemiskinan α = 0 z = Garis Kemiskinan yi = Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (i=1,2,3,...,q), yi < z q = Banyaknya Penduduk yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan n = Jumlah Penduduk </p>	Persen	11,81	10,98	8,48
					IS.17 Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p> G = Gini Rasio Pi = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk Pada Kelas ke-i Qi = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas ke-i </p>	Angka	0,265	0,261	0,242

NO	VISI DAN MISI RPJPD	RPD				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TAHUN 2021	KONDISI AWAL TAHUN 2022	KONDISI AKHIR TAHUN 2026
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
				S.13 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	IS.18 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah *)	$I_{LIDW} = (0,25)W + (0,25)X + (0,25)Y + (0,25)Z$ $W = 1 \times a$ $X = 1 \times b$ $Y = 0,12c + 0,20d + 0,07e + 0,06f + 0,55g$ $Z = 1 \times h$ I_{LIDW} = Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah W = Capaian Infrastruktur Dasar Bina Marga X = Capaian Infrastruktur Dasar Pengelolaan Sumber Daya Air Y = Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Z = Capaian Infrastruktur Dasar Ketahanan Energi a = Capaian Kinerja "Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten" b = Capaian Kinerja "Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2" c = Capaian Kinerja "Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum" d = Capaian Kinerja "Penduduk yang Memiliki Akses Aman Terhadap Sanitasi Layak" e = Capaian Kinerja "Jumlah Kawasan Kumuh" f = Capaian Kinerja "Rumah Tidak Layak Huni" g = Capaian Kinerja "Kesesuaian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang" h = Capaian Kinerja "Rasio Elektrifikasi"	Persen	58,06	55,78	58,70



NO	VISI DAN MISI RPJPD	RPD				DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI TAHUN 2021	KONDISI AWAL TAHUN 2022	KONDISI AKHIR TAHUN 2026
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
		T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	IT.6 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB			Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	-2,04	2,38	1,53
				S.14 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS.19 Nilai Tukar Petani	$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$ <p>NTP = Nilai Tukar Petani I_t = Indeks Harga yang Diterima Petani I_b = Indeks Harga yang Dibayar Petani</p>	Angka	88,03	101,20	137,34
					IS.20 Indeks Ketahanan Pangan	$IKP = (0,30)IK + (0,30)IA + (0,40)IP$ <p>IKP = Indeks Ketahanan Pangan IK = Indeks Ketersediaan IA = Indeks Keterjangkauan IP = Indeks Pemanfaatan</p>	Angka	75,34	73,60	76,28
		T.7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IT.7 Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB			Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	-1,43	14,13	24,41
				S.15 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS.21 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	$PPKW = \frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n - \text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n-1}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun } n-1} \times 100\%$ <p>PPKW = Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik</p>	Persen	20,83	394,31	10,00

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanggamus dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi serta isu-isu strategis di Kabupaten Tanggamus, maka penjabaran visi dan misi RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 kedalam RPD Kabupaten Tanggamus ditetapkan 7 (tujuh) tujuan dengan 7 (tujuh) indikator tujuan dan 15 (lima belas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran.

Tujuan dan sasaran yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka merespon perubahan keadaan terkini pada RPD Tahun 2024-2026 yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya Derajat Kesehatan;
 - b) Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya Pekon Maju;
 - b) Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - c) Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon;
 - d) Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana;
- 3) Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah;



- 5) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan;
 - b) Menurunnya Angka Pengangguran;
 - c) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
 - d) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah;
- 6) Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan;
- 7) Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal.

Tabel V.3. Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
1	T.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	IT.1 Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	69,32	70,55	71,17	71,79	71,79	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang; Puskesmas; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan	IS.1 Angka Harapan Hidup		Tahun	73,69	74,05	74,23	74,41		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
			S.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.2 Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	9,83	9,85	9,86	9,87	9,87	Dinas Pendidikan;	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2	T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	IT.2 Indeks Desa Membangun			Skor	0,6888	0,7138	0,7267	0,7398	0,7398	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Kecamatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.3 Meningkatnya Pekon Maju	IS.3 Persentase Pekon Maju	Persen	25,42	45,15	54,52	63,55	63,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Kecamatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.4 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IS.4 Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk	Angka	44,88	40,50	38,48	36,55	36,55	Satuan Polisi Pamong Praja;	TNI-Polri Kecamatan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika;
			S.5 Meningkatkan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	IS.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	62,06	66,21	69,14	69,35	69,35	Dinas Lingkungan Hidup;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan;
				IS.6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	1,69	2,89	3,78	4,94	4,94	Dinas Lingkungan Hidup;	Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
			S.6 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	IS.7 Indeks Risiko Bencana	Angka	149,46	117,54	104,23	92,43	92,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika;
3	T.3 Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	IT.3 Indeks Pembangunan Gender			Angka	91,10	91,34	91,46	91,58	91,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Sekretariat DPRD; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.7 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS.8 Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	56,54	56,84	56,99	57,14	57,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Sekretariat DPRD; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Katakanaan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
				IS.9 Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	736,15	745,52	750,25	755,01	755,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Sosial; Dinas Lingkungan Hidup;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
4	T.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT.4 Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	59,14	61,50	66,32	71,52	71,52	Inspektorat; Sekretariat Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
			S.8 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.10 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	64,69	65,29	65,59	65,90	65,90	Inspektorat; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
				IS.11 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	63,3465	65,0000	70,0000	75,0000	75,0000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika;	Seluruh Perangkat Daerah
			S.9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	IS.12 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,95	86,00	88,64	91,36	91,36	Sekretariat Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Seluruh Perangkat Daerah



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat DPRD; Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; Puskesmas; Kecamatan;	
				IS.13 Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,5300	2,7448	2,8589	2,9778	2,9778	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
5	T.5 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	IT.5 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			Angka	5,80	6,33	6,62	6,92	6,92	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah;
			S.10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	IS.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,16	5,00	5,32	5,66	5,66	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan;



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
												Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.11 Menurunnya Angka Pengangguran	IS.15 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,70	3,15	2,96	2,79	2,79	Dinas Tenaga Kerja;	Dinas Sosial; Dinas Katalanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.12 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.16 Angka Kemiskinan	Persen	10,98	9,79	9,11	8,48	8,48	Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja;	Kecamatan; Dinas Katalanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
												<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah;</p>
				IS.17 Indeks Gini	Angka	0,261	0,251	0,246	0,242	0,242	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Katalanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan;</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah;
			S.13 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	IS.18 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	55,78	57,23	57,96	58,70	58,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Tenaga Kerja;	Kecamatan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sosial; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Satuan Polisi Pamong Praja;
6	T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	IT.6 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB			Persen	2,38	1,35	1,44	1,53	1,53	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.14 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS.19 Nilai Tukar Petani	Angka	101,20	117,89	127,24	137,34	137,34	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan;	Dinas Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
				IS.20 Indeks Ketahanan Pangan	Angka	73,60	74,93	75,60	76,28	76,28	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;	Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
7	T.7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IT.7 Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB			Persen	14,13	18,57	21,29	24,41	24,41	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan;
			S.15 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS.21 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	394,31	8,00	9,00	10,00	10,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan;

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023

Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagai penggerak utama (*prime mover*) pelaksanaan tujuan dan sasaran, maka untuk melaksanakan hal tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan menjalankan enam prioritas pembangunan yang menjadi *concern* Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan, keenam prioritas pembangunan tersebut yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- 2) Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas;
- 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
- 4) Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan;
- 5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan; dan
- 6) Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

5.2. CASCADING KINERJA

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading kinerja harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi unit serta secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*) dan memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*).

Metode yang digunakan dalam menyusun *cascading* kinerja antara lain:

- 1) Menetapkan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah yang berorientasi hasil (*outcome*) dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah, isu strategis, dan janji politik;
- 2) Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- 3) Menjadikan faktor kunci yang paling berpengaruh, dijadikan sasaran strategis pada level Perangkat Daerah;
- 4) Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah, dan dijadikan program, kegiatan dan sub kegiatan.



Gambar V.3. Cascading Kinerja Tujuan 1 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Tujuan Pemda	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat										
Indikator	Indeks Pembangunan Manusia										
Sasaran Pemda	Meningkatnya Derajat Kesehatan						Meningkatnya Kualitas Pendidikan				
Indikator	Angka Harapan Hidup						Indeks Dimensi Pendidikan				
Tujuan PD	Meningkatkan Derajat Kesehatan			Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		Meningkatkan Peran Kepemudaan dalam Pembangunan	Meningkatkan Pembudayaan Olahraga dalam Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pendidikan		Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat	
Indikator	Angka Harapan Hidup			Angka Laju Pertumbuhan Penduduk		Indeks Pembangunan Pemuda	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Indeks Dimensi Pendidikan		Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat	
Sasaran PD	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Keluarga Berencana	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Prestasi Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca
Indikator	Angka Kematian Ibu (AKI)	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Puskesmas	Persentase Akseptor Pengguna KB MKJP	Persentase Keluarga Sejahtera	Persentase Pemuda yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	Persentase Atlet Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	Harapan Lama Sekolah	Persentase Tenaga Pendidik PAUD Berijazah S1	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Persentase Pekon <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	Persentase Sarana Pelayanan yang Harus Tersedia	Persentase Sarana Pelayanan yang Harus Tersedia	Persentase Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam Kelompok BKB	Persentase Pemuda yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi		Persentase Peningkatan Partisipasi Kelompok Olahraga Rekreasi	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase Tenaga Pendidik SD Bersertifikat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
	Prevalensi Balita Stunting		Persentase Ketersediaan Sarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik	Persentase Ketersediaan Sarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik					APK PAUD APK SD APK SMP APK Paket A,B,C	Persentase Tenaga Pendidik SMP Bersertifikat	Persentase Perpustakaan Pekon yang di Kelola dengan Baik
	Angka Penemuan Kasus TB/ <i>Case Notification Rate</i> (CNR)		Persentase Tenaga Kesehatan yang Harus Tersedia	Persentase Tenaga Kesehatan yang Harus Tersedia				APM PAUD APM SD APM SMP APM Paket A,B,C			
			Tingkat Pemenuhan Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Tingkat Pemenuhan Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas				APS Pendidikan			
			Insiden Keselamatan Pasien	Insiden Keselamatan Pasien				Rasio SD Terakreditasi			
			Nilai Bed Occupany Rate (BOR)	Persentase Capaian SPM Kesehatan				Rasio SMP Terakreditasi			
			Nilai Average Length Of Stay (ALOS)					Angka Kelulusan SD			
		Nilai Net Death Rate (NDR)					Angka Kelulusan SMP				
							Angka Melanjutkan ke SMP				
							Rasio Ruang Kelas PAUD Berkondisi Baik				
							Rasio Ruang Kelas SD Berkondisi Baik				
							Rasio Ruang Kelas SMP Berkondisi Baik				
PD	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang	Puskesmas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Dinas Pemuda dan Olahraga		Dinas Pendidikan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023



Gambar V.4. Cascading Kinerja Tujuan 2 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Tujuan Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat										
Indikator	Indeks Desa Membangun										
Sasaran Pemda	Meningkatnya Pekon Maju			Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		
Indikator	Persentase Pekon Maju			Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk *)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Risiko Bencana		
Tujuan PD	Meningkatkan Pekon Maju	Meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Pekon	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Menguatkan Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Menurunkan Risiko Bencana	Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan		
Indikator	Persentase Pekon Maju	Skor IDM Kecamatan	Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Demokrasi Kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Risiko Bencana	Rasio Kejadian Kebakaran		
Sasaran PD	Meningkatnya Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pembangunan Pekon	Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Pekon	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Menurunnya Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan Masyarakat	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Tertib, Tenram dan Aman	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Meningkatnya Parameter Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca	Meningkatnya Ketahanan dan Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan secara Dini dan Komprehensif
Indikator	Persentase Peningkatan Pekon Berkembang Menjadi Pekon Maju dan/atau Mandiri	Persentase Kelembagaan Pekon yang Aktif	Persentase Peningkatan Pekon Berkembang Menjadi Pekon Maju dan/atau Mandiri	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	Persentase Konflik SARA yang Tertangani	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Demokrasi	Indeks Kualitas Air	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengolahan Limbah	Indeks Kapasitas Daerah	Cakupan Pelayanan Kebakaran
	Persentase Pekon yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi				Tindak Kriminal yang Tertangani		Persentase Organisasi Masyarakat yang Bermitra dengan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Udara			Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi dalam Waktu Tanggap (Response Time)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Pekon							Indeks Kualitas Tutupan Lahan			Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Darurat Non Kebakaran
								Persentase Pengelolaan Sampah			Persentase Pekon Siaga Kebakaran
PD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023



Gambar V.5. *Cascading* Kinerja Tujuan 3 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Tujuan Penda	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	
Indikator	Indeks Pembangunan Gender	
Sasaran Penda	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Indikator	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai Kabupaten Layak Anak
Tujuan PD	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Indikator	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai Kabupaten Layak Anak
Sasaran PD	Meningkatnya Peranserta dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	
Indikator	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak
PD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023



Gambar V.6. Cascading Kinerja Tujuan 4 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Tujuan Periode Indikator	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Indeks Reformasi Birokrasi																																			
Sasaran Periode Indikator	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah									Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah																										
Tujuan RPD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik			Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepedululikan dan Pencatatan Sipil			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Meningkatkan Daya Saing dan Kemudahan Daerah											
Indikator	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			Tingkat Akuntabilitas Kinerja			Tingkat Akuntabilitas Kinerja			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks Layanan Informasi Publik			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kepegawaian			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kepedululikan dan Pencatatan Sipil			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Indeks Daya Saing Daerah		
Sasaran PD	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Sekretariat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Tata Kelola dan Layanan SPEE	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Statistik Sekretariat	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tematik	Meningkatnya Tata Kelola dan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Penastausahan Pengkajian Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Profesionalitas dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya Jive Koras Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya Kepedululikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Kepedululikan Dokumen Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatnya Pengelolaan Keunggulan Daerah	Meningkatnya Kualitas Unsur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Inovasi Daerah dan Kecepatan Hasil Riset dengan kebutuhan Pengembangan Potensi Daerah																	
Indikator	Nilai Mutu-asas SIP	Nilai Kapabilitas APD	Nilai Komponen Pencapaian Kinerja pada SAKIP Perda	Nilai LPPD	Nilai Domain Tujuan SPEE	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap RRMMD	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS Terhadap APED	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik pada IRE Perda	Persentase Pemngkatan Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Profesionalitas ASN	Persentase ASN yang Aktif Mengak Anggota Korpri	Persentase Penduduk ESI-KTP	Persentase Pemriban Akte Kutipan Kelahiran	Persentase Perijinan Kejasama Pemanfaatan Data dengan Perangkat Arasp Statis	Persentase Perangkat Daerah yang Menampilkan Arasp Statis	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Secara Tepat Waktu	Indeks Inovasi Daerah																		
Indikator	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada SAKIP Perda	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Perda	Nilai IP SEM	Nilai Domain Tata Kelola SPEE	Indeks Pembangunan Statistik	Persentase Penyerangan Anggaran	Optimasi BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi PAD	Nilai Komponen Tingkat Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan pada IRE Perda	Indeks Keajaiban Masyarakat	Persentase Pemriban Akte Kutipan Perkawinan	Indeks Merit System	Persentase Ewart Pengembangan Jive Koras Anggota Korpri yang Terkalkulasi dengan Baik	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Penerimaan Kebutuhan ASN	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibngan																	
	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diterapkan Mengak Perda dan Perbup	Nilai Komponen Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada IRE Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Infeksi	Persentase Perijinan Kejasama yang Dimplementasikan	Indeks Keajaiban Masyarakat	Persentase Pemriban Akte Kutipan Perkawinan	Indeks Merit System	Persentase Ewart Pengembangan Jive Koras Anggota Korpri yang Terkalkulasi dengan Baik	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Penerimaan Kebutuhan ASN	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibngan																			
	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diterapkan Mengak Perda dan Perbup	Nilai Komponen Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada IRE Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Infeksi	Persentase Perijinan Kejasama yang Dimplementasikan	Indeks Keajaiban Masyarakat	Persentase Pemriban Akte Kutipan Perkawinan	Indeks Merit System	Persentase Ewart Pengembangan Jive Koras Anggota Korpri yang Terkalkulasi dengan Baik	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Penerimaan Kebutuhan ASN	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibngan																			
	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diterapkan Mengak Perda dan Perbup	Nilai Komponen Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada IRE Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Infeksi	Persentase Perijinan Kejasama yang Dimplementasikan	Indeks Keajaiban Masyarakat	Persentase Pemriban Akte Kutipan Perkawinan	Indeks Merit System	Persentase Ewart Pengembangan Jive Koras Anggota Korpri yang Terkalkulasi dengan Baik	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Penerimaan Kebutuhan ASN	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibngan																			
	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diterapkan Mengak Perda dan Perbup	Nilai Komponen Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada IRE Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Infeksi	Persentase Perijinan Kejasama yang Dimplementasikan	Indeks Keajaiban Masyarakat	Persentase Pemriban Akte Kutipan Perkawinan	Indeks Merit System	Persentase Ewart Pengembangan Jive Koras Anggota Korpri yang Terkalkulasi dengan Baik	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Penerimaan Kebutuhan ASN	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibngan																			
	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diterapkan Mengak Perda dan Perbup	Nilai Komponen Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada IRE Perda	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Infeksi	Persentase Perijinan Kejasama yang Dimplementasikan	Indeks Keajaiban Masyarakat	Persentase Pemriban Akte Kutipan Perkawinan	Indeks Merit System	Persentase Ewart Pengembangan Jive Koras Anggota Korpri yang Terkalkulasi dengan Baik	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Penerimaan Kebutuhan ASN	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibngan																			
	Indikator	Indeks Keajaiban Masyarakat	Persentase Pemriban Akte Kutipan Perkawinan	Indeks Merit System	Persentase Ewart Pengembangan Jive Koras Anggota Korpri yang Terkalkulasi dengan Baik	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Penerimaan Kebutuhan ASN	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibngan																									
PD	Inspektoret	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretariat Daerah	Divisi Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	Divisi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Divisi Perhubungan dan Keunggulan Daerah	Divisi Pemanfaatan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																						

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023



Gambar V.7. Cascading Kinerja Tujuan 5 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Tujuan Pemda	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan															
Indikator	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif *)															
Sasaran Pemda	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan				Menurunnya Angka Pengangguran		Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah						
Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi *)				Tingkat Pengangguran Terbuka		Angka Kemiskinan *)			Indeks Gini		Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah *)				
Tujuan PD	Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan			Menurunkan Angka Pengangguran	Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah				Meningkatkan Sistem Transportasi yang Handal	Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Energi		
Indikator	Laju Pertumbuhan PMTB dalam PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Indeks Gini	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Rasio Elektrifikasi		
Sasaran PD	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dalam PDRB	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kemandirian Transmigran	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan yang Diterima oleh Setiap Penduduk	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan Darat dan Laut	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan		
Indikator	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persentase Koperasi yang Sehat Persentase UMKM yang Berdaya Saing Persentase Produk UMKM yang Memenuhi Standarisasi	Persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Persentase Pelaku Usaha yang Taat Dalam Tertib Niaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Transmigran yang Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum dengan Baik Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman Terhadap Sanitasi Layak Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani Rasio Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW	Persentase Kendararaan Angkutan Darat Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	Persentase Pertumbuhan Energi Baru dan Terbarukan yang Terbangun		
PD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Sosial	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				Dinas Perhubungan	Dinas Tenaga Kerja		

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023



Gambar V.8. Cascading Kinerja Tujuan 6 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Tujuan Pemd	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan							
Indikator	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB							
Sasaran Pemd	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan							
Indikator	Nilai Tukar Petani						Indeks Ketahanan Pangan	
Tujuan PD	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Kesejahteraan Petani			Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan		Meningkatkan Ketahanan Pangan	
Indikator	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani			Nilai Tukar Nelayan		Indeks Ketahanan Pangan	
Sasaran PD	Meningkatnya Daya Beli Petani	Meningkatnya Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Daya Beli Petani	Meningkatnya Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Kemandirian Pangan
Indikator	NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Padi	NTP Sub Sektor Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Unggulan	Persentase Penurunan Kematian Ternak	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan
	NTP Sub Sektor Hortikultura	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan	NTP Sub Sektor Peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Unggulan	Persentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Angka Konsumsi Ikan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama
PD	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		Dinas Perkebunan dan Peternakan			Dinas Perikanan		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Persentase Pekon Mandiri Pangan							

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023



Gambar V.9. *Cascading* Kinerja Tujuan 7 RPD dan Renstra-PD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Tujuan Penda	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	
Indikator	Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	
Sasaran Penda	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	
Indikator	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	
Tujuan PD	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	
Indikator	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	
Sasaran PD	Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah
Indikator	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Dikelola dengan Baik	Cakupan Perlindungan Benda Cagar Budaya (BCB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTE)
	Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata	
PD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023



5.3. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibarengi dengan komitmen yang dilakukan melalui rencana aksi pembangunan dan dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Penyusunan rencana aksi pembangunan tersebut sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga mampu mempercepat pencapaian target yang telah ditentukan dalam RPD sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Tabel V.4. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Rencana Aksi Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI PEMBANGUNAN	
			AGENDA KERJA UTAMA	FORMULASI
1	T.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	S.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan	Tanggamus Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan USG (<i>Ultrasonography</i>) di setiap Puskesmas untuk pemeriksaan ibu hamil; 2) Peningkatan Bantuan Operasional Posyandu dan Kader Posyandu serta meningkatkan pembinaan/pelatihan Kader Posyandu Balita dan Kader Lansia; 3) Peningkatan Layanan <i>Home Care</i> dan Kartu Lansia Tanggamus (mendatangi melakukan pemeriksaan rutin melalui Motor Reaksi Cepat Pelayanan Kesehatan (MRC-YANKES)); 4) Optimalisasi Percepatan Pekon ODF dan Bebas Stunting; 5) Penambahan Dokter Spesialis di RSUD;
		S.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Tanggamus Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Sekolah Ceria (Cerdas, Inovatif dan Asik) yang memadukan 4 pilar yaitu kurikulum merdeka, delapan standar mutu satuan pendidikan, standar kompetensi guru dan inovasi; 2) Pelaksanaan Semua Bisa Sekolah (SBS); 3) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 4) Pelaksanaan beasiswa masyarakat tidak mampu yang berprestasi; 5) Pembinaan dan pengembangan kreatifitas generasi muda; 6) Pembinaan Karang Taruna; 7) Pelaksanaan Tanggamus Literasi;
2	T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	S.3 Meningkatnya Pekon Maju	Pekon ASIK	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bantuan Operasional Perangkat Pekon; 2) Sai Pekon Sai Inovasi; 3) Pelaksanaan TMMD/Karya Bhakti TNI; 4) Pelaksanaan Rumah Kamtibmas (pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fasilitas kamtibmas di titik rawan kriminalitas);
		S.4 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tanggamus Beriman	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan bantuan tempat ibadah dan organisasi keagamaan; 2) Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika;
		S.5 Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	Biru Langkitku, Hijau Bumiku	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembenahan sistem pengolahan sampah; 2) Pelaksanaan Prokilm; 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan, pencegahan banjir dan kekeringan;
		S.6 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Tanggamus Siaga Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan bencana alam; 2) Pelaksanaan Pekon Tangguh Bencana; 3) Pelaksanaan Pekon Siaga Kebakaran (Balakar, Satlakar);
3	T.3 Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	S.7 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tanggamus Layak Anak dan Peduli Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

NO	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI PEMBANGUNAN	
			AGENDA KERJA UTAMA	FORMULASI
4	T.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S.8 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	APBD Berkualitas	1) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
		S.9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	Saber Pekan	1) Optimalisasi Tim Sapu Bersih Pelayanan Mengecewakan (Saber Pekan); 2) Pelaksanaan Pelayanan Publik Terpadu (YAN PUTER) dan Mall Pelayanan Publik Digital (MPP Digital); 3) Memangkas birokrasi perijinan yang tidak efektif dan efisien; 4) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan Aparatur yang terukur; 5) Membudayakan Aparatur yang Berintegritas dan Resposif;
5	T.5 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	S.10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	Tanggamus Ramah Usaha	1) Pelaksanaan Program Mendekati Pelanggan; 2) Pemberdayaan UMKM/Sai Pekon Sai Produk; 3) Promosi produk UMKM berbasis Teknologi Informasi; 4) Revitalisasi BUMD;
		S.11 Menurunnya Angka Pengangguran	Tanggamus Berkarya	1) Percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja/BLK; 2) Pelatihan wirausaha bagi PPKS;
		S.12 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Tanggamus Peduli Sosial	1) Peningkatan Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
		S.13 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Infrastruktur Untuk Semua	1) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata; 2) Percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanggamus/KIT; 3) Mendorong pembangunan Green Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Lampung; 4) Transformasi Perkotaan Kota Agung;
6	T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	S.14 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	Produk Unggul, Petani Sejahtera	1) Peningkatan SDM Petani melalui Sekolah Lapangan Pertanian; 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan); 3) Peningkatan Ketahanan Pangan; 4) Optimalisasi Rumah Agriculture dan Ternak Unggas; 5) Optimalisasi Rumah Alpukat Tanggamus Unggul;
7	T.7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	S.15 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	Pesona Wisata Ratu	1) Pelestarian dan pengembangan seni budaya; 2) Pengembangan destinasi pariwisata prioritas;

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RPD



422 TANGGAMUS 012



**“Keputusan dan kebijakan apapun tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Jika niat, tujuan dan konsepnya baik, lakukan saja”
- SBY -**

BAB VI
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Upaya pencapaian visi dan misi jangka panjang daerah yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks RPD Kabupaten Tanggamus, maka rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus

melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu tiga tahun ke depan, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2024-2026 sebagai perodesasi dari dokumen RPD Kabupaten Tanggamus.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 juga harus selaras dengan perodesasi perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPD, periode RPD saat ini berada dalam periode keempat dengan arah kebijakan yaitu “Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik”.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berdasarkan analisis pencapaian tujuan dan sasaran, strategi Kabupaten Tanggamus untuk periode pembangunan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Generasi yang Handal Melalui Jaminan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar;
- 2) Pengembangan Pendidikan yang Berorientasi Pada Potensi Daerah serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan;
- 3) Sinergisitas Percepatan Program Pengentasan Pekon Tertinggal dan Peningkatan Pekon Maju;
- 4) Peningkatan Kesadaran Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Menciptakan Suasana yang Kondusif dan Menjaga Stabilitas Sosial Masyarakat yang Religius dan Politik Daerah;
- 5) Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- 6) Peningkatan Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana;
- 7) Pemberdayaan, Perlindungan dan Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 8) Penguatan Tata Kelola Keuangan, dan Aset Daerah serta Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
- 9) Pengembangan Sistem Pemerintahan yang Integratif Melalui Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi Disemua Level Pemerintahan;
- 10) Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Sektor Unggulan dan Pengembangan Investasi;

- 11) Peningkatan Daya Saing Ketenagakerjaan Dalam Bentuk Kemitraan (*Partnership*) dengan Dunia Usaha dan Lembaga Pemerintahan;
- 12) Pengurangan Kesenjangan yang Berorientasi Pada *Pro-Equity* dan *Pro-Growth* Melalui Pemberdayaan, Bantuan Sosial dan Penguatan Interkonektivitas Spasial;
- 13) Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Penataan Kawasan serta Lingkungan Permukiman Sesuai RTRW;
- 14) Revitalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan serta Peningkatan Kestabilan dan Kestinambungan Penyediaan Pangan;
- 15) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pariwisata serta Apresiasi dan Kreativitas Masyarakat Terhadap Nilai Budaya dan Seni Dalam Rangka Menciptakan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata.

Strategi tersebut disusun untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Adapun hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel VI.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	RPJPD		RPD				
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		
1	Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom	Misi 1 Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis	T.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	S.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	ST.1	Pembangunan Generasi yang Handal Melalui Jaminan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar
				S.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	ST.2	Pengembangan Pendidikan yang Berorientasi Pada Potensi Daerah serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan
		Misi 2 Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis	T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	S.3	Meningkatnya Pekon Maju	ST.3	Sinergisitas Percepatan Program Pengentasan Pekon Tertinggal dan Peningkatan Pekon Maju
				S.4	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ST.4	Peningkatan Kesadaran Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Menciptakan Suasana yang Kondusif dan Menjaga Stabilitas Sosial Masyarakat yang Religius dan Politik Daerah
				S.5	Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	ST.5	Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Adaptasi Perubahan Iklim
				S.6	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	ST.6	Peningkatan Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana
				T.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Misi 3 Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik	T.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S.8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	ST.8	Penguatan Tata Kelola Keuangan, dan Aset Daerah serta Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
				S.9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	ST.9	Pengembangan Sistem Pemerintahan yang Integratif Melalui Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi Disemua Level Pemerintahan

NO	RPJPD		RPD		
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Misi 4 Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan	T.5 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	S.10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	ST.10 Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Sektor Unggulan dan Pengembangan Investasi
				S.11 Menurunnya Angka Pengangguran	ST.11 Peningkatan Daya Saing Ketenagakerjaan Dalam Bentuk Kemitraan (<i>Partnership</i>) dengan Dunia Usaha dan Lembaga Pemerintahan
				S.12 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	ST.12 Pengurangan Kesenjangan yang Berorientasi Pada <i>Pro-Equity</i> dan <i>Pro-Growth</i> Melalui Pemberdayaan, Bantuan Sosial dan Penguatan Interkoneksi Spasial
				S.13 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	ST.13 Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Penataan Kawasan serta Lingkungan Permukiman Sesuai RTRW
			T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	S.14 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	ST.14 Revitalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan serta Peningkatan Kestabilan dan Kesenambungan Penyediaan Pangan
			T.7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	S.15 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	ST.15 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pariwisata serta Apresiasi dan Kreativitas Masyarakat Terhadap Nilai Budaya dan Seni Dalam Rangka Menciptakan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama tiga tahun yang terhubung dengan arah kebijakan tahunan. Strategi terdiri dari langkah-langkah dalam sasaran yang secara berkesinambungan saling melengkapi dan membentuk rangkaian cerita yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tema tahapan pembangunan selama tiga tahun guna mencapai sasaran RPD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPD.

Dalam penyusunan arah kebijakan perlu dipertimbangkan urgensi dari suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut penjelasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 yang dikorelasikan dengan lima belas strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				2024	2025	2026
1	T.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	S.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan	ST.1 Pembangunan Generasi yang Handal Melalui Jaminan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar	AK. 1 Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Menuju Tanggamus Sehat		
		S.2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	ST.2 Pengembangan Pendidikan yang Berorientasi Pada Potensi Daerah serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	AK.2 Percepatan Pemenuhan Akses Prasarana-Sarana Layanan Dasar Pendidikan Menuju Tanggamus Cerdas		
2	T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	S.3 Meningkatkan Pekon Maju	ST.3 Sinergisitas Percepatan Program Pengentasan Pekon Tertinggal dan Peningkatan Pekon Maju		AK.3 Pengembangan Kawasan Perdesaan Melalui Konsep Smart Pekon	
		S.4 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	ST.4 Peningkatan Kesadaran Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Menciptakan Suasana yang Kondusif dan Menjaga Stabilitas Sosial Masyarakat yang Religius dan Politik Daerah	AK.4 Pengembangan Forum Kerjasama Lintas Budaya, Agama dan Adat Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Agar Tidak Terjadi Konflik Sosial		
		S.5 Meningkatkan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	ST.5 Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Adaptasi Perubahan Iklim	AK. 5 Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan Kritis, Gerakan Merdeka dari Sampah dan Penguatan Komitmen serta Implementasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Aktivitas Sehari-hari		
		S.6 Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana	ST.6 Peningkatan Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana	AK. 6 Peningkatan Dukungan Pemerintah Dalam Pencegahan/Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pasca Bencana		
3	T.3 Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	S.7 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ST.7 Pemberdayaan, Perlindungan dan Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	AK.7 Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Bidang Sosial, Ekonomi dan Politik serta Penghapusan Kekerasan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak untuk Tumbuh dan Berkembang baik Jasmani maupun Rohani secara Optimal		
4	T.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S.8 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	ST.8 Penguatan Tata Kelola Keuangan, dan Aset Daerah serta Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	AK.8 Penataan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Pengelolaan Aset Daerah		
		S.9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	ST.9 Pengembangan Sistem Pemerintahan yang Integratif Melalui Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi Disemua Level Pemerintahan	AK.9 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				2024	2025	2026
5	T.5 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	S.10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	ST.10 Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Sektor Unggulan dan Pengembangan Investasi	AK.10 Pengembangan Produk Unggulan, Jiwa Kewirausahaan dan Sistem Pemasaran Terpadu Produk UMKM serta Promosi dan Kerjasama Investasi		
		S.11 Menurunnya Angka Pengangguran	ST.11 Peningkatan Daya Saing Ketenagakerjaan Dalam Bentuk Kemitraan (<i>Partnership</i>) dengan Dunia Usaha dan Lembaga Pemerintahan		AK.11 Peningkatan Pelatihan Soft-Skill Menuju Tenaga Kerja yang Berdaya Saing Tinggi	
		S.12 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	ST.12 Pengurangan Kesenjangan yang Berorientasi Pada <i>Pro-Equity</i> dan <i>Pro-Growth</i> Melalui Pemberdayaan, Bantuan Sosial dan Penguatan Interkoneksi Spasial	AK.12 Pengurangan PPKS Melalui Rehabilitasi Sosial, Penyempurnaan Program Perlindungan Sosial dan Peningkatan Akses Rumah Tangga Miskin Terhadap Pelayanan Dasar		
		S.13 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	ST.13 Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Penataan Kawasan serta Lingkungan Permukiman Sesuai RTRW	AK.13 Pengurangan Disparitas Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh		
6	T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	S.14 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	ST.14 Revitalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan serta Peningkatan Kestabilan dan Kesenambungan Penyediaan Pangan	AK.14 Penguatan Petani, Peternak dan Nelayan Melalui Kebijakan yang Afirmatif Terhadap Penyediaan Bibit Unggul dan Pupuk, Kestabilan Harga, Sistem Pemasaran dan Penguatan Daya Saing Produk Unggulan serta Menjaga Kemandirian Pangan dengan Swasembada Komoditas Pangan		
7	T.7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	S.15 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	ST.15 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pariwisata serta Apresiasi dan Kreativitas Masyarakat Terhadap Nilai Budaya dan Seni Dalam Rangka Menciptakan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata		AK.15 Penguatan Regional Branding "Majestic Tanggamus", "Pesona Wisata Ratu" dan Peningkatan Event Pariwisata (Tanggamus Festival) serta Pembangunan Fasilitas Destinasi Wisata Unggulan.	

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, analisa data diolah, 2023

6.3. PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Sebagai bentuk untuk mewujudkan perencanaan yang implementatif, sasaran pembangunan Kabupaten Tanggamus dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan. Strategi dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tiga tahun. Baik strategi maupun arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien yang terangkum dalam kebijakan umum daerah.

Selanjutnya, sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dinamakan program prioritas yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPD.

Program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024-2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel VI.3. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Misi 1 RPJPD : Membangun Manusia Yang Berkualitas dan Agamis											
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	69,32	70,55		71,17		71,79		71,79		
	Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,69	74,05		74,23		74,41		74,41		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	57.387.655.902,00	76 Angka	58.387.655.902,00	80 Angka	58.387.655.902,00	80 Angka	174.162.967.706,00	DINAS KESEHATAN
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	30.646.781.955,00	76 Angka	31.646.781.955,00	80 Angka	31.646.781.955,00	80 Angka	93.940.345.865,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.302.763.704,00	76 Angka	1.302.763.704,00	80 Angka	1.302.763.704,00	80 Angka	3.908.291.112,00	Puskesmas Siring Betik
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.122.345.158,00	76 Angka	1.122.345.158,00	80 Angka	1.122.345.158,00	80 Angka	3.367.035.474,00	Puskesmas Wonosobo
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.203.668.400,00	76 Angka	1.203.668.400,00	80 Angka	1.203.668.400,00	80 Angka	3.611.005.200,00	Puskesmas Sudimoro
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.714.925.051,00	76 Angka	1.714.925.051,00	80 Angka	1.714.925.051,00	80 Angka	5.144.775.153,00	Puskesmas Sukaraja
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.307.938.236,00	76 Angka	1.307.938.236,00	80 Angka	1.307.938.236,00	80 Angka	3.923.814.708,00	Puskesmas Sanggi
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2.688.139.146,00	76 Angka	2.688.139.146,00	80 Angka	2.688.139.146,00	80 Angka	8.064.417.438,00	Puskesmas Kota Agung
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.001.300.696,00	76 Angka	1.001.300.696,00	80 Angka	1.001.300.696,00	80 Angka	3.003.902.088,00	Puskesmas Way Nipah
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.492.401.988,00	76 Angka	1.492.401.988,00	80 Angka	1.492.401.988,00	80 Angka	4.477.205.964,00	Puskesmas Pasar Simpang
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.302.453.185,00	76 Angka	1.302.453.185,00	80 Angka	1.302.453.185,00	80 Angka	3.907.359.555,00	Puskesmas Negara Batin
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2.150.216.860,00	76 Angka	2.150.216.860,00	80 Angka	2.150.216.860,00	80 Angka	6.450.650.580,00	Puskesmas Pulau Panggang
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.743.885.000,00	76 Angka	1.743.885.000,00	80 Angka	1.743.885.000,00	80 Angka	5.231.655.000,00	Puskesmas Ngarip
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2.048.711.144,00	76 Angka	2.048.711.144,00	80 Angka	2.048.711.144,00	80 Angka	6.146.133.432,00	Puskesmas Air Nanningan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2.855.867.839,00	76 Angka	2.855.867.839,00	80 Angka	2.855.867.839,00	80 Angka	8.567.603.517,00	Puskesmas Talang Padang
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.100.699.182,00	76 Angka	1.100.699.182,00	80 Angka	1.100.699.182,00	80 Angka	3.302.097.546,00	Puskesmas Margoyoso
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.765.178.195,00	76 Angka	1.765.178.195,00	80 Angka	1.765.178.195,00	80 Angka	5.295.534.585,00	Puskesmas Gisting
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.135.618.165,00	76 Angka	1.135.618.165,00	80 Angka	1.135.618.165,00	80 Angka	3.406.854.495,00	Puskesmas Kedaloman
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.930.048.786,00	76 Angka	1.930.048.786,00	80 Angka	1.930.048.786,00	80 Angka	5.790.146.358,00	Puskesmas Rantau Tjiang
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2.288.821.106,00	76 Angka	2.288.821.106,00	80 Angka	2.288.821.106,00	80 Angka	6.866.463.318,00	Puskesmas Sumanda
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.335.245.000,00	76 Angka	1.335.245.000,00	80 Angka	1.335.245.000,00	80 Angka	4.005.735.000,00	Puskesmas Bulok Sukamara
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.769.873.226,00	76 Angka	1.769.873.226,00	80 Angka	1.769.873.226,00	80 Angka	5.309.619.678,00	Puskesmas Putih Doh
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	950.170.034,00	76 Angka	950.170.034,00	80 Angka	950.170.034,00	80 Angka	2.850.510.102,00	Puskesmas Klumbayan
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.401.599.694,00	76 Angka	1.401.599.694,00	80 Angka	1.401.599.694,00	80 Angka	4.204.799.082,00	Puskesmas Antar Brak
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	908.341.676,00	76 Angka	908.341.676,00	80 Angka	908.341.676,00	80 Angka	2.725.025.028,00	Puskesmas Klumbayan Barat
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	715.308.542,00	76 Angka	715.308.542,00	80 Angka	715.308.542,00	80 Angka	2.145.925.626,00	Puskesmas Sumberejo
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Angka	0 Angka	0,00	76 Angka	515.308.542,00	80 Angka	515.308.542,00	80 Angka	1.030.617.084,00	Puskesmas Gunung Sari
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Angka	0 Angka	0,00	76 Angka	515.308.542,00	80 Angka	515.308.542,00	80 Angka	1.030.617.084,00	Puskesmas Martanda
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	39.799.963.839,00	100,00 %	39.799.963.839,00	100,00 %	39.799.963.839,00	100,00 %	119.399.891.517,00	DINAS KESEHATAN
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	15.031.109.659,00	100,00 %	15.031.109.659,00	100,00 %	15.031.109.659,00	100,00 %	45.093.328.977,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	580.137.000,00	100,00 %	580.137.000,00	100,00 %	580.137.000,00	100,00 %	1.740.411.000,00	Puskesmas Siring Betik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	428.737.000,00	100,00 %	428.737.000,00	100,00 %	428.737.000,00	100,00 %	1.286.211.000,00	Puskesmas Wonosobo
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	577.741.000,00	100,00 %	577.741.000,00	100,00 %	577.741.000,00	100,00 %	1.733.223.000,00	Puskesmas Sudimoro
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	568.670.000,00	100,00 %	568.670.000,00	100,00 %	568.670.000,00	100,00 %	1.706.010.000,00	Puskesmas Sukaraja
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	555.287.000,00	100,00 %	555.287.000,00	100,00 %	555.287.000,00	100,00 %	1.665.861.000,00	Puskesmas Sanggi
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	614.248.000,00	100,00 %	614.248.000,00	100,00 %	614.248.000,00	100,00 %	1.842.744.000,00	Puskesmas Kota Agung
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	594.967.000,00	100,00 %	594.967.000,00	100,00 %	594.967.000,00	100,00 %	1.784.901.000,00	Puskesmas Way Nipah
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	577.998.000,00	100,00 %	577.998.000,00	100,00 %	577.998.000,00	100,00 %	1.733.994.000,00	Puskesmas Pasar Simpang
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	583.828.000,00	100,00 %	583.828.000,00	100,00 %	583.828.000,00	100,00 %	1.751.484.000,00	Puskesmas Negara Batin
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	642.507.000,00	100,00 %	642.507.000,00	100,00 %	642.507.000,00	100,00 %	1.927.521.000,00	Puskesmas Pulau Panggung
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	660.446.000,00	100,00 %	660.446.000,00	100,00 %	660.446.000,00	100,00 %	1.981.338.000,00	Puskesmas Ngarip
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	611.719.000,00	100,00 %	611.719.000,00	100,00 %	611.719.000,00	100,00 %	1.835.157.000,00	Puskesmas Air Nanningan
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	610.005.000,00	100,00 %	610.005.000,00	100,00 %	610.005.000,00	100,00 %	1.830.015.000,00	Puskesmas Talang Padang
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	582.545.000,00	100,00 %	582.545.000,00	100,00 %	582.545.000,00	100,00 %	1.747.635.000,00	Puskesmas Margoyoso

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	628.721.000,00	100,00 %	628.721.000,00	100,00 %	628.721.000,00	100,00 %	1.886.163.000,00	Puskesmas Gisting
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	544.863.000,00	100,00 %	544.863.000,00	100,00 %	544.863.000,00	100,00 %	1.634.589.000,00	Puskesmas Kedaloman
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	626.873.000,00	100,00 %	626.873.000,00	100,00 %	626.873.000,00	100,00 %	1.880.619.000,00	Puskesmas Rantau Tjiang
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	544.353.000,00	100,00 %	544.353.000,00	100,00 %	544.353.000,00	100,00 %	1.633.059.000,00	Puskesmas Sumanda
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	569.282.000,00	100,00 %	569.282.000,00	100,00 %	569.282.000,00	100,00 %	1.707.846.000,00	Puskesmas Bulok Sukamara
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	543.738.000,00	100,00 %	543.738.000,00	100,00 %	543.738.000,00	100,00 %	1.631.214.000,00	Puskesmas Putih Doh
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	498.635.000,00	100,00 %	498.635.000,00	100,00 %	498.635.000,00	100,00 %	1.495.905.000,00	Puskesmas Klumbayan
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	571.553.000,00	100,00 %	571.553.000,00	100,00 %	571.553.000,00	100,00 %	1.714.659.000,00	Puskesmas Antar Brak
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	542.663.000,00	100,00 %	542.663.000,00	100,00 %	542.663.000,00	100,00 %	1.627.989.000,00	Puskesmas Klumbayan Barat
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	566.731.000,00	100,00 %	566.731.000,00	100,00 %	566.731.000,00	100,00 %	1.700.193.000,00	Puskesmas Sumberejo
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	0,00 %	0,00 %	0,00	100,00 %	366.731.000,00	100,00 %	366.731.000,00	100,00 %	733.462.000,00	Puskesmas Gunung Sari
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	0,00 %	0,00 %	0,00	100,00 %	366.731.000,00	100,00 %	366.731.000,00	100,00 %	733.462.000,00	Puskesmas Martanda
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	13.071.509.000,00	100,00 %	13.071.509.000,00	100,00 %	13.071.509.000,00	100,00 %	39.214.527.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	3.814.766.100,00	100,00 %	3.814.766.100,00	100,00 %	3.814.766.100,00	100,00 %	11.444.298.300,00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	115.543.000,00	100,00 %	115.543.000,00	100,00 %	115.543.000,00	100,00 %	346.629.000,00	Puskesmas Siring Betik
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	117.503.004,00	100,00 %	117.503.004,00	100,00 %	117.503.004,00	100,00 %	352.509.012,00	Puskesmas Wonosobo
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	115.066.000,00	100,00 %	115.066.000,00	100,00 %	115.066.000,00	100,00 %	345.198.000,00	Puskesmas Sudimoro
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	113.259.000,00	100,00 %	113.259.000,00	100,00 %	113.259.000,00	100,00 %	339.777.000,00	Puskesmas Sukaraja
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	110.594.000,00	100,00 %	110.594.000,00	100,00 %	110.594.000,00	100,00 %	331.782.000,00	Puskesmas Sanggi
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	122.337.000,00	100,00 %	122.337.000,00	100,00 %	122.337.000,00	100,00 %	367.011.000,00	Puskesmas Kota Agung
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	118.497.000,00	100,00 %	118.497.000,00	100,00 %	118.497.000,00	100,00 %	355.491.000,00	Puskesmas Way Nipah
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	115.117.000,00	100,00 %	115.117.000,00	100,00 %	115.117.000,00	100,00 %	345.351.000,00	Puskesmas Pasar Simpang
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	116.278.000,00	100,00 %	116.278.000,00	100,00 %	116.278.000,00	100,00 %	348.834.000,00	Puskesmas Negara Batin
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	127.965.000,00	100,00 %	127.965.000,00	100,00 %	127.965.000,00	100,00 %	383.895.000,00	Puskesmas Pulau Panggung
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	131.538.000,00	100,00 %	131.538.000,00	100,00 %	131.538.000,00	100,00 %	394.614.000,00	Puskesmas Ngarip
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	121.833.000,00	100,00 %	121.833.000,00	100,00 %	121.833.000,00	100,00 %	365.499.000,00	Puskesmas Air Nanningan
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	121.492.000,00	100,00 %	121.492.000,00	100,00 %	121.492.000,00	100,00 %	364.476.000,00	Puskesmas Talang Padang
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	116.023.000,00	100,00 %	116.023.000,00	100,00 %	116.023.000,00	100,00 %	348.069.000,00	Puskesmas Margoyoso

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	125.221.000,00	100,00 %	125.221.000,00	100,00 %	125.221.000,00	100,00 %	375.663.000,00	Puskesmas Gisting
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	108.518.000,00	100,00 %	108.518.000,00	100,00 %	108.518.000,00	100,00 %	325.554.000,00	Puskesmas Kedaloman
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	124.851.000,00	100,00 %	124.851.000,00	100,00 %	124.851.000,00	100,00 %	374.553.000,00	Puskesmas Rantau Tjiang
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	108.416.000,00	100,00 %	108.416.000,00	100,00 %	108.416.000,00	100,00 %	325.248.000,00	Puskesmas Sumanda
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	113.381.000,00	100,00 %	113.381.000,00	100,00 %	113.381.000,00	100,00 %	340.143.000,00	Puskesmas Bulok Sukamara
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	108.294.000,00	100,00 %	108.294.000,00	100,00 %	108.294.000,00	100,00 %	324.882.000,00	Puskesmas Putih Doh
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	99.311.000,00	100,00 %	99.311.000,00	100,00 %	99.311.000,00	100,00 %	297.933.000,00	Puskesmas Klumbayan
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	113.834.000,00	100,00 %	113.834.000,00	100,00 %	113.834.000,00	100,00 %	341.502.000,00	Puskesmas Antar Brak
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	108.080.000,00	100,00 %	108.080.000,00	100,00 %	108.080.000,00	100,00 %	324.240.000,00	Puskesmas Klumbayan Barat
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100,00 %	100,00 %	112.873.000,00	100,00 %	112.873.000,00	100,00 %	112.873.000,00	100,00 %	338.619.000,00	Puskesmas Sumberejo
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	0,00 %	0,00 %	0,00	100,00 %	85.873.000,00	100,00 %	85.873.000,00	100,00 %	171.746.000,00	Puskesmas Gunung Sari
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	0,00 %	0,00 %	0,00	100,00 %	85.873.000,00	100,00 %	85.873.000,00	100,00 %	171.746.000,00	Puskesmas Martanda
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	410.496.000,00	100,00 %	410.496.000,00	100,00 %	410.496.000,00	100,00 %	1.231.488.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pekon Siaga Kategori Mandiri	45,00 %	45,00 %	375.000.000,00	50,00 %	375.000.000,00	75,00 %	375.000.000,00	75,00 %	1.125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Persentase Pekon Siaga Kategori Mandiri	45,00 %	45,00 %	161.238.996,00	50,00 %	161.238.996,00	75,00 %	161.238.996,00	75,00 %	483.716.988,00	Puskesmas Wonosobo

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,30 %	2,50 %	396.600.000,00	3,00 %	396.600.000,00	3,50 %	396.600.000,00	3,50 %	1.189.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase partisipasi Keluarga dalam program KB	82,00 %	84,00 %	4.189.865.000,00	86,00 %	4.189.865.000,00	89,00 %	4.189.865.000,00	89,00 %	12.569.595.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam tribina	15,00 %	20,00 %	3.369.900.000,00	25,00 %	3.369.900.000,00	30,00 %	3.369.900.000,00	30,00 %	10.109.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Dimensi Pendidikan	9,83	9,85		9,86		9,87		9,87		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	450.773.071.780,00	76 Angka	452.773.071.780,00	80 Angka	452.773.071.780,00	80 Angka	1.356.319.215.340,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82,97 %	89,00 %	178.999.684.700,00	94 %	179.499.684.700,00	98 %	179.999.684.700,00	98 %	538.499.054.100,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	60,00 %	63,00 %	32.243.800,00	63 %	32.243.800,00	66 %	32.243.800,00	66 %	96.731.400,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Sekolah yang Melaksanakan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	%	%	0,00	100 %	852.923.005,00	100 %	653.750.000,00	100 %	1.506.673.005,00	DINAS PENDIDIKAN
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.630.468.269,00	76 Angka	4.130.468.269,00	80 Angka	4.130.468.269,00	80 Angka	11.891.404.807,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	75%	80%	236.498.800,00	90%	236.498.800,00	100%	236.498.800,00	100%	709.496.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dikelola Melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	60%	78%	38.160.552,00	100%	38.160.552,00	100%	38.160.552,00	100%	114.481.656,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Terlindungi dan Terselamatkan	100%	100%	11.809.100,00	100%	11.809.100,00	100%	11.809.100,00	100%	35.427.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.452.047.710,00	76 Angka	3.952.047.710,00	80 Angka	3.952.047.710,00	80 Angka	11.356.143.130,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	50,00 %	30,00 %	155.195.000,00	48 %	155.195.000,00	48 %	155.195.000,00	48%	465.585.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	33,33 %	42,86 %	1.860.741.300,00	48 %	1.860.741.300,00	48 %	1.860.741.300,00	48%	5.582.223.900,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Keberadaan Tingkatan Khusus Pramuka Garuda	0,00 %	10,00 %	102.420.000,00	48 %	102.420.000,00	48 %	102.420.000,00	48%	307.260.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Misi 2 RPJPD : Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis Dan Harmonis												
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Desa Membangun	0,6888	0,7138		0,7267		0,7398		0,7398		
Sasaran : Meningkatnya Pekon Maju		Persentase Pekon Maju	25,42	45,15		54,52		63,55		63,55		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.534.529.291,00	76 Angka	4.284.529.291,00	80 Angka	4.284.529.291,00	80 Angka	12.103.587.873,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pekon yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Penataan	100 %	100 %	1.552.216.000,00	100 %	1.552.216.000,00	100 %	1.552.216.000,00	100%	4.656.648.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama antar desa	100 %	100 %	0,00	100 %	1.340.600.000,00	100 %	1.340.600.000,00	100%	2.681.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan secara Tertib	100 %	100 %	1.684.835.700,00	100 %	1.684.835.700,00	100 %	1.684.835.700,00	100%	5.054.507.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Berpartisipasi dalam Proses Pembangunan Pekon	100 %	100 %	5.220.200.200,00	100 %	5.220.200.200,00	100 %	5.220.200.200,00	100%	15.660.600.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	5.074.354.324,00	76 Angka	5.324.354.324,00	80 Angka	5.324.354.324,00	80 Angka	15.723.062.972,00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	100.797.800,00	76 Angka	100.797.800,00	80 Angka	100.797.800,00	80 Angka	302.393.400,00	Kelurahan Baros

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	109.129.709,00	76 Angka	109.129.709,00	80 Angka	109.129.709,00	80 Angka	327.389.127,00	Kelurahan Pasar Madang
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	103.719.590,00	76 Angka	103.719.590,00	80 Angka	103.719.590,00	80 Angka	311.158.770,00	Kelurahan Kuripan
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.945.483.951,00	76 Angka	2.195.483.951,00	80 Angka	2.195.483.951,00	80 Angka	6.336.451.853,00	KECAMATAN WONOSOBO
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2.483.208.721,00	76 Angka	2.733.208.721,00	80 Angka	2.733.208.721,00	80 Angka	7.949.626.163,00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.711.204.347,00	76 Angka	1.961.204.347,00	80 Angka	1.961.204.347,00	80 Angka	5.633.613.041,00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.836.891.658,00	76 Angka	2.086.891.658,00	80 Angka	2.086.891.658,00	80 Angka	6.010.674.974,00	KECAMATAN PUGUNG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.335.360.575,00	76 Angka	1.585.360.575,00	80 Angka	1.585.360.575,00	80 Angka	4.506.081.725,00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.678.697.759,00	76 Angka	1.928.697.759,00	80 Angka	1.928.697.759,00	80 Angka	5.536.093.277,00	KECAMATAN SEMAKA
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.427.478.344,00	76 Angka	1.677.478.344,00	80 Angka	1.677.478.344,00	80 Angka	4.782.435.032,00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.505.987.597,00	76 Angka	1.755.987.597,00	80 Angka	1.755.987.597,00	80 Angka	5.017.962.791,00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.338.772.093,00	76 Angka	1.588.772.093,00	80 Angka	1.588.772.093,00	80 Angka	4.516.316.279,00	KECAMATAN ULU BELU
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.756.389.645,00	76 Angka	2.006.389.645,00	80 Angka	2.006.389.645,00	80 Angka	5.769.168.935,00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2.078.438.753,00	76 Angka	2.328.438.753,00	80 Angka	2.328.438.753,00	80 Angka	6.735.316.259,00	KECAMATAN GISTING
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.590.237.630,00	76 Angka	1.840.237.630,00	80 Angka	1.840.237.630,00	80 Angka	5.270.712.890,00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.537.346.893,00	76 Angka	1.787.346.893,00	80 Angka	1.787.346.893,00	80 Angka	5.112.040.679,00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.663.805.128,00	76 Angka	1.913.805.128,00	80 Angka	1.913.805.128,00	80 Angka	5.491.415.384,00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.563.959.753,00	76 Angka	1.813.959.753,00	80 Angka	1.813.959.753,00	80 Angka	5.191.879.259,00	KECAMATAN LIMAU
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.792.877.012,00	76 Angka	2.042.877.012,00	80 Angka	2.042.877.012,00	80 Angka	5.878.631.036,00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.252.875.515,00	76 Angka	1.502.875.515,00	80 Angka	1.502.875.515,00	80 Angka	4.258.626.545,00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.586.848.740,00	76 Angka	1.836.848.740,00	80 Angka	1.836.848.740,00	80 Angka	5.260.546.220,00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1.640.462.802,00	76 Angka	1.890.462.802,00	80 Angka	1.890.462.802,00	80 Angka	5.421.388.406,00	KECAMATAN BULOK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	17.960.000,00	100 %	17.960.000,00	100%	35.920.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	17.960.000,00	100 %	17.960.000,00	100%	35.920.000,00	KECAMATAN WONOSOBO
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	15.418.250,00	100 %	15.418.250,00	100%	30.836.500,00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	13.177.450,00	100 %	13.177.450,00	100%	26.354.900,00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	7.630.000,00	100 %	7.630.000,00	100 %	7.630.000,00	100%	22.890.000,00	KECAMATAN PUGUNG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	7.394.800,00	100 %	7.394.800,00	100%	14.789.600,00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	11.520.768,00	100 %	11.520.768,00	100%	23.041.536,00	KECAMATAN SEMAKA
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	13.577.404,00	100 %	13.577.404,00	100%	27.154.808,00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	18.289.000,00	100 %	18.289.000,00	100 %	18.289.000,00	100%	54.867.000,00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	6.746.000,00	100 %	6.746.000,00	100 %	6.746.000,00	100%	20.238.000,00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	7.462.500,00	100 %	7.462.500,00	100 %	7.462.500,00	100%	22.387.500,00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	9.365.500,00	100 %	9.365.500,00	100 %	9.365.500,00	100%	28.096.500,00	KECAMATAN GISTING

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	12.100.000,00	100 %	12.100.000,00	100%	24.200.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	12.821.000,00	100 %	12.821.000,00	100 %	12.821.000,00	100%	38.463.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	5.314.000,00	100 %	5.314.000,00	100 %	5.314.000,00	100%	15.942.000,00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	11.019.146,00	100 %	11.019.146,00	100%	22.038.292,00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	7.330.000,00	100 %	7.330.000,00	100%	14.660.000,00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	8.997.300,00	100 %	8.997.300,00	100 %	8.997.300,00	100%	26.991.900,00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	6.237.300,00	100 %	6.237.300,00	100 %	6.237.300,00	100%	18.711.900,00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00	100%	2.700.000,00	KECAMATAN BULOK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	53.180.000,00	42,00 %	53.180.000,00	45,50 %	53.180.000,00	45,50%	159.540.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	340.496.300,00	42,00 %	340.496.300,00	45,50 %	340.496.300,00	45,50%	1.021.488.900,00	Kelurahan Baros
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	323.831.800,00	42,00 %	323.831.800,00	45,50 %	323.831.800,00	45,50%	971.495.400,00	Kelurahan Pasar Madang
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	319.867.150,00	42,00 %	319.867.150,00	45,50 %	319.867.150,00	45,50%	959.601.450,00	Kelurahan Kuripan
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	94.833.200,00	42,00 %	94.833.200,00	45,50 %	94.833.200,00	45,50%	284.499.600,00	KECAMATAN WONOSOBO
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	59.676.650,00	42,00 %	59.676.650,00	45,50 %	59.676.650,00	45,50%	179.029.950,00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	32.424.450,00	42,00 %	32.424.450,00	45,50 %	32.424.450,00	45,50%	97.273.350,00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	27.900.000,00	42,00 %	27.900.000,00	45,50 %	27.900.000,00	45,50%	83.700.000,00	KECAMATAN PUGUNG
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	44.356.150,00	42,00 %	44.356.150,00	45,50 %	44.356.150,00	45,50%	133.068.450,00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	63.325.000,00	42,00 %	63.325.000,00	45,50 %	63.325.000,00	45,50%	189.975.000,00	KECAMATAN SEMAKA
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	39.811.300,00	42,00 %	39.811.300,00	45,50 %	39.811.300,00	45,50%	119.433.900,00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	36.944.900,00	42,00 %	36.944.900,00	45,50 %	36.944.900,00	45,50%	110.834.700,00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	44.983.000,00	42,00 %	44.983.000,00	45,50 %	44.983.000,00	45,50%	134.949.000,00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	22.282.500,00	42,00 %	22.282.500,00	45,50 %	22.282.500,00	45,50%	66.847.500,00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	34.595.400,00	42,00 %	34.595.400,00	45,50 %	34.595.400,00	45,50%	103.786.200,00	KECAMATAN GISTING
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	37.633.000,00	42,00 %	37.633.000,00	45,50 %	37.633.000,00	45,50%	112.899.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	68.425.300,00	42,00 %	68.425.300,00	45,50 %	68.425.300,00	45,50%	205.275.900,00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	36.855.800,00	42,00 %	36.855.800,00	45,50 %	36.855.800,00	45,50%	110.567.400,00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	39.550.000,00	42,00 %	39.550.000,00	45,50 %	39.550.000,00	45,50%	118.650.000,00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	49.875.000,00	42,00 %	49.875.000,00	45,50 %	49.875.000,00	45,50%	149.625.000,00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	20.766.600,00	42,00 %	20.766.600,00	45,50 %	20.766.600,00	45,50%	62.299.800,00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	17.450.500,00	42,00 %	17.450.500,00	45,50 %	17.450.500,00	45,50%	52.351.500,00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36,70 %	40,00%	40.570.000,00	42,00 %	40.570.000,00	45,50 %	40.570.000,00	45,50%	121.710.000,00	KECAMATAN BULOK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	69.000.000,00	100 %	69.000.000,00	100 %	69.000.000,00	100%	207.000.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	78.000.000,00	100 %	78.000.000,00	100 %	78.000.000,00	100%	234.000.000,00	KECAMATAN WONOSOBO

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	78.900.000,00	100 %	78.900.000,00	100 %	78.900.000,00	100%	236.700.000,00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	78.500.000,00	100 %	78.500.000,00	100 %	78.500.000,00	100%	235.500.000,00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	68.082.600,00	100 %	68.082.600,00	100 %	68.082.600,00	100%	204.247.800,00	KECAMATAN PUGUNG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	63.000.000,00	100 %	63.000.000,00	100 %	63.000.000,00	100%	189.000.000,00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	69.000.000,00	100 %	69.000.000,00	100 %	69.000.000,00	100%	207.000.000,00	KECAMATAN SEMAKA
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	66.800.000,00	100 %	66.800.000,00	100 %	66.800.000,00	100%	200.400.000,00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	76.402.500,00	100 %	76.402.500,00	100 %	76.402.500,00	100%	229.207.500,00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	59.700.000,00	100 %	59.700.000,00	100 %	59.700.000,00	100%	179.100.000,00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	51.000.000,00	100 %	51.000.000,00	100 %	51.000.000,00	100%	153.000.000,00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	52.087.500,00	100 %	52.087.500,00	100 %	52.087.500,00	100%	156.262.500,00	KECAMATAN GISTING
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	64.294.400,00	100 %	64.294.400,00	100 %	64.294.400,00	100%	192.883.200,00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	57.934.000,00	100 %	57.934.000,00	100 %	57.934.000,00	100%	173.802.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	57.090.000,00	100 %	57.090.000,00	100 %	57.090.000,00	100%	171.270.000,00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	69.000.000,00	100 %	69.000.000,00	100 %	69.000.000,00	100%	207.000.000,00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	69.000.000,00	100 %	69.000.000,00	100 %	69.000.000,00	100%	207.000.000,00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	50.400.000,00	100 %	50.400.000,00	100 %	50.400.000,00	100%	151.200.000,00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100%	180.000.000,00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	63.450.000,00	100 %	63.450.000,00	100 %	63.450.000,00	100%	190.350.000,00	KECAMATAN BULOK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	6.105.000,00	100 %	6.105.000,00	100%	12.210.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	17.177.500,00	100 %	17.177.500,00	100 %	17.177.500,00	100%	51.532.500,00	KECAMATAN WONOSOBO
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	4.976.000,00	100 %	4.976.000,00	100 %	4.976.000,00	100%	14.928.000,00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	26.200.000,00	100 %	26.200.000,00	100 %	26.200.000,00	100%	78.600.000,00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	8.200.000,00	100 %	8.200.000,00	100 %	8.200.000,00	100%	24.600.000,00	KECAMATAN PUGUNG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	2.400.000,00	100 %	2.400.000,00	100 %	2.400.000,00	100%	7.200.000,00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	12.850.000,00	100 %	12.850.000,00	100 %	12.850.000,00	100%	38.550.000,00	KECAMATAN SEMAKA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	9.752.500,00	100 %	9.752.500,00	100 %	9.752.500,00	100%	29.257.500,00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	17.615.000,00	100 %	17.615.000,00	100 %	17.615.000,00	100%	52.845.000,00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	9.740.000,00	100 %	9.740.000,00	100 %	9.740.000,00	100%	29.220.000,00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	8.387.500,00	100 %	8.387.500,00	100 %	8.387.500,00	100%	25.162.500,00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	10.701.800,00	100 %	10.701.800,00	100 %	10.701.800,00	100%	32.105.400,00	KECAMATAN GISTING
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	9.760.400,00	100 %	9.760.400,00	100 %	9.760.400,00	100%	29.281.200,00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	14.815.000,00	100 %	14.815.000,00	100 %	14.815.000,00	100%	44.445.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	5.625.000,00	100 %	5.625.000,00	100 %	5.625.000,00	100%	16.875.000,00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	11.483.000,00	100 %	11.483.000,00	100 %	11.483.000,00	100%	34.449.000,00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	11.483.000,00	100 %	11.483.000,00	100 %	11.483.000,00	100%	34.449.000,00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	8.690.000,00	100 %	8.690.000,00	100 %	8.690.000,00	100%	26.070.000,00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	3.285.000,00	100 %	3.285.000,00	100 %	3.285.000,00	100%	9.855.000,00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	4.050.000,00	100 %	4.050.000,00	100 %	4.050.000,00	100%	12.150.000,00	KECAMATAN BULOK

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	16.445.000,00	100 %	16.445.000,00	100 %	16.445.000,00	100%	49.335.000,00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	70.200.000,00	100 %	70.200.000,00	100 %	70.200.000,00	100%	210.600.000,00	Kelurahan Baros
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	113.400.000,00	100 %	113.400.000,00	100 %	113.400.000,00	100%	340.200.000,00	Kelurahan Pasar Madang
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	162.000.000,00	100 %	162.000.000,00	100 %	162.000.000,00	100%	486.000.000,00	Kelurahan Kuripan
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	29.538.000,00	100 %	29.538.000,00	100 %	29.538.000,00	100%	88.614.000,00	KECAMATAN WONOSOBO
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	13.500.000,00	100 %	13.500.000,00	100 %	13.500.000,00	100%	40.500.000,00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	5.700.000,00	100 %	5.700.000,00	100 %	5.700.000,00	100%	17.100.000,00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	1.800.000,00	100 %	1.800.000,00	100 %	1.800.000,00	100%	5.400.000,00	KECAMATAN PUGUNG
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	5.700.000,00	100 %	5.700.000,00	100%	11.400.000,00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	44.220.000,00	100 %	44.220.000,00	100 %	44.220.000,00	100%	132.660.000,00	KECAMATAN SEMAKA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	16.293.250,00	100 %	16.293.250,00	100 %	16.293.250,00	100%	48.879.750,00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	9.846.800,00	100 %	9.846.800,00	100 %	9.846.800,00	100%	29.540.400,00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	4.655.100,00	100 %	4.655.100,00	100 %	4.655.100,00	100%	13.965.300,00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	6.207.000,00	100 %	6.207.000,00	100 %	6.207.000,00	100%	18.621.000,00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	32.184.800,00	100 %	32.184.800,00	100 %	32.184.800,00	100%	96.554.400,00	KECAMATAN GISTING
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	9.192.900,00	100 %	9.192.900,00	100 %	9.192.900,00	100%	27.578.700,00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	35.452.300,00	100 %	35.452.300,00	100 %	35.452.300,00	100%	106.356.900,00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	2.325.000,00	100 %	2.325.000,00	100 %	2.325.000,00	100%	6.975.000,00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	26.125.000,00	100 %	26.125.000,00	100 %	26.125.000,00	100%	78.375.000,00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	26.125.000,00	100 %	26.125.000,00	100 %	26.125.000,00	100%	78.375.000,00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	0,00	100 %	3.223.000,00	100 %	3.223.000,00	100%	6.446.000,00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	5.400.000,00	100 %	5.400.000,00	100 %	5.400.000,00	100%	16.200.000,00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	755.400,00	100 %	755.400,00	100 %	755.400,00	100%	2.266.200,00	KECAMATAN BULOK
	Sasaran : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah	44,88	40,50		38,48		36,55		36,55		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	10.981.626.187,00	76 Angka	11.481.626.187,00	80 Angka	11.481.626.187,00	80 Angka	33.944.878.561,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	100 %	100 %	2.066.000.000,00	100 %	2.066.000.000,00	100 %	2.066.000.000,00	100%	6.198.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.314.861.470,00	76 Angka	3.814.861.470,00	80 Angka	3.814.861.470,00	80 Angka	10.944.584.410,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentasi Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100 %	100 %	600.631.600,00	100 %	600.631.600,00	100 %	600.631.600,00	100%	1.801.894.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Pendidikan Politik	100 %	100 %	549.382.550,00	100 %	549.382.550,00	100 %	549.382.550,00	100%	1.648.147.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif Dalam Pembangunan	100 %	100 %	38.485.477.522,00	100 %	688.709.035,00	100 %	688.709.035,00	100%	39.862.895.592,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	36.591.300,00	100 %	36.591.300,00	100 %	36.591.300,00	100%	109.773.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100 %	89.813.000,00	100 %	89.813.000,00	100 %	89.813.000,00	100%	269.439.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sasaran : Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,06	66,21		69,14		69,35		69,35		
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1,69	2,89		3,78		4,94		4,94		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4.879.994.102,00	76 Angka	5.379.994.102,00	80 Angka	5.379.994.102,00	80 Angka	15.639.982.306,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah Ditetapkan dan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	33 %	33 %	95.000.000,00	30 %	95.000.000,00	30 %	95.000.000,00	30%	285.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Parameter Baku Mutu Air dan Udara yang Melebihi Baku Mutu	30 %	67 %	118.419.700,00	30 %	118.419.700,00	30 %	118.419.700,00	30%	355.259.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Lahan Konservasi Sumberdaya Alam	20 %	33 %	18.640.000,00	20 %	18.640.000,00	20 %	18.640.000,00	20%	55.920.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS Limbah B3 yang Dikelola Dengan Baik	16 %	9 %	0,00	10 %	15.000.000,00	12 %	15.000.000,00	12%	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku usaha yang mengikuti Progam Penilaian Pringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan (PROPER)	40 %	22 %	500.000,00	40 %	500.000,00	40 %	500.000,00	40%	1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga / Kelompok Masyarakat Dibina Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	127.350.000,00	100 %	127.350.000,00	100 %	127.350.000,00	100%	382.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok/ Lembaga yang Mengikuti Progam Penilaian Pengelolaan Lingkungan yang Menerima Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota dan Difasilitasi untuk Penghargaan Tingkat Provinsi/Nasional	60 %	33 %	0,00	60 %	70.480.000,00	60 %	70.480.000,00	60%	140.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Permasalahan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	100 %	100 %	8.020.000,00	100 %	8.020.000,00	100 %	8.020.000,00	100%	24.060.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	13 %	19 %	680.930.000,00	14 %	680.930.000,00	15 %	680.930.000,00	15%	2.042.790.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Sasaran : Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	149,46	117,54		104,23		92,43		92,43		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.857.400.764,00	76 Angka	4.357.400.764,00	80 Angka	4.357.400.764,00	80 Angka	12.572.202.292,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %	100 %	1.116.000.000,00	100 %	1.116.000.000,00	100 %	1.116.000.000,00	100%	3.348.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.121.175.949,00	76 Angka	3.621.175.949,00	80 Angka	3.621.175.949,00	80 Angka	10.363.527.847,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	2.141.774.900,00	100 %	2.141.774.900,00	100 %	2.141.774.900,00	100%	6.425.324.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Tujuan : Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	91,10	91,34		91,46		91,58		91,58		
	Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	56,54	56,84		56,99		57,14		57,14		
		Nilai Kabupaten Layak Anak	736,15	745,52		750,25		755,01		755,01		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4.560.877.200,00	76 Angka	5.060.877.200,00	80 Angka	5.060.877.200,00	80 Angka	14.682.631.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Anggaran Responsif Gender Terhadap Belanja Daerah	-89 %	67 %	25.000.000,00	70 %	125.000.000,00	75 %	375.000.000,00	75%	525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Perempuan	150 %	-20 %	627.696.600,00	95 %	627.696.600,00	95 %	627.696.600,00	95%	1.883.089.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Penurunan Keluarga Pra sejahtera /Keluarga Miskin	-2,12 %	-1,52 %	0,00	87 %	150.000.000,00	90 %	200.000.000,00	90%	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Fasilitas Hak Anak pada Klaster Pendidikan	24,06 %	10,98 %	40.000.000,00	30 %	40.000.000,00	35 %	40.000.000,00	35%	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Anak	15,15 %	-7,89 %	303.630.000,00	30 %	303.630.000,00	35 %	303.630.000,00	35%	910.890.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Misi 3 RPJPD : Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik												
	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	59,14	61,50		66,32		71,52		71,52		
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	64,69	65,29		65,59		65,90		65,90		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	11.464.793.686,00	WTP	12.214.793.686,00	WTP	12.214.793.686,00	WTP	35.894.381.058,00	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	76 %	48 %	988.936.600,00	48 %	988.936.600,00	48 %	988.936.600,00	48%	2.966.809.800,00	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi kepada Objek Pemeriksaan yang Dilakukan Sesuai SOP	76 %	80 %	519.938.000,00	80 %	519.938.000,00	80 %	519.938.000,00	80%	1.559.814.000,00	INSPEKTORAT
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah	100 %	100 %	1.635.448.900,00	100 %	1.635.448.900,00	100 %	1.635.448.900,00	100%	4.906.346.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah	100 %	100 %	8.385.300,00	100 %	8.385.300,00	100 %	8.385.300,00	100%	25.155.900,00	DINAS TENAGA KERJA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	9.534.007.361,00	76 Angka	10.284.007.361,00	80 Angka	10.284.007.361,00	80 Angka	30.102.022.083,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	95 %	96 %	1.602.671.900,00	97 %	2.102.671.900,00	98 %	2.102.671.900,00	98%	5.808.015.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4.591.876.971,00	76 Angka	5.091.876.971,00	78 Angka	5.091.876.971,00	78 Angka	14.775.630.913,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Publikasi Informasi Komunikasi Publik	0,00 %	60,79 %	2.746.326.250,00	100 %	2.746.326.250,00	100 %	2.746.326.250,00	100%	8.238.978.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Aplikasi E-Government	0,00 %	11,11 %	1.953.915.500,00	15,11 %	1.953.915.500,00	25,00 %	1.953.915.500,00	25%	5.861.746.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100,00 %	100,00 %	64.365.000,00	100 %	64.365.000,00	100 %	64.365.000,00	100%	193.095.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Peningkatan Layanan keamanan Informasi	23,33 %	23,33 %	100.020.000,00	100 %	100.020.000,00	100 %	100.020.000,00	100%	300.060.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	63,5000	65,0000		70,0000		75,0000		75,0000		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	100 %	1.383.672.900,00	100 %	1.783.672.900,00	100 %	1.783.672.900,00	100%	4.951.018.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	30.526.748.671,00	76 Angka	31.276.748.671,00	80 Angka	31.276.748.671,00	80 Angka	93.080.246.013,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran	100,00 %	100,00 %	388.284.660.265,00	100 %	388.284.660.265,00	100 %	388.284.660.265,00	100%	1.164.853.980.795,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	100,00 %	100,00 %	1.150.943.500,00	100 %	1.150.943.500,00	100 %	1.150.943.500,00	100%	3.452.830.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi terhadap Potensi Objek Pajak dan Retribusi	59,47 %	62,19 %	360.227.200,00	100 %	360.227.200,00	100 %	360.227.200,00	100%	1.080.681.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,95	86,00		88,64		91,36		91,36		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	35.714.658.679,00	76 Angka	36.464.658.679,00	80 Angka	36.464.658.679,00	80 Angka	108.643.976.037,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kekucupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	4.834.474.200,00	100 %	4.834.474.200,00	100 %	4.834.474.200,00	100%	14.503.422.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4.588.680.168,00	76 Angka	5.088.680.168,00	80 Angka	5.088.680.168,00	80 Angka	14.766.040.504,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	494.722.700,00	76 Angka	494.722.700,00	80 Angka	494.722.700,00	80 Angka	1.484.168.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	100 %	1.033.343.100,00	100 %	1.033.343.100,00	100 %	1.033.343.100,00	100%	3.100.029.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	100 %	54.164.500,00	100 %	54.164.500,00	100 %	54.164.500,00	100%	162.493.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kepegawaian yang Berperidkat Memuaskan	100 %	100 %	281.990.300,00	100 %	281.990.300,00	100 %	281.990.300,00	100%	845.970.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	8.666.735.680,00	76 Angka	9.166.735.680,00	80 Angka	9.166.735.680,00	80 Angka	27.000.207.040,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik	97,83 %	98,36 %	348.900,00	100 %	348.900,00	100 %	348.900,00	100%	1.046.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	96,67 %	96,77 %	1.011.500,00	100 %	1.011.500,00	100 %	1.011.500,00	100%	3.034.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan PKS tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	24,00 %	30,00 %	1.604.300,00	100 %	1.604.300,00	100 %	1.604.300,00	100%	4.812.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	36,36 %	54,55 %	3.720.000,00	100 %	3.720.000,00	100 %	3.720.000,00	100%	11.160.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.552.367.046,00	76 Angka	4.052.367.046,00	80 Angka	4.052.367.046,00	80 Angka	11.657.101.138,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Implementasi Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25,00 %	6,67 %	183.300.000,00	76 Angka	183.300.000,00	80 Angka	183.300.000,00	80 Angka	549.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi	0,00 %	300,00 %	84.052.000,00	100 %	84.052.000,00	100 %	84.052.000,00	100%	252.156.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	100,00 %	100,00 %	152.609.132,00	100 %	152.609.132,00	100 %	152.609.132,00	100%	457.827.396,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100,00 %	100,00 %	365.200.000,00	100 %	365.200.000,00	100 %	365.200.000,00	100%	1.095.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Terpilah	100,00 %	100,00 %	18.361.276,00	100 %	18.361.276,00	100 %	18.361.276,00	100%	55.083.828,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	43.981.778.142,00	76 Angka	44.481.778.142,00	80 Angka	44.481.778.142,00	80 Angka	132.945.334.426,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Dengan Baik	100 %	100 %	6.542.082.800,00	100 %	6.792.082.800,00	100 %	6.792.082.800,00	100%	20.126.248.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,5300	2,7448		2,8589		2,9778		2,9778		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Iptek yang Dimanfaatkan	95 %	96 %	1.130.403.500,00	97 %	1.130.403.500,00	98 %	1.130.403.500,00	98%	3.391.210.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Misi 4 RPJPD : Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkeadilan											
	Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	5,80	6,33		6,62		6,92		6,92		
	Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,16	5,00		5,32		5,66		5,66		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	6.772.680.114,00	76 Angka	7.272.680.114,00	80 Angka	7.272.680.114,00	80 Angka	21.318.040.342,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	100,00 %	100,00 %	9.876.100,00	100 %	9.876.100,00	100 %	9.876.100,00	100%	29.628.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	62,16 %	50,00 %	0,00	100 %	106.770.000,00	100 %	106.770.000,00	100%	213.540.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Mendapatkan Akses Pembiayaan	0,00 %	0,63 %	24.941.900,00	100 %	24.941.900,00	100 %	24.941.900,00	100%	74.825.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil	0,19 %	0,22 %	0,00	100 %	250.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100%	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Memiliki Kenaikan Omset Minimal 10% Tahunan	31,38 %	35,67 %	364.036.900,00	100 %	364.036.900,00	100 %	364.036.900,00	100%	1.092.110.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Sasaran : Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70	3,15		2,96		2,79		2,79		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.587.473.848,00	76 Angka	4.087.473.848,00	80 Angka	4.087.473.848,00	80 Angka	11.762.421.544,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan dan Mengacu pada Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100 %	100 %	6.813.000,00	100 %	6.813.000,00	100 %	6.813.000,00	100%	20.439.000,00	DINAS TENAGA KERJA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan	100 %	100 %	5.528.250,00	100 %	5.528.250,00	100 %	5.528.250,00	100%	16.584.750,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pekerjaan	100 %	100 %	18.982.900,00	100 %	18.982.900,00	100 %	18.982.900,00	100%	56.948.700,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	100 %	100 %	4.120.100,00	100 %	4.120.100,00	100 %	4.120.100,00	100%	12.360.300,00	DINAS TENAGA KERJA
	Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Angka Kemiskinan	10,98	9,79		9,11		8,48		8,48		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.531.344.754,00	76 Angka	4.031.344.754,00	80 Angka	4.031.344.754,00	80 Angka	11.594.034.262,00	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	92.904.500,00	100 %	342.904.500,00	100 %	342.904.500,00	100%	778.713.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 %	100 %	2.770.000,00	100 %	52.770.000,00	100 %	52.770.000,00	100%	108.310.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Direhabilitasi	100 %	100 %	118.900.200,00	100 %	368.900.200,00	100 %	368.900.200,00	100%	856.700.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	50.582.500,00	100 %	300.582.500,00	100 %	300.582.500,00	100%	651.747.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Wilayah Kabupaten	100 %	100 %	89.750.500,00	100 %	339.750.500,00	100 %	339.750.500,00	100%	769.251.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	23.342.600,00	100 %	33.342.600,00	100 %	33.342.600,00	100%	90.027.800,00	DINAS SOSIAL
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Transmigran Yang Berasal Dari Kabupaten Tanggamus	100 %	100 %	28.776.900,00	100 %	43.776.900,00	100 %	43.776.900,00	100%	116.330.700,00	DINAS TENAGA KERJA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,261	0,251		0,246		0,242		0,242		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang Memenuhi Standar	100,00 %	100,00 %	0,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100%	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Rata-Rata Perubahan Harga Bahan Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting	23,39 %	24,62 %	69.862.300,00	100 %	69.862.300,00	100 %	69.862.300,00	100%	209.586.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	21,24 %	64,10 %	70.495.050,00	100 %	70.495.050,00	100 %	70.495.050,00	100%	211.485.150,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri	0,00 %	25,00 %	612.008.500,00	100 %	612.008.500,00	100 %	612.008.500,00	100%	1.836.025.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	55,784	57,23			57,96		58,70		58,705	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	13.886.617.290,00	76 Angka	14.636.617.290,00	80 Angka	14.636.617.290,00	80 Angka	43.159.851.870,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	35,50 %	40,60 %	6.461.268.900,00	2,72 %	6.461.268.900,00	4,54 %	6.461.268.900,00	5%	19.383.806.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten	52,87 %	54,54 %	202.000.000,00	0,31 %	202.000.000,00	0,66 %	1.202.000.000,00	1%	1.606.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1,20 %	1,77 %	201.400.000,00	0,12 %	201.400.000,00	0,26 %	1.201.400.000,00	0%	1.604.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik	100,00 %	100,00 %	105.000,00	0,12 %	1.425.105.000,00	0,26 %	2.273.024.467,55	0%	3.698.234.467,55	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	100,00 %	100,00 %	108.000,00	100 %	564.282.916,00	100 %	1.564.282.916,00	100%	2.128.673.832,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dengan Kondisi Baik	100,00 %	100,00 %	6.078.505.100,00	100 %	6.078.505.100,00	100 %	7.078.505.100,00	100%	19.235.515.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	100,00 %	100,00 %	10.323.289.479,00	100 %	10.323.289.479,00	100 %	10.323.289.479,00	100%	30.969.868.437,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	27,26 %	32,86 %	65.431.840.098,00	2 %	65.536.742.186,88	3 %	65.536.742.186,88	3%	196.505.324.471,76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	4,25 %	6,22 %	200.450.000,00	100 %	200.450.000,00	100 %	550.450.000,00	100%	951.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100,00 %	100,00 %	532.597.800,00	100 %	532.597.800,00	100 %	882.597.800,00	100%	1.947.793.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Bencana/Relokasi Program Pemerintah	100,00 %	100,00 %	214.080.000,00	100 %	214.080.000,00	100 %	214.080.000,00	100%	642.240.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditangani	37,17 %	41,61 %	530.825.000,00	100 %	530.825.000,00	100 %	530.825.000,00	100%	1.592.475.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100,00 %	100,00 %	2.651.400,00	100 %	2.651.400,00	100 %	2.651.400,00	100%	7.954.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4.752.644.193,00	76 Angka	4.752.644.193,00	80 Angka	4.752.644.193,00	80 Angka	14.257.932.579,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	16,77 %	10,00 %	774.298.600,00	70,02 %	774.298.600,00	70,02 %	774.298.600,00	70%	2.322.895.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Penumpang yang Terlayani dengan Baik oleh Angkutan Pelayaran	10,00 %	10,00 %	19.110.000,00	100 %	19.110.000,00	100 %	19.110.000,00	100%	57.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan	5,00 %	10,00 %	8.089.900,00	100 %	8.089.900,00	100 %	8.089.900,00	100%	24.269.700,00	DINAS TENAGA KERJA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	2,38	1,35		1,44		1,53		1,53		
	Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	Nilai Tukar Petani	101,20	117,89		127,24		137,34		137,34		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	6.461.281.512,00	73 Angka	6.961.281.512,00	80 Angka	6.961.281.512,00	80 Angka	20.383.844.536,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Varietas Tanaman Pertanian yang Telah Bersertifikat	20,49 %	17,69 %	103.704.700,00	100 %	103.704.700,00	100 %	103.704.700,00	100%	311.114.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Persentase Varietas Tanaman Pertanian yang Telah Bersertifikat	22,22 %	22,22 %	282.597.500,00	5 %	282.597.500,00	5 %	282.597.500,00	5%	847.792.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun	2,38 %	21,43 %	1.016.324.300,00	5 %	1.016.324.300,00	5 %	1.016.324.300,00	5%	3.048.972.900,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun	1,11 %	1,92 %	1.082.999.500,00	100 %	1.082.999.500,00	100 %	1.082.999.500,00	100%	3.248.998.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	100,00 %	100,00 %	214.655.000,00	100 %	214.655.000,00	100 %	214.655.000,00	100%	643.965.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian	80,20 %	86,50 %	140.774.900,00	100 %	140.774.900,00	100 %	140.774.900,00	100%	422.324.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang Dibina	1,39 %	1,24 %	604.323.700,00	100 %	604.323.700,00	100 %	604.323.700,00	100%	1.812.971.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3.692.636.747,00	73 Angka	4.192.636.747,00	80 Angka	4.192.636.747,00	80 Angka	12.077.910.241,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	41631.32 Ton	42000.00 Ton	1.320.610.700,00	100 %	1.320.610.700,00	100 %	1.320.610.700,00	100%	3.961.832.100,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	4740.63 Ton	4800.00 Ton	649.495.100,00	100 %	649.495.100,00	100 %	649.495.100,00	100%	1.948.485.300,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	100 %	100 %	44.027.500,00	100 %	44.027.500,00	100 %	44.027.500,00	100%	132.082.500,00	DINAS PERIKANAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	73,60	74,93		75,60		76,28		76,28		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	13.698.660.334,00	76 Angka	14.198.660.334,00	80 Angka	14.198.660.334,00	80 Angka	42.095.981.002,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari	100 %	100 %	510.384.050,00	100 %	510.384.050,00	100 %	510.384.050,00	100%	1.531.152.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	14,13	18,57		21,29		24,41		24,41		
	Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	394,31	8,00		9,00		10,00		10,00		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kelompok Kesenian dan kebudayaan lokal yang Difasilitasi Pengembangannya	32,17 %	100,00 %	186.985.844,00	100,00 %	186.985.844,00	100,00 %	186.985.844,00	100,00%	560.957.532,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Kesenian yang Difasilitasi Pengembangannya	0,00 %	100,00 %	130.000.000,00	100,00 %	130.000.000,00	100,00 %	130.000.000,00	100,00%	390.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Penerbitan Dokumen Sejarah	91,03 %	100,00 %	95.000.000,00	100,00 %	95.000.000,00	100,00 %	95.000.000,00	100,00%	285.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang Teregister	0,00 %	100,00 %	0,00	100,00 %	75.000.000,00	100,00 %	75.000.000,00	100,00%	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4.714.182.659,00	76 Angka	5.214.182.659,00	80 Angka	5.214.182.659,00	80 Angka	15.142.547.977,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pembangunan Fasilitas Destinasi Pariwisata	67,04 %	100 %	548.949.500,00	100,00 %	548.949.500,00	100,00 %	548.949.500,00	100,00%	1.646.848.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi/Event Pariwisata yang Diikuti	76,95 %	100 %	95.000.000,00	100,00 %	95.000.000,00	100,00 %	95.000.000,00	100,00%	285.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	71,12 %	100 %	0,00	100,00 %	50.000.000,00	100,00 %	50.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Kepariwisataan dan Pelaku Ekonomi Kreatif	25,00 %	50 %	100.000.000,00	50,00 %	100.000.000,00	50,00 %	100.000.000,00	50,00%	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH						1.722.211.526.852,00		1.717.872.919.276,88		1.724.021.665.739,43		5.164.106.111.868,31



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RPD



**42
TANGGAMUS
62**



**“Bermimpilah setinggi langit ...
Jika engkau jatuh,
engkau akan jatuh
diantara bintang-bintang”**

• Soekarno •

BAB VII

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara sumber-sumber keuangan dengan implementasi urusan pemerintahan dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi



intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu, yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala perangkat daerah.

Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama kepala perangkat daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

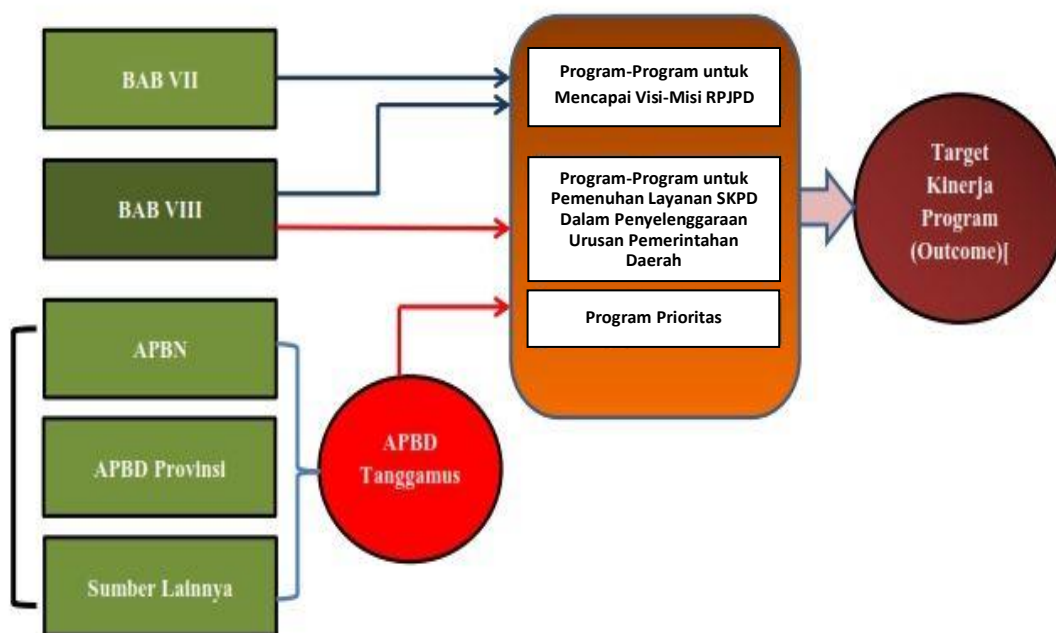
Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Tanggamus berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program



prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 106 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian Sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi.

Gambar VII. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPD



Sumber : Analisis data diolah, 2023

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan analisis kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Tanggamus

KODE	KAPASITAS RILL/BELANJA	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
	KAPASITAS RILL KEUANGAN	1,030,825,926,058.00	1,017,690,294,449.30	1,019,536,175,645.72
5	BELANJA DAERAH	1,722,177,451,852.00	1,717,835,436,776.88	1,723,983,995,826.93
5.1	Belanja Operasi	1,159,531,841,114.00	1,136,459,810,231.68	1,141,148,450,169.70
5.1.01	Belanja Pegawai	691,385,600,794.00	700,182,624,827.58	704,485,490,093.72
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386,686,676,055.00	394,420,409,576.10	396,392,511,623.98
5.1.03	Belanja Bunga	4,421,976,500.00	2,576,876,550.00	990,549,174.00
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	77,007,667,765.00	39,210,899,278.00	39,210,899,278.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29,920,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
5.2	Belanja Modal	187,285,428,072.00	206,015,443,879.20	207,475,362,991.24
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9,820,000.00	12,275,000.00	12,397,750.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,624,481,824.00	21,586,930,006.40	21,694,864,656.43
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67,576,283,950.00	74,333,912,345.00	74,705,581,906.73
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	78,141,912,298.00	85,956,103,527.80	86,815,664,563.08
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,932,930,000.00	24,126,223,000.00	24,246,854,115.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	366,360,182,666.00	366,360,182,666.00	366,360,182,666.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,691,889,224.00	3,691,889,224.00	3,691,889,224.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	362,668,293,442.00	362,668,293,442.00	362,668,293,442.00

Sumber : Proyeksi APBD 2024-2026, (data diolah)

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Penjabaran visi dan misi RPJPD;

- 2) Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
- 3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 4) Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup;
- 5) Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk periode Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Tanggamus, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus disajikan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang pada Tabel VII.2. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab sebelumnya.

Program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024-2026 merupakan program pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian indikasi program pembangunan beserta indikasi pendanaannya untuk setiap pencapaian sasaran tercantum pada tabel berikut:

Tabel VII.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				975,607,772,269		988,800,597,363		994,649,343,825		2,959,057,713,457	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				629,805,000,280		633,157,923,285		633,458,750,280		1,896,421,673,845	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	450,773,071,780.00	76 Angka	452,773,071,780.00	80 Angka	452,773,071,780.00	80 Angka	1,356,319,215,340.00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82,97 %	89.00 %	178,999,684,700.00	94 %	179,499,684,700.00	98 %	179,999,684,700.00	98 %	538,499,054,100.00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	60.00 %	63.00 %	32,243,800.00	63 %	32,243,800.00	66 %	32,243,800.00	66 %	96,731,400.00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Sekolah yang Melaksanakan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	%	%	0.00	100 %	852,923,005.00	100 %	653,750,000.00	100 %	1,506,673,005.00	DINAS PENDIDIKAN
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				214,546,112,468		218,481,937,552		218,481,937,552		651,509,987,572	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	57,387,655,902.00	76 Angka	58,387,655,902.00	80 Angka	58,387,655,902.00	80 Angka	174,162,967,706.00	DINAS KESEHATAN
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	30,646,781,955.00	76 Angka	31,646,781,955.00	80 Angka	31,646,781,955.00	80 Angka	93,940,345,865.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,302,763,704.00	76 Angka	1,302,763,704.00	80 Angka	1,302,763,704.00	80 Angka	3,908,291,112.00	Puskesmas Siring Betik
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,122,345,158.00	76 Angka	1,122,345,158.00	80 Angka	1,122,345,158.00	80 Angka	3,367,035,474.00	Puskesmas Wonosobo
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,203,668,400.00	76 Angka	1,203,668,400.00	80 Angka	1,203,668,400.00	80 Angka	3,611,005,200.00	Puskesmas Sudimoro
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,714,925,051.00	76 Angka	1,714,925,051.00	80 Angka	1,714,925,051.00	80 Angka	5,144,775,153.00	Puskesmas Sukaraja
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,307,938,236.00	76 Angka	1,307,938,236.00	80 Angka	1,307,938,236.00	80 Angka	3,923,814,708.00	Puskesmas Sanggi
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2,688,139,146.00	76 Angka	2,688,139,146.00	80 Angka	2,688,139,146.00	80 Angka	8,064,417,438.00	Puskesmas Kota Agung
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,001,300,696.00	76 Angka	1,001,300,696.00	80 Angka	1,001,300,696.00	80 Angka	3,003,902,088.00	Puskesmas Way Nipah
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,492,401,988.00	76 Angka	1,492,401,988.00	80 Angka	1,492,401,988.00	80 Angka	4,477,205,964.00	Puskesmas Pasar Simpang
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,302,453,185.00	76 Angka	1,302,453,185.00	80 Angka	1,302,453,185.00	80 Angka	3,907,359,555.00	Puskesmas Negara Batin
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2,150,216,860.00	76 Angka	2,150,216,860.00	80 Angka	2,150,216,860.00	80 Angka	6,450,650,580.00	Puskesmas Pulau Panggung
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,743,885,000.00	76 Angka	1,743,885,000.00	80 Angka	1,743,885,000.00	80 Angka	5,231,655,000.00	Puskesmas Ngarip

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2,048,711,144.00	76 Angka	2,048,711,144.00	80 Angka	2,048,711,144.00	80 Angka	6,146,133,432.00	Puskesmas Air Nanningan
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2,855,867,839.00	76 Angka	2,855,867,839.00	80 Angka	2,855,867,839.00	80 Angka	8,567,603,517.00	Puskesmas Talang Padang
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,100,699,182.00	76 Angka	1,100,699,182.00	80 Angka	1,100,699,182.00	80 Angka	3,302,097,546.00	Puskesmas Margoyoso
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,765,178,195.00	76 Angka	1,765,178,195.00	80 Angka	1,765,178,195.00	80 Angka	5,295,534,585.00	Puskesmas Gisting
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,135,618,165.00	76 Angka	1,135,618,165.00	80 Angka	1,135,618,165.00	80 Angka	3,406,854,495.00	Puskesmas Kedaloman
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,930,048,786.00	76 Angka	1,930,048,786.00	80 Angka	1,930,048,786.00	80 Angka	5,790,146,358.00	Puskesmas Rantau Tjiang
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2,288,821,106.00	76 Angka	2,288,821,106.00	80 Angka	2,288,821,106.00	80 Angka	6,866,463,318.00	Puskesmas Sumanda
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,335,245,000.00	76 Angka	1,335,245,000.00	80 Angka	1,335,245,000.00	80 Angka	4,005,735,000.00	Puskesmas Bulok Sukamara
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,769,873,226.00	76 Angka	1,769,873,226.00	80 Angka	1,769,873,226.00	80 Angka	5,309,619,678.00	Puskesmas Putih Doh
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	950,170,034.00	76 Angka	950,170,034.00	80 Angka	950,170,034.00	80 Angka	2,850,510,102.00	Puskesmas Klumbayan
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,401,599,694.00	76 Angka	1,401,599,694.00	80 Angka	1,401,599,694.00	80 Angka	4,204,799,082.00	Puskesmas Antar Brak
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	908,341,676.00	76 Angka	908,341,676.00	80 Angka	908,341,676.00	80 Angka	2,725,025,028.00	Puskesmas Klumbayan Barat
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	715,308,542.00	76 Angka	715,308,542.00	80 Angka	715,308,542.00	80 Angka	2,145,925,626.00	Puskesmas Sumberejo
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Angka	0 Angka	0.00	76 Angka	515,308,542.00	80 Angka	515,308,542.00	80 Angka	1,030,617,084.00	Puskesmas Gunung Sari
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Angka	0 Angka	0.00	76 Angka	515,308,542.00	80 Angka	515,308,542.00	80 Angka	1,030,617,084.00	Puskesmas Martanda
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	39,799,963,839.00	100.00 %	39,799,963,839.00	100.00 %	39,799,963,839.00	100.00 %	119,399,891,517.00	DINAS KESEHATAN
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	15,031,109,659.00	100.00 %	15,031,109,659.00	100.00 %	15,031,109,659.00	100.00 %	45,093,328,977.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	580,137,000.00	100.00 %	580,137,000.00	100.00 %	580,137,000.00	100.00 %	1,740,411,000.00	Puskesmas Siring Betik
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	428,737,000.00	100.00 %	428,737,000.00	100.00 %	428,737,000.00	100.00 %	1,286,211,000.00	Puskesmas Wonosobo
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	577,741,000.00	100.00 %	577,741,000.00	100.00 %	577,741,000.00	100.00 %	1,733,223,000.00	Puskesmas Sudimoro
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	568,670,000.00	100.00 %	568,670,000.00	100.00 %	568,670,000.00	100.00 %	1,706,010,000.00	Puskesmas Sukaraja
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	555,287,000.00	100.00 %	555,287,000.00	100.00 %	555,287,000.00	100.00 %	1,665,861,000.00	Puskesmas Sanggi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	614,248,000.00	100.00 %	614,248,000.00	100.00 %	614,248,000.00	100.00 %	1,842,744,000.00	Puskesmas Kota Agung
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	594,967,000.00	100.00 %	594,967,000.00	100.00 %	594,967,000.00	100.00 %	1,784,901,000.00	Puskesmas Way Nipah
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	577,998,000.00	100.00 %	577,998,000.00	100.00 %	577,998,000.00	100.00 %	1,733,994,000.00	Puskesmas Pasar Sempang
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	583,828,000.00	100.00 %	583,828,000.00	100.00 %	583,828,000.00	100.00 %	1,751,484,000.00	Puskesmas Negara Batin
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	642,507,000.00	100.00 %	642,507,000.00	100.00 %	642,507,000.00	100.00 %	1,927,521,000.00	Puskesmas Pulau Panggung
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	660,446,000.00	100.00 %	660,446,000.00	100.00 %	660,446,000.00	100.00 %	1,981,338,000.00	Puskesmas Ngarip
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	611,719,000.00	100.00 %	611,719,000.00	100.00 %	611,719,000.00	100.00 %	1,835,157,000.00	Puskesmas Air Naningan
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	610,005,000.00	100.00 %	610,005,000.00	100.00 %	610,005,000.00	100.00 %	1,830,015,000.00	Puskesmas Talang Padang
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	582,545,000.00	100.00 %	582,545,000.00	100.00 %	582,545,000.00	100.00 %	1,747,635,000.00	Puskesmas Margoyoso
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	628,721,000.00	100.00 %	628,721,000.00	100.00 %	628,721,000.00	100.00 %	1,886,163,000.00	Puskesmas Gisting
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	544,863,000.00	100.00 %	544,863,000.00	100.00 %	544,863,000.00	100.00 %	1,634,589,000.00	Puskesmas Kedaloman
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	626,873,000.00	100.00 %	626,873,000.00	100.00 %	626,873,000.00	100.00 %	1,880,619,000.00	Puskesmas Rantau Tjang
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	544,353,000.00	100.00 %	544,353,000.00	100.00 %	544,353,000.00	100.00 %	1,633,059,000.00	Puskesmas Sumanda
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	569,282,000.00	100.00 %	569,282,000.00	100.00 %	569,282,000.00	100.00 %	1,707,846,000.00	Puskesmas Bulok Sukamara
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	543,738,000.00	100.00 %	543,738,000.00	100.00 %	543,738,000.00	100.00 %	1,631,214,000.00	Puskesmas Putih Doh
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	498,635,000.00	100.00 %	498,635,000.00	100.00 %	498,635,000.00	100.00 %	1,495,905,000.00	Puskesmas Klumbayan
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	571,553,000.00	100.00 %	571,553,000.00	100.00 %	571,553,000.00	100.00 %	1,714,659,000.00	Puskesmas Antar Brak
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	542,663,000.00	100.00 %	542,663,000.00	100.00 %	542,663,000.00	100.00 %	1,627,989,000.00	Puskesmas Klumbayan Barat
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	566,731,000.00	100.00 %	566,731,000.00	100.00 %	566,731,000.00	100.00 %	1,700,193,000.00	Puskesmas Sumberejo
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	0.00 %	0.00 %	0.00	100.00 %	366,731,000.00	100.00 %	366,731,000.00	100.00 %	733,462,000.00	Puskesmas Gunung Sari
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	0.00 %	0.00 %	0.00	100.00 %	366,731,000.00	100.00 %	366,731,000.00	100.00 %	733,462,000.00	Puskesmas Martanda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	13,071,509,000.00	100.00 %	13,071,509,000.00	100.00 %	13,071,509,000.00	100.00 %	39,214,527,000.00	DINAS KESEHATAN
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	3,814,766,100.00	100.00 %	3,814,766,100.00	100.00 %	3,814,766,100.00	100.00 %	11,444,298,300.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	115,543,000.00	100.00 %	115,543,000.00	100.00 %	115,543,000.00	100.00 %	346,629,000.00	Puskesmas Siring Betik
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	117,503,004.00	100.00 %	117,503,004.00	100.00 %	117,503,004.00	100.00 %	352,509,012.00	Puskesmas Wonosobo
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	115,066,000.00	100.00 %	115,066,000.00	100.00 %	115,066,000.00	100.00 %	345,198,000.00	Puskesmas Sudimoro
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	113,259,000.00	100.00 %	113,259,000.00	100.00 %	113,259,000.00	100.00 %	339,777,000.00	Puskesmas Sukaraja
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	110,594,000.00	100.00 %	110,594,000.00	100.00 %	110,594,000.00	100.00 %	331,782,000.00	Puskesmas Sanggi
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	122,337,000.00	100.00 %	122,337,000.00	100.00 %	122,337,000.00	100.00 %	367,011,000.00	Puskesmas Kota Agung
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	118,497,000.00	100.00 %	118,497,000.00	100.00 %	118,497,000.00	100.00 %	355,491,000.00	Puskesmas Way Nipah
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	115,117,000.00	100.00 %	115,117,000.00	100.00 %	115,117,000.00	100.00 %	345,351,000.00	Puskesmas Pasar Simpang
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	116,278,000.00	100.00 %	116,278,000.00	100.00 %	116,278,000.00	100.00 %	348,834,000.00	Puskesmas Negara Batin
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	127,965,000.00	100.00 %	127,965,000.00	100.00 %	127,965,000.00	100.00 %	383,895,000.00	Puskesmas Pulau Panggung
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	131,538,000.00	100.00 %	131,538,000.00	100.00 %	131,538,000.00	100.00 %	394,614,000.00	Puskesmas Ngarip
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	121,833,000.00	100.00 %	121,833,000.00	100.00 %	121,833,000.00	100.00 %	365,499,000.00	Puskesmas Air Naningan
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	121,492,000.00	100.00 %	121,492,000.00	100.00 %	121,492,000.00	100.00 %	364,476,000.00	Puskesmas Talang Padang
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	116,023,000.00	100.00 %	116,023,000.00	100.00 %	116,023,000.00	100.00 %	348,069,000.00	Puskesmas Margoyoso
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	125,221,000.00	100.00 %	125,221,000.00	100.00 %	125,221,000.00	100.00 %	375,663,000.00	Puskesmas Gisting

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	108,518,000.00	100.00 %	108,518,000.00	100.00 %	108,518,000.00	100.00 %	325,554,000.00	Puskesmas Kedaloman
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	124,851,000.00	100.00 %	124,851,000.00	100.00 %	124,851,000.00	100.00 %	374,553,000.00	Puskesmas Rantau Tjiang
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	108,416,000.00	100.00 %	108,416,000.00	100.00 %	108,416,000.00	100.00 %	325,248,000.00	Puskesmas Sumanda
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	113,381,000.00	100.00 %	113,381,000.00	100.00 %	113,381,000.00	100.00 %	340,143,000.00	Puskesmas Bulok Sukamara
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	108,294,000.00	100.00 %	108,294,000.00	100.00 %	108,294,000.00	100.00 %	324,882,000.00	Puskesmas Putih Doh
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	99,311,000.00	100.00 %	99,311,000.00	100.00 %	99,311,000.00	100.00 %	297,933,000.00	Puskesmas Klumbayan
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	113,834,000.00	100.00 %	113,834,000.00	100.00 %	113,834,000.00	100.00 %	341,502,000.00	Puskesmas Antar Brak
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	108,080,000.00	100.00 %	108,080,000.00	100.00 %	108,080,000.00	100.00 %	324,240,000.00	Puskesmas Klumbayan Barat
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100.00 %	100.00 %	112,873,000.00	100.00 %	112,873,000.00	100.00 %	112,873,000.00	100.00 %	338,619,000.00	Puskesmas Sumberejo
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	0.00 %	0.00 %	0.00	100.00 %	85,873,000.00	100.00 %	85,873,000.00	100.00 %	171,746,000.00	Puskesmas Gunung Sari
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	0.00 %	0.00 %	0.00	100.00 %	85,873,000.00	100.00 %	85,873,000.00	100.00 %	171,746,000.00	Puskesmas Martanda
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	410,496,000.00	100.00 %	410,496,000.00	100.00 %	410,496,000.00	100.00 %	1,231,488,000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pekon Siaga Kategori Mandiri	45.00 %	45.00 %	375,000,000.00	50.00 %	375,000,000.00	75.00 %	375,000,000.00	75.00 %	1,125,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		Persentase Pekon Siaga Kategori Mandiri	45.00 %	45.00 %	161,238,996.00	50.00 %	161,238,996.00	75.00 %	161,238,996.00	75.00 %	483,716,988.00	Puskesmas Wonosobo
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				103,318,181,667		106,162,258,672		111,710,178,139		321,190,618,478	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	13,886,617,290.00	76 Angka	14,636,617,290.00	80 Angka	14,636,617,290.00	80 Angka	43,159,851,870.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	35.50 %	40.60 %	6,461,268,900.00	2.72 %	6,461,268,900.00	4.54 %	6,461,268,900.00	5%	19,383,806,700.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten	52.87 %	54.54 %	202,000,000.00	0.31 %	202,000,000.00	0.66 %	1,202,000,000.00	1%	1,606,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.20 %	1.77 %	201,400,000.00	0.12 %	201,400,000.00	0.26 %	1,201,400,000.00	0%	1,604,200,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik	100.00 %	100.00 %	105,000.00	0.12 %	1,425,105,000.00	0.26 %	2,273,024,467.55	0%	3,698,234,467.55	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	100.00 %	100.00 %	108,000.00	100 %	564,282,916.00	100 %	1,564,282,916.00	100%	2,128,673,832.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dengan Kondisi Baik	100.00 %	100.00 %	6,078,505,100.00	100 %	6,078,505,100.00	100 %	7,078,505,100.00	100%	19,235,515,300.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	100.00 %	100.00 %	10,323,289,479.00	100 %	10,323,289,479.00	100 %	10,323,289,479.00	100%	30,969,868,437.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	27.26 %	32.86 %	65,431,840,098.00	2 %	65,536,742,186.88	3 %	65,536,742,186.88	3%	196,505,324,471.76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	4.25 %	6.22 %	200,450,000.00	100 %	200,450,000.00	100 %	550,450,000.00	100%	951,350,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100.00 %	100.00 %	532,597,800.00	100 %	532,597,800.00	100 %	882,597,800.00	100%	1,947,793,400.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				744,905,000		744,905,000		744,905,000		2,234,715,000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Bencana/Relokasi Program	100.00 %	100.00 %	214,080,000.00	100 %	214,080,000.00	100 %	214,080,000.00	100%	642,240,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditangani	37.17 %	41.61 %	530,825,000.00	100 %	530,825,000.00	100 %	530,825,000.00	100%	1,592,475,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				23,283,977,800		24,783,977,800		24,783,977,800		72,851,933,400	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	10,981,626,187.00	76 Angka	11,481,626,187.00	80 Angka	11,481,626,187.00	80 Angka	33,944,878,561.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %	100 %	2,066,000,000.00	100 %	2,066,000,000.00	100 %	2,066,000,000.00	100%	6,198,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,857,400,764.00	76 Angka	4,357,400,764.00	80 Angka	4,357,400,764.00	80 Angka	12,572,202,292.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %	100 %	1,116,000,000.00	100 %	1,116,000,000.00	100 %	1,116,000,000.00	100%	3,348,000,000.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,121,175,949.00	76 Angka	3,621,175,949.00	80 Angka	3,621,175,949.00	80 Angka	10,363,527,847.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	2,141,774,900.00	100 %	2,141,774,900.00	100 %	2,141,774,900.00	100%	6,425,324,700.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3,909,595,054		5,469,595,054		5,469,595,054		14,848,785,162	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,531,344,754.00	76 Angka	4,031,344,754.00	80 Angka	4,031,344,754.00	80 Angka	11,594,034,262.00	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	92,904,500.00	100 %	342,904,500.00	100 %	342,904,500.00	100%	778,713,500.00	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 %	100 %	2,770,000.00	100 %	52,770,000.00	100 %	52,770,000.00	100%	108,310,000.00	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Direhabilitasi	100 %	100 %	118,900,200.00	100 %	368,900,200.00	100 %	368,900,200.00	100%	856,700,600.00	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	50,582,500.00	100 %	300,582,500.00	100 %	300,582,500.00	100%	651,747,500.00	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Wilayah Kabupaten	100 %	100 %	89,750,500.00	100 %	339,750,500.00	100 %	339,750,500.00	100%	769,251,500.00	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	23,342,600.00	100 %	33,342,600.00	100 %	33,342,600.00	100%	90,027,800.00	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				94,007,508,712		101,865,358,712		102,165,358,712		298,038,226,136	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3,622,918,098		4,122,918,098		4,122,918,098		11,868,754,294	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,587,473,848.00	76 Angka	4,087,473,848.00	80 Angka	4,087,473,848.00	80 Angka	11,762,421,544.00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan dan Mengacu pada Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100 %	100 %	6,813,000.00	100 %	6,813,000.00	100 %	6,813,000.00	100%	20,439,000.00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan	100 %	100 %	5,528,250.00	100 %	5,528,250.00	100 %	5,528,250.00	100%	16,584,750.00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pekerjaan	100 %	100 %	18,982,900.00	100 %	18,982,900.00	100 %	18,982,900.00	100%	56,948,700.00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	100 %	100 %	4,120,100.00	100 %	4,120,100.00	100 %	4,120,100.00	100%	12,360,300.00	DINAS TENAGA KERJA
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5,557,203,800		6,307,203,800		6,607,203,800		18,471,611,400	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4,560,877,200.00	76 Angka	5,060,877,200.00	80 Angka	5,060,877,200.00	80 Angka	14,682,631,600.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Anggaran Responsif Gender Terhadap Belanja Daerah	-89 %	67 %	25,000,000.00	70 %	125,000,000.00	75 %	375,000,000.00	75%	525,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Perempuan	150 %	-20 %	627,696,600.00	95 %	627,696,600.00	95 %	627,696,600.00	95%	1,883,089,800.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Penurunan Keluarga Pra sejahtera /Keluarga Miskin	-2.12 %	-1.52 %	0.00	87 %	150,000,000.00	90 %	200,000,000.00	90%	350,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Fasilitas Hak Anak pada Klaster Pendidikan	24.06 %	10.98 %	40,000,000.00	30 %	40,000,000.00	35 %	40,000,000.00	35%	120,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Anak	15.15 %	-7.89 %	303,630,000.00	30 %	303,630,000.00	35 %	303,630,000.00	35%	910,890,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				14,209,044,384		14,709,044,384		14,709,044,384		43,627,133,152	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	13,698,660,334.00	76 Angka	14,198,660,334.00	80 Angka	14,198,660,334.00	80 Angka	42,095,981,002.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari	100 %	100 %	510,384,050.00	100 %	510,384,050.00	100 %	510,384,050.00	100%	1,531,152,150.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2,651,400		2,651,400		2,651,400		7,954,200	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	100.00 %	100.00 %	2,651,400.00	100 %	2,651,400.00	100 %	2,651,400.00	100%	7,954,200.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5,928,853,802		6,514,333,802		6,514,333,802		18,957,521,406	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4,879,994,102.00	76 Angka	5,379,994,102.00	80 Angka	5,379,994,102.00	80 Angka	15,639,982,306.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah Ditetapkan dan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	33 %	33 %	95,000,000.00	30 %	95,000,000.00	30 %	95,000,000.00	30%	285,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Parameter Baku Mutu Air dan Udara yang Melebihi Baku	30 %	67 %	118,419,700.00	30 %	118,419,700.00	30 %	118,419,700.00	30%	355,259,100.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Lahan Konservasi Sumberdaya Alam	20 %	33 %	18,640,000.00	20 %	18,640,000.00	20 %	18,640,000.00	20%	55,920,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS Limbah B3 yang Dikelola Dengan Baik	16 %	9 %	0.00	10 %	15,000,000.00	12 %	15,000,000.00	12%	30,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku usaha yang mengikuti Progam Penilaian Pringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan (PROPER)	40 %	22 %	500,000.00	40 %	500,000.00	40 %	500,000.00	40%	1,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga / Kelompok Masyarakat Dibina Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	127,350,000.00	100 %	127,350,000.00	100 %	127,350,000.00	100%	382,050,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok/ Lembaga yang Mengikuti Progam Penilaian Pengelolaan Lingkungan yang Menerima Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota dan Difasilitasi untuk Penghargaan Tingkat	60 %	33 %	0.00	60 %	70,480,000.00	60 %	70,480,000.00	60%	140,960,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Permasalahan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	100 %	100 %	8,020,000.00	100 %	8,020,000.00	100 %	8,020,000.00	100%	24,060,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	13 %	19 %	680,930,000.00	14 %	680,930,000.00	15 %	680,930,000.00	15%	2,042,790,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8,673,420,380		9,173,420,380		9,173,420,380		27,020,261,140	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	8,666,735,680.00	76 Angka	9,166,735,680.00	80 Angka	9,166,735,680.00	80 Angka	27,000,207,040.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik	97.83 %	98.36 %	348,900.00	100 %	348,900.00	100 %	348,900.00	100%	1,046,700.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	96.67 %	96.77 %	1,011,500.00	100 %	1,011,500.00	100 %	1,011,500.00	100%	3,034,500.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan PKS tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	24.00 %	30.00 %	1,604,300.00	100 %	1,604,300.00	100 %	1,604,300.00	100%	4,812,900.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	36.36 %	54.55 %	3,720,000.00	100 %	3,720,000.00	100 %	3,720,000.00	100%	11,160,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11,991,781,191		14,082,381,191		14,082,381,191		40,156,543,573	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,534,529,291.00	76 Angka	4,284,529,291.00	80 Angka	4,284,529,291.00	80 Angka	12,103,587,873.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pekon yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Penataan	100 %	100 %	1,552,216,000.00	100 %	1,552,216,000.00	100 %	1,552,216,000.00	100%	4,656,648,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama antar desa	100 %	100 %	0.00	100 %	1,340,600,000.00	100 %	1,340,600,000.00	100%	2,681,200,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan secara Tertib	100 %	100 %	1,684,835,700.00	100 %	1,684,835,700.00	100 %	1,684,835,700.00	100%	5,054,507,100.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Berpartisipasi dalam Proses Pembangunan Pekon	100 %	100 %	5,220,200,200.00	100 %	5,220,200,200.00	100 %	5,220,200,200.00	100%	15,660,600,600.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,956,365,000		7,956,365,000		7,956,365,000		23,869,095,000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2.30 %	2.50 %	396,600,000.00	3.00 %	396,600,000.00	3.50 %	396,600,000.00	3.50 %	1,189,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase partisipasi Keluarga dalam program KB	82.00 %	84.00 %	4,189,865,000.00	86.00 %	4,189,865,000.00	89.00 %	4,189,865,000.00	89.00 %	12,569,595,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam tribuna	15.00 %	20.00 %	3,369,900,000.00	25.00 %	3,369,900,000.00	30.00 %	3,369,900,000.00	30.00 %	10,109,700,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				5,546,052,793		5,546,052,793		5,546,052,793		16,638,158,379	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4,752,644,193.00	76 Angka	4,752,644,193.00	80 Angka	4,752,644,193.00	80 Angka	14,257,932,579.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	16.77 %	10.00 %	774,298,600.00	70.02 %	774,298,600.00	70.02 %	774,298,600.00	70%	2,322,895,800.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Penumpang yang Terlayani dengan Baik oleh Angkutan Delavaran	10.00 %	10.00 %	19,110,000.00	100 %	19,110,000.00	100 %	19,110,000.00	100%	57,330,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9,292,118,721		9,792,118,721		9,792,118,721		28,876,356,163	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4,591,876,971.00	76 Angka	5,091,876,971.00	78 Angka	5,091,876,971.00	78 Angka	14,775,630,913.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Publikasi Informasi Komunikasi Publik	0.00 %	60.79 %	2,746,326,250.00	100 %	2,746,326,250.00	100 %	2,746,326,250.00	100%	8,238,978,750.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Aplikasi E-Government	0.00 %	11.11 %	1,953,915,500.00	15.11 %	1,953,915,500.00	25.00 %	1,953,915,500.00	25%	5,861,746,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				6,807,498,114		7,664,268,114		7,664,268,114		22,136,034,342	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	6,772,680,114.00	76 Angka	7,272,680,114.00	80 Angka	7,272,680,114.00	80 Angka	21,318,040,342.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	100.00 %	100.00 %	9,876,100.00	100 %	9,876,100.00	100 %	9,876,100.00	100%	29,628,300.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	62.16 %	50.00 %	0.00	100 %	106,770,000.00	100 %	106,770,000.00	100%	213,540,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Mendapatkan Akses Pembiayaan	0.00 %	0.63 %	24,941,900.00	100 %	24,941,900.00	100 %	24,941,900.00	100%	74,825,700.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil	0.19 %	0.22 %	0.00	100 %	250,000,000.00	100 %	250,000,000.00	100%	500,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4,355,889,454		4,855,889,454		4,855,889,454		14,067,668,362	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,552,367,046.00	76 Angka	4,052,367,046.00	80 Angka	4,052,367,046.00	80 Angka	11,657,101,138.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Implementasi Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25.00 %	6.67 %	183,300,000.00	76 Angka	183,300,000.00	80 Angka	183,300,000.00	80 Angka	549,900,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi	0.00 %	300.00 %	84,052,000.00	100 %	84,052,000.00	100 %	84,052,000.00	100%	252,156,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	100.00 %	100.00 %	152,609,132.00	100 %	152,609,132.00	100 %	152,609,132.00	100%	457,827,396.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100.00 %	100.00 %	365,200,000.00	100 %	365,200,000.00	100 %	365,200,000.00	100%	1,095,600,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Terpilah	100.00 %	100.00 %	18,361,276.00	100 %	18,361,276.00	100 %	18,361,276.00	100%	55,083,828.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				5,570,404,010		6,070,404,010		6,070,404,010		17,711,212,030	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,452,047,710.00	76 Angka	3,952,047,710.00	80 Angka	3,952,047,710.00	80 Angka	11,356,143,130.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	50.00 %	30.00 %	155,195,000.00	48 %	155,195,000.00	48 %	155,195,000.00	48%	465,585,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	33.33 %	42.86 %	1,860,741,300.00	48 %	1,860,741,300.00	48 %	1,860,741,300.00	48%	5,582,223,900.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Keberadaan Tingkatan Khusus Pramuka Garuda	0.00 %	10.00 %	102,420,000.00	48 %	102,420,000.00	48 %	102,420,000.00	48%	307,260,000.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				64,365,000		64,365,000		64,365,000		193,095,000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100.00 %	100.00 %	64,365,000.00	100 %	64,365,000.00	100 %	64,365,000.00	100%	193,095,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				100,020,000		100,020,000		100,020,000		300,060,000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Peningkatan Layanan keamanan Informasi	23.33 %	23.33 %	100,020,000.00	100 %	100,020,000.00	100 %	100,020,000.00	100%	300,060,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				411,985,844		486,985,844		486,985,844		1,385,957,532	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kelompok Kesenian dan kebudayaan lokal yang Difasilitasi Pengembangannya	32.17 %	100.00 %	186,985,844.00	100.00 %	186,985,844.00	100.00 %	186,985,844.00	100.00%	560,957,532.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Kesenian yang Difasilitasi Pengembangannya	0.00 %	100.00 %	130,000,000.00	100.00 %	130,000,000.00	100.00 %	130,000,000.00	100.00%	390,000,000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Penerbitan Dokumen Sejarah	91.03 %	100.00 %	95,000,000.00	100.00 %	95,000,000.00	100.00 %	95,000,000.00	100.00%	285,000,000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang Teregister	0.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	75,000,000.00	100.00 %	75,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3,866,967,069		4,366,967,069		4,366,967,069		12,600,901,207	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,630,468,269.00	76 Angka	4,130,468,269.00	80 Angka	4,130,468,269.00	80 Angka	11,891,404,807.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	75%	80%	236,498,800.00	90%	236,498,800.00	100%	236,498,800.00	100%	709,496,400.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				49,969,652		49,969,652		49,969,652		149,908,956	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dikelola Melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	60%	78%	38,160,552.00	100%	38,160,552.00	100%	38,160,552.00	100%	114,481,656.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Terlindungi dan Terselamatkan	100%	100%	11,809,100.00	100%	11,809,100.00	100%	11,809,100.00	100%	35,427,300.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				22,224,832,868		23,839,832,868		23,839,832,868		69,904,498,604	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5,706,770,047		6,206,770,047		6,206,770,047		18,120,310,141	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,692,636,747.00	73 Angka	4,192,636,747.00	80 Angka	4,192,636,747.00	80 Angka	12,077,910,241.00	DINAS PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	41631.32 Ton	42000.00 Ton	1,320,610,700.00	100 %	1,320,610,700.00	100 %	1,320,610,700.00	100%	3,961,832,100.00	DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	4740.63 Ton	4800.00 Ton	649,495,100.00	100 %	649,495,100.00	100 %	649,495,100.00	100%	1,948,485,300.00	DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	100 %	100 %	44,027,500.00	100 %	44,027,500.00	100 %	44,027,500.00	100%	132,082,500.00	DINAS PERIKANAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				5,458,132,159		6,008,132,159		6,008,132,159		17,474,396,477	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4,714,182,659.00	76 Angka	5,214,182,659.00	80 Angka	5,214,182,659.00	80 Angka	15,142,547,977.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pembangunan Fasilitas Destinasi Pariwisata	67.04 %	100 %	548,949,500.00	100.00 %	548,949,500.00	100.00 %	548,949,500.00	100.00%	1,646,848,500.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi/Event Pariwisata yang Diikuti	76.95 %	100 %	95,000,000.00	100.00 %	95,000,000.00	100.00 %	95,000,000.00	100.00%	285,000,000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	71.12 %	100 %	0.00	100.00 %	50,000,000.00	100.00 %	50,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Kepariwisataan dan Pelaku Ekonomi Kreatif	25.00 %	50 %	100,000,000.00	50.00 %	100,000,000.00	50.00 %	100,000,000.00	50.00%	300,000,000.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				9,906,661,112		10,406,661,112		10,406,661,112		30,719,983,336	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	6,461,281,512.00	73 Angka	6,961,281,512.00	80 Angka	6,961,281,512.00	80 Angka	20,383,844,536.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Varietas Tanaman Pertanian yang Telah Bersertifikat	20.49 %	17.69 %	103,704,700.00	100 %	103,704,700.00	100 %	103,704,700.00	100%	311,114,100.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Persentase Varietas Tanaman Pertanian yang Telah Bersertifikat	22.22 %	22.22 %	282,597,500.00	5 %	282,597,500.00	5 %	282,597,500.00	5%	847,792,500.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun	2.38 %	21.43 %	1,016,324,300.00	5 %	1,016,324,300.00	5 %	1,016,324,300.00	5%	3,048,972,900.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun	1.11 %	1.92 %	1,082,999,500.00	100 %	1,082,999,500.00	100 %	1,082,999,500.00	100%	3,248,998,500.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	100.00 %	100.00 %	214,655,000.00	100 %	214,655,000.00	100 %	214,655,000.00	100%	643,965,000.00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian	80.20 %	86.50 %	140,774,900.00	100 %	140,774,900.00	100 %	140,774,900.00	100%	422,324,700.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang Dibina	1.39 %	1.24 %	604,323,700.00	100 %	604,323,700.00	100 %	604,323,700.00	100%	1,812,971,100.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				8,089,900		8,089,900		8,089,900		24,269,700	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan	5.00 %	10.00 %	8,089,900.00	100 %	8,089,900.00	100 %	8,089,900.00	100%	24,269,700.00	DINAS TENAGA KERJA
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				752,365,850		802,365,850		802,365,850		2,357,097,550	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang Memenuhi Standar	100.00 %	100.00 %	0.00	100 %	50,000,000.00	100 %	50,000,000.00	100%	100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Rata-Rata Perubahan Harga Bahan Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting	23.39 %	24.62 %	69,862,300.00	100 %	69,862,300.00	100 %	69,862,300.00	100%	209,586,900.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	21.24 %	64.10 %	70,495,050.00	100 %	70,495,050.00	100 %	70,495,050.00	100%	211,485,150.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri	0.00 %	25.00 %	612,008,500.00	100 %	612,008,500.00	100 %	612,008,500.00	100%	1,836,025,500.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				364,036,900		364,036,900		364,036,900		1,092,110,700	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Memiliki Kenaikan Omset Minimal 10% Pertahun	31.38 %	35.67 %	364,036,900.00	100 %	364,036,900.00	100 %	364,036,900.00	100%	1,092,110,700.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				28,776,900		43,776,900		43,776,900		116,330,700	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Transmigran Yang Berasal Dari Kabupaten Tanggamus	100 %	100 %	28,776,900.00	100 %	43,776,900.00	100 %	43,776,900.00	100%	116,330,700.00	DINAS TENAGA KERJA
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				92,716,828,021		94,216,828,021		94,216,828,021		281,150,484,063	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				42,192,967,079		42,942,967,079		42,942,967,079		128,078,901,237	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	35,714,658,679.00	76 Angka	36,464,658,679.00	80 Angka	36,464,658,679.00	80 Angka	108,643,976,037.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	4,834,474,200.00	100 %	4,834,474,200.00	100 %	4,834,474,200.00	100%	14,503,422,600.00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah	100 %	100 %	1,635,448,900.00	100 %	1,635,448,900.00	100 %	1,635,448,900.00	100%	4,906,346,700.00	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah	100 %	100 %	8,385,300.00	100 %	8,385,300.00	100 %	8,385,300.00	100%	25,155,900.00	DINAS TENAGA KERJA
4.02	SEKRETARIAT DPRD				50,523,860,942		51,273,860,942		51,273,860,942		153,071,582,826	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	43,981,778,142.00	76 Angka	44,481,778,142.00	80 Angka	44,481,778,142.00	80 Angka	132,945,334,426.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Dengan Baik	100 %	100 %	6,542,082,800.00	100 %	6,792,082,800.00	100 %	6,792,082,800.00	100%	20,126,248,400.00	SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				440,426,236,065		443,326,236,065		443,326,236,065		1,327,078,708,195	
5.01	PERENCANAAN				12,520,352,161		14,170,352,161		14,170,352,161		40,861,056,483	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	9,534,007,361.00	76 Angka	10,284,007,361.00	80 Angka	10,284,007,361.00	80 Angka	30,102,022,083.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	100 %	100 %	1,383,672,900.00	100 %	1,783,672,900.00	100 %	1,783,672,900.00	100%	4,951,018,700.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	95 %	96 %	1,602,671,900.00	97 %	2,102,671,900.00	98 %	2,102,671,900.00	98%	5,808,015,700.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02	KEUANGAN				420,322,579,636		421,072,579,636		421,072,579,636		1,262,467,738,908	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	30,526,748,671.00	76 Angka	31,276,748,671.00	80 Angka	31,276,748,671.00	80 Angka	93,080,246,013.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran	100.00 %	100.00 %	388,284,660,265.00	100 %	388,284,660,265.00	100 %	388,284,660,265.00	100%	1,164,853,980,795.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	100.00 %	100.00 %	1,150,943,500.00	100 %	1,150,943,500.00	100 %	1,150,943,500.00	100%	3,452,830,500.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi terhadap Potensi Objek Pajak dan Retribusi	59.47 %	62.19 %	360,227,200.00	100 %	360,227,200.00	100 %	360,227,200.00	100%	1,080,681,600.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.03	KEPEGAWAIAN				6,170,910,468		6,670,910,468		6,670,910,468		19,512,731,404	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	4,588,680,168.00	76 Angka	5,088,680,168.00	80 Angka	5,088,680,168.00	80 Angka	14,766,040,504.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	494,722,700.00	76 Angka	494,722,700.00	80 Angka	494,722,700.00	80 Angka	1,484,168,100.00	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	100 %	1,033,343,100.00	100 %	1,033,343,100.00	100 %	1,033,343,100.00	100%	3,100,029,300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	100 %	54,164,500.00	100 %	54,164,500.00	100 %	54,164,500.00	100%	162,493,500.00	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				281,990,300		281,990,300		281,990,300		845,970,900	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kepegawaian yang Berpredikat Memuaskan	100 %	100 %	281,990,300.00	100 %	281,990,300.00	100 %	281,990,300.00	100%	845,970,900.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,130,403,500		1,130,403,500		1,130,403,500		3,391,210,500	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Iptek yang Dimanfaatkan	95 %	96 %	1,130,403,500.00	97 %	1,130,403,500.00	98 %	1,130,403,500.00	98%	3,391,210,500.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12,973,668,286		13,723,668,286		13,723,668,286		40,421,004,858	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				12,973,668,286		13,723,668,286		13,723,668,286		40,421,004,858	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	11,464,793,686.00	WTP	12,214,793,686.00	WTP	12,214,793,686.00	WTP	35,894,381,058.00	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	76 %	48 %	988,936,600.00	48 %	988,936,600.00	48 %	988,936,600.00	48%	2,966,809,800.00	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi kepada Objek Pemeriksaan yang Dilakukan Sesuai SOP	76 %	80 %	519,938,000.00	80 %	519,938,000.00	80 %	519,938,000.00	80%	1,559,814,000.00	INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				41,177,923,189		46,320,409,007		46,320,409,007		133,818,741,203	
7.01	KECAMATAN				41,177,923,189		46,320,409,007		46,320,409,007		133,818,741,203	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	5,074,354,324.00	76 Angka	5,324,354,324.00	80 Angka	5,324,354,324.00	80 Angka	15,723,062,972.00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	100,797,800.00	76 Angka	100,797,800.00	80 Angka	100,797,800.00	80 Angka	302,393,400.00	Kelurahan Baros
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	109,129,709.00	76 Angka	109,129,709.00	80 Angka	109,129,709.00	80 Angka	327,389,127.00	Kelurahan Pasar Madang
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	103,719,590.00	76 Angka	103,719,590.00	80 Angka	103,719,590.00	80 Angka	311,158,770.00	Kelurahan Kuripan
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,945,483,951.00	76 Angka	2,195,483,951.00	80 Angka	2,195,483,951.00	80 Angka	6,336,451,853.00	KECAMATAN WONOSOBO
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2,483,208,721.00	76 Angka	2,733,208,721.00	80 Angka	2,733,208,721.00	80 Angka	7,949,626,163.00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,711,204,347.00	76 Angka	1,961,204,347.00	80 Angka	1,961,204,347.00	80 Angka	5,633,613,041.00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,836,891,658.00	76 Angka	2,086,891,658.00	80 Angka	2,086,891,658.00	80 Angka	6,010,674,974.00	KECAMATAN PUGUNG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,335,360,575.00	76 Angka	1,585,360,575.00	80 Angka	1,585,360,575.00	80 Angka	4,506,081,725.00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,678,697,759.00	76 Angka	1,928,697,759.00	80 Angka	1,928,697,759.00	80 Angka	5,536,093,277.00	KECAMATAN SEMAKA
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,427,478,344.00	76 Angka	1,677,478,344.00	80 Angka	1,677,478,344.00	80 Angka	4,782,435,032.00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,505,987,597.00	76 Angka	1,755,987,597.00	80 Angka	1,755,987,597.00	80 Angka	5,017,962,791.00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,338,772,093.00	76 Angka	1,588,772,093.00	80 Angka	1,588,772,093.00	80 Angka	4,516,316,279.00	KECAMATAN ULU BELU
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,756,389,645.00	76 Angka	2,006,389,645.00	80 Angka	2,006,389,645.00	80 Angka	5,769,168,935.00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	2,078,438,753.00	76 Angka	2,328,438,753.00	80 Angka	2,328,438,753.00	80 Angka	6,735,316,259.00	KECAMATAN GISTING
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,590,237,630.00	76 Angka	1,840,237,630.00	80 Angka	1,840,237,630.00	80 Angka	5,270,712,890.00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,537,346,893.00	76 Angka	1,787,346,893.00	80 Angka	1,787,346,893.00	80 Angka	5,112,040,679.00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,663,805,128.00	76 Angka	1,913,805,128.00	80 Angka	1,913,805,128.00	80 Angka	5,491,415,384.00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,563,959,753.00	76 Angka	1,813,959,753.00	80 Angka	1,813,959,753.00	80 Angka	5,191,879,259.00	KECAMATAN LIMAU
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,792,877,012.00	76 Angka	2,042,877,012.00	80 Angka	2,042,877,012.00	80 Angka	5,878,631,036.00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,252,875,515.00	76 Angka	1,502,875,515.00	80 Angka	1,502,875,515.00	80 Angka	4,258,626,545.00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,586,848,740.00	76 Angka	1,836,848,740.00	80 Angka	1,836,848,740.00	80 Angka	5,260,546,220.00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	1,640,462,802.00	76 Angka	1,890,462,802.00	80 Angka	1,890,462,802.00	80 Angka	5,421,388,406.00	KECAMATAN BULOK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	17,960,000.00	100 %	17,960,000.00	100%	35,920,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	17,960,000.00	100 %	17,960,000.00	100%	35,920,000.00	KECAMATAN WONOSOBO
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	15,418,250.00	100 %	15,418,250.00	100%	30,836,500.00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	13,177,450.00	100 %	13,177,450.00	100%	26,354,900.00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	7,630,000.00	100 %	7,630,000.00	100 %	7,630,000.00	100%	22,890,000.00	KECAMATAN PUGUNG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	7,394,800.00	100 %	7,394,800.00	100%	14,789,600.00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	11,520,768.00	100 %	11,520,768.00	100%	23,041,536.00	KECAMATAN SEMAKA
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	13,577,404.00	100 %	13,577,404.00	100%	27,154,808.00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	18,289,000.00	100 %	18,289,000.00	100 %	18,289,000.00	100%	54,867,000.00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	6,746,000.00	100 %	6,746,000.00	100 %	6,746,000.00	100%	20,238,000.00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	7,462,500.00	100 %	7,462,500.00	100 %	7,462,500.00	100%	22,387,500.00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	9,365,500.00	100 %	9,365,500.00	100 %	9,365,500.00	100%	28,096,500.00	KECAMATAN GISTING

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	12,100,000.00	100 %	12,100,000.00	100%	24,200,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	12,821,000.00	100 %	12,821,000.00	100 %	12,821,000.00	100%	38,463,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	5,314,000.00	100 %	5,314,000.00	100 %	5,314,000.00	100%	15,942,000.00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	11,019,146.00	100 %	11,019,146.00	100%	22,038,292.00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	7,330,000.00	100 %	7,330,000.00	100%	14,660,000.00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	8,997,300.00	100 %	8,997,300.00	100 %	8,997,300.00	100%	26,991,900.00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	6,237,300.00	100 %	6,237,300.00	100 %	6,237,300.00	100%	18,711,900.00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	900,000.00	100 %	900,000.00	100 %	900,000.00	100%	2,700,000.00	KECAMATAN BULOK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	53,180,000.00	42.00 %	53,180,000.00	45.50 %	53,180,000.00	45.50%	159,540,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	340,496,300.00	42.00 %	340,496,300.00	45.50 %	340,496,300.00	45.50%	1,021,488,900.00	Kelurahan Baros
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	323,831,800.00	42.00 %	323,831,800.00	45.50 %	323,831,800.00	45.50%	971,495,400.00	Kelurahan Pasar Madang
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	319,867,150.00	42.00 %	319,867,150.00	45.50 %	319,867,150.00	45.50%	959,601,450.00	Kelurahan Kuripan
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	94,833,200.00	42.00 %	94,833,200.00	45.50 %	94,833,200.00	45.50%	284,499,600.00	KECAMATAN WONOSOBO
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	59,676,650.00	42.00 %	59,676,650.00	45.50 %	59,676,650.00	45.50%	179,029,950.00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	32,424,450.00	42.00 %	32,424,450.00	45.50 %	32,424,450.00	45.50%	97,273,350.00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	27,900,000.00	42.00 %	27,900,000.00	45.50 %	27,900,000.00	45.50%	83,700,000.00	KECAMATAN PUGUNG
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	44,356,150.00	42.00 %	44,356,150.00	45.50 %	44,356,150.00	45.50%	133,068,450.00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	63,325,000.00	42.00 %	63,325,000.00	45.50 %	63,325,000.00	45.50%	189,975,000.00	KECAMATAN SEMAKA
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	39,811,300.00	42.00 %	39,811,300.00	45.50 %	39,811,300.00	45.50%	119,433,900.00	KECAMATAN PEMATANG SAWA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	36,944,900.00	42.00 %	36,944,900.00	45.50 %	36,944,900.00	45.50%	110,834,700.00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	44,983,000.00	42.00 %	44,983,000.00	45.50 %	44,983,000.00	45.50%	134,949,000.00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	22,282,500.00	42.00 %	22,282,500.00	45.50 %	22,282,500.00	45.50%	66,847,500.00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	34,595,400.00	42.00 %	34,595,400.00	45.50 %	34,595,400.00	45.50%	103,786,200.00	KECAMATAN GISTING
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	37,633,000.00	42.00 %	37,633,000.00	45.50 %	37,633,000.00	45.50%	112,899,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	68,425,300.00	42.00 %	68,425,300.00	45.50 %	68,425,300.00	45.50%	205,275,900.00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	36,855,800.00	42.00 %	36,855,800.00	45.50 %	36,855,800.00	45.50%	110,567,400.00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	39,550,000.00	42.00 %	39,550,000.00	45.50 %	39,550,000.00	45.50%	118,650,000.00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	49,875,000.00	42.00 %	49,875,000.00	45.50 %	49,875,000.00	45.50%	149,625,000.00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	20,766,600.00	42.00 %	20,766,600.00	45.50 %	20,766,600.00	45.50%	62,299,800.00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	17,450,500.00	42.00 %	17,450,500.00	45.50 %	17,450,500.00	45.50%	52,351,500.00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Persentase Pekon Maju dan Mandiri	36.70 %	40.00%	40,570,000.00	42.00 %	40,570,000.00	45.50 %	40,570,000.00	45.50%	121,710,000.00	KECAMATAN BULOK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	69,000,000.00	100 %	69,000,000.00	100 %	69,000,000.00	100%	207,000,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	78,000,000.00	100 %	78,000,000.00	100 %	78,000,000.00	100%	234,000,000.00	KECAMATAN WONOSOBO
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	78,900,000.00	100 %	78,900,000.00	100 %	78,900,000.00	100%	236,700,000.00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	78,500,000.00	100 %	78,500,000.00	100 %	78,500,000.00	100%	235,500,000.00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	68,082,600.00	100 %	68,082,600.00	100 %	68,082,600.00	100%	204,247,800.00	KECAMATAN PUGUNG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	63,000,000.00	100 %	63,000,000.00	100 %	63,000,000.00	100%	189,000,000.00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	69,000,000.00	100 %	69,000,000.00	100 %	69,000,000.00	100%	207,000,000.00	KECAMATAN SEMAKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	66,800,000.00	100 %	66,800,000.00	100 %	66,800,000.00	100%	200,400,000.00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	76,402,500.00	100 %	76,402,500.00	100 %	76,402,500.00	100%	229,207,500.00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	59,700,000.00	100 %	59,700,000.00	100 %	59,700,000.00	100%	179,100,000.00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	51,000,000.00	100 %	51,000,000.00	100 %	51,000,000.00	100%	153,000,000.00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	52,087,500.00	100 %	52,087,500.00	100 %	52,087,500.00	100%	156,262,500.00	KECAMATAN GISTING
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	64,294,400.00	100 %	64,294,400.00	100 %	64,294,400.00	100%	192,883,200.00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	57,934,000.00	100 %	57,934,000.00	100 %	57,934,000.00	100%	173,802,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	57,090,000.00	100 %	57,090,000.00	100 %	57,090,000.00	100%	171,270,000.00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	69,000,000.00	100 %	69,000,000.00	100 %	69,000,000.00	100%	207,000,000.00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	69,000,000.00	100 %	69,000,000.00	100 %	69,000,000.00	100%	207,000,000.00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	50,400,000.00	100 %	50,400,000.00	100 %	50,400,000.00	100%	151,200,000.00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	60,000,000.00	100 %	60,000,000.00	100 %	60,000,000.00	100%	180,000,000.00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Diselesaikan	100 %	100 %	63,450,000.00	100 %	63,450,000.00	100 %	63,450,000.00	100%	190,350,000.00	KECAMATAN BULOK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	6,105,000.00	100 %	6,105,000.00	100%	12,210,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	17,177,500.00	100 %	17,177,500.00	100 %	17,177,500.00	100%	51,532,500.00	KECAMATAN WONOSOBO
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	4,976,000.00	100 %	4,976,000.00	100 %	4,976,000.00	100%	14,928,000.00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	26,200,000.00	100 %	26,200,000.00	100 %	26,200,000.00	100%	78,600,000.00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	8,200,000.00	100 %	8,200,000.00	100 %	8,200,000.00	100%	24,600,000.00	KECAMATAN PUGUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	2,400,000.00	100 %	2,400,000.00	100 %	2,400,000.00	100%	7,200,000.00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	12,850,000.00	100 %	12,850,000.00	100 %	12,850,000.00	100%	38,550,000.00	KECAMATAN SEMAKA
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	9,752,500.00	100 %	9,752,500.00	100 %	9,752,500.00	100%	29,257,500.00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	17,615,000.00	100 %	17,615,000.00	100 %	17,615,000.00	100%	52,845,000.00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	9,740,000.00	100 %	9,740,000.00	100 %	9,740,000.00	100%	29,220,000.00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	8,387,500.00	100 %	8,387,500.00	100 %	8,387,500.00	100%	25,162,500.00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	10,701,800.00	100 %	10,701,800.00	100 %	10,701,800.00	100%	32,105,400.00	KECAMATAN GISTING
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	9,760,400.00	100 %	9,760,400.00	100 %	9,760,400.00	100%	29,281,200.00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	14,815,000.00	100 %	14,815,000.00	100 %	14,815,000.00	100%	44,445,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	5,625,000.00	100 %	5,625,000.00	100 %	5,625,000.00	100%	16,875,000.00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	11,483,000.00	100 %	11,483,000.00	100 %	11,483,000.00	100%	34,449,000.00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	11,483,000.00	100 %	11,483,000.00	100 %	11,483,000.00	100%	34,449,000.00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	8,690,000.00	100 %	8,690,000.00	100 %	8,690,000.00	100%	26,070,000.00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	3,285,000.00	100 %	3,285,000.00	100 %	3,285,000.00	100%	9,855,000.00	KECAMATAN AIR NANINGAN
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dengan Baik	100 %	100 %	4,050,000.00	100 %	4,050,000.00	100 %	4,050,000.00	100%	12,150,000.00	KECAMATAN BULOK
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	16,445,000.00	100 %	16,445,000.00	100 %	16,445,000.00	100%	49,335,000.00	KECAMATAN KOTA AGUNG
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	70,200,000.00	100 %	70,200,000.00	100 %	70,200,000.00	100%	210,600,000.00	Kelurahan Baros
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	113,400,000.00	100 %	113,400,000.00	100 %	113,400,000.00	100%	340,200,000.00	Kelurahan Pasar Madang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	162,000,000.00	100 %	162,000,000.00	100 %	162,000,000.00	100%	486,000,000.00	Kelurahan Kuripan
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	29,538,000.00	100 %	29,538,000.00	100 %	29,538,000.00	100%	88,614,000.00	KECAMATAN WONOSOBO
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	13,500,000.00	100 %	13,500,000.00	100 %	13,500,000.00	100%	40,500,000.00	KECAMATAN TALANGPADANG
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	5,700,000.00	100 %	5,700,000.00	100 %	5,700,000.00	100%	17,100,000.00	KECAMATAN PULAU PANGGUNG
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	1,800,000.00	100 %	1,800,000.00	100 %	1,800,000.00	100%	5,400,000.00	KECAMATAN PUGUNG
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	5,700,000.00	100 %	5,700,000.00	100%	11,400,000.00	KECAMATAN CUKUH BALAK
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	44,220,000.00	100 %	44,220,000.00	100 %	44,220,000.00	100%	132,660,000.00	KECAMATAN SEMAKA
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	16,293,250.00	100 %	16,293,250.00	100 %	16,293,250.00	100%	48,879,750.00	KECAMATAN PEMATANG SAWA
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	9,846,800.00	100 %	9,846,800.00	100 %	9,846,800.00	100%	29,540,400.00	KECAMATAN SUMBEREJO
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	4,655,100.00	100 %	4,655,100.00	100 %	4,655,100.00	100%	13,965,300.00	KECAMATAN ULU BELU
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	6,207,000.00	100 %	6,207,000.00	100 %	6,207,000.00	100%	18,621,000.00	KECAMATAN KELUMBAYAN
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	32,184,800.00	100 %	32,184,800.00	100 %	32,184,800.00	100%	96,554,400.00	KECAMATAN GISTING
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	9,192,900.00	100 %	9,192,900.00	100 %	9,192,900.00	100%	27,578,700.00	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	35,452,300.00	100 %	35,452,300.00	100 %	35,452,300.00	100%	106,356,900.00	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	2,325,000.00	100 %	2,325,000.00	100 %	2,325,000.00	100%	6,975,000.00	KECAMATAN GUNUNG ALIP
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	26,125,000.00	100 %	26,125,000.00	100 %	26,125,000.00	100%	78,375,000.00	KECAMATAN LIMAU
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	26,125,000.00	100 %	26,125,000.00	100 %	26,125,000.00	100%	78,375,000.00	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	0.00	100 %	3,223,000.00	100 %	3,223,000.00	100%	6,446,000.00	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	5,400,000.00	100 %	5,400,000.00	100 %	5,400,000.00	100%	16,200,000.00	KECAMATAN AIR NANINGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Pekon yang Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan Baik	100 %	100 %	755,400.00	100 %	755,400.00	100 %	755,400.00	100%	2,266,200.00	KECAMATAN BULOK
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				43,076,757,442		5,779,988,955		5,779,988,955		54,636,735,352	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				43,076,757,442		5,779,988,955		5,779,988,955		54,636,735,352	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Angka	73 Angka	3,314,861,470.00	76 Angka	3,814,861,470.00	80 Angka	3,814,861,470.00	80 Angka	10,944,584,410.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100 %	100 %	600,631,600.00	100 %	600,631,600.00	100 %	600,631,600.00	100%	1,801,894,800.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Pendidikan Politik	100 %	100 %	549,382,550.00	100 %	549,382,550.00	100 %	549,382,550.00	100%	1,648,147,650.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif dalam Pembangunan	100 %	100 %	38,485,477,522.00	100 %	688,709,035.00	100 %	688,709,035.00	100%	39,862,895,592.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	36,591,300.00	100 %	36,591,300.00	100 %	36,591,300.00	100%	109,773,900.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100 %	89,813,000.00	100 %	89,813,000.00	100 %	89,813,000.00	100%	269,439,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		JUMLAH			1,722,211,526,852.00		1,717,872,919,276.88		1,724,021,665,739.43		5,164,106,111,868.31	



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RPD



**42
TANGGAMUS
GAN**

**“Jika orang lain
berbuat baik padamu,
pahatlah di batu,
agar tidak hilang dan selalu ingat.
Jika engkau
berbuat baik pada orang lain,
tulislah ditanah,
agar cepat hilang dan tidak diingat”**

• H.M. Soeharto •



BAB VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maksudnya adalah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Infrastruktur, Nilai Tukar Petani dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanggamus, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung. Hasil penetapan indikator kinerja pemerintah dituangkan dalam Tabel VIII.1, VIII.2 dan VIII.3.

Tabel VIII.1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN PER TAHUN			KONDISI AKHIR
			2022	2024	2025	2026	
1	IM.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,16	5,00	5,32	5,66	5,66
2	IM.2 Angka Kemiskinan	Persen	10,98	9,79	9,11	8,48	8,48
3	IM.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,70	3,15	2,96	2,79	2,79
4	IM.4 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,32	70,55	71,17	71,79	71,79
5	IM.5 Indeks Gini	Angka	0,261	0,251	0,246	0,242	0,242
6	IM.6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	1,69	2,89	3,78	4,94	4,94

Sumber : Analisis data diolah, 2023

Penentuan Indikator Makro diatas mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Tabel VIII.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
1	T.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	IT.1 Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	69,32	70,55	71,17	71,79	71,79	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang; Puskesmas; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan	IS.1 Angka Harapan Hidup	Tahun	73,69	74,05	74,23	74,41	74,41	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang; Puskesmas;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.4 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IS.4 Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk	Angka	44,88	40,50	38,48	36,55	36,55	Satuan Polisi Pamong Praja;	TNI-Polri Kecamatan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika;
			S.5 Meningkatkan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	IS.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	62,06	66,21	69,14	69,35	69,35	Dinas Lingkungan Hidup;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan;
				IS.6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	1,69	2,89	3,78	4,94	4,94	Dinas Lingkungan Hidup;	Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
4	T.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT.4 Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	59,14	61,50	66,32	71,52	71,52	Inspektorat; Sekretariat Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
			S.8 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.10 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	64,69	65,29	65,59	65,90	65,90	Inspektorat; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
				IS.11 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	63,3465	65,0000	70,0000	75,0000	75,0000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika;	Seluruh Perangkat Daerah
			S.9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	IS.12 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,95	86,00	88,64	91,36	91,36	Sekretariat Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Seluruh Perangkat Daerah



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
												Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.11 Menurunnya Angka Pengangguran	IS.15 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,70	3,15	2,96	2,79	2,79	Dinas Tenaga Kerja;	Dinas Sosial; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.12 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.16 Angka Kemiskinan	Persen	10,98	9,79	9,11	8,48	8,48	Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja;	Kecamatan; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah;
			S.13 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	IS.18 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	55,78	57,23	57,96	58,70	58,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Tenaga Kerja;	Kecamatan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sosial; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemeadam Kebakaran dan Penyelamatan; Satuan Polisi Pamong Praja;
6	T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	IT.6 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB			Persen	2,38	1,35	1,44	1,53	1,53	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.14 Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS.19 Nilai Tukar Petani	Angka	101,20	117,89	127,24	137,34	137,34	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan;	Dinas Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							2024	2025	2026		UTAMA	PENDUKUNG
				IS.20 Indeks Ketahanan Pangan	Angka	73,60	74,93	75,60	76,28	76,28	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;	Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
7	T.7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IT.7 Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB			Persen	14,13	18,57	21,29	24,41	24,41	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan;
			S.15 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS.21 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	394,31	8,00	9,00	10,00	394,31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan;

Sumber : Analisis data diolah, 2023



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59,14	61,50	66,32	71,52	71,52	Indikator Tujuan	
20	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	64,69	65,29	65,59	65,90	65,90	Indikator Kinerja Utama	
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	63,3465	65,0000	70,0000	75,0000	75,0000	Indikator Kinerja Utama	
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,95	86,00	88,64	91,36	91,36	Indikator Kinerja Utama	
23	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,5300	2,7448	2,8589	2,9778	2,9778	Indikator Kinerja Utama	
24	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Angka	5,80	6,33	6,62	6,92	6,92	Indikator Tujuan	
25	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,16	5,00	5,32	5,66	5,66	Indikator Kinerja Utama	
26	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,70	3,15	2,96	2,79	2,79	Indikator Kinerja Utama	
27	Angka Kemiskinan	Persen	10,98	9,79	9,11	8,48	8,48	Indikator Kinerja Utama	
28	Indeks Gini	Angka	0,261	0,251	0,246	0,242	0,242	Indikator Kinerja Utama	
29	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	55,78	57,23	57,96	58,70	58,70	Indikator Kinerja Utama	
30	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	Persen	2,38	1,35	1,44	1,53	1,53	Indikator Tujuan	
31	Nilai Tukar Petani	Angka	101,20	117,89	127,24	137,34	137,34	Indikator Kinerja Utama	
32	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	73,60	74,93	75,60	76,28	76,28	Indikator Kinerja Utama	
33	Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	Persen	14,13	18,57	21,29	24,41	24,41	Indikator Tujuan	
34	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	394,31	8,00	9,00	10,00	10,00	Indikator Kinerja Utama	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Urusan Layanan Wajib Dasar									
35	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.35	7.72	8.10	8.51	8.51	Dinas Pendidikan	
36	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.30	12.92	13.56	14.24	14.24	Dinas Pendidikan	
37	APK Pendidikan PAUD	%	50.79	51.30	51.81	52.33	52.33	Dinas Pendidikan	
38	APK Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	%	93.89	94.83	95.78	96.73	96.73	Dinas Pendidikan	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
39	APK Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).	%	86.82	87.69	88.57	89.45	89.45	Dinas Pendidikan	
40	APK Pendidikan Paket A, B,C	%	3.12	3.15	3.18	3.21	3.21	Dinas Pendidikan	
41	APM Pendidikan PAUD	%	39.83	40.23	40.63	41.04	41.04	Dinas Pendidikan	
42	APM Pendidikan SD	%	87.99	88.87	89.76	90.66	90.66	Dinas Pendidikan	
43	APM Pendidikan SMP	%	71.74	72.46	73.18	73.91	73.91	Dinas Pendidikan	
44	APM Pendidikan Paket A, B, C	%	2.98	3.01	3.04	3.07	3.07	Dinas Pendidikan	
45	APS Pendidikan	%	87.99	87.11	86.24	85.38	85.38	Dinas Pendidikan	
46	Rasio SD Terakreditasi	%	61.92	62.54	63.16	63.80	63.80	Dinas Pendidikan	
47	Rasio SMP Terakreditasi	%	61.92	62.54	63.16	63.80	63.80	Dinas Pendidikan	
48	Angka Kelulusan SD	%	96.74	97.71	98.68	99.67	99.67	Dinas Pendidikan	
49	Angka Kelulusan SMP	%	96.74	97.71	98.68	99.67	99.67	Dinas Pendidikan	
50	Angka Melanjutkan ke SMP	%	92.36	93.28	94.22	95.16	95.16	Dinas Pendidikan	
51	Rasio Ruang Kelas PAUD Berkondisi Baik	%	77.78	78.17	78.56	78.95	78.95	Dinas Pendidikan	
52	Rasio Ruang Kelas SD Berkondisi Baik	%	82.89	83.30	83.72	84.14	84.14	Dinas Pendidikan	
53	Rasio Ruang Kelas SMP Berkondisi Baik	%	72.74	73.10	73.47	73.84	73.84	Dinas Pendidikan	
54	Persentase Tenaga Pendidik PAUD Berijazah S1	%	47.18	47.65	48.13	48.61	48.61	Dinas Pendidikan	
55	Persentase Tenaga Pendidik SD Bersertifikat	%	37.84	38.22	38.60	38.99	38.99	Dinas Pendidikan	
56	Persentase Tenaga Pendidik SMP Bersertifikat	%	31.48	31.79	32.11	32.43	32.43	Dinas Pendidikan	
57	Angka Kematian Ibu (AKI)	%	106	105	104	103	103	Dinas Kesehatan	
58	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	0.9	3.8	3.7	3.6	3.6	Dinas Kesehatan	
59	Prevalensi Balita Stunting	%	20.24	14.25	12	10	10	Dinas Kesehatan	
60	Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	%	140	385	330	285	285	Dinas Kesehatan	
61	Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	%	16.67	20	23	25	25	Dinas Kesehatan	
62	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	87,9	98	100	100	100	Dinas Kesehatan	
63	Persentase Pekon Open Defecation Free (ODF)	%	26,8	79,5	92,7	100	100	Dinas Kesehatan	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
64	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,050	0,1	0,1	0,1	0,1	Dinas Kesehatan	
65	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
66	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
67	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	97	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
68	Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	98	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
69	Pelayanan Kesehatan Balita	%	89	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
70	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	58	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
71	Pelayanan Kesehatan pada usia produkti	%	58	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
72	Pelayanan pada usia lanjut	%	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
73	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	35	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
74	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	58	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
75	Pelayanan Kesehatan orang Dengan gangguan Jiwa Berat	%	47	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
76	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	%	57	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
77	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	59	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
78	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.95	68.00	70.00	71.00	71.00	RSUD Batin Mangunang	
79	Indeks kepuasan masyarakat	%	80.00	95.00	95.00	95.00	95.00	RSUD Batin Mangunang	
80	Persentase Sarana Pelayanan yang Harus Tersedia	%	80.00	82.00	84.00	86.00	86.00	RSUD Batin Mangunang	
81	Persentase Ketersediaan Sarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik	%	80.00	82.00	84.00	86.00	86.00	RSUD Batin Mangunang	
82	Persentase Tenaga Kesehatan yang Harus Tersedia	%	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	RSUD Batin Mangunang	
83	Tingkat Pemenuhan Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	%	100.00	100.00	100.00	100.00	81.80	RSUD Batin Mangunang	
84	Insiden Keselamatan Pasien	%	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	RSUD Batin Mangunang	
85	Nilai Bed Occupany Rate (BOR)	%	39.00	62.00	64.00	68.00	68.00	RSUD Batin Mangunang	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
86	Nilai Average Length Of Stay (ALOS)	Hari	4	6	6	6	4	RSUD Batin Mangunang	
87	Nilai Net Death Rate (NDR)	Angka	27.00	25.00	25.00	25.00	25.00	RSUD Batin Mangunang	
88	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	%	4,00	7,00	8.00	9.00	9.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
89	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	48	61	67	74	250.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
90	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	100	100	100	400.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
91	Percentase Sarana dan Prasana Sumber Daya Air yang berkualitas	%	63.00	73.00	80.00	88.00	304.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
92	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian banjir	%	18.77	21.00	23.00	25.00	87.77	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
93	Rasio Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai Rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman di pantai WS Kewenangan provinsi	%	0	0	0	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
94	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	0	0	0	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
95	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap Kebutuhan pemenuhan Kapasitas yang memerlukan pelayanan Air minum curah lintas	%	51.67	58	65	72	245.98	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
96	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah domestik oleh SPAL Regional	%	45.34	50	55	61	212.66	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
97	Rasio Kemantapan Jalan	%	62.124	68	75	83	288.78	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
98	Rasio Tenaga kerja Konstruksi yang terlatih diwilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat Pelatihan Ahli	%	0	100	100	100	300.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
99	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	%	50.00	55	61	67	233.30	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
100	Persentase Warga Negara yang terkena Realokasi Akibat Program pemerintah daerah Provinsi yang memperoleh Fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni	%	1.84	4	5	6	16.66	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
101	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang di tangani	%	15.20	17.30	19.30	21.30	73.10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
102	Persentase Satuan perumahan yang sudah di lengkapi PSU	%	48.00	61.00	67.00	74.00	250.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
103	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persen	45	50	60	65	65	Satuan Polisi Pamong Praja	
104	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	40	45	50	55	55	Satuan Polisi Pamong Praja	
105	Presentase Peningkatan Kapasitas dan kualitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat serta bina potensi masyarakat Kabupaten Tanggamus	Persen	55	64	63	65	65	Satuan Polisi Pamong Praja	
106	Presentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tanggamus	Persen	45	50	60	65	65	Satuan Polisi Pamong Praja	
107	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	82%	83%	84%	84%	85%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
108	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi dalam waktu tanggap (Response Time)	%	82%	83%	84%	84%	85%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
109	Cakupan Pelayanan Kebakaran	%	20%	25%	30%	30%	35%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
110	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (Response Time)	%	82%	83%	84%	84%	85%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
111	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar) yang dibentuk dan /atau dibawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	0%	20%	43%	43%	45%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
112	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
113	Layanan Pemadama oleh relawan kebakaran (BALAKAR, SATLAKAR)	%	0%	20%	43%	43%	45%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
114	Layanan Penyelamatan dan evakuasi darurat Non Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
115	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Angka	0.36	0.40	0.45	0.50	0.50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
116	Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Angka	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
117	Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Angka	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
118	Indeks Pencapaian SPM Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Angka	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
119	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	100	100	100	100	Dinas Sosial	
120	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota	%	-	100	100	100	100	Dinas Sosial	
121	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	13,34	12,70	12,65	12,60	12,60	Dinas Sosial	
122	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	80	87	88	89	89	Dinas Sosial	
123	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	%	82	87	88	89	89	Dinas Sosial	
Urusan Layanan Wajib Non Dasar									
124	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	60.05	60.1	60.2	60.3	60.3	Dinas Tenaga Kerja	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
125	Persentase Pertumbuhan Energi Baru dan Terbarukan yang Terbangun	Persen	95.89	96.25	96.50	97.00	97.00	Dinas Tenaga Kerja	
126	Persentase Peningkatan Transmigran yang Di Fasilitas Penempatannya	Persen	0.5	1	1.02	1.05	1.05	Dinas Tenaga Kerja	
127	Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	0	72	72.2	70.4	70.4	Dinas Tenaga Kerja	
128	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan Luar negeri) Melalui Mekanisme layanan antar kerja	Jumlah	4528	4550	4575	4600	4600	Dinas Tenaga Kerja	
129	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen		100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja	
130	Persentase akseptor Pengguna KB MKJP	Persen	38	40	48	50	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
131	Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok BKB	Persen	16	18	20	22	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
132	Persentase penurunan keluarga pra sejahtera	Persen	11,80	11	10,50	10	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
133	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	93	94	95	96	96	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
134	Persentase pencapaian indikator kabupaten layak anak	Persen	80	85	87	90	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
135	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	21	22	23	24	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
136	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Persen	2	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
137	Rasio kekerasan terhadap perempuan, terhadap TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	2	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
138	TFR	Persen	2	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
139	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	Persen	56	57	58	60	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
140	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persen	44	43	42	40	40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
141	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	7	6.12	6.31	6.56	6.56	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
142	Persentase Pekon Mandiri Pangan	%	0.95	0.98	0.99	1.12	1.12	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
143	NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	%	106.13	106.36	106.66	106.98	106.98	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
144	NTP Sub Sektor Hortikultura	%	96.28	96.33	96.45	96.67	96.67	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
145	Persentase Peningkatan Produksi Padi	%	90.86	90.99	91.87	92.21	92.21	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
146	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan	%	105.6	105.8	106.1	106.5	106.5	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
147	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian (Afolu)	Persen	-	0.31	0.41	0.52	0.52	Dinas Lingkungan Hidup	
148	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	-	5.15	5.15	5.31	5.31	Dinas Lingkungan Hidup	
149	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Transportasi	Persen	-	1.36	1.42	1.4	1.4	Dinas Lingkungan Hidup	





NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
150	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri dan Penggunaan Produk	Persen	-	0,06	0,06	0,1	0,1	Dinas Lingkungan Hidup	
151	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengolahan limbah	Persen	-	0.43	0.52	0.52	0.52	Dinas Lingkungan Hidup	
152	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,06	66,21	69,14	69,35	69,35	Dinas Lingkungan Hidup	
153	Indeks Kualitas Air	Angka	51.54	59.57	70,44	70,64	70,64	Dinas Lingkungan Hidup	
154	Indeks Kualitas Udara	Angka	86.78	84.41	71,51	71,81	71,81	Dinas Lingkungan Hidup	
155	Indeks Tutupan Lahan	Angka	34.42	43.96	62,53	62,60	62,60	Dinas Lingkungan Hidup	
156	Persentase Pengelolaan Sampah	Angka	16.64	15.5	16	16.5	16.5	Dinas Lingkungan Hidup	
157	Nilai IKM Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	88.33	89.35	89.84	91.17	91.17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
158	Persentase Penduduk Ber-KTP	%	106,72	108,41	109,93	111,21	111,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
159	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
160	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	%	74,10	80,56	88,71	90,35	90,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
161	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran	%	113,20	115,74	117,25	118,78	118,78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
162	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
163	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
164	Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Perangkat Daerah	%	35,48	48,39	64,52	80,65	80,65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
165	Persentase Kesesuaian Administrasi Kependudukan dengan Data Base	%	95.27	96.71	96.98	97.23	97.23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
166	Presentase Peningkatan Pekon Berkembang menjadi Pekon Maju dan/atau Mandiri	%	10,33	7,01	7,54	8,20	8,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
167	Presentase Pekon yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi	%	77,76	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
168	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Pekon	%	86.09	90	99	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
169	Prentase Kelembagaan Pekon yang Aktif	%	6.32	70	75	80	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
170	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	50	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
171	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	200,00	50,00	44,44	44,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
172	Rasio konektivitas Provinsi	%	97	97.20	97.25	97.36	97.36	Dinas Perhubungan	
173	V/C Ratio di Jalan Provinsi	%	56	58	60	63	63	Dinas Perhubungan	
174	Persentase Kendaraan Angkutan Darat Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	38.11	38.21	38.55	38.67	38.67	Dinas Perhubungan	
175	Persentase Angkutan Laut Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan	
176	Indeks SPBE	Indeks	2,5	3,5	4	4,5	4,5	Dinas Komunikasi dan Informatika	
177	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	80	85	90	95	95	Dinas Komunikasi dan Informatika	
178	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Satu Data Statistik Sektoral dengan baik	%	60	70	75	80	80	Dinas Komunikasi dan Informatika	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
190	Peningkatan Omzet Pedagang Pasar Rakyat yang Sudah Direvitalisasi	Persen	10.00	5.33	10.50	25.00	25.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
191	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang bermitra	Persen	8.05	15.00	18.00	21.50	21.50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
192	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	87.46	87.50	87.55	87,62	87.62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
193	Persentase Capaian unsur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkinerja sangat baik	%	9.71	9.72	9.73	9.74	9.74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
194	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah	60,340,107,142.00	60,943,508,213.42	62,162,378,377.69	64,027,249,729.02	64,027,249,729.02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
195	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi	%	25	28.00	31.00	34.00	27.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
196	Persentase Cakupan Layanan Pengandaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	%	0.99	1.00	2.00	3.00	3.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
197	Persentase Pemuda yang Berprestasi Minimal Tk. Provinsi	%	4.44	6.50	7.00	8.00	8.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
198	Persentase Atlet Berprestasi Minimal Tk. Provinsi	%	32.31	35.00	40.00	45.00	45.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
199	Persentase Peningkatan Kelompok Olahraga Rekreasi	%	33.33	35.00	40.00	45.00	45.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
200	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.05	0.055	0.07	0.08	0.08	Dinas Pemuda dan Olahraga	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
223	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan kabupaten yang mempunyai izin usaha perikanan kabupaten yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Kelompok	20	25	30	35	35	Dinas Perikanan	
224	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Perikanan	
225	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Kelompok	120	130	140	150	150	Dinas Perikanan	
226	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas kecamatan dalam 1 daerah kabupaten yang diterbitkan	Kelompok	20	25	30	40	40	Dinas Perikanan	
227	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	28.53	40.00	45.00	50.00	50.00	Dinas Perikanan	
228	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	4.90	6.50	7.00	7.50	7.50	Dinas Perikanan	
229	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasarana Hasil Perikanan	%	1.96	3.00	3.50	4.00	4.00	Dinas Perikanan	
230	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Thn	33.91	50.00	65.00	75.00	75.00	Dinas Perikanan	
231	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	603038	700000	800000	850000	850000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
232	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	70%	20%	25%	30%	30%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
233	Cakupan Perlindungan Benda Cagar Budaya (BCB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Persen	37	40	45	50	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
234	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan		90.11	91.22	92.40	93.50	95.60	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
235	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan		87.23	88.11	88.50	89.12	89.50	Dinas Perkebunan dan Peternakan	





NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
236	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Unggulan	Persen (%)	5	5.25	5.45	5.50	5.50	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
237	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Unggulan	Persen (%)	5	5.1	5.5	5.75	5.75	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
238	Persentase Penurunan Kematian Ternak	Persen (%)	100	100	100	100	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
239	Persentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
240	Populasi Sapi Potong (ekor)	Ekor	7,889	7,936	8,254	8,625	8,625	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
241	Populasi Sapi Perah (ekor)	Ekor	116	117	121	127	127	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
242	Populasi Kambing (ekor)	Ekor	256,926	258,468	268,806	280,903	280,903	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
243	Populasi Ayam Ras Pedaging (ekor)	Ekor	450,868	453,573	471,716	492,943	492,943	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
244	Populasi Ayam Ras Petelur (ekor)	Ekor	32,616	32,812	34,124	35,660	35,660	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
245	Produksi Daging Sapi (ton)	Ekor	131	132	137	143	143	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
246	Produksi Telur (ton)	Ekor	878	883	919	960	960	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
247	Produksi Kopi Robusta (ton)	Ekor	46,461	46,740	48,609	50,797	50,797	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
248	Produksi Kakao (ton)	Ekor	7,023	7,065	7,348	7,678	7,678	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
249	Produksi Kelapa Dalam (ton)	Ekor	15,655	15,749	16,379	17,116	17,116	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
250	Produksi Lada (ton)	Ekor	3,623	3,645	3,791	3,961	3,961	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
Urusan Layanan Penunjang									
251	Persentase Propomperda yang ditetapkan menjadi PERDA	%	54	100	100	100	100	Sekretariat DPRD	
252	Persentase Peningkatan Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	%	85	100	100	100	100	Sekretariat DPRD	
253	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda	Nilai	21.60	22.03	22.25	22.48	22.48	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	



NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
254	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda	Nilai	18.00	20.61	22.05	23.59	23.59	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
255	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
256	Indeks Inovasi Daerah	Skor	70.14	72.89	74.30	75.74	75.74	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
257	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	95	96	97	98	98	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
258	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
259	Persentase Penyerapan Anggaran	%	84.05	86.95	86.24	85.66	85.66	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
260	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
261	Persentase Realisasi PAD	%	58.91	63.52	64.60	65.51	65.51	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
262	Persentase Penatausahaan BMD yang sesuai dengan Perda	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
263	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
264	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
265	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kepegawaian	Angka	92.06	97	98	99	99	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
266	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	54.23	65.77	66.00	67.00	67.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	





NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN AWAL PERIODE PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD	KETERANGAN
			2022	2024	2025	2026			
			Realisasi	Target	Target	Target			
267	Indeks Merit System	Angka	173	250	250	250	250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
268	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	Persen		100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
269	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Persen	0.2	4.0	5.0	6.0	6.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
270	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	Persen	89.53	90.00	95.00	98.00	98	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
271	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	5.76	6.69	7.00	7.25	7.25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
272	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0.74	0.78	0.79	0.80	0.80	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
273	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
274	Persentase ASN yang aktif menjadi Anggota Kopri	%	84,55	90.61	89,46	88,39	88,39	Sekretariat Dewan Pengurus Kopri	
275	Persentase Event Pengembangan Jiwa Korsa Anggota Kopri	%	20	13,14	13,37	13,58	13,58	Sekretariat Dewan Pengurus Kopri	





BerAKHLAK # bangga
melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RPD



**42
TANGGAMUS
GAN**



**“Sebenarnya apapun tingkahmu,
sebaik apapun perilaku hidupmu,
kebencian dari manusia itu pasti ada,
jadi jangan terlalu diambil pusing.
Terus saja jalan”**

• Gus Dur •

BAB IX
Penutup



BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPD merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2019-2024 serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dokumen RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 disajikan pada sub bab berikut ini.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2026. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I RPD ini, alasan utama yang melatarbelakangi penyusunan RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 yaitu penerapan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana



tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak secara Nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Tanggamus akan terdapat masa transisi menjelang Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 dikarenakan akan habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus pada Bulan September Tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak mulai tahun 2022 sampai dengan Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak Secara Nasional Tahun 2024.

Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Tanggamus tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah dalam bentuk RPJMD, menunggu Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dalam bentuk RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

9.1.1 Pedoman Transisi Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2024 sedangkan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023 sehingga diperlukan pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan tersebut.

Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru maka Kabupaten Tanggamus dan Pemerintah Daerah lainnya yang pada tahun 2023 masa berlaku dokumen jangka menengahnya berakhir maka dapat diperoleh acuan sebagai pengganti RPJMD tersebut.

9.1.2 Pedoman Transisi Akhir Periode RPD Tahun 2026

Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka RPD ini memuat 3 (tiga) tahun arah pembangunan jangka menengah, selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2025 juga akan ditetapkan RPJMD Tahun 2025-2030 sebagai hasil dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Secara Nasional Tahun 2024.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2026 akan berpedoman pada RPD ini dan mengakomodir Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak Secara Nasional Tahun 2024.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025,

RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMN dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Perkembangan kondisi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus akibat pandemi *Covid-19* menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi *Covid-19* dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret Tahun 2020 ini. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah diselaraskan ke dalam RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 ini.

Dalam rangka mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka di dalam dokumen RPD ini, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, 2025 dan 2026 beserta Perubahannya;
- 2) Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
- 3) RPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanggamus wajib menyusun Renstra-PD Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan prioritas dan unggulan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan, sub kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan;
- 4) Renstra-PD dijadikan pedoman dalam menyusun Renja-PD untuk setiap tahunnya yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 5) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkewajiban melaksanakan program-program yang

terdapat dalam RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota lainnya, serta masyarakat termasuk dunia usaha;

- 6) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra-PD dan Renja-PD secara periodik;
- 7) Dalam hal program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, dimana kemungkinan Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Orivate Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar ke berbagai daerah di Provinsi Lampung, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lebaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJPD Tahun 2005–2025 serta tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 sangat tergantung kepada peran seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengajak kepada seluruh *stakeholders* agar menyukseskan dan mengawal pelaksanaan pembangunan sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera.

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

